BALAIRUNG

EDISI KHUSUS JURNAL/TH.X/1996

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

MENUJU MASYARAKAT DUNIA

Catatan Untuk Indonesia

ISSN : 0215 – 076X

Rp.3.500,00

Supersin®

Lapisan anti refleksi dari RODENSTOCK

1. Pantulannya **4 X** lebih sedikit dari Multicoating biasa, sehingga keindahan mata anda terlihat lebih alami.

2. **Supersin® Menghilangkan** bayangan hantu/semu disaat mengemudi kendaraan dimalam hari.

3. Bahan material dasar **RODENSTOCK** menahan sinar U.V. lebih baik dari lensa biasa, sehingga mata tidak cepat Katarak (mengeruh pada usia lanjut).

4. **Supersin®**
bergaransi
1 tahun
terhadap
kerusakan
coating.

KARTU GARANSI

RODENSTOCK

Supersin® adalah merek dagang dari RODENSTOCK, terdaftar pada Dinas Patent Departemen Kehakiman No : 131574. Merek lain dilarang menggunakan istilah Supersin.

■ Mintalah Kartu Garansi Rodenstock Supersin bila anda membeli Lensa orisinil Supersin dengan logo R yang terdapat pada lensa.

RODENSTOCK

KETENTUAN PENGGUNAAN VOUCHER INI :

A. Voucher ini berlaku sebagai potongan harga pembelian paket komputer di WISNO GRAHAKOM .

B. Voucher berlaku untuk pembelian paket komputer (bukan unit bagian terpisah).

C. Satu Voucher berlaku untuk potongan harga pembelian 1 (satu) paket komputer serta tidak dapat digabung dengan Voucher lain.

D. Voucher ini bernilai potongan sama dengan angka yang tertera (dihala - man depan) dan tidak dapat diuangkan serta hanya berlaku untuk sekali pembelian.

E. Voucher tidak hanya berlaku untuk pembelian paket komputer 3M, Cuci gudang, Ulang tahun.

F. Voucher ini berlaku sampai dengan tanggal : **30 September 1996**

Jurnal mahasiswa. Itulah obsesi kami di BALAIRUNG. Sudah lama kami mencita-citakan membuat jurnal yang dikelola oleh mahasiswa dan berisi tulisan-tulisan dari mahasiswa sendiri. Lewat media itu kami ingin menghimpun pemikiran-pemikiran kritis mahasiswa. Sebagaimana pembaca *mahfum*, jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia amat terbatas, disamping nasibnya kembang kempis, terlebih sedikit sekali porsi yang diberikan kepada mahasiswa. Lalu mengapa jurnal? Barangkali terkesan agak aneh. Mengingat *mainstream* yang ada kali ini membawa mahasiswa pada politik praktis. Yang jelas ini bukan ekapisme, melainkan satu wujud sumbangsih untuk ikut urun rembug secara konseptual dalam menggulirkan perubahan di negeri ini. Untuk mewujudkan obsesi itu, disela-sela penerbitan majalah BALAIRUNG reguler, minimal dua tahun sekali, kami merencanakan membuat edisi khusus jurnal. BALAIRUNG edisi jurnal yang pertama adalah edisi th VIII/1994, dengan tema "Mosaik Indonesia Masa Depan". Sedang untuk yang kedua kalinya, yang sedang anda pegang, dengan tema, "Menuju Masyarakat Dunia: Catatan Untuk Indonesia." Berbeda dengan BALAIRUNG reguler, dalam edisi jurnal lebih memberi keleluasaan pada mahasiswa untuk menuangkan gagasannya secara panjang lebar.

tRi wAsOnO sUnU

Profil Jurnal ilmiah: pemikiran yang kian tidak mendapat tempat.

Ada maksud khusus kami menerbitkan edisi jurnal ini. Yakni memberi tempat bagi pemikiran mahasiswa pada posisi yang penting.Ketika iklim keilmuan kampus sedang digugat, seperti isu penghapusan Skripsi di UI yang menimbulkan pro kontra, penjiplakan skripsi, bahkan di Yogya sempat terjadi penggrebegan jual beli skripsi di pusat penjualan buku *Shopping Centre*. Ketika pemikiran mahasiswa semakin tidak mendapat tempat, BALAIRUNG mencoba menyusun serpih-serpih yang berserakan itu.

Penerbitan BALAIRUNG edisi khusus ini berkeinginan menyajikan ragam pemikiran mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Para penulis mempunyai latar belakang akademis yang sangat beragam. Setidaknya mereka mewakili kelompok-kelompok ilmu yang ada di UGM.

Ketika pembangunan babak kedua di negri ini terus bergulir dan raksasa dunia membuat Indonesia kian terjepit dalam kecenderungan global maka segela persoalan negri ini juga kian kompleks. Dalam rangka itulah 17 penulis muda Bulaksumur ini mencoba menyumbangkan pemikiran masa depan Indonesia dari berbagai perspektif.

Penjaga Dapur

BALAIRUNG
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Diterbitkan oleh Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM). Ijin Terbit: SK MENPEN RI No. 1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK Rektor No. UGM/UM/01/37 International Standard Serial Number (ISSN): 0215-076X **Pelindung** : Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com. (Rektor UGM) **Penasihat:** Ir. Bambang Kartika (Purek III UGM), Prof. Dr. Koesnadi Hardjasumantri, S.H., Ir. Abdul Hamid Dipopramono **Pemimpin Umum**: Timbul Sunoto **Sekretaris Umum**: Aris Purnomo **Pemimpin Redaksi**: Hary Prabowo **Sekretaris Redaksi**: Nining Sunartiningsih **Ka. Litbang**: Aship Agus Hasani **Staf Litbang**: Eriyanto, Lais Abid, Sunarto, Frans Surdiasis **Pemimpin Perusahaan**: Agus Riyanto **Sekretaris Perusahaan**: Kun Anggoro EY **Kabag Distribusi dan Promosi**: Risdiyanto **Kabag. Iklan**: Among Kurnia Ebo **Kabag. Keuangan**: Mohammad Sri Sadono **Staf Perusahaan**: F. Ika Yuniarti, Erna Setyaningrum, Daryanti, Sholihati, Oscar **Dewan Redaksi**: Sunarto, Frans Surdiasis, Eriyanto, Timbul Sunoto, Lais Abid **Redaktur Pelaksana:** Khoirul Rosyadi **Penanggung Jawab Rubrik**: Fransisca Indirasari, Moh. Mustajab, Agung Widiatmoko, Rudy Isbowo, Kusbiantoro E, Dirmawan Hatta, Yuli Widi Purwanto, Anjar W **Reporter**: Mashudi, Asep Mulyana, Wuwun Widiawati, M. Naufal, Herwanto, N Novianti Fatkhiastuti, M. Hermawan, Sutrisno, Sigid RA (nonaktif) , Widarso, Hendrik FS, M. Arifin, Freddy WK (nonaktif), M. Naufal, Akhid Masduki, Yarmanis (nonaktif), Setiati **Redaktur Artistik**: Agung Arif Budiman **Staf Artistik**: M.G. Amanullah, Lely Fakhrina, Pedy Artsanti, Eka Kurniawan **Redaktur Foto**: Tri Wasono Sunu **Fotografer**: Achmad Krisna **Pimpinan Produksi**: Agung Arif Budiman **Alamat Redaksi**: Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281, telp. (0274) 901703, Fax. (0274) 566171 **Rekening**: Tabungan MITRA BAPINDO Cabang UGM No. Rek. 22.1.5027.66.1. **Percetakan**: Liberty Offset, Jl Jayengprawiran 21 Yogyakarta Telp. (0274) 512908. Isi di luar tanggung jawab percetakan

Redaksi menerima tulisan dan foto terutama tentang dunia mahasiswa. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. Tulisan diketik rangkap 2-6 halaman kuarto. Atau dalam bentuk file disket dengan menyebutkan program pengolah kata 6-36 kilobyte. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai perangko balasan secukupnya

Kulit Muka :
Desain, Fotografi & Visualisasi Digital : Agung Arif Budiman

Menuju Masyarakat Dunia
Catatan Untuk Indonesia

Seperti apakah wajah dunia masa depan? Jika mengacu pada futurolog, maka jawabnya adalah satu: dunia yang akan datang adalah dunia yang makin menyempit, serta pupusnya batas kultur juga geografis antar bangsa yang digantikan oleh satu kampung besar masyarakat dunia. Begitulah ketika Alvin Toffler bicara gelombang informasi dan teknologi yang menjadikan dunia makin "kecil"; John Naisbitt dan Patricia Aburdane bicara internasionalisasi budaya; kemudian Benjamin R Barber mengungkap gerak modal yang melampaui batas-batas negara; Keiichi Ohmae bicara dunia yang tanpa tapal batas; dan L J Renkie bicara gerak informasi yang menumbuhkan keterikatan dan ketergantungan antar negara. Apakah dunia semacam ini adalah "jalan sejarah" masa depan, jalan yang dengan demikian Indonesia sebagai salah satu warga dunia mau tidak mau ikut terecebur di dalamnya?

Yang pasti gejala makin pupusnya batas geografis kini tengah melanda di hampir semua bidang. Di bidang ekonomi, kita melihat perkembangan yang begitu cepat selama dasawarsa terakhir ini, berkaitan erat dengan proses globalisasi dunia, tengah mengintegrasikan dunia ke dalam sistem yang berlandaskan prinsip ekonomi bebas. Momentumnya adalah disepakatinya ketentuan baru pada Putaran Uruguay dalam rangka GATT. Kondisi ini bukan tanpa konsekuensi. Bagi negara berkembang, posisi makin sulit karena persaingan untuk merebut pasaran internasional semakin ketat dan dana murah berupa bantuan luar negri semakin langka. Uniknya, proses globalisasi ekonomi ini dibarengi dengan munculnya glokalisasi yang ditandai oleh kehadiran blok-blok perdagangan ekonomi.

Bersatunya dunia itu, lebih-lebih terlihat dalam bidang budaya. Naisbitt dan Aburdane menyebut sebagai gejala internasionalisasi budaya. Setelah dunia diserbu oleh gelombang turisme internasional, kini jaringan televisi satelit, film, video, dan komputer dengan internet-nya menyerbu lebih besar lagi. Pola dan gaya hidup menjadi seragam. Apa yang menjadi trend dan sedang dipergunjingkan di satu negara, menjadi trend pula di negara lain. Naisbitt dan Aburdane begitu optimis bahwa penyeragaman budaya adalah kabar baik bagi dunia yang sebelumnya terus terpecah akibat beragamnyaperbedaan. Tetapi bagi negara berkembang, fenomena ini diterima dengan kecemasan. Negara berkembang pada akhirnya menjadi konsumen yang seleranya terbentuk oleh produk global. Ia hanyalah kepanjangan tangan dari "pasar global" yang menjadikan negara berkembang sebagai pasar potensial dari produk kapitalis. Belum lagi mengenai nasib budaya lokal menghadapi budaya global tersebut.

Di bidang politik, setelah berakhirnya perang dingin dan runtuhnya komunisme, terjadi pergeseran yang demikian cepat. Blok-blok militer digantikan oleh blok ekonomi. Terjadi suatu kondisi yang sering disebut sebagai *Aid Fatique* yaitu berkurangnya penggunaan dana bantuan luar negri sebagai alat untuk menebar pengaruh politik. Peta dunia berubah tajam, imperialisme, sebagaimana ditulis Noam Chomsky, muncul dengan pola dan dominasi baru. Isu-isu hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup, intervensionisme akan mewarnai dunia masa depan. Peta dunia semacam ini yang akan dihadapi oleh Indonesia masa depan. Sampai sekarang jarang dipermasalahkan bagaimana konsepsi Indonesia di masa datang. Bagaimana Indonesia menghadapi perubahan global tersebut dan mengintegrasikan di dalamnya. Termasuk bagaimana bentuk Indonesia masa depan yang tanggap terhadap perubahan global. Dari berbagai retorika dan pernyataan, kita mendengar bahwa tak pilihan lain selain membuka diri. Di berbagai forum ekonomi seperti APEC, AFTA kita ada di depan dalam menyatakan kesanggupan untuk ikut serta dalam pasar bebas dunia -hal yang juga sangat mengejutkan negara-negara yang berpikiran maju sekalipun. Di bidang budaya, sejak 1990 kita menganut kebijakan *open sky policy* bagi siaran televisi dan satelit asing.

Persoalannya, seberapa jauh kesiapan kita dalam menghadapi era global tersebut. Di bidang ekonomi misalnya, apakah berbagai sektor industri dan secara umum perekonomian kita sudah kita perlakukan sedemikian rupa sehingga siap untuk persaingan bebas? Pasar bebas jelas memerlukan tingkat efisiensi industri. Kenyataanya, kita melihat bagaimana struktur ekonomi Indonesia saat ini mengidap *bopeng-bopeng*. Pasar yang tertutup, monopoli, oligopoli, praktek kartel, integrasi vertikal, horisontal-adalah sebagian penyakit yang menunjukkan bagaimana kita sebenarnya tidak menciptakan struktur industri yang mempunyai taraf keunggulan komparatif maupun kompetitif.

Liberalisasi ekonomi juga memerlukan liberalisasi politik. Sistem administrasi yang tanggap, birokrasi yang efektif dan efisienadalah suatu keharusan. Pola-pola politik lama yang diwarnai oleh korporatisme dan depolitisasi jelas tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat modern yang menghendaki adanya partisipasi politik. Kenyataannya praktek politik kita saat ini diwarnai oleh "borok-borok" berupa praktek korup, birokrasi yang paternalistik, nepotisme dan sebagainya. Demikian halnya dengan kelas menengah, suatu kelas yang diprediksikan mempunyai peran besar, di Indonesia ia tidak mandiri dan masih tergantung kekuasaan. Kehadirannya tidak disertai etos kerja yang menciptakan efisiensi dan peningkatan produksi.

Itu hanyalah sekelumit persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia di masa datang. Masih banyak agenda yang harus diperbuat dan dilakukan Indonesia menghadirkan era masa depan . Di bidang pertanian misalnya, kita harus mengantisipasi kecenderungan pemanfaatan teknologi dengan pemakaian bioteknologi lewat teknologi *aqua qulture* dan *tissue culture*. Belum lagi tantangan krisis pangan akibat makin berkurangnya lahan produktif yang digunakan untuk kepentingan industri. Kota, sebagai trend masa depan, akan ditandai oleh jumlah penduduk yang membengkak. Kemunculan kota-kota baru mandiri(*self contained new town*) harus diantisipasi sejak dini. Di bidang ekologi, kerusakan tanah, tingginya pencemaran dan menurunnya ragam hayati tropis adalah masalah yang makin menguat di masa depan.

Majalah BALAIRUNG mengangkat persoalan tersebut dalam edisi khusus ini. Untuk keduakalinya, tema ini diangkat. Pertama kali diangkat dalam edisi khusus tahun 1993. BALAIRUNG menghadirkan pemikir-pemikir muda Bulaksumur UGM untuk secara bersama-sama membahas kecenderungan Indonesia masa depan dan kesiapan menghadapi era global. Ada 16 tulisan yang menyoroti trend Indonesia masa depan dalam bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, industri, pertanian, perkembangan kota, dan politik luar negri. Seluruh tema dirumuskan dan dipersiapkan oleh tim redaksi majalah BALAIRUNG yang terdiri dari Khoirul Rosyadi (koordinator), Eriyanto, Frans Surdiasis, Sunarto, Timbul Sunoto dan Lais Abid.***

Eriyanto

Ketimpangan Regional Di Indonesia Perspektif Ekonomi Politik

KETIMPANGAN REGIONAL BUKAN SEMATA PERSOALAN KETIMPANGAN SUMBER DAYA ALAM. LETAK GEOGRAFIS, ATAUPUN KESENJANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. IA TIDAK DAPAT DIJELASKAN TANPA MENGIKUTSERTAKAN DETERMINASI FAKTOR EKONOMI POLITIK. SENTRALISASI PEMBANGUNAN SEKTORAL SELAMA BEBERAPA DEKADE TELAH MEMBUAHKAN STRUKTUR KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP PUSAT. KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT CENDERUNG EKSPLOITATIF BERUPA EKSPLOITASI KEKAYAAN ALAM YANG CENDERUNG MENGUNTUNGKAN PEMERINTAH PUSAT DIBANDINGKAN MASYARAKAT LOKAL. DITAMBAH BERBAGAI KEBIJAKAN YANG TAK MENGUNTUNGKAN DAERAH, MAKA MUNCULLAH DIKOTOMI PUSAT-DAERAH, JAWA-LUAR JAWA, KTI-KBI, YANG SEMUANYA TIDAK TERPISAHKAN DARI PROBLEMA KETIMPANGAN SOSIAL.

I. INTRODUKSI: BERBAGAI IRONI YANG MENYEDIHKAN

Seorang tokoh masyarakat di Riau, Dr. Tabrani Rab, menyimpulkan dengan sangat tepat masalah pembangunan di propinsi tersebut sebagai penghasil devisa utama dari minyak.

"*Saat ini masyarakat Riau sadar daerahnya memberikan nilai tambah yang besar bagi pemasukan negara. Tetapi di pihak lain daerahnya justru yang paling parah adalah di bidang pendidikan dan sosial ekonomi.*"[1]

Pengoperasian PT Caltex di Riau menghasilkan produksi minyak 680,3 barrel per hari, alias hampir separuh dari total produksi minyak Indonesia yang mencapai 1.462,1 barrel per hari.[2] Akan tetapi, hasil eksploitasi tambang masyarakat lokal.

Selain minyak, Riau kini juga tumbuh sebagai penghasil devisa terbesar kedua di sektor pariwisata, setelah Bali. Sebanyak 1,2, juta wisatawan masuk ke daerah ini setiap tahunnya.[3]

Di samping gemerlap devisa dari penjualan minyak dan eksploitasi sektor pariwisata, Riau termasuk kawasan sentra kemiskinan dan keterbelakangan. Kekayaan alam dan berbagai sumber daya potensial yang ada propinsi ini, justru dapat menyulut berbagai ketegangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Kasus yang kurang lebih sama dapat dilihat di Irian Jaya. Eksploitasi kekayaan alam bumi Irian yakni emas, perak dan tembaga menimbulkan efek marjinalisasi terhadap penduduk asli. Akibat pengoperasian PT Freeport Indonesia Co untuk menggali tambang di Tembagapura, banyak *costs* yang harus dibayar justru oleh Suku Amungme yang bermukim di kaki Gunung Bijih (Ertzberg), maupun Suku Komoro yang mendiami dataran rendah dan pantai. Menurut studi Carolin D. Turinsky Cook,

Istimewa

Indra Ismawan, lahir 7 Juni 1974 di Lampung Tengah. Kini sedang menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UGM, program S-1. Meminati bidang kebijakan publik, terutama yang terkait dengan masalah ekonomi, pertanian dan ketenagakerjaan.

Aktif menulis artikel dan resensi di berbagai media massa pusat dan daerah. Diantaranya *Republika, Kompas, Suara Pembaharuan, Bisnis Indoensia, Bernas, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Surabaya Post, Surya dan Minggu Pagi*

M.A., dari Washington State University, Suku Amungme sering menjadi "sasaran" pembuangan limbah dari PT Freeport.[4] Tragisnya, penduduk asli itu disebut-sebut mengkais limbah untuk memperoleh makanan.

Proyek eksploitasi kekayaan alam Irian Jaya hampir sepenuhnya dimiliki orang asing. Sebanyak 81,28 persen saham PT Freeport Indonesia Co dimiliki Freport MacMoRan Copper and Gold Inc, Amerika Serikat. Belakangan ini, memang sebagian kecil saham perusahaan itu jatuh ke tangan swasta domestik. Dari bursa saham Wall Street, pengusaha nasional Aburizal Bakrie membeli 9,36 persen saham Freeport. Beberapa perusahaan Indonesia sebenarnya juga berminat membeli saham Freeport, misalnya PT Setdco Ganesha (milik Setiawan Jody) dan Humpuss Group (milik Hutomo Mandala Putra)[5]. Sedangkan saham yang dimiliki pemerintah dalam industri strategis ini hanya kurang dari 10 persen, padahal pemerintah di banyak negara menguasai 50 persen saham perusahaan tambang.

PT Freeport Indonesia Co sebenarnya menyisihkan sekitar Rp. 500 juta per tahun — *trickle down effect?* — untuk membeli hasil pertanian dan perikanan di wilayah Timika. Di samping itu, juga dibangun kompleks perumahan dan sekolah bagi penduduk setempat. Namun sudah layakkah semua itu sebagai penukar ketersisihan hak penduduk asli atas kekayaan alam warisan nenek moyang mereka?

Konflik yang berlarut-larut di pedalaman Irian Jaya, maupun munculnya kelompok *sempalan* yang menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM), berakar dari ketimpangan *sharing* pendapatan seperti tergambar di atas. Ada yang mengambil jalan konfrontatif, akan tetapi kebanyakan memilih diam atau menuntut "sekedarnya". Salah satu illustrasi menarik terlukis pada sebuah cuplikan cerita dramatis yang dipublisir *The Nation*, sebuah majalah terbitan AS edisi Agustus 1995. Diceritakan, kepala Suku Amungme menemui pada seorang wakil dari induk PT Freeport Indonesia Co di AS. Sang Kepala Suku menyerahkan pisau sambil berkata,

"*Ambil dan bunuh saya, karena saya tak tahan melihat masalah-masalah yang ada...Buat lubang yang besar untuk mengubur saya dan semua milik saya. Tutupi dan kemudian kerjakan apa yang kamu inginkan*[6]."

TABEL 1
DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PROPINSI, 1992
(Milyar Rupiah)

Propinsi	PDRB*)	%	PDRB**	%	Perubahan %
DI Aceh	8.623,6	3,48	3.984,7	1,86	-1,62
Sumut	14.316,7	5,77	13.826,5	6,46	0,69
Sumbar	4.276,2	1,73	4.276,2	2,00	0,27
Riau	14.669,9	5,92	3.769,5	1,76	-4,16
Jambi	1.787,5	0,72	1.737,4	0,81	0,09
Sumsel	10.029,3	4,04	7.610,6	3,55	-0,49
Bengkulu	1.100,5	0,44	1.100,5	0,51	0,07
Lampung	4.351,2	1,76	4.351,2	2,03	0,27
DKI Jaya	30.923,6	12,47	30.923,6	14,43	1,96
Jabar	41.064,0	16,56	37.772,4	17,63	1,07
Jateng	30.200,7	12,18	26.809,7	12,51	0,33
DIY	2.500,9	1,01	2.500,9	1,17	0,16
Jatim	38.566,7	15,56	38.537,7	17,99	2,43
Bali	3.975,3	1,60	3.975,3	1,86	0,26
NTB	1.870,4	0,75	1.870,4	0,87	0,12
NTT	1.639,0	0,66	1.639,0	0,77	0,11
Timtim	386,4	0,16	386,4	0,18	0,02
Kalbar	3.702,5	1,49	3.702,5	1,73	0,24
Kalteng	1.951,4	0,79	1.951,4	0,91	0,12
Kalsel	3.165,5	1,28	3.116,3	1,45	0,17
Kaltim	13.493,5	5,44	5.298,2	2,47	-2,97
Sulut	1.963,0	0,79	1.936,0	0,92	0,13
Sulteng	1.267,6	0,51	1.267,6	0,59	0,08
Sulsel	6.071,3	2,45	6.071,3	2,83	0,38
Sultra	1.063,9	0,43	1.063,9	0,50	0,07
Maluku	1.940,9	0,78	1.923,2	0,90	0,12
Irja	3.059,3	1,23	2.814,5	1,31	0,08
JUMLAH	247.959,5	100,0	214.243,5	100,0	100,0

Sumber: diolah dari *Statistical Pocketbook*, BPS, Jakarta, 1994

Apa yang terjadi di Riau dan Irian Jaya tersebut merupakan sekelumit contoh ironis tentang eksploitasi kekayaan alam yang cenderung menguntungkan pemerintah pusat dibandingkan masyarakat lokal. Kecenderungan eksploitatif tersebut merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi ketimpangan regional di Indonesia.

Di samping kebijakan pemerintah pusat yang cenderung eksploitatif maupun sistem bagi-hasil yang timpang; masalah miskinnya sumber daya (*resources*) juga sering menjadi kendala tersendiri. Kemiskinan yang terjadi di NTB dan NTT, diyakini sebagai akibat dari miskinnya sumber daya, baik SDA, SDM, maupun

political resources. Ditambah kecenderungan kebijakan pemerintah pusat yang tak menguntungkan daerah, maka muncullah dikotomi pusat-daerah, Jawa-Luar Jawa dan KTI (Kawasan Timur Indonesia) - KBI (Kawasan Barat Indonesia) yang semuanya tak terpisahkan dari problema ketimpangan regional.

Bagaimana kita memahami permasalahan ini secara jernih? Belajar dari kebijakan yang telah diambil untuk mengoptimalkan sumber daya daerah selama ini, langkah apa lagi yang harus diambil untuk mengatasi problema ketimpangan regional di tanah air?

II. FIGUR KETIMPANGAN

2.a. PDRB

Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk meraba profil ketimpangan antar daerah. Penyebaran PDRB di Indonesia masih terasa timpang, terutama di KTI. PDRB Timtim pada tahun 1982, hanya mencapai Rp. 386,4 milyar, sedangkan NTT (Rp. 1.639,0 milyar), NTB (1.870,4 milyar), Sulawesi Tenggara (Rp. 1.063,9 milyar) dan Maluku (Rp. 1.940,9 milyar). Bandingkan dengan Jawa Timur (Rp. 38.566,7 milyar), DKI Jakarta (Rp. 30.923,6 milyar), Jawa Barat (Rp. 41.064,0 milyar) dan Jawa Tengah (Rp. 30.200,7 milyar) — *lihat tabel 1.*

Memang masih ada propinsi di Jawa dan Sumatera yang PDRB-nya rendah, misalnya Bengkulu (Rp. 1.100,5 milyar) dan Jambi (Rp. 1.787,5 milyar). Akan tetapi umumnya propinsi- propinsi di luar Jawa dan Sumatera memiliki PDRB yang relatif rendah. Pengecualian hanyalah propinsi Kaltim yang memiliki sumber devisa berupa tambang minyak.

Di samping Riau, Kaltim merupakan contoh kasus yang menarik. Dilihat dari PDRB-nya, kedua propinsi tersebut bertengger pada papan atas. PDRB Riau pada tahun 1992 tercatat Rp. 14.669,9 milyar dan Kaltim Rp. 13.493,5 milyar. Akan tetapi pendapatan dari minyak masih sangat dominan kontribusinya terhadap PDRB setempat. Karena minyak dan hasil-hasilnya sangat berpengaruh terhadap besar-kecilnya PDRB, akan tetapi tak berpengaruh banyak terhadap tingkat kesejahteraan riil masyarakat; maka untuk membuat PDRB lebih valid sebagai indikator statistikal, variabel minyak dan hasil-hasilnya sering dikeluarkan. Akan tetapi, dengan mengecualikan kontribusi minyak dan hasil-hasilnya, ternyata PDRB Kaltim dan Riau merosot drastis. Tanpa minyak dan hasil-hasilnya, PDRB Kaltim langsung merosot dari Rp. 13.493,5 milyar menjadi hanya Rp. 5.298,2 milyar; dan Riau merosot dari Rp. 14.669,9 milyar menjadi Rp. 3.769,5 milyar — *lihat tabel 1.*

Angka-angka di atas merupakan indikator agregat yang belum terdistribusi menurut jumlah penduduk. Namun PDRB per kapita juga menunjukkan ketimpangan yang kronis. DKI Jakarta sebagai pusat pertumbuhan selalu menempati peringkat pertama. Pada tahun 1983, PDRB per kapita DKI Jakarta mencapai Rp. 1.087.338,00 dan meningkat menjadi Rp. 1.839.849,00 pada tahun 1988. Sebaliknya, propinsi Timtim selalu menempati tempat terbawah dalam periode yang sama. Pada tahun 1983, PDRB per kapita Timtim hanya Rp. 138.454,00 dan meningkat menjadi Rp. 296.487,00 pada tahun 1988. Propinsi-propinsi yang kondisinya tak jauh dengan Timtim adalah NTB dan NTT.

Pada tahun 1983, NTB mencatat PDRB per kapita sebesar Rp. 178.733,00; meningkat menjadi Rp. 293.769,00 pada tahun 1988. Pada periode yang sama, NTT mencatat perkembangan PDRB per kapita dari Rp. 171.466,00 menjadi Rp289.333,00. Dengan kata lain, antara tahun 1983 hingga 1988 PDRB per kapita di Timtim, NTB dan NTT hanya sekitar seperdelapan dari PDRB per kapita di DKI Jakarta. Kendatipun jumlah absolutnya meningkat, namun komposisi relatifnya tidak mengalami perubahan berarti. Dalam hal ini, pembangunan baru berhasil dalam pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, namun belum diimbangi dengan aspek pemerataan.

Indikator makro seperti PDRB, baik secara total maupun per kapita, mendapat kritikan tajam karena sifat agregatnya. PDRB total maupun per kapita, sekalipun menunjukkan ketimpangan regional, akan tetapi gagal untuk menjelaskan profil kemiskinan secara riil. Sebab dari keseluruhan produksi masyarakat di suatu propinsi, sebagian di antaranya akan ditransfer oleh pemilik modal — teristimewa proyek-proyek yang bergerak pada bidang eksploitasi kekayaan alam. Karena sebagian besar pemilik modal berada di pusat (baca: Jakarta) dan mancanegara, maka terjadilah *transfer* keluar dalam jumlah yang signifikan. Implikasinya, "devisa" yang tertransfer ke luar tak dapat menggerakkan

TABEL 2
PERSENTASE KEMISKINAN MENURUT DAERAH DAN WILAYAH
1984-1990

Daerah	Tahun	Jawa-Bali	Luar Jawa-Bali	Indonesia
Kota	1984	25,0	18,4	23,1
	1987	21,0	17,6	20,1
	1990	18,5	16,0	16,8
Desa	1984	23,6	16,6	21,2
	1987	17,8	14,0	16,4
	1990	12,5	16,5	14,3
Kota + Desa	1984	24,0	16,9	21,6
	1987	18,8	14,8	17,4
	1990	14,6	16,7	15,1

Sumber : *World Bank* (1984-1987) dan **Jossy P. Moeis**, dkk., (dalam **Mohammad Arsjad Anwar**, dkk. [ed], 1995: hal. 153)

perekonomian di daerah ybs. secara langsung ataupun melalui efek pelipat (*multiplier effect*).

2.b. DISTRIBUSI PENDUDUK MISKIN

Selama tahun 1984 hingga 1990, terjadi penurunan populasi penduduk miskin di Indonesia. Secara nasional, jumlah penduduk miskin turun dari 21,6 persen menjadi 15,1 persen. Akan tetapi penurunan populasi penduduk miskin tersebut relatif hanya terjadi di KBI (Kawasan Barat Indonesia), yakni 5 propinsi di Jawa, 8 propinsi di Sumatera, 4 propinsi di Kalimantan dan Bali. Di luar ke-18 propinsi tersebut, persentase penduduk miskin terhadap total populasi, masih cenderung stagnan.

Menurut perhitungan Jossy P. Moeis, dkk. (1995) pada periode tahun 1984-1990 populasi penduduk miskin di KBI menurun dari 24 persen menjadi 14,6 persen; atau mengalami penurunan sebanyak -9,4 persen. Akan tetapi dalam periode yang sama, populasi penduduk miskin propinsi-propinsi NTB, NTT, Sulut, Sultra, Sulteng, Sulsel, Timtim, Maluku dan Irja hanya mengalami penurunan -0,2 persen; dari 16,9 persen menjadi 16,7 persen — *lihat tabel 2*

Sebenarnya pada tahun 1987 populasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di KTI sudah menurun hingga 14,8 persen. Akan tetapi tiga tahun kemudian, persentase itu justru meningkat menjadi 16,7 persen.

Perbandingan populasi penduduk miskin antara kawasan Jama-Bali dan kawasan luar Jawa-Bali juga mengalami pergeseran. Pada tahun 1984, penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Jawa-Bali (71,1 persen). Sedangkan kawasan luar Jawa-Bali hanya 28,9 persen. Namun proporsi tersebut berubah enam tahun kemudian, menjadi 56,6 persen (kawasan Jawa-Bali) dan 43,4 persen (kawasan luar Jawa-Bali) — *lihat tabel*

2.c. PENYEBARAN INVESTASI

Investasi merupakan bahan bakar penggerak roda perekonomian. Teori Harrod-Domar dan Pentahapan Pembangunan ala Rostow menggariskan bahwa investasi (dan tabungan masyarakat untuk membiayai investasi) merupakan penentu pertumbuhan ekonomi. Blomstron dan Hettne (1984) menegaskan bahwa persoalan keterbelakangan kemudian dirumuskan sebagai masalah kekurangan modal. Terlepas dari implikasi non-ekonomi, realisasi dari proyek-proyek investasi akan meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan sekitar investasi. Oleh sebab itu kalangan ahli ekonomi percaya bahwa daerah yang tak tersentuh investasi akan mengalami stagnasi perekonomian yang berakibat pada mandeknya akselerasi kesejahteraan riil masyarakat.

Periode 1 Januari 1967 hingga 31 Agustus 1995, terjadi ketimpangan distribusi investasi di Indonesia, baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Propinsi-propinsi yang dikenal sebagai pusat pertumbuhan (*growth-centre*), menyerap lebih banyak investasi dibandingkan propinsi-propinsi yang dikenal sebagai sentra kemiskinan. Jawa Barat misalnya, menyerap Rp. 117.897,5 milyar PMDN yang terbagi ke dalam 2.994 proyek; serta US$ 37.610,1 juta PMA yang terbagi ke dalam 1.364 proyek. Bandingkan dengan Sulawesi Tenggara misalnya, yang hanya mendapatkan pangsa PMDN sebesar Rp. 1.484,3 milyar yang terbagi dalam 23 proyek dan PMA senilai US$ 75,3 juta yang terbagi ke dalam 9 proyek investasi — *lihat tabel 4 dan 5.*

Investasi erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur fisik dan non-fisik. *Political will* ke arah pemerataan investasi harus diimbangi dengan realisasi pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik untuk menarik minat investor.

Akan tetapi dalam hal penyediaan infrastruktur yang paling mendasar, yakni jalan raya, juga masih terdapat ketimpangan. Pada periode tahun 1987-1992, pertumbuhan panjang jalan di daerah luar Jawa-Madura dan Sumatera masih kalah dibandingkan pertumbuhan panjang jalan di Jawa-Sumatera. Pertumbuhan panjang jalan di Jawa-Madura mencapai 9,03 persen per tahun; di Sumatera 10,18 persen per tahun; Kalimantan 8,74 persen per tahun; Sulawesi 6,53 persen per tahun; dan daerah lainnya 6,86 persen per tahun — *lihat tabel 6.*

Secara absolut, profil ketimpangan infrastruktur jalan raya juga tergambar secara jelas. Pada tahun 1987, wilayah Jawa-Madura memiliki panjang jalan 60.745 km, dan meningkat menjadi 88.157 km pada tahun 1992. Dalam periode yang sama, panjang jalan di Sulawesi tercatat 34.476 km (1987) dan meningkat menjadi 46.871 km (1992).

TABEL 3
PERSENTASE DISTRIBUSI PENDUDUK MISKIN
1984-1990

Wilayah	1984	1987	1990
Jawa-Bali	71,1	67,6	56,6
Luar Jawa Bali	28,9	32,4	43,4
	100,00	100,00	100,00

Sumber : **Jossy P. Moeis**, dkk., (dalam **Mohammad Arsjad Anwar**, dkk. [ed], 1995: hal. 154)

III. MERABA PENYEBAB KETIMPANGAN

Mengapa terjadi ketimpangan regional? Tampaknya kita tak dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya ketimpangan regional dari satu sudut pandang disiplin ilmu belaka. Ketimpangan regional bukan semata-mata persoalan politik, ketimpangan sumber daya alam, letak geografis, ataupun kesenjangan SDM. Ketimpangan regional juga tak dapat dijelaskan hanya

dengan memperhatikan distribusi investasi, tanpa mengikutsertakan determinasi faktor budaya politik.

Cornelis Lay (1993) menyebutkan empat hal sebagai akar persoalan ketimpangan antarwilayah di Indonesia. *Pertama*, bekerjanya mekanisme pasar yang mempunyai kecenderungan *centripetal*. *Kedua*, hambatan geografis sebagai akibat langsung dari nature Indonesia sebagai negara kepulauan. *Ketiga*, *colonial legacy*. Dan *keempat*, sejumlah kebijaksanaan negara yang bias dan diskriminatif terhadap kawasan-kawasan pinggiran[7].

Ternyata masih ada faktor lain yang cukup dominan, yakni faktor budaya politik yang mendeterminasi *formatting* dan *re-formatting* spesialisasi ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi *value added* yang diterima masyarakat di kawasan ybs.

TABEL 4:
DISTRIBUSI PMDN MENURUT LOKASI
1 Januari 67 s/d 31 Agustus 1995

LOKASI	Rp. Milyar	%thd.total	Jm.Proyek
JAWA			
DKI Jaya	37.417,5	10,74	1.454
Jabar	117.897,5	33,82	2.994
Jateng	26.995,5	7,75	668
DIY	1.811,7	0,52	121
Jatim	37.115,9	10,65	1.099
SUMATERA			
DI Aceh	3.954,6	1,13	107
Sumut	9.711,6	2,79	386
Sumbar	2.824,6	0,81	123
Riau	20.895,4	5,99	290
Jambi	4.397,7	1,26	74
Sumsel	9.597,8	2,75	247
Bengkulu	2.836,7	0,81	51
Lampung	6.021,5	1,73	162
KALIMANTAN			
Kalbar	8.443,7	2,42	202
Kaltim	15.533,2	4,46	243
Kalteng	2.744,5	0,79	114
Kalsel	4.332,6	1,24	132
SULAWESI			
Sulut	3.153,7	0,90	92
Sulteng	2,531,0	0,73	74
Sultra	1.484,3	0,43	23
Sulsel	4.343,3	1,25	220
Bali & Nustra	11.344,0	3,25	400
Maluku, Irja dan Timtim	13.167,7	3,78	201
JUMLAH	348.556,0	100,00	9.477

Sumber: diolah dari ***Indikator Ekonomi***, BPS, Jakarta, November 1995

3.a. MASALAH AKSESIBILITAS POLITIK

Persoalan ketimpangan regional memang bersumber dari masalah aksesibilitas politik. Masyarakat lokal relatif kurang memiliki akses terhadap *decision making process*. Kenyataan ini sungguh ironis, karena banyak permasalahan pembangunan di daerah yang tak dapat diraba dengan kebijakan- kebijakan teknis yang bersifat umum. Banyak masalah spesifik yang hanya dapat diraba kasus per kasus.

Minimnya aksesibilitas masyarakat lokal, antara lain menyebabkan ketidakmerataan distribusi proyek sektoral. Happy Bone Zulkarnaen (1994) (Analisis CSIS, No. 4 Tahun 1994: hal. 324-325) menyebutkan data tentang ketimpangan distribusi proyek sektoral antara KBI dan KTI. Propinsi-propinsi di Pulau Jawa dan Sumatera menerima 200-400 persen lebih tinggi dari luas relatifnya[8]. Sedangkan propinsi-propinsi di KTI menerima lebih rendah — *lihat tabel* 7

Pada Pemilu 1987, perolehan suara Golkar di KTI (Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Maluku, NTT, NTB dan Irja) mencapai 89,24 persen; PPP 6,42 persen dan PDI 4,29 persen. Namun pada pemilu berikutnya, perolehan suara Golkar menyusut menjadi 85,10 persen; PPP sedikit meningkat menjadi 6,47 persen dan PDI mencapai peningkatan hampir dua kali lipat, yakni menjadi 8,42 persen[9].

Di KTI, Golkar masih dapat mempertahankan posisi yang sering diistilahkan sebagai *single majority*[10] (menurut istilah Ketua DPP Golkar, H. Harmoko). Akan tetapi akses politik masyarakat KTI masih belum memadai. Kesempatan bagi masyarakat KTI untuk menjadi anggota dewan legislatif pusat, juga sangat terbatas. Hanya 32,9 persen "calon jadi" Pemilu 1992 yang mewakili propinsi-propinsi di KTI, yang berdomisili di KTI. Selebihnya, yakni 67,1 persen berdomisili di Jakarta. Padahal persentase rata-rata nasional tingkat kesertaan wakil rakyat asal daerah mencapai 47,6 persen dari hasil Pemilu 1987 dan 43,6 persen dari hasil Pemilu 1992[11].

Dilihat dari kontribusi politik yang diberikan masyarakat KTI terhadap penguatan hegemoni pemerintahan, sesungguhnya minimnya aksesibiltas

politik tersebut adalah sesuatu yang ironis. Betapa tidak, masyarakat KTI masih berperan sebagai penyumbang suara untuk keunggulan mayoritas Golkar, kendatipun memang ada kecenderungan menurun dalam dua pemilu terakhir. Akan tetapi belum ada "imbalan" yang memadai terhadap kontribusi yang penting tersebut. Fenomena keterbelakangan dan kemiskinan masih cukup terasa di KTI.

nasional.

Ketiga, pada akhirnya muncul inefisiensi dan ketidakefektifan kebijakan-kebijakan publik. Mekanisme *top-down planning* berimplikasi adalah pada pola kebijakan yang tipikal bersifat deduktif, sehingga problema kemiskinan di daerah sulit dipecahkan secara tuntas. Sebab pola kebijaksanaan deduktif acapkali menarik sebuah kesimpulan general mengenai masalah-masalah yang memiliki

3.b. SENTRALISASI PEMBANGUNAN DAN OTONOMI YANG AMBIVALEN

Sentralisasi pembangunan sektoral selama beberapa dekade telah membuahkan struktur ketergantungan daerah terhadap pusat, sehingga cenderung tidak kreatif untuk mengoptimalisasikan sumber daya daerah. Isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan di daerah sangat diarahkan oleh pemerintah pusat[12]. Berdasarkan pengalaman empirik, pola sentralisasi tersebut terbukti kurang valid untuk merumuskan *problem solving* bagi problema-problema di daerah yang kompleks lantaran memiliki karakteristik masing-masing.

Kondisi tersebut berimplikasi setidaknya pada tiga hal.

Pertama, terpeliharanya kondisi kelangkaan akses masyarakat lokal terhadap proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Berbondong-bondongnya beberapa kalangan masyarakat lokal untuk mengajukan aspirasi secara langsung ke DPR pusat, merupakan bukti dari kondisi kurang representatifnya lembaga legislatif tingkat daerah untuk mewadahi dan memecahkan isu-isu lokal. Selanjutnya hal ini berakibat pada menurunnya wibawa lembaga legislatif pada Dati I dan kabupaten.

Kedua, karena proses pengambilan keputusan yang sentralistik, ada kemungkinan lemahnya validitas dalam perumusan masalah-masalah spesifik di daerah. Mekanisme perencanaan proyek yang berpola *top-down planning* (dari atas ke bawah) seringkali tidak efektif, karena tidak memiliki relevansi yang erat dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Diakui atau tidak, pola *top-down planning* yang tidak relevan masih eksis dalam pola perencanaan pembangunan kita. Pola perencanaan tersebut dapat bertahan karena berkaitan dengan kepentingan supra-struktur

TABEL 5:
DISTRIBUSI PMA MENURUT LOKASI
1 Januari 1967 s/d 31 Agustus 1995

LOKASI	US$Juta	% Thd. Total	Jml. Proyek
JAWA:			
DKI Jaya	19.253,6	15,09	1.035
Jabar	37.610,1	29,48	1.364
Jateng	4.372,3	3,43	101
DIY	123,4	0,10	11
Jatim	23.154,3	18,15	314
SUMATERA			
DI Aceh	3.722,0	2,92	20
Sumut	4.845,4	3,80	81
Sumbar	360,8	0,28	22
Riau	9.621,3	7,54	243
Jambi	3.395,7	2,66	4
Sumsel	1.879,1	1,47	31
Bengkulu	99,3	0,08	12
Lampung	1.124,8	0,88	22
KALIMANTAN			
Kalbar	204,3	0,16	29
Kaltim	2.417,3	1,89	45
Kalteng	320,0	0,25	32
Kalsel	2.810,6	2,20	32
SULAWESI			
Sulut	631,4	0,49	30
Sulteng	47,1	0,04	11
Sultra	75,3	0,06	9
Sulsel	4.529,1	3,55	27
Bali & Nustra	2.687,8	2,11	149
Maluku, Irja dan Timtim	4.298,2	3,37	47
TOTAL	**127.583,2**	**100,00**	**3.671**

Sumber: diolah dari ***Indikator Ekonomi***, BPS, Jakarta, Nopember 1995

dimensi perbedaan yang kompleks di masing-masing wilayah.

Sentralisasi kebijakan pembangunan yang menyebabkan marjinalisasi daerah, menurut studi Cornelis Lay (1993), terkait dengan muatan ide kekuasaan "Jawanisme". Mengutip MacAndrews dkk.

(1982: 47), Lay menuliskan bahwa kekuasaan politik di Indonesia sangat terkonsentrasi, dan ini merupakan refleksi dari dominasi Jawa dan kultur Jawa dalam sistem politik Indonesia. Tampak bahwa dominasi kultur Jawa inilah yang membuat Clifford Geertz menyimpulkan bahwa "*if ever there was a tail wich wagged a dog, Java is the tail and Indonesia is the dog*" (Geertz, 1963: 13).

Untuk menghindarkan dampak negatif dari sentralisasi pembangunan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi untuk memanifestasikan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Otonomi Daerah. SK Mendagri No. 105/1994 berisi tentang ujicoba otonomi daerah untuk 26 Dati II se-Indonesia. Kendatipun masih dalam taraf ujicoba, namun banyak pihak yang mencemaskan bahwa kebijakan otonomi akan terjebak oleh ambiguitas dan ambivalensi.

TABEL 6
PANJANG JALAN MENURUT DAERAH UTAMA
1987 dan 1992 (Kilometer)

Daerah Utama	1987	1992	% pertumbuhan
Jawa-Madura	60.745	88.157	9,03
Sumatera	66.471	100.304	10,18
Kalimantan	23.261	33.430	8,74
Sulawesi	34.476	46.871	6,53
Daerah Lainnya	37.971	50.996	6,86
TOTAL	**222.924**	**319.758**	

Sumber : diolah dari ***Statistical Pocketbook***, BPS, Jakarta, 1994

Mereka yang memandang otonomi identik dengan kemandirian pembiayaan pembangunan, secara pesimistik, menganggap kebijakan otonomi sulit diterapkan karena pihak daerah masih memiliki tingkat ketergantungan finansial yang tinggi terhadap pusat. — *lihat tabel 8.*

Akan tetapi, ada pula kelompok yang memandang bahwa otonomi daerah harus dipisahkan dari masalah subsidi dari pusat. Ada atau tidaknya ketergantungan finansial bukanlah menjadi masalah, sebab otonomi memang sebuah hak yang harus diterima daerah untuk lebih leluasa melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

Terlepas dari masalah pro-kontra di atas, tampaknya otonomi tetap menjadi ambivalen apabila pengucuran dana subsidi dari pusat "diboncengi" oleh instruksi-instruksi khusus yang cenderung menghambat kemandirian daerah dalam mengoptimalisasi sumber daya potensial di daerahnya.

3.c. KETIMPANGAN POTENSI SDA DAN LETAK GEOGRAFIS

Pembangunan di Indonesia menganut aliran Teori Modernisasi yang menekankan pada ketersediaan modal. Padahal mengalirnya modal ke suatu daerah, terkait erat dengan masalah sumber daya di daerah tersebut.

Penanaman modal tersebar secara tidak merata, sebagai konsekuensi dari ketidakmerataan penyebaran sumber daya. Riau yang tanahnya banyak memiliki kandungan minyak, menerima PMA dan PMDN yang jauh lebih banyak dari tetangga dekatnya, yakni Jambi. Lampung yang memiliki keterbatasan SDA, tetapi letak daerahnya cukup strategis, juga menerima investasi yang lebih besar dari tetangga dekatnya, Bengkulu — *lihat tabel 4 & 5.*

Dari sudut pandang geografis, letak Irian Jaya kurang strategis untuk mengembangkan industri dan jasa. Ketidakstrategisan ini juga implikasi dari sentralisasi kebijakan pembangunan yang mengarah ke pusat (baca: Jakarta). Namun, karena tanahnya memiliki kandungan emas, perak dan tembaga; maka Irian Jaya masih sangat menarik bagi investor, bahkan di bursa saham Wall Street.

Bagaimana dengan daerah yang tidak memiliki SDA, dan letak geografisnya tak strategis? Apa daya, daerah seperti itu relatif tak menarik bagi investor. Implikasinya, pembangunan di daerah tersebut relatif lebih lamban dibandingkan tetangga-tetangganya. Karena ketersediaan infrastruktur memiliki korelasi positif yang cenderung timbal-balik dengan penanaman modal, maka daerah yang kurang menarik bagi investor juga mengalami kelambanan dalam ketersediaan infrastruktur. Akhirnya keterbelakangan menjadi semacam lingkaran setan (*vicious circle*) yang sulit dikenali ujung-pangkalnya.

3.d. DEMOGRAFI DAN MOBILITAS PENDUDUK

Variabel demografi dan mobilitas penduduk juga cukup signifikan untuk menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan regional di Indonesia. Konsentrasi penduduk di Jawa menyebabkan aktivitas ekonomi di pulau tersebut meningkat pesat menuju skenario industrialisasi melalui tiga tahap.

Pertama, populasi yang padat berarti kebutuhan akan barang dan jasa pada tingkat kuantitas yang tinggi. Mula-mula adalah kebutuhan primer (pangan, sandang dan perumahan). Kaum industriwan secara cermat membaca peluang ini. Mereka menginvestasikan modal untuk menggarap lahan kebutuhan primer tersebut.

Investasi yang dilakukan industriwan, otomatis meningkatkan kapasitas ekonomi di kawasan sekitarnya. Jika hal ini terjadi secara agregat, maka ada peningkatan yang signifikan terhadap GDP agregat yang berarti peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Proyek-proyek investasi yang bermunculan bak jamur di musim hujan di Pulau Jawa, meneteskan kemakmuran ekonomis kepada anggota masyarakat yang terlibat. Terjadilah peningkatan pendapatan

masyarakat. Karena peningkatan pendapatan mempengaruhi pola konsumsi, maka peningkatan pendapatan agregat pun mempengaruhi permintaan agregat. Permintaan agregat juga ikut mempengaruhi proyeksi investasi di masa mendatang.

Tahap *kedua*, industrialisasi di kawasan pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles*). Mula-mula sebagian besar penduduk bermatapencaharian utama sebagai petani. Namun karena daya tarik sektor industri dan jasa, maka mereka mulai memalingkan diri ke kedua sektor tersebut.

Terjadilah apa yang diistilahkan sebagai proletarisasi petani[13]. Proletarisasi petani didahului oleh proses peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri[14]. Proletarisasi petani menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi kian intens dan terintegrasi ke dalam sekup kapitalisme industri.

Industrialisasi terpusat di Jawa dan akan tersebar secara eskalatif ke daerah luar Jawa seperti Lampung, seandainya potensi kapasitas industri di Jawa sudah optimal. Industrialisasi yang terjadi di Jawa menimbulkan *reformatting* dalam pengambilan spesialisasi antara sektor pertanian dan industri. Sejarah Jawa sebagai kawasan penghasil bahan makanan utama perlahan-lahan bergeser ke luar Jawa[15]. Inilah gejala tahap ketiga.

Reformatting tersebut dapat berimplikasi serius, andaikata *term of trade* komoditas pertanian tak kunjung membaik, khususnya terhadap komoditas industri dan jasa. Selama ini,perbedaan nilai tukar tersebut dipandang valid sebagai penjelas dari ketimpangan negara maju dan negara sedang berkembang[16].

Sebenarnya ada semacam "rekayasa" terhadap mobilitas penduduk antarkawasan. Program transmigrasi yang dilakukan pemerintah merupakan sebuah upaya untuk memeratakan penyebaran penduduk, *dus* memeratakan potensi permintaan agregat sehingga menarik minat investor. Akan tetapi, transmigrasi tampaknya terjebak dalam problema "transplantasi kemiskinan" dan pengkonsentrasian penduduk yang kualitas SDM-nya rendah ke luar Jawa. Di samping itu, transmigrasi juga memberi dampak terhadap perubahan struktur ekonomi masyarakat di lokasi transmigran yang belum tentu memberi keuntungan secara proporsional terhadap masyarakat lokal.

Masalah migrasi di Irian Jaya membawa problem berupa kesenjangan ekonomi antara kaum pendatang dan masyarakat setempat. Dalam lima tahun (1985-1990) penduduk Irian terdesak oleh kaum pendatang, terutama dari Jawa (51,5 persen dari total pendatang) dan Sulawesi (36,8 persen)[17]. Orang Jawa di Irian ditempatkan di kawasan subur, dekat PNG[18].

Bersamaan dengan fenomena program transmigrasi sebagai "transplantasi kemiskinan" ke luar Jawa, terjadi pula penyerapan SDM bermutu dari luar Jawa ke Jawa. Penyerapan ini terjadi melalui dua jalur utama, yakni industrialisasi dan pendidikan. Penyerapan melalui jalur industrialiasi terjadi karena *demonstration effect* sektor industri di Jawa yang membawa dampak pada arus migrasi SDM potensial dari desa ke kota. Banyak lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dari kawasan pedesaan Lampung yang bermigrasi ke sentra- sentra industri Jabotabek, untuk sekedar menjadi buruh harian, mingguan atau bulanan. Padahal, jelas bahwa potensi

TABEL 7
PERSENTASE DISTRIBUSI PROYEK SEKTORAL BERDASARKAN PROPINSI
TAHUN ANGGARAN 1988-1989

Propinsi	% Penduduk	% luas daerah	% anggaran
Aceh	1,74	2,89	1,18
Sumut	5,75	3,69	2,22
Sumbar	2,32	2,59	1,04
Riau	1,38	4,93	0,68
Jambi	0,91	2,34	0,73
Sumsel	3,01	5,40	1,41
Bengkulu	0,47	1,10	0,40
Lampung	2,61	1,74	1,35
DKI Jakarta	3,81	0,03	58,52
Jabar	18,04	2,41	10,26
Jateng	17,90	1,79	3,95
DIY	1,99	0,16	0,83
Jatim	20,52	2,50	4,93
Kalbar	1,74	7,65	0,59
Kalteng	0,63	7,95	0,45
Kalsel	1,42	1,96	0,76
Kaltim	0,73	10,55	2,84
Sulut	1,46	0,99	0,59
Sulteng	0,81	3,63	0,46
Sulsel	4,35	3,79	1,86
Sultra	0,60	1,44	0,49
Bali	1,77	0,29	0,97
NTB	1,87	1,05	0,47
NTT	1,89	2,49	0,60
Maluku	1,00	3,88	0,61
Irja	0,79	21,98	0,81
Timtim	0,49	0,78	0,46
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : data BPS (1990) dalam **Happy Bone Zulkarnaen**, *Otonomi dan Demokratisasi dari Perspektif Regional, Analisis CSIS* No. 4 Th. 1994: hal 324

kampung halaman masing-masing.

Sedangkan penyerapan SDM potensial pada jalur pendidikan, terjadi karena *demonstration effect* serupa. Jawa dikenal sebagai pusat sekolah bermutu, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Oleh karenanya, banyak SDM potensial asal daerah yang melanjutkan pendidikannya ke Jawa. Seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa menyelenggarakan program penjaringan bibit unggul dari SLTA-SLTA di daerah[19]. Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, misalnya, setiap tahun menerima mahasiswa baru melalui program PBUD (Penjaringan Bibit Unggul Daerah) dengan jumlah sekitar 25 persen dari total mahasiswa baru.

TABEL 8
PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP APBD DI 26 PROPINSI

No.	Propinsi	% PAD thd. APBD
1.	DKI Jakarta	63,92
2.	Bali	24,76
3.	Jawa Timur	22,25
4.	Sumatera Utara	21,40
5.	Jawa Barat	21,00
6.	Jawa Tengah	19,33
7.	Kalimantan Timur	18,80
8.	Sumatera Barat	17,84
9.	Sulawesi Selatan	16,57
10.	DI Yogyakarta	16,29
11.	Lampung	16,15
12.	Sumatera Selatan	15,48
13.	Riau	15,36
14.	Bengkulu	15,22
15.	Sulawesi Utara	13,87
16.	Jambi	13,34
17.	Kalimantan Selatan	13,18
18.	Kalimantan Barat	13,06
19.	DI Aceh	11,95
20.	Nusa Tenggara Timur	11,90
21.	Nusa Tenggara Barat	10,49
22.	Maluku	9,19
23.	Sulawesi Tengah	8,09
24.	Sulawesi Tenggara	7,40
25.	Kalimantan Tengah	5,50
26.	Irian Jaya	4,49

Sumber: **T. Dzulkarnaen Amin**, dalam **Syamsudin Harris**, *Beberapa Segi Politik Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Analisis CSIS*, No. 1 Th. 1994: hal. 44

Bibit unggul asal daerah tersebut, setelah menyelesaikan pendidikannya, banyak yang enggan untuk kembali ke daerah. Kebanyakan di antara mereka telah menerima transformasi nilai-nilai baru yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap masa depan. Setelah melampaui tahap *brain-drain* selama menyelesaikan studi, mereka cenderung lebih suka untuk bekerja di kota-kota besar daripada pulang kembali ke daerah masing- masing. Akhirnya, pihak daerah hanya berperan sebagai pemasok SDM potensial untuk "diekspor" ke kawasan yang sudah maju, sekaligus "mengimpor" SDM kurang potensial untuk ditempatkan di daerah tersebut. Lebih ironis lagi, pihak daerah juga terkesan diposisikan sebagai "pemasok dana" hasil eksploitasi kekayaan alam

3.e. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SETENGAH HATI

Telah disinggung di muka, bahwa ketimpangan fasilitas infrastruktur merupakan salah satu penyebab dari ketidakmerataan investasi antar daerah. Namun sejauh ini *political will* menuju arah pemerataan investasi belum diiringi dengan memadainya pemerataan pembangunan infrastruktur. Minimnya pembangunan infrastruktur memang terkait dengan keterbatasan anggaran pemerintah. Untuk mengantisipasi hal ini, maka pemerintah mengeluarkan deregulasi investasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1994[20]. Deregulasi investasi ini melegalisasi kepemilikan saham hingga 100 persen bagi perusahaan yang bergerak pada bidang telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang lain.

PP 20/1994 merupakan legalisasi ketidakmampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur di daerah. Akan tetapi investasi di KTI dan daerah miskin, sejauh ini belum mendapat insentif yang cukup. Prosedur yang ada masih cenderung berbelit-belit sehingga menimbulkan *opportunity cost* yang semakin besar. Di samping itu berbagai macam pungutan yang dilegalkan pada sekup daerah, juga membengkakkan *fixed cost* yang harus ditanggung proyek-proyek investasi di daerah.

Untuk mengalirkan investasi ke daerah, memang dibutuhkan insentif khusus. Negara lain, seperti Cina dan Vietnam yang sedang menggalakkan pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan insentif khusus sebagai daya tarik bagi investor asing.

Akan tetapi, tanpa adanya model pembagian keuntungan (*profit-sharing*) yang adil antara pihak lokal, pusat dan investor; membengkaknya investasi di daerah justru menimbulkan masalah-masalah sosiopolitik, kultural dan lingkungan hidup di masa mendatang.

IV. MENCOBA MENGATASI KETIMPANGAN REGIONAL

4.a. REALOKASI SUMBER DAYA

Persoalan ketimpangan regional pada hakikatnya bersumber dari masalah ketimpangan sumber daya (*inequality resources*). Oleh sebab itu, solusinya juga dapat diawali dengan langkah-langkah realokasi sumber daya.

Masalah sumber daya di sini tidak terbatas hanya dalam pengertian faktor produksi (alam, modal/kapital, SDM dan *enterpreneur*). Variabel aksesibilitas politik sangat berperan dalam realokasi faktor produksi — tentu saja *natural resource* menjadi pengecualian dalam agenda realokasi.

Justru yang terpenting adalah bagaimana untuk meredistribusikan sumber daya politik (*political resource*) agar masyarakat lokal tidak terbentur pada masalah keterbatasan akses terhadap mekanisme pengambilan keputusan di tingkat pusat. Realokasi faktor produksi modal/kapital dan SDM, serta redistribusi proyek-proyek pemerintah agar lebih memperdulikan orientasi pengembangan perekonomian daerah, hanya berjalan mengikuti realokasi *political resource.*

Salah satu hal mendasar yang perlu dibenahi — dalam kerangka prinsip *people's entitlement* atau pembesaran hak dalam tataran mikro sesuai dengan pembesaran ekonomi dalam tataran makro — adalah peningkatan akses politik masyarakat lokal terhadap proses pengambilan keputusan pembangunan di wilayah yang bersangkutan. Karena peran lembaga legislatif daerah (baca: DPRD) cenderung tersubordinasi lembaga eksekutif, intervensi politik masyarakat lokal terhadap gerak pemerintahan sangat terbatas. Tidak efektifnya fungsi kontrol DPRD, ditambah minimnya akses dan *political resources* masyarakat lokal, cukup menyulitkan upaya menggalang aspirasi melalui elemen-elemen institusi lokal yang representatif.

Sumber daya yang akhir-akhir kian terasa makna pentingnya adalah aksesibilitas masyarakat lokal terhadap informasi. Sejauh mana masyarakat lokal memiliki kekuatan tawar- menawar (*bargaining power*) dengan negara dalam kaitan interaksi institusional yang terbingkai dalam *good governance,* sangat tergantung kepada akses mereka terhadap informasi.

Satu masalah besar dalam upaya meningkatkan akses masyarakat lokal terhadap distribusi informasi adalah kecenderungan penyeragaman informasi oleh pihak yang berwenang. Di samping metode tersebut sangat efektif untuk upaya penyensoran, penyeragaman informasi tersebut justru memunculkan aneka macam distorsi yang merugikan masyarakat umum. Implikasi selanjutnya, masyarakat hanya berpeluang untuk tampil sebagai penonton di pinggiran arena pembangunan. Atau kalau pun dilibatkan, perannya tak lebih sebagai aktor-aktor marginal yang tak dapat berbuat banyak demi kepentingan mereka sendiri.

4.b. *GOOD AND CLEAN GOVERNANCE*

Kecuali masalah aksesbilitas masyarakat lokal, efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah juga membutuhkan terpenuhinya prasyarat berupa tata cara pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), baik dalam skala nasional maupun lokal. Aspek *good governance,* di samping berpeluang memberikan kontribusi bagi eliminasi praktik- praktik yang tak sehat, juga memberikan keuntungan tertentu bagi mekanisme kontrol terhadap pemerintah daerah, baik dilakukan oleh lembaga legislatif daerah (DPRD) maupun masyarakat secara langsung.

Salah satu ide dasar untuk mengefektifkan kebijakan otonomi daerah sebagai upaya nyata penghapusan kemiskinan adalah penciptaan *good and clean government* — terutama dalam tataran daerah. Di samping peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemda, termasuk pula aspek pemberdayaan lembaga legislatif di daerah terhadap kesan subordinasi lembaga eksekutif. *Good governance* adalah "cara di mana kekuasaan dilaksanakan dalam penguasaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara bagi kemajuan". Terdapat unsur hak ekonomi dan politik masyarakat di dalam pembangunan, sehingga alokasi sumber oleh negara dilakukan sebagai jaminan terhadap hak ekonomi dan politik tersebut. Sebagai sebuah pendekatan institusional, konsep penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) diartikan sebagai interaksi antara penyelenggaraan negara (pemerintah) dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat[21]. Menurut rekomendasi Bank Dunia, terdapat empat dimensi penting dari *good governance,* yakni keterandalan, kerangka hukum yang efektif, informasi yang sejalan dengan transparansi (atau akuntabilitas pemerintahan) dan tersedianya tenaga kerja terdidik.

Keterandalan *good governance* tidak lepas dari permasalahan teknis seputar kualitas birokrasi. Disadari bahwa problema mendasar yang sangat potensial menjadi benturan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain masalah *clean government.* Patologi birokrasi seperti nepotisme, kolusi, dan korupsi; berkombinasi dengan faktor-faktor kultural sebagai lahan penjalinan hubungan patron-klien yang mempertaruhkan kepentingan orang banyak. Kendala-kendala struktural dan kultural tersebut sulit teratasi secara tuntas, selama masih ada kompromi dan toleransi terhadap perilaku-perilaku devian dalam mekanisme birokrasi yang bersih.

Kerangka hukum yang efektif merupakan penjamin terselenggaranya *good governance.* Dapat dibayangkan, bila sebuah produk hukum tak mampu lagi tampil sebagai pranata formal, maka pelbagai hambatan struktural dan kultural dalam birokrasi di daerah akan sulit dijinakkan. Kecenderungan memberi toleransi terhadap perilaku menyimpang, karena bersentuhan dengan kepentingan elit politik dan ekonomi, hanya akan memelihara bibit penyelewengan yang kronis. Hal ini diperparah bila

mekanisme kontrol, baik yang bersifat formal maupun informal, sudah mengalami penyempitan gerak.

Accountability penyelenggaraan pemerintahan juga tak lepas dari kualitas dan keterandalan birokrasi yang bersih. Ketika terjadi semacam permakluman massal yang mengijinkan munculnya korupsi, nepotisme, kolusi, dll; ada kecenderungan untuk menutup-nutupi hal yang sesungguhnya. Dari sisi penciptaan dan penjagaan stabilitas, barangkali ini positif. Tapi dari segi akuntabilitas (dan lebih luas lagi, segi normatif), tentu saja itu sebuah kesalahan yang sulit dimaafkan.

Ketika pemerintahan di daerah mendapat keleluasaan yang semakin besar untuk membangun wilayahnya secara mandiri, pada saat yang bersamaan muncul pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan publik. Dalam bingkai *good governance*, aspek transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan akses politik- ekonomi masyarakat lokal, berpeluang memunculkan situasi dialogis antara masyarakat dan negara. Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya akibat-akibat negatif dari perubahan, seperti ketercerabutan sekelompok orang dari wilayah asalnya (*displacement*) yang memunculkan orang-miskin-baru, ketersisihan dari sistem sosial (*disempowerment*) dan pemiskinan relatif maupun absolut.

4.c. MEREALISASIKAN IDE *BOTTOM UP PLANNING*

Agar tidak muncul distorsi dalam meraba problema spesifik yang muncul di daerah, dianjurkan agar negara mampu memelihara institusi lokal yang telah ada. Dari titik ini, pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dapat diawali dan diharapkan lebih bermanfaat dibandingkan perencanaan dari atas (*top-down planning*).

Yang dibutuhkan masyarakat lokal adalah dukungan pemerintah pusat terhadap elemen-elemen institusional yang telah tertanam dalam komunitas mereka, agar proses alokasi sumber- sumber dapat berjalan secara adil.

Jadi masyarakat lokal bukan membutuhkan ketersediaan wahana atau organisasi yang telah diformat mekanisme kerjanya, tetapi justru kurang mampu tampil sebagai penyambung aspirasi. Dari sisi ini, kita dapat mengharapkan sebuah mekanisme perencanaan *bottom up* yang selama ini tak lebih sebagai "macan kertas" belaka. Dengan demikian, sebuah proses pengambilan keputusan (yang tentu saja berkaitan dengan hajat hidup orang banyak) dapat berlangsung lebih demokratis dan melibatkan sebanyak mungkin kelompok-kelompok masyarakat lokal yang kenyataannya memang cukup plural.

Setidaknya, terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan dalam menyusun pendekatan (*approach*) dalam penanggulangan masalah ini. Pertama, penanggulangan yang dititikberatkan pada pembinaan kualitas dan mentalitas aparat daerah setempat. Seringkali masalah kualitas SDM dan mentalitas aparat pemda menjadi *bottleneck* dalam memberantas kemiskinan yang kronis di daerah. Sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk memancing redistribusi akses dan sumber daya terhadap masyarakat miskin, mengalami mis-alokasi hanya karena faktor kapabilitas yang kurang memadai.

Kedua, sejauh mana penyesuaian kebijakan sosial-ekonomi nasional secara makro sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan pembangunan daerah secara proporsional. Kebijakan otonomi daerah layak untuk dioptimalisasikan agar pihak daerah semakin dewasa dan mampu menjalankan pemerintahan secara mandiri.

4.d. OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH

Penggarapan sumber daya daerah secara optimal berkaitan dengan sejauh mana otonomi diberikan oleh pemerintah pusat. Bila otonomi diberikan secara setengah-setengah, maka masih ada peluang terselipnya kekuasaan pihak pusat yang membelenggu gerak operasional aparat di daerah.

Upaya untuk membuat Dati II dapat membangun daerahnya secara mandiri dapat dilakukan melalui beberapa alternatif optimalisasi asset dan sumber daya. Penggalian PAD sampai titik maksimal merupakan tugas yang selalu menantang. Secara konvensional, PAD digali dari sektor pajak dan retribusi. Ekstensivikasi untuk kedua sektor ini barangkali mendapat kesulitan yang serius, sebab cenderung membebani masyarakat dengan pungutan yang beragam. Selain itu, mekanisme pungutan tersebut memberikan banyak celah penyelewengan aparat. Oleh sebab itu perlu dikaji upaya-upaya lain untuk memobilisasi dana pembangunan. Deregulasi investasi seperti yang tertuang dalam Pakto 93 merupakan modal yang cukup berarti untuk upaya ini. Upaya menarik investor asing ke daerah seperti yang termaktub dalam Pakto 93 merupakan peluang untuk menggali pendapatan daerah yang memadai.

Aset pemerintah daerah seperti BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang selama ini jarang menghasilkan laba, masih mungkin untuk diprofesionalisasikan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas produksi dalam kinerja BUMD akan meningkatkan *share* BUMD terhadap pembangunan di wilayahnya. Masalah-masalah yang mendasar seperti nepotisme, mis-manajemen, kesalahan alokasi sumber daya, dll. sudah selayaknya mendapat perhatian yang serius. Dengan demikian, kemandirian yang tertuang melalui kebijakan ekonomi bukan merupakan kemandirian yang "semu".

Kerjasama pengelolaan BUMD dengan pihak swasta juga merupakan lapangan lain yang selama ini belum banyak tersentuh. Paket Deregulasi PMA melalui PP No. 20/1994 yang membuka peluang penanaman modal bagi investor asing dalam berbagai lapangan usaha, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak swasta dan asing.

Namun upaya-upaya kerjasama dengan swasta memiliki konsekuensi yang sejak dini harus diantisipasi. Swasta yang bersifat profit oriented bukan tidak mungkin melancarkan upaya-upaya eksploatatif untuk memaksimalkan laba usaha mereka. Upaya-upaya maksimisasi laba tersebut dalam beberapa hal dapat bertabrakan dengan kepentingan umum. Kasus yang banyak terjadi adalah pencemaran lingkungan oleh aktivitas industrialisasi yang diselenggarakan oleh swasta.

Menghadapi kemungkinan tersebut, baik lembaga eksekutif maupun legislatif di kabupaten dituntut ketegasannya. Peningkatan peran dan *bargaining power* lembaga legislatif diharapkan merupakan satu langkah awal yang strategis untuk menghadapi konflik-konflik dengan mitra swasta.

4.e. BEBERAPA CATATAN

Telah disinggung di muka bahwa inti dari ketimpangan regional di Indonesia adalah ketimpangan sumber daya, khususnya sumber daya politik antara daerah yang satu dengan yang lain. Akan tetapi realokasi sumber daya belum sepenuhnya menuntaskan persoalan, karena justru dapat menimbulkan persoalan baru di masa mendatang.

Pemerataan investasi ke daerah-daerah, tak semata-mata membawa implikasi ekonomis berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi juga dapat menyulut ketegangan sosial, politik, dan budaya. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan masalah *profit-sharing* antara investor, masyarakat lokal dan pemerintah pusat. Di samping itu, pelibatan peran masyarakat lokal terhadap proyek investasi ybs., juga sangat dibutuhkan. Tak hanya dilibatkan sebatas sebagai tenaga kerja kasar, akan tetapi dapat dimasukkan ke dalam *squad* pengambil keputusan, seandainya prasyarat formalitasnya memadai.

Masyarakat lokal seyogianya juga diberi hak untuk ikut mengontrol operasionalisasi proyek investasi. Apabila proyek tersebut menunjukkan indikasi merusak lingkungan atau bahkan jiwa penduduk di sekitarnya, maka harus ada tindakan tegas untuk memberi sanksi yang setimpal.***

CATATAN AKHIR

1. Tabrani Rab, *Kompas* 22 September 1986; dikutip Deswandi Muzwar, 1988 dan Loekman Sutrisno & Awan S. Dewanta (dalam Mubyarto, dkk.1993)

2. Embassy of US, *Petroleum Report in Indonesia*, July 1991

3. *Media Indonesia*, edisi 13 Februari 1996

4. Carolin D. Turinsky, 1988, *Traditional Tribal Land and Tenure and the Effects of Developmen, Case Study of Amungme of Irian Jaya, Indonesia*

5. *Forum Keadilan*, No. 11 Tahun IV, tgl. 11 September 1995; hal. 20

6. *Forum Keadilan*, No. 11, Tahun IV, tanggal 11 September 1995: hal. 19

7. Cornelis lay, *Ketimpangan dan Keterbelakangan*,seni monograf Fisipol UGM No. 5 tahun 1993

8. Happy Bone Zulfikarnaen, **Otonomi dan Demokrasi dari Perspektif Regional**, dimuat dalam *jurnal Analisis CSIS* No.4 Th. 1994 : hal. 325

9. Riswanda Imawan, dalam syamsudin Harris, **Beberapa Segi Politik Pembangunan Kawasan Timur Indonesia,** *jurnal Analisis CSIS* No. 1 Th. 1994 : hal. 47

10. *"Single majority"* atau majoritas tunggal adalah istilah yang pernah digunakan oleh Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Golkar, H. Harmoko untuk memverbalkan realita perolehan suara oleh satu OPP (organisasi peserta pemilu) secara dominan. Istilah ini pernah dipolemikkan di media massa.

11. Syamsudin Harris, **Beberapa Segi Politik Pembangunan Kawasan Timur Indonesia**, dalam *Analisis CSIS* No. 1 Th. 1994 : hal.47

12. Didik J. Rachbini (penyunting), **Negara dan Kemiskinan di Daerah**, *Sinar Harapan*, Jakarta, 1995

13. Muhammad Sobary, *Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi*, Yayasan Benteng Budaya, Yogyakarta, 1995 : hal. 1

14. Menurut sumber data resmi yang dikutip media massa, sekitar satu juta hektar lahan pertanian produktif di Jawa telah beralih fungsi menjadi lahan industri dan pemukiman, selam satu dasawarsa pasca Swasembada Beras 1984.

15. Pada tahun 1996 ini, proyek pembukaan lahan gambut jutaan hektar di Kalimantan dimulai. Di samping pemilikan lahan, pembukaan lahan gambut menjadi areal pertanian baru tersebut, dipandang sebagai peralihan peran pemasok pengan utama dari Jawa keluar Jawa. Padahal menitik teori Keunggulan Komparatif-nya David Ricardo, Jawa memiliki keunggulan komparatif sebagai penghasil produk pertanian.

16. Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995

17. Marthen L. Ndoen, **Ekonomi Politik Migrasi di Irian Jaya**, artikel yang dimuat pada majalah *Bina Darma* No. 44 Tahun 1994

18. *Forum Keadilan* No. 11 Tahun IV, tanggal 11 September 1995 : hal. 17

19. " Bibit Unggul" dari daerah tersebut dijaring melalui seleksi yang didasarkan pada nilai rapor siswa-siswa SLTA. Mereka yang lolos seleksi, dipanggil untuk menjadi mahasiswa baru harus melalui UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Melalui mekanisme ini, pihak PTN mendapatkan siswa yang masuk dalam kategori " terbaik" dari daerah-daerah.

20. Deregulasi PMA ini terbuakti effektif, ketika terjadi peningkatan nilai dan proyek investasi yang disetujui (approval investment) secara impresif. Pasca dikeluarkan nya PP 20/1994, angka persetujuan investasi di Indonesia (asing maupun domestik) tumbuh hingga seratus persen per tahun.

21. Didik J. Rachbini (penyunting), **Negara dan Kemiskinan di Daerah**, *Sinar Harapan*, Jakarta, 1995

Industrialisasi Indonesia : Deregulasi Zigzag Dan Kebijakan Kompetisi

Kritik paling utama terhadap pembangunan perekonomian Indonesia selama ini hampir tidak pernah bergeser dari menyoal paradigma campur tangan pemerintah (government intervention). Derajat keterlibatan pemerintah yang cukup tinggi merupakan "mode" dalam sejarah industrialisasi Indonesia yang telah berlangsung selama empat dekade ini. Hasilnya, sektor industri yang selama ini terlalu banyak diatur (regulated) oleh pemerintah melalui berbagai bentuk proteksi, lisensi maupun subsidi telah memunculkan fenomena monopoli, oligopoli dan kartel yang menyebabkan inefisiensi alokasi sumberdaya ekonomi serta mendistorsi iklim persaingan usaha yang sehat. Sektor industri yang dipercaya untuk menjadi sektor garda depan (leading sector) dalam pembangunan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, kinerjanya tidak seperti yang diharapkan. Beberapa indikator ekonomi yang dipergunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu industrialisasi, terhitung sangat tidak memuaskan. Selain itu daya penciptaan devisa sektor industri Indonesia sangat rendah, melihat neraca ekspornya yang sangat marjinal baik dalam hal kuantitas maupun daya saing.

Bagi perekonomian yang sedang berkembang seperti Indonesia, rendahnya kinerja industrialisasi adalah problem yang krusial karena dari sektor industri diharapkan dapat menyumbangkan efek pengganda (multiplier effect) yang besar bagi sektor-sektor lain dalam perekonomian dan ekspor sektor industri merupakan andalan utama untuk mandiri melanjutkan pembangunan ke tahap berikutnya, menjamin pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi serta menyediakan lapangan kerja produktif. Rendahmya kinerja sektor industri merupakan suatu "kegagalan" Indonesia untuk bisa survive dalam situasi kompetisi perdagangan yang keras menyongsong era perdagangan bebas pasca 2020.

Pendahuluan

Tulisan ini berniat untuk mengungkap perkembangan industrialisasi di Indonesia mulai dari jaman substitusi impor dan transformasinya ke era yang lebih berorientasi ekspor. Tinjauan kinerja dan struktur industri merupakan alat analisa utama yang dipakai untuk mengevaluasi proses 40 tahun industrialisasi di Indonesia dan daya saing produk industri di pasar global. Selanjutnya diberikan suatu alternatif solusi untuk kebijakan industrialisasi baik untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam jangka pendek *(short-run)* maupun prioritas kebijakan kompetisi untuk menghadapi tantangan berat di masa depan.

RATIH PRATIWI (LOELOE)
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, suka menekuni masalah industri dan ekonomi internasional. Pernah berada di jajaran pengurus Majalah Mahasiswa BALAIRUNG Universitas Gadjah Mada sebagai Redaktur Artistik, aktif di departemen penalaran Badan Eksekutif Mahasiswa -Senat Mahasiswa FE-UGM 1994-1995, delegasi Indonesia di *International Student Conference 1995* yang diselenggarakan oleh *Harvard Univesity*, dan anggota **Tim Sembilan** Senat Mahasiswa UGM yang merumuskan **Rancangan Undang-Undang Anti Dominasi Ekonomi** yang diusulkan ke FPP dan FKP di DPR-RI September 1995 lalu.

Arti penting pembangunan sektor industri

Alur pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana negara Asia lainnya mengikuti jalur industrialisasi dimana industri dan perdagangan mempunyai peranan sentral dalam proses perubahan struktur ekonomi masyarakat. Perubahan struktural yang dimaksud adalah peran produksi di sektor sekunder terutama industri manufaktur (pengolahan) dan produksi di sektor tersier (sektor jasa termasuk kegiatan perdagangan) semakin meningkat dan meluas dibanding dengan perkembangan di sektor primer (pertanian dalam arti luas dan pertambangan). Industrialisasi dan perdagangan luar negeri tersebut diletakkan dalam konteks pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat basis devisa negara.

Strategi kebijakan perdagangan sangat mempengaruhi perkembangan sektor industri. Mobilitas input maupun output yang lancar baik di pasar domestik maupun antar negara merupakan jaminan bagi kelancaran proses produksi dan kepastian usaha. Di sisi lain proses produksi perlu dijaga dalam situasi persaingan yang *fair* dimana industri domestik dilepaskan dalam bursa komoditas apabila diyakini sudah cukup kuat menghadapi industri mancanegara. Disini terlihat bahwa kebijakan pemerintah memegang peranan penting, namun perlu formulasi khusus sehingga kebijakan perdagangan yang diambil tidak malah menjadi penyumbat bagi pengembangan sektor industri. Apapun strategi industrialisasi yang ditempuh, substitusi impor maupun promosi ekspor, bila campur tangan pemerintah terlalu menghambat maka yang terjadi adalah ketimpangan struktur ekonomi alias kegagalan industrialisasi itu sendiri.

Industrialisasi subsitusi impor

Di bawah kendali Presiden Soeharto, Orde Baru menggelar pembangunan ekonominya tahap demi tahap melalui Repelita. Dengan beban ekonomi yang sangat berat peninggalan Orde Lama, langkah-langkah utama rezim baru adalah memperbaiki struktur finansial kenegaraan. Tabungan domestik yang hampir nihil dan kekayaan devisa yang minimal menghasilkan suatu strategi perdagangan yang *inward looking* (berorientasi ke dalam) dan strategi industrialisasi substitusi impor.

Strategi industrialisasi substitusi impor diadopsi , mengikuti jejak pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yang lain, melewati debat pendek dan hampir tanpa alternatif. Pada saat itu industrialisasi ibarat imunisasi polio yang wajib diinjeksikan ke semua negara dunia ketiga. Bagi Indonesia, industrialisasi substitusi impor bagaikan sesuatu yang *'taken for granted'* dalam awal-awal program rehabilitasi ekonomi , mengingat pesimisme ekspor dan kendala anggaran pembangunan yang terbatas maka aktivitas impor barang konsumsi yang boros devisa perlu dibatasi.

Mesin pertumbuhan ekonomi bernama industrialisasi itu melaju kencang semenjak paruh kedua dasawarsa 60-an, mengikuti langkah yang diambil Filipina yang sudah memulainya pada dasawarsa 50-an, Malaysia, Singapura dan Thailand pada dasawarsa 60-an. Dengan panduan staf ahli dari World Bank dan Dana Moneter International (IMF), langkah pertama yang dilakukan Orde Baru adalah merombak sistem perekonomian yang tertutup menjadi sistem perekonomian yang lebih terbuka terhadap sentuhan aktivitas ekonomi dunia seperti perdagangan luarnegeri dan investasi asing. Karpet merah pun digelar untuk modal asing berupa Undang-undang No.1 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967. Dan untuk lebih mendorong industrialisasi substitusi impor, diadakan pembenahan sistem devisa berupa pembebasan lalu-lintas devisa dan penyatuan nilai tukar sehingga transaksi perdagangan luar negeri menjadi lebih sederhana, serta menjamin aliran bahan mentah dan bahan modal dari luarnegeri. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut Orde Baru telah meletakkan satu landasan dalam pengembangan sektor industri di Indonesia (**Mc. Cawley**, 1990:82).

Perombakan sistem perekonomian yang terbuka ternyata dirasa belum cukup. Rezim baru melengkapi

program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi dengan kontrol ketat terhadap besarnya kredit dengan cara meningkatkan suku bunga (kebijakan di bidang moneter), meningkatkan pendapatan negara dari pajak, memotong defisit neraca pembayaran dan memotong anggaran belanja negara, program bantuan asing serta "de-etatisasi" dalam kegiatan-kegiatan ekonomi (**Sugiono**,1992:170).

Hasilnya cukup fantastis, terutama di sektor-sektor produksi "modern". Antara tahun 1968-71 dan tahun 1971-77, Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia tumbuh dengan kecepatan rata-rata 7,1% dan 7,9% pertahun, sangat jauh diatas kemampuan periode sebelumnya yang hanya sebesar 2,1% pada periode 1960-66 dan 4,1% pada periode 1966-68. Sejak tahun 1968, tingkat pertumbuhaan GDP Indonesia tersebut jauh melampaui tingkat rata-rata yang dicapai oleh semua negara sedang berkembang di dunia. Data-data yang dikumpulkan oleh World Bank menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun semua negara-negara berkembang hanya setinggi 5,9% pada periode 1970-75, sudah termasuk 3,9% rata-rata pertumbuhan negara-negara Asia berpendapatan rendah, 2,8% pertumbuhan di negara-negara berpendapatan rendah di Benua Afrika serta 6,4% di negara-negara berkembang berpendapatan menengah (**Arsjad Anwar**, 1980:207).

"APAPUN STRATEGI INDUSTRIALISASI YANG DITEMPUH, SUBSTITUSI IMPOR MAUPUN PROMOSI EKSPOR, BILA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH TERLALU MENGHAMBAT MAKA YANG TERJADI ADALAH KETIMPANGAN STRUKTUR EKONOMI ALIAS KEGAGALAN INDUSTRIALISASI ITU SENDIRI."

Hampir semua sektor dan subsektor dalam proses industrialisasi substitusi impor ini mengalami ekspansi, kecuali subsektor perikanan dan pertanian skala kecil. Pertambangan, manufaktur, dan konstruksi tumbuh sangat cepat sejak tahun 1968, dalam nilai riil ekspansinya sebesar 10-15% selama periode 1968-77, dan kontribusinya meningkat secara signifikan dalam GDP. Sektor pertambangan menjadi primadona utama dalam pertumbuhan output, sumbangannya terhadap GDP dalam harga berlaku secara spektakuler meningkat baik dalam masa-masa sebelum maupun sesudah dunia dilanda krisis minyak, dari 4% di tahun 1971 menjadi 8% ditahun 1971 dan melonjak ke 19% pada tahun 1977 (**BPS**, 1974 & 1977)

Sektor manufaktur (pengolahan) mengembang dengan sangat pesat setelah tahun 1968 dibandingkan dekade-dekade pada awal kemerdekaan. Durasi 1968-71 dan 1971-77 tingkat pertumbuhan sektor ini mencapai level diatas 2 digit, yaitu 12,4% di tahun 1960 dan 13,4% di tahun 1973. Sebaliknya, sektor pertanian mengalami stagnasi pertumbuhan dan penciutan. Output riil sektor pertanian hanya tumbuh 1,9% dan 2,5% pada periode 1960-66 dan 1966-68, dan sedikit lebih cepat hampir mencapai 4% pada tahun 1968-71 dan 1971-77. Kontribusi sektor pertanian dalam GDP Indonesia melorot dari 51% tahun 1968 menjadi 31% di 1977 (**BPS**, ibid).

Banyak faktor kondusif yang menyebabkan kontrasnya perkembangan sektor manufaktur dan sektor pertanian pada periode industrialisasi substitusi impor. Penurunan pertumbuhan di sektor pertanian diakibatkan pertama oleh sangat rendahnya pertumbuhan produksi padi, hanya sekitar 1,4% per tahun pada durasi tahun 1974 - 77. Hama dan musim kemarau yang berkepanjangan telah membuat produksi beras anjlok sebesar 6,6% pada tahun 1974-75. Kedua, resesi dunia mengurangi volume ekspor kayu sehingga terjadi reduksi nilai tambah kotor di subsektor kehutanan . Resesi ini membuat nilai tambah kotor di subsektor kehutanan pada tahun 1977 lebih rendah daripada di tahun 1974 (**Arsjad**, 1980:210)

Di sektor manufaktur, ada empat faktor utama yang menyebabkan ekspansi pasca tahun 1968, yaitu (1) Adanya kelebihan kapasitas sektor industri sehingga produsen dapat menaikkan kapasitas produksinya, (2) Adanya lonjakan investasi sebagai buah dari digulirkannya UU No.1 tahun 1967 tentang PMA yang disusul dengan UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 1968, (3) Kelangkaan devisa dan konversi nilai tukar yang kaku telah berhasil diatasi sejak adanya peningkatan ekspor minyak dan bahan tambang lain serta terjadinya *capital inflow* dalam bentuk pinjaman luarnegeri, (4) Membaiknya perekonomian telah meningkatkan permintaan domestik dan mendorong produsen dalam negeri untuk memproduksi barang-barang industri yang pada saat itu termasuk langka (**Arsjad**, et.al.:210 dan **Mc Cawley** ,et.al.:83).

Akibat dari cepatnya pertumbuhan di sektor pertambangan terutama minyak dan di sub-sektor kehutanan, yang keduanya memang diorientasikan untuk ekspor, membawa dampak positif pada perdagangan luarnegeri. Nilai ekspor riil Indonesia meningkat dengan sangat cepat dibandingkan dengan periode sebelum 1968. Nilai total ekspor Indonesia dalam durasi tahun 1968-77 melipat hampir duabelas kali, dari US$870 menjadi US$10,850. Sedangkan kontribusi ekspor terhadap total GDP melipat duakali dari 11% di tahun 1968 menjadi 22% di tahun 1977 (**BPS**, ibid). Tetapi, peningkatkan ekspor pada periode tersebut sangat didominasi oleh sektor ekstraktif terutama minyak dan gas. Usaha-usaha membuat ekspor lebih terdiversifikasi mengalami hambatan akibat rejeki minyak yang meninabobokan. Ekonomi minyak tercipta ketika pangsa minyak dalam total ekspor Indonesia melonjak dari 35% di tahun 1968 menjadi lebih dari 67% di tahun 1977 (**BPS**, 1978).

Data BPS keluaran setelah tahun 1972 merupakan data yang cukup valid untuk menganalisa peta ekspor dan kinerja ekspor Indonesia di masa industrialisasi

bstitusi impor. Menggunakan kategori TC (*Standard International Trade Classification*) 5- struktur ekspor setelah tahun 1972 sangat kuat ominasi minyak sebesar 51% pada tahun 1972 enjadi 67% di tahun 1977. Tujuh macam hasil anian utama yaitu karet, kopi, minyak sawit, teh, a, tembakau dan kayu secara keseluruhan emberi kontribusi dalam total ekspor sebesar 30% da tahun 1972 dan menurun menjadi 26% di tahun 7. Sektor manufaktur ternyata hanya memberi ntribusi yang marjinal pada struktur ekspor Indo- esia, sedangkan kontribusinya dalam total GDP hkan melorot dari tingkat 2,4% di tahun 1975 enjadi lebih marjinal lagi pada tingkat 2,1% di tahun 6 (**Arsjad**, 1988:212).

ambaran struktur ekspor Indonesia tersebut enunjukkan bahwa 15 tahun pertama setelah Orde aru industrialisasi Indonesia mengandalkan unggulan komparatif *(comparative advantage)* di ktor primer dan tradisional yang berbasis mberdaya alam (*natural resouce intensive*). Kinerja ktor manufaktur sangat rendah, sebagaimana lihat pada sumbangannya terhadap pembentukan tput nasional maupun kontribusinya terhadap to- l ekspor. Rendahnya *performance* sektor anufaktur dan sektor industri terutama disebabkan eh meluasnya intervensi negara pada masa itu, lam bentuk proteksi atau perlindungan yang rlebihan kepada sektor industri dan manufaktur. rlindungan dan proteksi ini mengikuti "*infant in- ustry argument*" yang sangat populer dalam startegi dustrialisasi substitusi impor. Dalam pandangan ini, dustri-industri domestik yang baru saja dibangun anggap masih "bayi"/ *infant,* sehingga layak endapatkan perlindungan dari kerasnya persaingan ang disebabkan oleh serbuan barang-barang impor Gillis, 1992:442). Proteksi ini diperlukan karena odusen domestik memerlukan waktu yang cukup ma untuk bisa berproduksi pada skala ekonomis engan biaya produksi yang rendah sebagai syarat aju bersaing dalam arena kompetisi internasional. ebelum produk domestik benar-benar *contestable*, emerintah merasa perlu memproteksinya melalui embebanan hambatan tarif maupun non-tarif rhadap barang-barang impor saingannya. Campur ngan pemerintah melalui kebijakan perdagangan arnegeri yang protektif ini sampai permulaan ekade 80-an lebih banyak yang berbentuk hambatan rif nominal yang tinggi pada hampir semua omoditas impor.

Pada akhirnya, kebijakan proteksi ini membawa ampak yang negatif bagi perkembangan industri asional. Sektor industri dilanda "ekonomi biaya nggi" akibat produsen kesulitan mendatangkan put antara dan barang modal sehubungan dengan ngginya tingkat bea masuk. Kurangnya infrastruktur roduksi seperti listrik, air, telekomunikasi dan ansportasi serta minimalnya keahlian manajerial dan ntrepreneurship menyebabkan ongkos produksi elejit. Dengan adanya kebijakan pematokan nilai ukar (*stable exchange rate*) sampai dengan tahun 1978 dan tingginya tingkat inflasi membuat secara domestik barang-barang industri lokal menjadi kurang kompetitif tanpa adanya fasilitas proteksi.

Besarnya pengaruh sektor ekonomi yang dikuasai negara selama situasi ekonomi *oil boom* pada durasi tahun 1974-81 juga menjadi faktor utama mengapa sektor industri Indonesia tidak terdorong untuk menjadi lebih efisien. Inefisiensi ini meliputi sektor-sektor produksi berskala besar di bawah kendali perusahaan-perusahaan negara (BUMN). Sebagai raksasa ekonomi, BUMN merupakan pemain utama dalam pentas perekonomian Indonesia, mengingat kontribusi BUMN dalam nilai tambah pada tahun 1974/75 mencapai setengah dari seluruh nilai tambah sektor industri dan 25% output sektor industri berasal dari perusahaan besar dan sedang milik negara. Pada paruh pertama dekade 70-an, perusahaan negara mengabsorbsi 20% dari seluruh tenaga kerja sektor industri. Besarnya keterlibatan sektor negara bertambah lagi karena sangat luasnya bidang-bidang produksi yang dicakup, termasuk dalam pertambangan, pupuk, kertas dan baja. Namun peranan yang sangat besar (dan sangat "birokratis") tersebut tidak diikuti dengan kinerja yang produktif dan efisien, bahkan pemborosan yang besar-besaran banyak berasal dari sektor ini (**Mc Cawley**,1990:96). Sektor negara ini sangat menggantungkan aliran dana yang berasal dari devisa minyak untuk menggerakkan roda ekonominya yang sangat besar tetapi lamban.

"PADA AKHIRNYA, KEBIJAKAN PROTEKSI INI MEMBAWA DAMPAK YANG NEGATIF BAGI PERKEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL. SEKTOR INDUSTRI DILANDA "EKONOMI BIAYA TINGGI" AKIBAT PRODUSEN KESULITAN MENDATANGKAN INPUT ANTARA DAN BARANG MODAL SEHUBUNGAN DENGAN TINGGINYA TINGKAT BEA MASUK."

Industrialisasi Promosi Ekspor

Devisa minyak ternyata tidak abadi mengalir ke Indonesia, walaupun Indonesia sempat menikmati saat-saat harga minyak membumbung tinggi, dari US$6 per barrel di tahun 1973 mencapai puncaknya US$35 per barrel di tahun 1981. Akibat membengkaknya suplai minyak di pasaran dunia dan kontraksi pemakaian energi di negara-negara maju membuat berakhirnya masa-masa keemasan dan kejayaan ekonomi minyak Indonesia ketika harga minyak dunia "terjun bebas" dalam waktu 5 tahun hingga menjadi US$10.25 per barrel di tahun 1986.

Tajamnya fluktuasi harga minyak di pasaran internasional tersebut mengubah perwajahan komposisi ekspor Indonesia secara drastis. Sumbangan minyak (dan gas alam) yang meliputi 82% dari nilai total ekspor di tahun di tahun 1981 turun secara dramatis menjadi 32% dari nilai total ekspor di tahun 1986 (**BPS**, 1994 :X dan **Soemitro**,

1991:115). Pemerintah dengan cepat merespon perubahan situasi tersebut dengan mengubah haluan orientasi perdagangan luar negerinya menjadi lebih "*export-drive*" terutama untuk mendorong ekspor komoditi non-migas. Adanya strategi perdagangan yang lebih melihat keluar *(outward looking trade strategy)* tersebut membawa konsekwensi perubahan strategi industrialisasi menjadi lebih mempromosikan ekspor *(export-promoting strategy)*. Antisipasi ini dipandang penting untuk mengurangi besarnya ketergantungan pembiayaan pembangunan atas penerimaan negara yang berbasis migas.

Perubahan paradigma kebijakan perdagangan dan industrialisasi ini secara resmi kemudian diikuti peluncuran paket-paket deregulasi semenjak tahun 1986, yang sebenarnya sudah diawali oleh kebijakan devaluasi rupiah terhadap dollar AS pada bulan Maret 1983 yang bertujuan memperkuat posisi *bargaining price* komoditas ekspor Indonesia. Berbagai macam beleid deregulasi tersebut sedianyanya ditujukan untuk merasionalisasi biaya produksi dan mengefisienkan sektor industri, dengan cara menghapus berbagai macam proteksi, membubarkan monopoli lisensi impor input antara, memangkas rantai birokrasi dan berbagai prosedur "*red-tape*" di pelabuhan serta mendorong basis-basis ekspor yang lebih terdiversifikasi dan kompetitif (**LPEM team**, 1990:II-76,77). Paket-paket deregulasi tersebut masih ditambah kebijakan membangun Entreport Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) atau zone produksi bebas bea masuk untuk input bagi produk-produk yang akan diekspor.

"ADANYA STRATEGI PERDAGANGAN YANG LEBIH MELIHAT KELUAR *(OUTWARD LOOKING TRADE STRATEGY)* TERSEBUT MEMBAWA KONSEKWENSI PERUBAHAN STRATEGI INDUSTRIALISASI MENJADI LEBIH MEMPROMOSIKAN EKSPOR *(EXPORT-PROMOTING STRATEGY)*."

Inkonsistensi dalam upaya memekarkan perkembangan sektor industri dengan deregulasi di sektor riil tampak dengan peluncuran instrumen tarif baru berupa bea masuk tambahan (BMT) yang memperkuat derajat proteksi industri infant. Struktur tarif baru yang diperkenalkan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. 915/KMK.05/1986 tersebut dibebankan bagi impor input antara terutama untuk industri manufaktur yang berakibat reduksi harga jual produk di pasar domestik tidak terjadi. Sampai sekarang, industri otomotif merupakan merupakan industri yang memperoleh proteksi berupa BMT. terbesar, kecuali industri "mobil nasional" yang baru-baru ini dengan Inpres No. 2/1996 memperoleh fasiliatas pembebasan tarif dan pajak barang mewah tanpa alasan yang "rasional" untuk impor komponen asingnya. Selain itu, mode proteksi berupa kebijakan non-tarif seperti lisensi impor yang hanya diberikan untuk BUMN sebelum tahun 80-an makin diperluas untuk kalangan swasta pada dekade 80-an. Mekanisme pengurangan tarif yang bersifat *product-by-product* , parsial dan cenderung diskriminatif, dimana sangat dimungkinkan seorang menteri mengeluarkan dua keputusan penyesuaian tarif terhadap dua kelompok komoditas hanya berselang satu hari (**Pradiptyo**, 1995:18). Deregulasi yang demikian terkesan tanpa arah yang jelas (zigzag), dan kadang-kadang merupakan respon mendadak akibat perubahan eksternal sehingga mengakibatkan kesulitan dalam penyusunan daftar tarif maupun menentukan kebijakan penyesuaian tarif yang komprehensif dan konsisten dari waktu ke waktu.

Walaupun beban non-tarif dan tarif kian berat karena penambahan instrumen BMT, selama industrialisasi promosi ekspor pertumbuhan sektor industri manufaktur tergolong tinggi. Selama periode 1981-92, sektor industri manufaktur non-migas tercatat mempunyai pertumbuhan GDP rata-rata 9,8%per tahun, sedikit di bawah pertumbuhan GDP migas yang rata-rata 10% pertahun. Industri-industri yang mempunyai pertumbuhan produksi yang relatif tinggi selama periode 1986-92 adalah industri barang-barang kulit (38%), barang-barang plastik (34,5%) serta barang-barang keramik dan porselen (23,5%). Meskipun ketiga macam produk industri tersebut diekspor namun nilainya masih relatif kecil.

Dari data BPS yang diolah oleh Goeltom (**Goeltom**, 1995:12), terlihat bahwa peta ekspor industri manufaktur mengalami perubahan yang menyolok selama durasi 1968-92 baik dalam pangsanya terhadap total ekspor maupun pertumbuhan ekspornya. Pangsa ekspor barang manufaktur yang pada permulaan industrialisasi promosi ekspor tahun 1986 hanya menyumbang 17,82% dari total ekspor Indonesia (termasuk ekspor migas) beranjak naik menyumbang 52,34% dari total ekspor Indonesia tahun 1994. Komposisi ekspor sektor manufaktur mengalami pergeseran dominasi dari komoditas yang berbasis sumber daya alam ke komoditas yang berbasis keunggulan komparatif tenaga kerja tak terampil *(unskilled labor intensive)*, diikuti dengan meningkatnya pangsa komoditas yang berbasis kapital fisik intensif *(physical capital intensive)* dan *human capital intensive* meskipun dua yang disebut terakhir masih relatif rendah kontribusinya dalam total ekspor.

Yang perlu dicermati dalam ekspor barang manufaktur Indonesia semenjak tahun 1986 adalah pertumbuhan ekspornya yang terus-menerus menurun. Dalam awal era 80-an tepatnya periode 1980-83, ekspor sektor manufaktur SITC 5, 6 (kecuali 68), 7, 8 dan 9 tumbuh sebesar 45,66% sedangkan selama periode 1986-90 dan periode 1990-92 pertumbuhannya turun menjadi 36,17% dan 33,02%. Hal ini adalah indikasi bahwa kekuatan ekspor manufaktur Indonesia mengalami penurunan atau terjadi pelemahan daya saing walaupun di satu sisi

telah terjadi restrukturisasi dalam komposisi ekspornya.

Evaluasi kinerja industrialisasi

Menjelang dan pada awal dekade 90-an, cerita tentang kesuksesan perekonomian Indonesia dalam meningkatkan ekspor komoditi non-tradisional dan meningkatnya GDP yang menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi 6,8% per tahun menjadi pendukung justifikasi industrialisasi ala Barat bahwa tidak ada satu negara pun yang mempunyai prestasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa melalui proses industrialisasi (**Kahn**, 1979:118). Citra ekonomi Indonesia yang *glamour* melengkapi bagian belakang cerita tentang kesuksesan negara-negara Asia Timur yang melakukan industrialisasi dalam pembangunan ekonominya. Bahkan Indonesia pada dekade 90-an dimasukkan dalam kategori *Newly Industrializing Economies* (negara dalam proses menjadi negara industri baru) (**Yeok**, 1994: 231) menyusul *Asian Newly Industrialized Economies* seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura.

Anggapan bahwa ekonomi Indonesia cukup *"reputable"* memang sedikit benar, paling tidak kalau indikator yang digunakan adalah indikator ekonomi "sempit" seperti peningkatan Produk Domestik Bruto (GDP) dan pendapatan per kapita (GNP per capita). World Bank sebagai sponsor utama dan penasehat setia reformasi ekonomi Indonesia pada tahun 1993 memberi "gelar" kepada Indonesia sebagai "*One of East Asian Miracle*" berdasarkan dua indikator ekonomi tersebut. Padahal, baik GDP maupun pendapatan per kapita sekarang ini oleh banyak ekonom dipandang tidak cukup valid karena tidak mengungkapkan output kotor yang dihasilkan oleh perekonomian asing dan kemudian "dilarikan" ke negara asal pemodal asing melalui mekanisme repatriasi keuntungan perusahaan-perusahaan transnasional (*Transnational Corporations*). Pendapatan per kapita yang tinggi juga tidak mengungkapkan kesenjangan distribusi pendapatan karena adanya konsentrasi produksi secara sektoral maupun regional.

Kinerja ekonomi Indonesia baru boleh dikata sedikit sukses dalam jalur industrialisasi karena telah terjadi peningkatan pangsa sektor manufaktor dalam total ekspor. Secara teknis-ekonomis, bila pangsa sektor manufaktur telah melebihi 25% dari total ekspor maka suatu negara dapat dikategorikan sebagai *Newly Industrializing Economies* atau industrialisasinya dianggap sukses (**Sugiono**, 1992 166). Berdasarkan data *Statistik Perdagangan Internasional - Ekspor BPS* (**BPS**,1994) indikator ini di tahun 1994 telah mencapai 52,34%, padahal pada tahun 1975 hanya sebesar 1,2% dan tahun 1986 baru 17,82%. Itu pun prestasi Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara-negara sekutunya di Asia Tenggara yang sama-sama memulai lomba industrialisasi pada dekade 60-an. Sebagai pembanding, Malaysia, pada tahun 1991 pangsa sektor manufaktur dalam total ekspornya sudah sebesar 53,6% sementara Thailand 63,4% (**Asian Development Bank** dalam **Hooley**, 1994:3). Prestasi ekspor manufaktur Indonesia pada tahun yang sama berada pada peringkat sejajar dengan Filipina yang selama dekade 80-an ke atas mempunyai tingkat instabilitas ekonomi dan politik yang cukup tinggi.

Neraca keberhasilan industrialisasi dapat dievaluasi dengan menggunakan indikator ekonomi lain yang dipandang lebih valid dalam mengungkapkan suatu proses reformasi struktural ekonomi, seperti, adanya peningkatan nilai tambah (*value added*), penyerapan tenaga kerja di sektor produktif, kemampuan menciptakan devisa dan transfer teknologi.

Pertama, dengan mengevaluasi nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor manufaktur, ternyata Indonesia belum berhak lolos dan menyandang predikat negara yang sukses dalam industrialisasi. Meskipun telah terjadi peningkatan nilai tambah dalam sektor manufaktur, secara relatif sangat marjinal, dari US$994 juta tahun 1970 menjadi US$27,854 juta tahun 1992 (**World Development Report**, 1995:172). Dengan nilai tambah sebesar itu, industrialisasi Indonesia masih kalah dengan negara-negara sub-sahara Afrika yang mempunyai rentang nilai tambah sektor manufaktur US$7,233-45,689 juta. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur, Indonesia tertinggal kereta industrialisasi jauh dibelakang karena nilai tambah minimal di Asia Timur adalah US$37,886 juta. Rendahnya nilai tambah sektor manufaktur di Indonesia tersebut merupakan efek gabungan dari rendahnya mutu sumberdaya manusia, rendahnya absorbsi teknologi dan pola produksi yang salah di sektor manufaktur. Produsen manufaktur lokal hanya bekerja sebagai "*tailor*" dari input antara yang di-*supply* perusahaan transnasional dan bekerja atas dasar "*job-order*" untuk menerima upah dari pemilik kapital di luar negeri (**Tarmidi**, 1994: 271).

"PROSES INDUSTRIALISASI SELAMA 40 TAHUN SETELAH BERAKHIRNYA REZIM SOEKARNO DIAM-DIAM MENYIMPAN SUMBER INSTABILITAS PEREKONOMIAN DAN KERAWANAN POLITIK YANG SANGAT GAWAT."

Kedua, peningkatan lapangan kerja produktif di sektor industri untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran yang merajalela belum menunjukkan hasil yang nyata. Sektor pertanian tetap menjadi gantungan hidup sebanyal 50% dari jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 1990, sedangkan sektor industri hanya mampu menyerap 17% dari total tenaga kerja. Secara teoritis, absorbsi sektor industri terhadap tenaga kerja berkaitan dengan strategi industrialisasi yang dipilih. Industrialisasi substitusi impor mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada teknologi impor sehingga berbias pada pemilihan jenis industri yang intensif kapital atau padat modal (**Tadjjuddin**, 1995:3, **Fahmi**, 1995:24).

Kemampuan industri padat modal pada penciptaan tenaga kerja umumnya relatif terbatas dibandingkan dengan industri yang berbasis keunggulan komparatif yang padat tenaga kerja. Dari sisi inilah sangat jelas mengapa belum terjadi suatu transformasi tenaga kerja secara struktural ke arah sektor industri. Selama titik balik (*turning point*) dalam pasar tenaga kerja belum tercapai, yaitu daya serap tenaga kerja di sektor industri melebihi sektor pertanian, maka Indonesia belum bisa dikategorikan sebagai negara industri.

Tabel 1 :
Rasio Konsentrasi Sembilan Subsektor Industri Manufaktur Indonesia
tahun 1985 dan 1991 (dalam persen)

Kode ISIC	Subsektor	1985	1991
31	Makanan, minuman, tembakau	59,1	61,5
32	Tekstil, pakaian jadi,	24,9	24,0
33	Produk kayu	13,4	15,9
34	Kertas	43,8	50,2
35	Kimia	46,4	44,6
36	Barang galian bukan logam	75,7	58,1
37	Logam dasar	82,0	71,8
38	Barang dari logam, mesin dan peralatan	49,7	57,4
39	Pengolahan lain	71,9	49,0
Rata-rata tertimbang		49,5	47,1

Sumber : BPS, backcast data dari **Iqbal, Farukh** (1995:17) dalam **Edy Suandi Hamid** (1995:8)

Ketiga, transfer teknologi dalam proses industrialisasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehubungan dengan tingginya derajat dan ketergantungan teknologi impor dalam industrialisasi yang padat modal, studi empiris menunjukkan bahwa daya dukung teknologi terhadap pertumbuhan sektor industri cenderung memprihatinkan. Studi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pada periode 1985-90 tidak ada satu sektor pun dalam perekonomian Indonesia yang tumbuh akibat peningkatan penggunaan teknologi (**Pradiptyo**, 1995 :10-11). Fenomena ini menggarisbawahi tendensi sistem produksi yang makin tidak efisien, ditunjukkan oleh efek perubahan teknologi yang negatif. Penggunaan teknologi dalam sektor industri di Indonesia ternyata tidak dibarengi dengan inovasi-inovasi teknologi maupun adaptasi teknologi yang diimpor, padahal kebanyakan teknologi impor ini di negara asalnya sudah termasuk *obsolete technology* alias teknologi yang ketinggalan jaman.

Keempat, industri di Indonesia belum bisa diandalkan sebagai penghasil devisa. Berdasarkan data dari BPS, industrialisasi Indonesia selama ini sangat tergantung pada input dan modal dari luar negeri. Bahkan setelah lima tahun pasca perombakan paradigma *inward looking*, karakter industri yang intensif impor yang merupakan ciri khas industrialisasi subsitusi impor masih tetap terasa. Ini terlihat dari porsi impor input antara dan barang modal yang mencapai 96% dari total impor Indonesia di tahun 1985, tahun 1990 dan tahun 1995. Kebocoran devisa dalam periode industrialisasi promosi ekspor yang intensif impor tersebut disebabkan oleh kondisi internal, yaitu lemahnya industri pendukung di dalam negeri dalam menyediakan kebutuhan industri yang berorientasi ekspor, juga kondisi eksternal berupa tingginya kualitas yang diminta oleh negara-negara maju yang membeli produk tersebut.

Integrasi ekonomi Indonesia dengan negara-negara Asia Timur pada dekade 80-an keatas ikut menentukan arah industrialisasi. Integrasi ini berbentuk kecenderungan transfer industri lintas negara dengan pola *flying geese* (formasi angsa terbang). Pola ini berupa transfer industri dari negara-negara Asia Timur yang sudah kehilangan keunggulan komparatifnya ke negara-negara Asia lain yang masih mempunyai keunggulan komparatif. Industri yang ditranfer biasanya adalah *footloose industry* yaitu industri yang sudah kehilangan keunggulan komparatif akibat kenaikan upah di negara asalnya atau terkena peraturan lingkungan yang ketat, misalnya industri tekstil dan *footwear*. Industri ini cenderung berdagang secara intraindustri atau *intrafirm*, yaitu negara tempat mengolah produk (*host country*) memperoleh supplai input dan barang modal dari industri di negara asal (*home country*), dan hasil dari produknya kemudian dijual ke negara lain atau negara asalnya. Meskipun orientasi ekspor industri-industri ini sangat besar, ketergantungan impor input asing sebagai konsekwensi pola perdagangan yang *intrafirm* atau intraindustri merupakan sumber pemborosan devisa yang sangat serius.

Selain itu, aktivitas sektor industri yang dibawah kendali investor asing melalui investasi asing langsung/*Foreign Direct Investment (FDI)* mengakibatkan tingginya *capital outflow* dalam bentuk repratriasi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan multinasional ke negara asal FDI tersebut. *Capital outflow* ini di Indonesia secara substansial merupakan beban yang sangat berat dalam neraca pembayaran selain pembayaran cicilan dan utang luar negeri. Penanaman modal asing (PMA) telah menyebabkan aliran kapital ke luarnegeri sebesar 48% dari GDP Indonesia periode 1988-93 dihitung pada harga konstan tahun 1990 (**Sritua Arief**, 1995:9). Dengan memakai data dari IMF, terlihat bahwa masuknya kapital ke dalam negeri (*capital inflow*) lewat mekanisme kerja PMA ke Indonesia sebesar US$5.8 milyar pada periode 1973-90 telah diikuti dengan transfer keuntungan PMA ke negara asalnya sebesar US$58.9 milyar. Dengan kata lain, Indonesia harus membayar sebesar US$10.19 untuk setiap US$1 yang ditanamkan investor asing. Hal tersebut merupakan gambaran yang sangat jelas bagaimana cara kerja investasi asing dalam mengeksploitasi sumberdaya Indonesia. (**Sritua Arief,** ibid:8).

Analisa struktur industri dan daya saing

Analisa struktur industri, terutama analisa struktur pasar sektor industri, merupakan salah satu aspek penting dalam melihat dan menilai perkembangan industrialisasi di Indonesia. Dengan analisa ini akan terlihat bahwa proses industrialisasi selama 40 tahun setelah berakhirnya rezim Soekarno diam-diam menyimpan sumber instabilitas perekonomian dan kerawanan politik yang sangat rawat. Bila industrialisasi adalah suatu ikhtiar mengeliminasi kesenjangan dan ketimpangan yang bersifat struktural dalam masyarakat, hasil yang sekarang kita hadapi justru makin menguatnya kecenderungan ke arah ketidakmerataan kepemilikan dan distribusi sumber-sumber daya ekonomi.

Problem penting dan krusial dalam sektor industri Indonesia saat ini adalah, salah satunya, tingginya derajat konsentrasi dalam struktur sektor industri. Struktur industri yang terkonsentrasi pada satu atau beberapa gelintir produsen membawa dampak ekonomis berupa menurunnya daya kompetisi akibat mekanisme hambatan masuk *(barrier to entry)* yang diterapkan oleh segelintir pemain dominan di dalam industri tersebut. Akibat menurunnya persaingan, dorongan untuk melakukan efisiensi produksi berkurang. Aspek efisiensi dan daya saing ini sangat perlu mendapat tekanan mengingat mau tidak mau dan siap tidak siap Indonesia telah memasuki era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang menekankan efisiensi ekonomi dan kekuatan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Gejala monopoli , oligopoli dan kartel dalam perekonomian Indonesia adalah indikasi adanya konsentrasi dalam struktur industri. Monopoli adalah struktur pasar industri yang hanya dikuasai oleh satu produsen, sedangkan oligopoli merupakan struktur industri yang didominasi oleh beberapa atau segelintir produsen. Pada umumnya, oligopoli adalah jenis perusahaan dan struktur industri yang sering dijumpai di dunia nyata (**Martin**, 1988:1). Namun di Indonesia fenomena ini menjadi sumber potensial yang menggerogoti kesehatan perekonomian nasional.

Tabel 2. Jenis-jenis Hambatan dalam Persaingan di Pasar Dalam Negeri

Jenis Hambatan	Sektor Industri
Kartel	Semen, Kaca, Plywood, Kertas
Kontrol Harga	Semen, Gula, Beras, Mobil
Kontrol Masuk / Keluar Pasar (*Barrier to entry / exit*)	Plywood dan Mobil
Lisensi Khusus	Pemasaran Cengkeh, Tepung Terigu
Perusahaan Negara	Baja, Pupuk

Sumber: **Iqbal, Farukh** (1995:14) dalam **Edy Suandi Hamid** (1995:9)

Dalam struktur industri yang oligopoli sangat terbuka kesempatan untuk membentuk kartel, yaitu integrasi baik secara horisontal maupun vertikal antar oligopolis untuk mengadakan konspirasi atau kesepakatan yang berkaitan dengan produksi, pembagian pasar, penetapan harga dan lainnya yang umumnya bertujuan untuk mencapai keuntungan maksimal berupa praktek-praktek *"joint profit maximization"*. Apabila dalam upaya maksimisasi keuntungan tersebut dilakukan dengan menghilangkan iklim kompetisi, maka yang terjadi adalah *welfare lost* atau hilangnya kesejahteraan konsumen dan produsen penyedia input karena terjadi distorsi harga. Di dalam kartel para oligopolis mempunyai daya negosiasi yang sangat kuat dalam sistem tata niaga, baik terhadap produsen input , konsumen akhir maupun pemerintah. Ingat kasus semen di Indonesia, kartel semen (Asosiasi Semen Indonesia) mempunyai *bargaining power* yang sangat kuat untuk menolak harga patokan setempat (HPS) yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya konsumen membeli semen dengan harga jauh tinggi

Tabel 3.
Rekapitulasi komoditas ekspor Indonesia yang mempunyai keunggulan komparatif (1989-1995)

DRC/SER	1989	%	1992	%	1994	%	1995	%
<1 (Layak)	47	18,73	34	13,55	40	15,94	47	18,73
>1 (Tidak Layak)	204	81,27	217	86,45	211	84,06	204	81,27
Total	**251**	**100**	**251**	**100**	**251**	**100**	**251**	**100**

Data diolah oleh Rimawan Pradiptyo(1995:50)

Keterangan : Analisa DRC/SER merupakan indikator kunggulan komparatif suatu produk di pasar internasional. Jika nilai (DRC/SER<1) maka produk tersebut dikembangkan atas dasar keunikan faktor *endowment* atau berdasarkan pada keunggulan komparatif, namun apabila nilai (DRC/SER>1) maka produk tersebut dikembangkan tanpa dasar keunggulan komparatif(**Batitista dan Tecson**, 1979),

DRC adalah *opportunity cost* pengorbanan sumber daya domestik untuk mendapatkan satu-satuan devisa (US$).

di atas biaya produksi semen, dan disisi lain ini merupakan bentuk subsidi tidak langsung konsumen kepada produsen semen. Rente ekonomi (*super normal profit*) yang diperoleh oligopolis yang melakukan konsolidasi di dalam kartel tersebut membawa implikasi para produsen oligopolis enggan melakukan efisiensi. Meski dampak negatif keberadaan kartel sudah terbukti, secara legal eksistensinya masih direstui pemerintah dalam bentuk berbagai macam asosiasi-asosiasi pengusaha yang notabene adalah kumpulan para pencari rente ekonomi.

Dalam area perekonomian yang lebih makro, kekuatan distortif yang dimiliki oligopolis tersebut bersifat destruktif (merusak) perekonomian. Studi empiris Arti Adji baru-baru ini membuktikan bahwa ada korelasi positif antara tingginya konsentrasi industri dengan tingginya laju inflasi, dengan kata lain kekuatan distortif oligopolis mampu mempengaruhi laju inflasi di Indonesia. Pada tingkat konsentrasi oligopoli yang tinggi, yaitu kondisi dimana oligopolis lebih intensif menggelar kesepatan-kesepakatan antar mereka, dengan melalui mekanisme penyesuaian harga para oligopolis bisa mempercepat penyesuaian harga-harga ke atas alias akan lebih cepat terjadi kenaikan harga. Kesimpulannya, tingginya derajat konsentrasi dalam struktur industri atau struktur industri yang oligopolis cenderung memperhebat masalah inflasi di Indonesia (**Arti Adji**, 1995:1-2).

Hasil kalkulasi Dr. Nurimansyah Hasibuan menunjukkan bahwa derajat konsentrasi industri di Indonesia sudah sangat tinggi. Pada sektor industri manufaktur, konsentrasi industri yang oligopolistik di Indonesia saat ini sudah mencapai 72% dari total industri yang ada. Derajat konsentrasi industri tersebut meningkat sebab 8 tahun yang lalu masih 67% (**Hamid**,1995:6).

Menggunakan konvensi yang biasa dipakai oleh kebanyakan ekonom, derajat konsentrasi suatu industri dapat dihitung dan dianalisa dengan menggunakan *Concentration Ratio-4 (CR-4)*. Suatu industri dapat dikatakan memiliki struktur oligopoli manakala empat perusahaan terbesar dalam industri tersebut menguasai 40% dari total output (**World Bank**, 1994:9). Dengan kata lain, perbandingan antara output empat perusahaan terbesar dalam suatu industri terhadap output total industri tersebut lazim disebut rasio konsentrasi-4 atau CR-4. Makin besar nilai CR-4 makin besar kemungkinan terjadinya praktek-praktek jahat para oligopolis dalam industri yang bersangkutan.

Apabila CR-4 yang dijadikan acuan analisa, maka tujuh dari sembilan subsektor industri manufaktur di Indonesia (pada ISIC/*International Standard Industry Classification* 2 digit level), di tahun 1991, termasuk subsektor yang tinggi derajat konsentrasinya atau mempunyai struktur industri oligopoli. Bahkan lima dari industri oligopolis di subsektor manufaktur tersebut mempunyai CR-4 lebih dari 50%, yaitu industri makanan-minuman-tembakau (61.5%), industri kertas (50,2%), industri barang galian bukan logam (58,1%), industri logam dasar (71,8%) dan industri barang dari logam, mesin dan peralatannya (57,4%). Empat dari sembilan subsektor tersebut memperlihatkan kenaikan rasio CR-4 artinya malah semakin oligopolistis selama kurun waktu 1985-91. Rata-rata tertimbang CR-4 industri manufaktur Indonesia pada tahun 1985 adalah 49,5% sedangkan di tahun 1991 turun sedikit menjadi 47,1%. Dari sini terlihat bahwa deregulasi yang dilakukan sejak tahun 1983 hampir tidak menggoyahkan dominasi oligopolis di sektor industri manufaktur Indonesia.

Intrepetasi CR-4 diatas, menurut World Bank, harus disertai pemahaman bahwa sebagian besar industri di Indonesia bersifat konsentris pada beberapa pemilik atau mengumpul dibawah beberapa payung group bisnis tertentu. Dari segi ini nampak adanya pemilik perusahaan yang sama mendirikan beberapa perusahaan yang beroperasi pada subsektor industri yang sama, atau pemilik perusahaan yang sama mempunyai beberapa perusahaan di beberapa subsektor industri serta adanya gejala eksistensi kartel di suatu industri. Dengan mempertimbangkan kenyataan adanya fenomena konglomerasi di Indonesia berupa penguasaan 80% output nasional ditangan 300 konglomerat "jago kandang", maka angka CR-4 yang sesungguhnya bisa lebih besar daripada yang dihitung oleh Farukh Iqbal dari World

Tabel 4.
Rekapitulasi komoditas ekspor Indonesia yang mempunyai keunggulan kompetitif (1989-1995)

(1+ERP-SER/r)	1989	%	1992	%	1994	%	1995	%
< 0 (Layak)	42	16,73	33	13,15	38	15,14	47	18,73
>0 (Tak Layak)	209	83,27	218	86,85	213	84,86	204	81,27
Total	**251**	**100**	**251**	**100**	**251**	**100**	**251**	**100**

Data diolah oleh **Rimawan Pradiptyo**, 1995:49
Keterangan: ERP *(Effective Rate of Protection)* yang dibobot dengan SER (*Shadow Exchange Rate*/harga pasar devisa) merupakan alat analisis daya kompetisi suatu komoditas/industri. SER merupakan parameter untuk mengetahui sejauh mana nilai tukar resmi devisa ® mengalami penyimpangan dari *opportunity cost* dalam mata uang nasional, yang disebabkan oleh beban yang dikenakan pemerintah terhadap barang dan jasa impor (Clive **Gray**, 1992:128). Suatu industri memiliki daya saing apabila ERP lebih kecil daripada (SER-r)/r atau (1+ERP-SER/r)<0.

Bank.

Berkenaan dengan strategi industrialisasi menggenjot ekspor yang dijadikan acuan sejak tahun 1986, struktur industri yang konsentris ini sangat kontradiktif dengan strategi perdagangan *outward looking*. Sebab, derajat konsentrasi industri yang diukur dengan rasio konsentrasi mempunyai korelasi yang negatif dengan kemampuan ekspor. Industri yang mempunyai CR-4 rendah ada indikasi untuk berorientasi ekspor, sebaliknya industri yang CR-4 nya tinggi kecenderungan untuk *global oriented*nya rendah. Artinya, industri-industri dengan CR-4 tinggi tersebut tidak mampu bersaing dengan industri-industri luar negeri, mereka memanfaatkan *captive market* (pasar yang sudah ada) di dalam negeri dan tidak terdorong untuk melakukan ekspansi pasar ke manca negara. Untuk bertahan dari barang-barang investasi disektor swasta maupun pemerintah. Dibandingkan dengan negara pesaing utamanya, China, biaya investasi Indonesia lebih tinggi 70% untuk investasi dibidang pembangkit tenaga listrik, 65% lebih tinggi di bidang telekomunikasi dan 30% lebih tinggi dibidang jalan raya (**World Bank**, ibid:12-13). Tingginya biaya investasi di bidang infrastruktur tersebut seringkali ditransfer menjadi biaya produksi atau jasa yang tinggi.

Keunggulan kompetitif komoditas ekspor Indonesia telah dikaji melalui sebuah penelitian yang dikerjakan oleh Rimawan Pradiptyo (**Pradipyto**,1995:50). Hasilnya, rendahnya daya saing komoditas Indonesia merupakan derivasi dari pengembangan sektor industri yang tidak mempertimbangkan aspek *factor endowment* yang dimiliki. Ternyata selama ini sektor industri
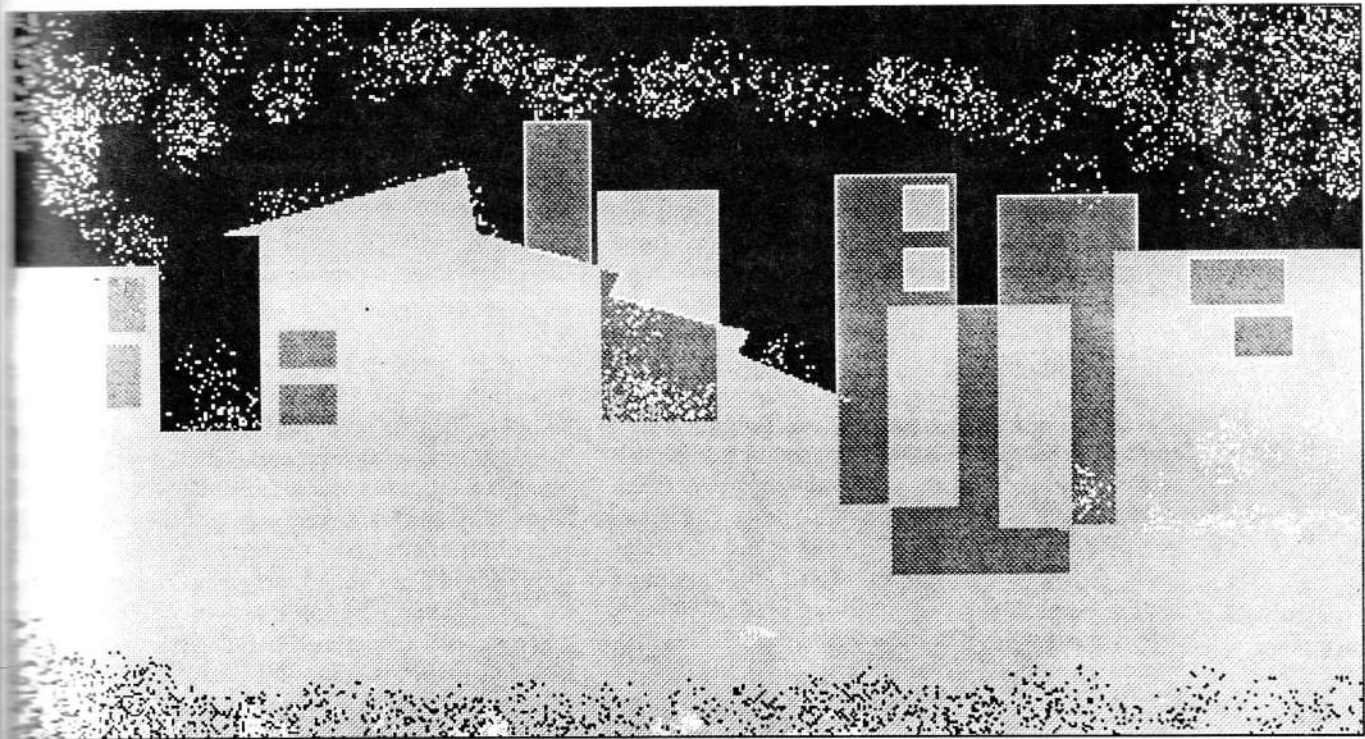
eKa KuRnIaWan

impor mereka selama ini memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah yang pada hakekatnya merupakan restriksi terhadap persaingan yang *fair* di pasar domestik.

Praktik perdagangan pemerintah yang tidak *compatible* dengan tujuan pengembangan sektor industri tersebut membuat daya saing produk industri manufaktur terpuruk bahkan tidak masuk rangking daya saing 41 negara. Dengan mengadakan komparasi harga 30 macam produk domestik terhadap produk internasional, ternyata harga domestik produk industri manufaktur Indonesia lebih mahal (*overprice*) sekitar 22% dari harga di tingkat internasional (**World Bank**, 1994:12). Daya saing Indonesia juga diperlemah oleh adanya inefisiensi dalam kegiatan investasi yang menyebabkan biaya investasi di Indonesia menjadi sangat mahal baik dikembangkan tidak mengacu pada faktor keunggulan komparatif sebagai salah satu elemen dasar daya saing. Ditemukan bahwa komoditas ekspor Indonesia yang mempunyai keunggulan komparatif pada tahun 1989 tercatat hanya 47 komoditas (18,73%) dari total 251 yang diperdagangkan. Pada tahun 1992 dan 1994 komoditas yang dikembangkan dan mempunyai keunggulan komparatif hanya 34 komoditas (13,55%) dan 40 komoditas (15,94%). Pada tahun 1995 hanya 47 komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif. Rendahnya daya dukung dan keterlibatan potensi sumberdaya domestik dalam industri selama ini merupakan gambaran dari dis-alokasi sumber-daya domestik dalam perekonomian nasional. Akibatnya, secara kuantitas jumlah komoditas yang mempunyai kelayakan bersaing *(competitive advantage)* menjadi

rendah. Menurut hasil penelitian ini, jumlah komoditas Indonesia yang mempunyai kelayakan bersaing hanyalah 42 komoditas (1989), 33 komoditas (1992), 38 komoditas (1994) dan 47 komoditas (1995) dari total 251 komoditas.

Kebijakan kompetisi dan arah pengembangan industri

Dominasi doktrin ekonomi yang sangat Keynesian yang mengkhawatirkan perekonomian akan kolaps tanpa campur tangan pemerintah terbukti membawa dampak yang sebaliknya di Indonesia. Banyak pihak sependapat kebijakan yang terlalu intervensionis yang dilakukan oleh pemerintah malahan membuat perekonomian "amburadul" dilihat dari sisi mendesaknya kesiapan negara ini berebut tempat di pasar dunia yang tanpa batas *(borderless market)*. Deregulasi yang terkesan "zigzag" tanpa *time table* dan perencanaan serta preferensi yang jelas, sampai dengan tahun 1996 ini dirasakan tidak efektif lagi. Deregulasi yang demikian terbukti tidak mampu membuat harga-harga menjadi semakin rendah dan ekspor juga tidak tumbuh sebagaimana yang diharapkan sebagai pengganti sektor minyak yang mulai tidak berdaya.

Proposal untuk meliberalisasi perdagangan, yang telah secara sadar (dan terpaksa) diratifikasi Indonesia dalam forum regional *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) maupun dalam GATT(*General Agreement on Tariff and Trade*), adalah salah kekuatan penekan untuk re-strukturisasi sektor industri di Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan kompetisi melalui liberalisasi perdagangan sebagaimana yang diusulkan oleh penganut fanatik doktrin Adam Smith, bukanlah satu-satunya kebijakan yang melengkapi strategi industrialisasi promosi ekspor Indonesia. Kebijakan kompetisi untuk membuat komoditas industri Indonesia lebih *contestable* menuntut diadakannya pembatasan-pembatasan terhadap praktek-praktek konsentrasi maupun dominasi dalam perekonomian seperti monopoli, oligopoli dan kartel. Mengingat ketidakseimbangan struktural dalam sektor industri sudah bersifat distortif dan makin destruktif terhadap perekonomian, maka **Undang-undang Anti Dominasi Ekonomi** merupakan suatu hal yang sangat mendesak saat ini (**Tim Sembilan SM-UGM**, 1995). Undang-undang ini akan menamatkan riwayat para industrialis pemburu rente ekonomi yang berlindung dibawah segala macam fasilitas proteksi dan subsidi, memperbaiki struktur perekonomian, menstabilkan harga-harga, meningkatkan efisiensi produksi dan memperbaiki distribusi pendapatan karena sumber daya ekonomi teralokasi secara ekonomis, serta menciptakan iklim persaingan sehat yang mendukung peningkatan daya saing produk baik dalam pasar domestik maupun global.

Wacana arah pengembangan sektor industri Indonesia akan dibawa kemana telah "berakhir" menjelang pergantian PJPT II kemarin dengan kemenangan kubu teknolog atas kubu ekonom. Dari sini mulai terjadi pergeseran dominasi paradigma industrialisasi yang berdasarkan keunggulan komparatif yang realisasinya belum optimal dalam PJPT I (*Widjojonomics*) ke industrialisasi berbasis IPTEK (*Habibienomics*). Hadirnya unsur teknologi dalam bentuk inovasi(pembaharuan) maupun invensi (penemuan) secara teoritis menurut penganut Schumpeterian, akan meningkatkan produktivitas ekonomi secara berkelanjutan dan menjadi semacam asuransi bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang (**Dean Yang & Adriana Abdeneur**, 1995:4). Faktor perubahan teknologi (*technological change*) merupakan variabel penting yang mampu mendongkrak tingkat output nasional dalam kondisi keterbatasan sumberdaya ekonomi (**Samuelson**, 1992:536).

Studi empiris Gustav Ranis baru-baru ini mengungkapkan kepesatan industrialisasi di dua negara macan Asia Korea Selatan dan Taiwan merupakan hasil dari industrialisasi yang berbasis *science* dan teknologi. Kebijakan pemerintah di negara tersebut pada tahun 1970an dan 1980an telah memutar haluan industrialisasi orientasi ekspornya ke era teknologi. Perhatian pemerintah Korea Selatan dan Taiwan semakin meningkat pada dekade-dekade tersebut dalam hal pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan *science* dan teknologi, serta perubahan-perubahan institusional dalam rangka memperluas aktivitas-aktivitas dibidang *research and development* (R&D) (**Ranis**, 1995:509 & 527).

Transfer pengalaman kedua negara tersebut ke indonesia merupakan suatu dilema. Di satu sisi teknologi menjadi solusi bagi rendahnya produktivitas di sektor industri di Indonesia dan peluang untuk menciptakan *value added* (nilai tambah) yang lebih besar, disisi lain faktor keunggulan komparatif seperti kemelimpahruahan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam belum termanfaatkan secara optimal. Kebijakan impor maupun pengembangan teknologi diarahkan pada pemilihan teknologi yang mempunyai arti ekonomis, yakni teknologi yang mampu meningkatkan *efisiensi teknis* industri berupa *komposisi optimal antara tenaga kerja dan kapital* dalam suatu proses produksi. Perlu digaris bawahi bahwa industrialisasi yang teknologi intensif tidak sama dan sebangun pengertiannya dengan industrialisasi yang intensif modal. Padat teknologi tidak berarti padat modal.

Dengan demikian kebijakan industri yang bermuatan paradigma teknologi bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri namun harus berpijak pada realita yang ada. Bukan mustahil penggunaan perspektif keunggulan komparatif dan intensif teknologi dalam kebijakan sektor industri secara bersama-sama akan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor Indonesia. Kombinasi keunggulan komparatif dan teknologi yang *embodied* dalam proses produksi, pada teori perdagangan internasional yang baru sebagaimana yang dirumuskan oleh Michael E. Porter (**Porter**,1990:20), merupakan dua dari empat variabel penting penentu

...unggulan kompetitif suatu negara (*competitive ad-...ntage of nations*) selain ketersediaan infrastruktur ...ng memadai dan pengembangan pasar. ...simpulannya, penambahan unsur teknologi akan ...njamin keunggulan komparatif yang dinamis se...ai dengan tuntutan milenium perdagangan bebas ...g akan datang.*

...AFTAR PUSTAKA

... Arti D.,1995, **Industrial Concentration and Price ...stment, Indonesia Case Study**, paper dipresentasikan ... *Seminar Internasional Lustrum ke - 8 Fakultas Ekonomi* ... pp.1, 2

...ar, M. Arsjad, 1980, **Trade Strategies and Industrial ...elopment in Indonesia**, dalam Ross Garnaut (ed.), ...*in a Changing Pacific and World Economy*, pp. ... Australia National University Press.

...f Sritua, 1985, **Relocation of Foreign Industrial ... in Indonesia : Economic Implication**, paper pre-... at *Regional Conference on Economic, Social and Eco-... Implication of Industrial Relocation*, CIDES-Kophalindo, ...

——, 1974, *Statistical Pocketbook of Indonesia 1972/73*, ...sat Statistik, Jakarta.

—— 1977, *Tabel-tabel Pokok Pendapatan Nasional 1971-...* ... Pusat Statistik, Jakarta,

—— 1994, *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia* ... Jilid/Volume I, Biro Pusat Statistik, Jakarta, pp..X

...ev, Peter Mc, 1990, **Pertumbuhan Sektor Industri** ... Anne Booth dan Peter Mc Cawley (ed.), *Ekonomi Orde ...* pp 82-83,LP3ES, Jakarta.

...adikusumo, Sumitro, 1991, *Perdagangan dan Industri ... Pembangunan*, LP3ES,,Jakarta.

... Tadjuddin Noer,1995, **Pembangunan, Pasar Kerja ... Migrasi Internasional Pekerja**, paper on *World Devel-... Report Seminar*, World Bank -PAU Studi Ekonomi-... UGM, pp.3

...i, Ahmad Zaki,1995, **Perubahan Struktur ...agakerjaan Menurut Sektor Produksi dan Mobilitas ...aan di Indonesia**, *Mini Economica* No.23, Juli - ... 1995, pp.24

... M., D. Perkins, M. Roemer and D. Snodgrass, 1992, ...*cs of Development*, WW Norton and Company,New ...

...eltom, Miranda, 1996,**Kinerja Perdagangan ...asional Indonesia, 1980-1995**, Jurnal *Kelola* Vol.11/ ... MM-UGM, pp.12

... Edy Suandi, 1996,**Perubahan Struktur Ekonomi, ... Upah dan Produktivitas Industri Manufaktur di Indonesia**, paper dipresentasikan dalam *Seminar Internasional Lustrum ke-8 Fakultas Ekonomi UGM*, pp.6-7

Hooley, Richard, 1996, **How Traditional are Non-Traditional Exports? A case Study of Selected Southeast Asian Countries**, paper presented at the *Second Conference on "APEC: NAFTA/ASEAN/SAARC"*, pp.3

Kahn, H., 1979, *World Economic Development*, Westview Press, Boulder.

LPEM Team FE-UI,1990, **Concept of Adjustment and Restructuring of the Economy and Industrialization**, paper peresented at the *Senior Policy Roundtable on Industrial Restructuring in Indonesia*, pp.76, 77

Porter, Michael E.,1990, **The Competitive Advantage of Nations**, The Free Press.

Pradiptyo, Rimawan,1995, **Analisis Dampak Kebijakan Perdagangan dan Industri Terhadap Struktur dan Kinerja Sektor Industri Indonesia 1980-1994**, paper dipresentasikan dalam *Seminar Internasional Lustrum ke-8 Fakultas Ekonomi UGM*, pp.10, 11

Pradiptyo, Rimawan,1996, **Dampak Kebijakan Sektor Riil terhadap Struktur dan Kinerja sektor Industri Indionesia,1980-1994**, *Jurnal Kelola* No.11/VI/1996, MM-UGM, pp.49, 95

Ranis, Gustav,1995, **Another Look at the East Asian Miracle**, *The World Bank Economic Review* No.3 Vol.9, September , pp.509, 527

Samulson, Paul A. & William D. Nordhaus, 1992, **Economics**, Fourteenth Ed., Mc Graw-Hill International Edition,

Sugiono, Muhadi, 1992,**Perdagangan Luar Negeri Indonesia dan Perubahan Ekonomi Global**, *Prospektif* No.2-3, Vol.4, PPSK,pp.170

Tarmidi, Lepi T.,1992, **The Impact of Industry Relocation from Northeast Asian Countries on Indonesia's External Trade and Industrialization**, *Asian Economic Journal* Vol.8, No.31, pp.271

Tim Sembilan Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada,1995, **Undang-undang Anti Dominasi Ekonomi**, draft akademik untuk audensi dengan DPR-RI, tidak dipublikasikan,

______,1995,**Workers in an Integrating World**, *World Development Report 1995*, World Bank, Oxford University Press, pp.172

______, 1994, *Indonesia Competition Policy: Industrial Competitiveness and Effects of Deregulation*, World Bank Industry and Energy Division, White Cover, pp.9, 12, 13

Yang, Dean & Adriana Abdeneur, 1995, **Trade Policy and Development**, paper at the *International Student Conference 1995 on Changing the Miracle: Challenges Facing Asian Development*, Harvard University, pp.4

Yeok, Tan Lin, 1994,**International Capital Flow and East Asian Dynamism**, *Asian Economic Journal* Vol.8 No.2, pp.231***

Restrukturisasi Ekonomi Indonesia Menghadapi Era Pasar Bebas : Konteks Dan Relevansinya

ERA PASAR DAN PERDAGANGAN BEBAS MENSYARATKAN ADANYA TINGKAT EFISIENSI INDUSTRI DI INDONESIA. STRUKTUR EKONOMI INDONESIA SAAT INI MENGIDAP PENYAKIT YANG "AKUT". PENYAKIT TERSEBUT DIANTARANYA PASAR YANG TERUTUP, MONOPOLI, OLIGOPOLI, PRAKTEK KARTEL, INTEGRASI VERTIKAL, INTEGRASI HORISONTAL DAN SEBAGAINYA. STRUKTUR INDUSTRI DAN EKONOMI INDONESIA ITU PERLU REFORMASI SEHINGGA MENCAPAI TARAF KEUNGGULAN KOMPARATIF MAUPUN KEUNGGULAN KOMPETITIF. INDUSTRI HULU SECARA BERTAHAP PERLU DIHAPUS PROTEKSINYA AGAR SECARA PERLAHAN BISA BERKOMPETISI . INDUSTRI PERLU DIARAHKAN UNTUK BIDANG-BIDANG MEMPUNYAI KEUNGGULAN KOMPARATIF TINGGI SEHINGGA TIDAK PERLU MEMINTA JAMINAN PROTEKSI TINGGI DARI PEMERINTAH.

I. Strategi Besar Pembangunan Nasional

Pada awal pembangunan orde baru, pemegang kendali kekuasaan negeri kita ini mempunyai obsesi yang begitu besar untuk menata secara struktural dan sistemik sistem ekonomi Indonesia yang pada periode sebelumnya porak-poranda.dasar legitimsinya adalah kondisi ekonomi di masa sebelumnya yang mengalami masa-masa *chaos*. Pada periode ini keadaan ekonomi benar-benar berada dalam kondisi kolaps; angka inflasi mencapai sekitar 600% pertahun, utang luar negeri macet hingga $2 miliar, kegiatan investasi lumpuh, dan bahaya kelaparan merajalela di mana-mana.

A.Prasetyantoko, Mahasiswa Semester VIII FE-UGM,anggota Bidang Penalaran Badan Eksekutif Mahasiswa FE-UGM, Steering Committee Seminar Nasional FE-UGM 1996/1997 nggota sebuah kelompok studi, dan aktif menulis di berbagai media massa

Situasi seperti ini, disebut menjadi dampak dari keadaan elit politik yang terlalu terpesona oleh persoalan-persoalan politik yang sama sekali tidak riil bagi kebutuhan rakyat banyak. Untuk itu, ketika rezim orde baru mulai naik ke panggung pentas politik sebagai pemegang tampuk kekuasaan yang baru (menggantikan rezim orde lama), logika ekonomilah yang diagungkan menjadi satu-satunya sarana untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari situasi keterpurukan.
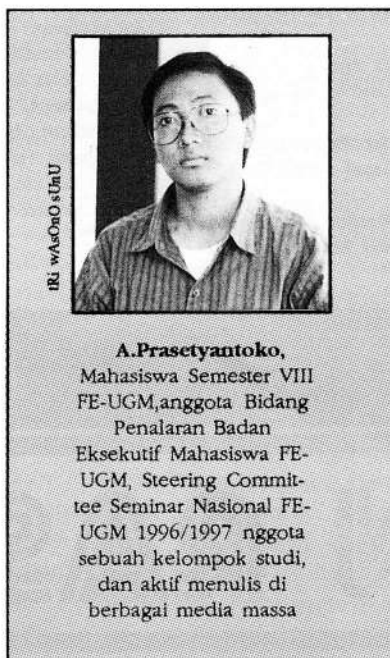
Segala daya upaya dan aktivitas negara selalu disatukan dalam referensi ekonomis dengan mengadakan serangkaian pemotongan aktivitas di bidang lain yang dianggap kontraproduktif terhadap usaha pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, aktivitas politiklah yang akhirnya dikebiri habis-habisan dengan menggunakan dasar legitimasi pembangunan ekonomi. Dengan demikian masuklah dinamika negeri kita ini ke dalam suatu masa yang lalu dikenal dengan sebutan 'Ekonomi sebagai panglima'.

Secara riil usaha awal yang dilakukan oleh

...gang kekuasaan adalah dengan membenahi ... banyak infrastruktur yang memang pada ... itu sangat buruk. Setelah pembangunan ...ruktur, upaya pembangunan ekonomi ...kan untuk membenahi struktur produksi ... Program-program yang dikembangkan ... memacu sektor-sektor ekonomi produktif ... memiliki kontribusi langsung terhadap produksi ... secara keseluruhan.

... utama dari tahap pembangunan yang mulai ...ki tahap pendalaman ini adalah pemberian ... terhadap sektor-sektor usaha yang memiliki ... tambah *(value added)* yang tinggi terhadap ... Nasional Bruto (PDB).

... konteks ini, kebijakan pemerintah yang ...uh adalah dengan mengembangkan sektor ... terutama industri manufaktur. Proses ...lisasi dipandang sebagai pola kebijakan yang ... daya guna paling besar untuk meningkatkan ...tivitas nasional. Karena memang secara ... sektor industri (apalagi yang padat modal) ... meningkatkan pendapatan nasional dalam ... waktu yang relatif cepat *(quick yield)*.

... serta pemerintah dalam usaha memotivasi ...bangan sektor industri dilakukan dengan ...arkan peraturan-peraturan bahkan undang-... yang sangat menguntungkan sektor industri. ...-sampai pemerintah tak segan-segan ...arkan paket-paket bantuan modal yang ...kan secara langsung kepada para pengusaha ... di bidang industri.

... satu bentuk kebijakan yang akhirnya menjadi ...um perkembangan sektor industri di Indo-... ...ah pemberian proteksi secara besar-besaran ... kebijakan industri pengganti impor *(import ...n industry/ISI)*. Maksud dari kebijakan ini ... memberikan kesempatan pada pengusaha ... industri domestik untuk mengembangkan ... tanpa harus menghadapi persaingan ... produsen asing. Kebijakan ini jelas-jelas ...kan niat pemerintah untuk menitikberatkan ...gunan industri domestik dengan ...nginya supaya mampu bertahan hidup ... industri yang masih bayi *(infant industry ...)*.

... bentuk-bentuk perlindungan yang ...an dan pemberian fasilitas yang sangat ...tungkan pengusaha menyebabkan ...angan di sektor industri terjadi dengan ... drastis. Tercatat bahwa mulai tahun 1970, ... industri terus mengalami percepatan ...angan dari tahun ke tahun.

...rasi pertumbuhan sektor industri telah jauh ...kan pertumbuhan sektor pertanian yang ... waktu ke waktu nampak cenderung ...kan kinerja yang tidak berkembang, bila ... dengan perkembangan di sektor industri.

...kan untuk mengembangkan sektor industri ...esia mendapatkan dukungan dana yang ... ruah pada waktu itu akibat adanya oil ... dan 1980). Kedua memontum ini benar-benar mampu menghantarkan bangsa Indonesia kepada suatu ritme pembangunan industri yang masuk dalam jalur cepat *(fast track)*.

Kebijakan industrialisasi yang dibiayai dari rezeki nomplok tersebut membuat Indonesia dikenal sebagai salah satu negera sedang berkembang yang perkembangan ekonominya paling dinamis *(The East Asian Miracle, 1992)*.

II. Pola Kebijakan Ekonomi dan Pola Kepentingan Bisnis

Bila diamati secara seksama, sudah sejak awal masa pembangunan orde baru ini kebijakan pemerintah kita dalam bidang ekonomi beserta implementasinya menunjukkan gejala yang tidak konsisten, bahkan tidak jarang saling bertentangan (Vetikiotis, 1993). Maka dalam terminologi perekonomian Indonesia yang terjadi tidak hanya kesenjangan antardaerah, antarkelompok namun juga antarkebijakan.

Ada Kesan yang cukup kental bahwa kebijakan pemerintah lebih condong kepada kepentingan golongan kelas atas yang bermodal. Mereka mempunyai akses terhadap pusat kekuasaan untuk kemudian mendapatkan fasilitas bisnis yang sangat menguntungkan kepentingan bisnis pribadinya. Menurut Yahya Muhaimin (1992), perusahaan-perusahaan besar di Indonesia muncul sebagai "perusahaan klien" yang tumbuh berkat koneksi politik, konsesi, subsidi dan proteksi pemerintah.

Pada waktu obsesi industrialisasi diterapkan, pembengkakan konsentrasi modal dengan memunculkan struktur industri yang cenderung monopolis (oligopolis) menjadi warna tersendiri dalam struktur perekonomian kita. Kelompok pengusaha oligopolis ini mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah. Dalam melakukan bisnisnya mereka selalu berpatron pada negara dengan mengandalkan koneksi dan fasilitas yang disediakan demi kepentingan bisnisnya.

> **"AKSELERASI PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI TELAH JAUH MENINGGALKAN PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN YANG DARI WAKTU KE WAKTU NAMPAK CENDERUNG MENUNJUKKAN KINERJA YANG TIDAK BERKEMBANG, BILA DIBANDING DENGAN PERKEMBANGAN DI SEKTOR INDUSTRI."**

Menurut survey yang dilakukan oleh Andrew MacIntyre yang kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul *"Business and Politics in Indonesia"*, ada banyak sektor ekonomi di Indonesia yang dikuasai oleh sekelompok pengusaha tertentu yang memiliki akses kepada negara dan memiliki kekuatan untuk ikut mengatur mekanisme kebijakan di sektor tersebut. Sampel yang digunakannya adalah sektor tektile, industri farmasi dan bisnis perasuransian (MacIntyre, 1990). Di ketika sektor ini, berbagai fenomena distorsi ekonomi

©Ka KuRaIaWan

nampak begitu kental.

Pada periode tahun 1983-1993, terjadi serangkaian kebijakan deregulasi dengan tujuan untuk mengurangi tingkat regulasi di berbagai sektor ekonomi agar tercipta daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Mulai tahun 1983 pemerintah banyak mengeluarkan paket-paket deregulasi di bidang perdagangan dan investasi.

Dalam perkembangannya, kebijakan deregulasi tidak memberi banyak keuntungan kepada perusahaan kecil dan menengah, bahkan justru lebih menguntungkan perusahaan besar dan konglomerat (Abimanyu, 1994). Dari data mengenai pola pertumbuhan *(graduation)* perusahaan dilihat dari jumlah perusahaan dan nilai tambahnya selama tahun 1985-1992, terlihat bahwa tingkat graduation untuk perusahaan kecil relatif rendah (9,31%) bila dibandingkan dengan perusahan menengah (12,3%) dan perusahaan besar (28,68%).

Kenyataan ini sangat ironis mengingat seharusnya intervensi kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau mengangkat posisi kelompok ekonomi lemah yang tidak mampu bersaing di pasaran. Namun yang terjadi justru memperkokoh struktur ekonomi yang tetap saja memantapkan kedudukan kelompok yang telah kuat atau mapan.

Bentuk hubungan antara penguasa dan pengusaha adalah berpola *patron-client* yang cenderung terjadi di semua sektor dan menjadi gejala umum dalam pelaksanaan pembangunan. Faktor ekonomi-politik yang cukup memiliki kerentanan ini menjadi salah satu problem yang pada akhirnya akan menghambat efisiensi ekonomi kita.

Dominasi pengusaha-pengusaha konsentris yang tingkat penguasaan pasarnya cukup tinggi ini bagaimanapun juga menjadi distorsi terhadap proses alokasi sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal yang paling mencolok terlihat dalam alokasi permodalan dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat.

Menurut data tentang pemberian kredit bank pemerintah terlihat bahwa pengusaha besar jauh lebih mendapatkan prioritas daripada pengusaha kecil. Sebesar 68,8% fasilitas kredit disalurkan kepada pengusaha besar, yang *notabene* hanya sebagaian kecil saja dari keseluruhan pengusaha yang ada.

Kelompok pengusaha besar yang mendapatkan banyak fasilitas dari pemerintah menjadi kekuatan bisnis yang begitu kuat dan membentuk jaringan konglomerasi yang mampu menguasai sebagian besar pangsa pasar domestik.

Kekuatan kelompok pengusaha besar ini telah mampu menempatkan dirinya pada posisi yang strategis dan tidak lagi tergoyahkan. Kekuatan yang begitu dominan dari kelompok pengusaha yang menduduki jalur produksi dalam sistem pasar mengakibatkan mekanisme pasar tidak lagi mampu berjalan dengan baik.

III. Upaya Mempersiapkan Diri Memasuki Persaingan Global

Kondisi persaingan yang maha dasyat tentu akan terjadi di wilayah perekonomian global nanti. Kesiapan perekonomian kita untuk memasuki wilayah tersebut, menjadi kunci masa depan bangsa. Daya saing tentu saja menjadi hal pokok yang dituntut dari sistem persaingan bebas. Hanya sektor ekonomi yang benar-benar efisien saja yang akan mampu bertahan.

Dalam suasana dimana semua pihak telah mulai menyiapkan diri untuk memasuki pasar bebas, perekonomian kita masih begitu pekat diselubungi oleh kabut kepentingan. Menengok perkembangan terakhir masih saja muncul kebijakan pemerintah yang menyimpan segumpal kejanggalan. Ketika keluar Inpres No.2/1996 mengenai produksi mobil nasional, dalam waktu yang bersamaan muncul PT Timor yang menawarkan kontrak pembuatan mobil tersebut, dan akhirnya mendapat lisensi tunggal.

Bagaimanapun fenomena ini menyiratkan adanya ruang gelap tertentu yang tidak terjangkau oleh kaca mata ekonomi, sementara perspektif politik menjadi wilayah yang diharamkan untuk dijelajah. Telah terjadi konspirasi bisnis yang semakin merajalela

menghantui nasib masa depan bangsa kita.

Telah sejak dekade 80-an instrumen kebijakan pemerintah diarahkan untuk menderegulasi sektor-sektor ekonomi agar lebih efisien, namun sampai sekarang tidak nampak adanya perbaikan yang sungguh-sungguh (esensial). Kebijakan ekonomi dan instrumen deregulasi hanya mampu merambah permukaan luarnya saja, tanpa pernah menyentuh inti persoalan patologi ekonomi. Konspirasi yang terjalin antara para pengusaha dan penguasa telah menimbulkan imperium kerajaan bisnis swasta yang mampu membuat mekanisme tersendiri di pasar. Kebijakan pemerintah pun tidak lagi mampu menembus jaringan tersebut, kerena di satu sisi mereka mendapatkan jaminan tertentu dari si pembuat kebijakan itu sendiri.

Saat pemerintah mengeluarkan paket-paket deregulasi, pihak pengusaha mampu melakukan re-regulasi dengan mengadakan pendekatan-pendekatan lobi kepada birokrasi, atau kalau tidak mereka mampu menjalin kerjasama dalam bentuk kartel-kartel industri yang mampu memainkan kepentingannya.

Langkah-langkah untuk mempersiapkan diri dalam memasuki perekonomian global dilakukan dengan lebih diarahkan kepada usaha untuk memecah pemusatan modal dan membongkar konfigurasi monopoli, oligopoli beserta sistem-sistem kartel yang selama ini tumbuh subur.

Kesulitan terbesar untuk menanggulan penyakit ekonomi yang merajalela ini adalah tidak adanya sistem kontrol dari negara yang memang mempunyai hak untuk mengintervensi mekanisme pasar demi peningkatan efisiensi. Kebalikanlah yang justru terjadi, di mana birokrasi ikut bermain sebagai aktor yang memperkokoh posisi monopolistis-oligopolistis.

Pendekatan ekonomis saja tidak akan memenuhi harapan, karena selalu tidak memberikan *problem solving* yang berarti. Setiap perbaikan setapak yang berhasil dilakukan oleh kebijakan ekonomi selalu diiringi dengan gerakan mundur akibat penyimpangan-penyimpangan yang lebih besar. Akibatnya, kebijakan ekonomi hanya menimbulkan putaran memutar dengan hanya merambat maju sedikit saja.

Tanpa mengurangi penghargaan prestasi pembangunan yang begitu mengagumkan, dalam hal-hal tertentu sedang terjadi involusi yang merisaukan. Sebagai sebuah bangsa yang menjaga mementum pembangunan dengan biaya yang sangat mahal, gejala kemunduran ini menjadi hal yang cukup menghantui masa depan bangsa, terutama di saat-saat menjelang memasuki arena pasar global seperti sekarang ini.

Untuk mengantisipasi semakin mundurnya beberapa hal pokok di bidang perekonomian kita, seharusnya usaha yang dilakukan tidak terbatas pada bidang ekonomi saja, melainkan juga usaha-usaha politik.

Seperti diuraikan dalam hasil survey yang dilakukan oleh Andrew MacIntyre, sejak pertengahan 1980-an dominasi negara untuk mempengaruhi dinamika kehidupan masyakat mulai mengendur. Kekuatan militer yang pada awal masa pembangunan banyak digunakan untuk menahan gejolak masyarakat agar momentum pembangunan tetap berjalan, dalam perkembangannya semakin tidak efektif untuk digunakan lagi. Peran pemerintah dalam ekonomi pasar semakin tereduksi dengan tampilnya pihak swasta yang mulai menguat di awal tahun 1980-an.

Mengendornya kekuatan hegemoni negara dalam tatanan sosial ekonomi masyarakat memberi peluang bagi kristalisasi kekuatan rakyat. Dalam relasi negara dan masyarakat *(society)* titik tolak perhatiannya adalah pada tarik menarik kekuatan antarkeduanya. Jika dominasi negara melemah, berarti massa rakyat memiliki potensi untuk menguat.

Menguatnya kekuatan rakyat, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, bisa menjadi alat untuk melakukan interaksi yang lebih berimbang terhadap negara. Isu demokratisasi dan keterbukaanpun bisa dijadikan dasar tuntutan kepada negara dalam melakukan kehidupan bernegara. Gelombang demonstrasi menyangkut permasalahan Departemen Perhubungan menjadi salah satu tanda bahwa tuntutan akan keterbukaan semakin menjadi kebutuhan masyarakat.

"KESULITAN TERBESAR UNTUK MENANGGULANGI PENYAKIT EKONOMI YANG MERAJALELA INI ADALAH TIDAK ADANYA SISTEM KONTROL DARI NEGARA YANG MEMANG MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGINTERVENSI MEKANISME PASAR DEMI PENINGKATAN EFISIENSI."

IV. Pembenahan Struktur Industri

Di samping usaha politik yang terus menerus dilakukan, pembenahan di dalam struktur ekonomi sendiri menjadi hal pokok lain yang juga tidak kalah peliknya. Persoalan ketimpangan antara sektor industri dan pertanian menjadi persoalan klasik yang rentetan permasalahannya jauh ke belakang.

Untuk membenahi ketimpangan struktur ekonomi yang dualis ini, kebijakan yang harus diambil adalah mengkoreksi strategi besar pembangunan nasional. Belajar dari negara Taiwan yang juga sangat terobsesi dengan sektor industri perlu ada prasyarat-prasyarat kebijakan tertentu yang harus diambil.

Taiwan termasuk salah satu negara yang berhasil mengatasi masa transisi menuju negara industrialis. Empat strategi yang dijalankan oleh Taiwan adalah :

1. Mengkondisikan agar transfer surplus modal dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dapat berjalan dengan baik.

2.Industri yang dikembangkan adalah yang padat karya yang dan berorientasi pada ekspor.

3. Lokasi industri tidak mendorong terjadinya urbanisasi.

4. Dilakukan *land reform* agar pertanian bisa lebih berkembang dengan baik.

Kalau dicermati lebih dalam, situasi yang bertolak belakang justru terjadi di Indonesia dimana transfer sumber daya ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri tidak terjadi dengan baik. Industrialisasi yang dikembangkan bukan yang padat karya melainkan padat modal. Sehingga, banyak tenaga kerja dari sektor pertanian yang tidak tertampung di sektor industi (menganggur) atau masuk ke dunia industri dan mensubsidi sektor tersebut dengan gaji yang sangat murah.

Kecenderungan untuk mengembangkan industri yang padat modal terus berkembang sampai sekarang dengan terus berobsesi untuk menggunakan teknologi tinggi. Logika yang digunakan adalah ingin mengejar ketinggalan terhadap negara lain dengan cara transfer teknologi tinggi.

Logika ini sama sekali keliru karena sebagaian masyarakat Indonesia sedang berada pada problem bagaimana bisa bertahan hidup, mencari pekerjaan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Obsesi pada teknologi tinggi lagi-lagi menjadi monopoli kaum ilmuwan tertentu yang jumlahnya hanya segelintir saja, kalau tidak hanya obsesi seorang menteri semata. Pengembangan sektor industri yang berbasis pada massa jauh lebih penting untuk mengembangkan potensi tenaga kerja Indonesia guna mengatasi pengangguran. Rancang bangun di bidang-bidang yang sederhana jauh lebih menguntungkan dan memiliki daya saing daripada mencoba-coba memasuki wilayah yang masih asing bagi bangsa kita.

Mengapa justru tidak pabrik sepeda yang dikembangkan daripada pesawat terbang yang tidak pernah laku di pasaran? Seharusnya sektor industri dikembangkan untuk menopang sektor pertanian, seperti mengembangkan pabrik diesel untuk alat-alat pertanian, alat pemrosesan makananan, dan teknologi mekanisasi pertanian.

Artinya, peluang yang diambil dalam memasuki era perdagangan bebas nanti adalah peluang yang memiliki relevansi dengan kapabilitas bangsa dan kontekstual dengan kebutuhan pembangunan masyarakat Indonesia. Memang harus diakui bahwa segmen yang mampu digarap adalah masih sangat sederhana, namun jika dikembangkan dengan sungguh-sungguh justru akan menciptakan daya saing.

Kita tidak pernah bermimpi negeri kita mampu menjadi pengekpor sepeda yang kualitasnya diakui oleh dunia internasional. Mimpi ini jauh lebih realistis daripada bermimpi memaksa negara lain membeli pesawat terbang kita yang tercipta dengan ala kadarnya.

V.Penutup

Akhirnya harus ada sinergi strategi agar daya saing ekonomi negeri kita mampu memberi arti bagi keberadaan bangsa dalam era persaingan bebas nanti. Selain membina sektor industri yang menjadi pilihan kita untuk memacu eksistensi bangsa di tengah percaturan dunia, sektor pertanian pun juga harus diperhatikan karena menghidupi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Di sektor bisnis, kepekatan persoalan kepentingan menjadi permasalahan yang rumit dan tidak bisa hilang hanya dengan pendekatan-pendekatan sektoral saja. Di satu sisi usaha pemerintah untuk merderegulasi dan melakukan restrukturalisasi perekonomian negeri ini patut dihargai dan dituntut konsistensinya. Namun di sisi lain, harus tetap dilakukan usaha-usaha politik untuk mengoyak dominasi negara.

Hanya dengan usaha dari semua pihak dengan terus melakukan interaksi yang saling menyempurnakan akan terjadi pergerakan langkah yang terus maju. Kita memang belum mampu berlari seperti negara-negara maju, tetapi tidak wajar kalau sampai sekarang kita belum juga bisa berdiri.

Restrukturisasi ekonomi bisa menjadi instrumen untuk membuat negara kita cepat bisa berdiri dan akhirnya jalan setapak demi setapak. Semua pihak tidak menginginkan bangsa kita menjadi *the looser* dalam persaingan bebas nanti, maka pihak yang duduk dalam pusat kekuasaan birokrasi harus segera menyadari untuk tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Selain masyarakat terus memacu diri untuk mempersiapkan diri.***

DAFTAR PUSTAKA

1 Anwar,Arsjad M., Kian Wie,Thee dan Jaya Azis, Iwan,(ed.), *1992,Pemikiran, Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi*, FE-UI, ISEI, dan Gramedia, Jakarta.

2. Assegaff,Djafar H, 1994, **Konglomerasi, Taipan, dan Koneksi Bisnis,** *Warta Ekonomi*, Jakarta.

3. Budiman, Arif, *1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

4. Basri H., Faisal dan Munandar,Haris, **Tinjauan Ekonomi Politik atas Lingkungan Bisnis di Indonesia,** seri karya tulis ilmiah dalam bidang ilmu ekonomi, Publikasi FE-UI, Jakarta.

5. Hasibuan N., 1985, **Oligopoli di Indonesia: Kasus Sektor Industri,** *Prisma*, No.2 Th 14, LP3ES, Jakarta.

6. MacIntyre,Andrew, 1991, *Business and Politics in Indonesia* , Asian Studies Association of Australia in association with Allen adn Unwin, Australia.

7. Zein, Winarno, 1986, **Pokok-pokok Masalah dan Pemikiran Mengenai Industrialisasi, Sebuah Tinjauan Umum**, *Prisma*, No.1 Th 15, LP3ES, Jakarta.

8. Wirosardjono, Soetjipto, 1985, **Pengertian, Batasan dan Masalah Sektor Informal**, *Prisma* No.3 Th 14, LP3ES, Jakarta.***

Reformasi Blok Perdagangan Dunia Dan Implikasinya Bagi Indonesia

KECENDERUNGAN DARI LINGKUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL DEWASA INI MENGARAH PADA GLOBALISASI EKONOMI. TETAPI PADA SAAT YANG SAMA, MUNCUL FENOMENA YANG SECARA SELINTAS TAMPAK SEBAGAI GERAKAN ANTITESISNYA, YAITU TIMBULNYA GERAKAN REGIONALISASI YANG BERUPA PEMBENTUKAN BLOK-BLOK PERDAGANGAN DI BERBAGAI KAWASAN. ERA BLOK PERTAHANAN MILITER MULAI SUSUT DIGANTIKAN OLEH BLOK-BLOK EKONOMI REGIONAL. SITUASI DAN LINGKUNGAN EKONOMI GLOBAL SEMACAM INI YANG MENJADI TANTANGAN PERDAGANGAN INDONESIA DI BERBAGAI PETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL YANG KINI CENDERUNG LEBIH PROTEKSIONIS. NAMUN PERUBAHAN EKONOMI GLOBAL INI JUGA MEMBUKA PELUANG BARU. PERSOALANYA, BAGAIMANA STRATEGI PERDAGANGAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI BLOK PERDAGANGAN ITU.

Saat ini paling tidak terdapat tiga perkembangan ekonomi eksternal yang mulai membawa pengaruh ke perekonomian Indonesia (Rachbini,1995). Perkembangan ini secara ideologis disebut liberalisasi. Dampak liberalisasi akan membuka kemungkinan transformasi pada ekonomi Indonesia. *Pertama*, disetujuinya hasil Putaran Uruguay tentang GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) tahun 1994 dan digantikan perannya oleh WTO (World Trade Organization) mulai tahun 1995. Secara global hal ini menandai terbentuknya regim perdagangan bebas yang bertugas menciutkan hambatan tarif dan perdagangan. *Kedua*, pemerintah Indonesia bersama-sama 17 pemerintah lainnya dalam pertemuan informal para pemimpin Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Coorperation*) APEC, di Bogor tahun 1994, telah menghasilkan "Deklarasi Tekad Bersama" (*Declaration of Common Resolve*). Isi deklarasi yang paling esensial adalah disepakatinya jadwal liberalisasi perdagangan dan investasi yang akan berlaku mulai tahun 2010 untuk negara-negara yang ekonominya saat ini sudah pada tingkat industrialisasi (yaitu negara-negara maju) dan tahun 2020 untuk negara- negara berkembang. Munculnya deklarasi ini dipandang sebagai awal dimulainya abad atau era Asia Pacific.

Ketiga, para pemerintah di ASEAN, termasuk Indonesia, merencanakan untuk memberlakukan AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada 2003. Namun pihak Brunei Darussalam mengusulkan supaya AFTA dipercepat menjadi tahun 2000.

Upaya para pemerintah di hampir seluruh dunia mengakui kehadiran WTO serta rencana memberlakukan blok-blok

Atantya H Mulyanto,
Kini Mahasiswa Manajemen FE-UGM, disamping menjadi Asisten Peneliti pada Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Ekonomi UGM, juga menjadi Redaktur Pelaksana Majalah Equilibrium FE-UGM.
Prestasi yang pernah diraih antara lain Juara I Lomba Karya Tulis Tingkat Nasional SCTV-UNBRAW tahun 1994. Tahun 1993-1994 pernah menjabat Ketua Ikatan Mahasiswa Manajemen FE-UGM. Tahun 1995 Menjadi anggota "Tim Sembilan" Senat Mahasiswa UGM yang merupakan tim perumus Undang-Undang Anti Dominasi Ekonomi. Tahun 1995 menjadi Ketua delegasi mahasiswa FE-UGM ke Simposium Mahasiswa Tingkat Nasional di UGM.

perdagangan regional secar bebas, bagi Indonesia jelas mempunyai keterkaitan secara eksternal. Begitu juga, dengan diterimanya kesepakatan liberalisasi perdaganagn dan investasi - mau tidak mau - akan mendorong proses transformasi ekonomi di Indonesia. Hal ini akan menimbulkan berbagai implikasi bagi masa depan perekonomian nasional.

GLOBALISASI VERSUS GLOKALISASI

Memasuki akhir dasawarsa abad 20 menjelang abad 21 - yang disebut juga *Era Milenium Ketiga* oleh John Naisbitt dalam buku Megatrends 2000 -, tatanan kehidupan dunia mengalami perubahan cepat dan mendasar, baik kehidupan politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dunia dilanda arus globalisasi yang mendorong dinamika dan perkembangan ekonomi di hampir semua negara.

Bila dicermati, arus globalisasi yang menghantam aktivitas ekonomi setidaknya memilki tiga dimensi (Kuncoro,1995). Pertama, globalisasi telah menyebabkan pergerakan dan mobilitas modal semakin tidak memiliki "bendera" dan lebih berdasarkan perhitungan rasional ekonomis. Bisa dipahami apabila kemudian banyak negara berkembang berlomba-lomba merebut modal asing, setidaknya bersikap semakin manis. Modal asing dapat berujud investasi asing, investasi portofolio, offshore-loan, licensing, maupun franchising. Ini berkaitan dengan dimensi "3F" dalam globalisasi gaya hidup versi Megatrends 2000, yaitu makanan (Food), mode pakaian (Fashion) dan hiburan (Fun).

Tabel 1.
Perdagangan Intra-Regional
(sebagai proporsi terhadap total perdagangan)

Tahun	Asia-Pasifik	Amerika Utara	Masyarakat Eropa
1980	0,33	0,32	0,51
1986	0,32	0,35	0,57
1989	0,37	0,36	0,59

Sumber: Frankel dan Wei (1992)

Kedua, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan Multinasional (MNCs) ke seluruh penjuru dunia. Didorong oleh motif mengejar keuntungan global, memperoleh suplai bahan mentah, melayani pasar secara langsung, meminimumkan biaya, dan mengikuti tahap evolutif dalam internasionalisasi bisnis, serta didukung oleh kemampuan memindah uang dan keuntungan diantara perusahaan afiliasinya secara internal, tak pelak lagi MNCs merupakan fenomena yang telah mewarnai dan membentuk konfigurasi perekonomian global.

Ketiga, terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global, yang memunculkan tiga *megamarkets* ekonomi dunia: (1) Uni Eropa, (2) Amerika Utara, dan (3) Asia Timur dan Tenggara (dengan Jepang sebagai motor utama). Tiga kawasan ini mendominasi produksi dan perdagangan global dengan menghasilkan 70 persen ekspor dunia dan 62 persen produk manufaktur dunia, sekaligus juga sebagai sumber dan penerima investasi internasional.

Globalisasi ekonomi berkembang pesat, namun pada saat yang bersamaan muncul fenomena yang secara selintas tampak sebagai gerakan antitesisnya, yaitu timbulnya gerakan regionalisasi yang berupa pembentukan blok-blok perdagangan/ekonomi lokal dipelbagai kawasan. Konstelasi ekonomi global pasca Perang Dingin menunjukkan bahwa blok-blok ekonomi regional telah muncul sebagai trend baru di tengah promosi perdagangan bebas. Inilah yang dikenal dengan *Glokalisasi*.

Glokalisasi dicirikan oleh terjadinya integrasi beberapa negara dalam suatu perjanjian kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, sosial budaya dan sebagainya. Tabel 1 berikut menunjukkan blok-blok perdagangan yang telah dan masih memegang peranan penting adlam perekonomian dunia sampai saat ini.

Analisis historis pembentukan blok-blok perdagangan dunia menunjukkan bahwa Integrasi Eropa adalah pemicunya. Tahapan integrasi Eropa bermula sejak ditandatanganinya Treaty of Rome pada tahun 1957, Single European Act tahun 1986, dan Maastricht Treaty tahun 1991. Dalam Kesepakatan Maastricht, para pemimpin 12 negara anggota ME (Masyarakat Eropa) telah mencanangkan untuk membentuk Uni Moneter Eropa (EMU) pada akhir abad ini. Harus diakui, diantara blok-blok perdagangan yang ada di seluruh dunia; ME merupakan blok perdagangan yang paling menonjol dan sering dijadikan model bagi blok perdagangan lain.

Sampai detik ini, kerjasama ME yang paling berhasil baru dalam bidang perdagangan. Indikasi meningkatnya volume perdagangan antar negara anggota ME dibanding negara-negara Asia dan Amerika Utara terlihat dalam tabel 2. Ini merupakan bukti bahwa "Benteng Eropa" sudah mulai aktif berjalan. Dalam literatur ekonomi internasional, kerjasama ME dalam bidang perdagangan sudah termasuk suatu bentuk integrasi ekonomi yang bernama *common market.* Ini adalah tingkatan integrasi ekonomi yang lebih tinggi derajatnya dibanding *free trade area* (area perdagangan bebas) maupun *customs union.* Karena dalam suatu common market tidak hanya hambatan perdagangan antar negara anggota dihilangkan dan diterapkannya kebijakan perdagangan yang seragam terhadap non-anggota, namun lebih dari itu faktor produksi diberi keleluasaan untuk bergerak antar negara anggota.

Untuk mencapai integrasi ekonomi yang paling tinggi atau *economic union*, tidak hanya dibutuhkan penghilangan hambatan perdagangan namun juga harmonisasi kebijakan ekonomi di bawah pengawasan 'supra-nasional'. Agaknya ide dasar EMU sejalan dengan konsep integrasi ekonomi yang tertinggi ini. Kalau memang EMU benar-benar terwujud barangkali mitos Eropa Bersatu akan segera

tetap. Rencana Eropa Bersatu ini menurut banyak ahli dipandang sebagai salah satu faktor utama pendorong kerjasama APEC.

Pada perkembangan lebih lanjut, berbagai gagasan integrasi ekonomi muncul baik di negara-negara Asia (AFTA), Eropa (EFTA), Amerika Utara (NAFTA), Amerika Latin (LAIA), Amerika Tengah (CACM), Karibia (CARICORM), sampai negara-negara di Pasifik Selatan (ANZERTA).

REFORMASI ALIANSI ASIA

Sejarah kerjasama ekonomi di Asia Pasifik sebenarnya sudah dimulai sejak dibentuknya OPTAD (Organization for Pacific Trade and Development) pada tahun 1968, yang terdiri dari AS, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Kemudian disusul oleh PECC (Pacific Economic Cooperation Conference) pada tahun 1980, yang aktivitasnya masih terbatas pada pengadaan forum konferensi dan seminar.

Seiring dengan percepatan tumbuhnya kerjasama Masyarakat Ekonmi Eropa yang semakin kuat pada dasawarsa 1980-an, upaya mencari bentuk regionalisasi di kawasan Asia Pasifik seakan mendapat momentum. Singkatnya, pada tahun 1989 secara resmi APEC ditradisikan sebagai forum konsultasi antara negara- negara di kawasan Asia Pasifik. Pada waktu itu anggota APEC mencakup 5 negara anggota OPTAD, 6 negara anggota ASEAN, Korea Selatan, dan Kepulauan Pasifik. Pada tahun 1992 Cina, Hongkong, dan Taiwan turut bergabung pula. Selanjutnya Meksiko masuk tahun 1994, disusul Chili tahun 1994. Pertumbuhan volume perdagangan APEC sebenarnya merupakan imbas dari perdagangan dan investasi Negara-negara Asia Timur.

Perdagangan dan investasi di Asia Timur sendiri pada umumnya dicirikan dengan sifatnya yang *market driven.* Karena kedekatan jarak dan relatif rendahnya biaya transaksi (transaction cost) maka perdagangan dan investasi di kawasan Asia berkembang pesat. Studi yang dilakukan Jeffrey Frankel (1992) dengan menggunakan model gravitasi menunjukkan bahwa kedekatan jarak dan skala besar merupakan faktor utama meningkatnya perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Studi ini menunjukkan kawasan Asia Pasifik mempunyai tingkat perdagangan "internal" yang paling tinggi, melebihi kawasan Uni Eropa dan Amerika Utara. Studi lainnya yang dilakukan Ammelung (1991) menunjukkan bahwa biaya transaksi dalam perdagangan di kawasan Asia Pasifik tergolong rendah. Sedang studi yang dilakukan oleh Seiji Naya (1993) menunjukkan bahwa kawasan Asia Timur semakin bersifat "mandiri" dalam perdagangan internal mereka sebagaimana ditunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi antara 7-8 persen pada saat Jepang dan Eropa Barat mengalami stagnasi dan Amerika Utara mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi relatif rendah.

Menangkap sinyalemen ini, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan tiga tahun lalu pernah pula menawarkan integrasi pasar kepada negara-negara industri baru Asia Timur dengan membentuk semacam aliansi. Usaha itu kiranya bersambut dengan tawaran ASEAN, Malaysia khususnya, mengenai *(East Asia Economic Coucus, EAEC)* yang ingin menggabungkan kepentingan negara-negara industri besar Asia (Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, dan Singapura) di Asia Timur serta negara - negara berkembang di Asia Tenggara khususnya ASEAN. ASEAN sendiri dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 1992 di Singapura telah menyepakati realisasi wilayah perdagangan bebas ASEAN *(ASEAN Free Trade Area, AFTA)* pada tahun 2008,—namun kemudian diajukan menjadi tahun 2003—, yang diawali dengan pelaksanaan *Common Effective Preference Tariff, CEPT),* yakni penyesuaian dan penurunan tarif bea masuk dan lain sebagainya dari sekitar 15 kelompok produksi negara-negara ASEAN (antara lain tekstil, farmasi, barang kimia, semen, pupuk, plastik, perhiasan, elektronika, perabot dari kayu dan rotan, kulit, pulp, dan produk-produk yang terbuat dari karet) yang telah diberlakukan sejak bulan Januari 1993. Pada KTT ASEAN tahun 1995 , Agenda AFTA ternyata lebih dipercepat lagi menjadi tahun 2000.

Diantara negara-negara ASEAN, pangsa perdagangan diantara mereka sendiri (Intra-ASEAN) sebenarnya sangat kecil, bahkan dibanding pangsa

Tabel 2.
Perdagangan Dunia, Uni Eropa, APEC

	1980		1990	
	Milyar dolar AS	**Pangsa (%)**	**Milyar dolar AS**	**Pangsa (%)**
Perdagangan dunia	4.057,2	-	6.976,5	-
Perdagangan intra-Pasifik	378,0	9,3*	939,3	13,5*
Perdagangan intra-Uni Eropa	309,0	7,6*	753,0	10,8*
Perdagangan intra-Amerika Utara	102,0	28.0~	230,0	24,5~
Perdagangan intra-Asia Timur	100,7	27,0~	286,3	30,5~
Perdagangan intra-ASEAN	24,4	6,4~	53,4	5,7~
Perdagangan antara Amerika Utara dengan Asia Timur	118,6	31,4~	326,0	34,7~

Keterangan:*)
Pangsa terhadap perdagangan dunia, ~) Pangsa terhadap perdagangan intra-Pasifik
Sumber: Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Ekonomi UGM, diolah dari berbagai sumber.

perdagangan kawasan manapun di dunia, yaitu hanya sekitar 6,4 persen pada tahun 1980 dan menurun menjadi 5,7 persen tahun 1990, dari total perdagangan mereka (lihat Tabel. 3). Angka yang relatif rendah inipun masih didominasi oleh peranan Singapura sebagai entry port bagi produk-produk mentah negara-negara ASEAN. Jika peranan Singapura dikesampingkan maka tingkat perdagangan antar negara ASEAN tidak akan cukup berarti. Sehingga gagasan untuk membentuk AFTA lebih didasari oleh keinginan untuk menarik perdagangan dan investasi dengan negara-negara lain di luar ASEAN daripada diantara negara anggota sendiri. Selain itu AFTA juga dapat dijadikan sebagai langkah awal bagi liberalisasi perdagangan yang lebih luas lagi cakupannya.

Dengan demikian, hadirnya kebutuhan akan integrasi ekonomi di kawasan Asia sebenarnya adalah wajar, sebagai konsekuensi dari meningkatnya blok-blok ekonomi di kawasan negara- negara industri besar (Eropa Barat dan Amerika Utara). Tetapi bagi Eropa dan Amerika Serikat, dalam perspektif jangka panjang, kerjasama atau integrasi ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia dipandang sebagai ancaman atas dominasi mereka pada pusat-pusat perdagangan global yang telah dikuasai selama ini.

PERIMBANGAN KEKUATAN

Apa yang saat ini terjadi di Asia khususnya Asia Timur dalam bidang perdagangan dan investasi, adalah suatu proses regionalisasi yang didorong oleh kepentingan pasar, bukan diwadahi oleh suatu kerangka hukum atau kesepakatan yang mengikat serta mewadahi perkembangan perdagangan dan investasi; contohnya Uni Eropa dan NAFTA.

Sebelumnya banyak pengamat internasional telah membuat prediksi, bahwa memasuki abad 21 Asia akan menjadi wilayah potensial bagi hadirnya kekuatan-kekuatan ekonomi besar, yang akan sangat mempengaruhi pola perubahan konstelasi dan konfigurasi perekonomian dunia. Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia *(Newly Industrialized Countries,NICs)* semakin memperkuat ramalan bahwa pusat ekonomi dunia *(centre of economic gravity)* tidak lagi akan dimonopoli oleh kekuatan- kekuatan industri besar, seperti AS, Uni Eropa dan Jepang.

Kehadiran Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura sebagai naga-naga Asia *(Asia's little dragons)*, yang diikuti oleh menguatnya ASEAN terutama Indonesia, Thailand, dan Malaysia *(Asia's new little dragons)* dalam percaturan perdagangan dunia, telah membuat perimbangan ketat dalam peta perekonomian global satu dasawarsa terakhir ini (Steven Schlossstein, *Asia's New Little Dragons, 1991*). Kenyataan ini diperkuat oleh laporan terakhir WTO tentang Perdagangan Dunia 1994-1995, yang menilai Asia sebagai pusat pertumbuhan perdagangan global, dengan kenaikan ekspor 10-25 persen dan impor 8-30 persen di tengah pertumbuhan rata-rata dunia sekitar 1,5 persen.

Menguatnya kekuatan-kekuatan ekonomi Asia ini terjadi bersamaan, ketika AS dan beberapa negara Uni Eropa tengah menghadapi resesi yang mengkhawatirkan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran AS, menunjukkan peningkatan. Dimulai periode 1982-1985, defisit AS berjumlah sekitar 1,3 persen dari NNP (Net National Product), meningkat menjadi sekitar 4 persen dari NNP pada interval 1986-1987. Tahun-tahun berikutnya defisit ini relatif tetap meningkat dan menimbulkan masalah terhadap kebijakan moneter AS. Kebijakan-kebijakan yang berusaha ditempuh presiden Bush dalam menjawab masalah tersebut pada waktu itu, dinilai kurang efektif. *Impoten*-nya kebijakan ekonomi Bush untuk memperbaiki defisit AS inilah yang menjadi salah satu 'senjata' kandidat presiden dari Partai Demokrat, Bill Clinton, untuk menjatuhkan Bush dari tampuk kepresidenan dalam Pemilu 1993. Di bawah kepemimpinan Clinton ternyata AS tetap belum mampu melakukan *terapi* yang efektif untuk menekan defisit, termasuk di dalamnya defisit

Tabel 3.
Perdagangan Dunia, Uni Eropa, APEC

	1980		1990	
	Milyar dolar AS	**Pangsa (%)**	**Milyar dolar**	**AS Pangsa (%)**
Perdagangan dunia	4.057,2	-	6.976,5	-
Perdagangan intra-Pasifik	378,0	9,3*	939,3	13,5*
Perdagangan intra-Uni Eropa	309,0	7,6*	753,0	10,8*
Perdagangan intra-Amerika Utara	102,0	28.0~	230,0	24,5~
Perdagangan intra-Asia Timur	100,7	27,0~	286,3	30,5~
Perdagangan intra-ASEAN	24,4	6,4~	53,4	5,7~
Perdagangan antara Amerika Utara dengan Asia Timur	118,6	31,4~	326,0	34,7~

Keterangan:*) Pangsa terhadap perdagangan dunia, ~) Pangsa terhadap perdagangan intra-Pasifik
Sumber: Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Ekonomi UGM, diolah dari berbagai sumber.

transaksi berjalan neraca perdagangan dengan Jepang — yang karena apresiasi ¥ (Yen) terhadap US $ (Dollar AS) — ketimpangan ini menjadi semakin besar.

Masalah yang sama, saat ini juga telah dihadapi oleh negara-negara anggota Uni Eropa dalam melakukan proses *"assesment"* (penyesuaian/penyelarasan) dengan Pasar Tunggal Eropa yang mulai diberlakukan sejak akhir tahun 1992. Jika pertumbuhan ekonomi Amerika Utara dan beberapa negara Eropa Barat sekitar 3,25 persen pada tahun 1990, maka dalam tahun 1991 pertumbuhan itu mengalami penurunan hanya sekitar 1,25 persen. Angka pertumbuhan sebesar itu relatif stabil sampai akhir tahun 1993.

Sementara Naga-naga Asia (Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, dan Singapura) dan negara-negara ASEAN mengalami fenomena yang sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di kedua kelompok ini mengalami percepatan yang mencengangkan dunia. Tahun 1992 pertumbuhan ekonomi *(Economic Growth)* Korea Selatan mencapai 8,4 persen, Taiwan mencapai 7 persen, sementara Singapura 6,5 persen, Thailand 7,9 persen, Malaysia 8,5 persen dan Indonesia mencapai 7 persen (*Far Eastern Economic Review*, 1992). Angka pertumbuhan ekonomi tersebut pada beberapa negara mengalami fluktuasi yang bervariasi untuk tahun 1993 dan 1994 (September). Namun secara umum angka pertumbuhan ekonomi tersebut masih cukup tinggi dibanding negara-negara kawasan lain di dunia. Tahun 1993 ekonomi Korea Selatan tumbuh sebesar 4,9 persen atau turun sebesar 2,1-3,1 persen, Taiwan 6,03 persen (turun 0,97 persen), Sementara negara Singapura 6-8 persen, Thailand 7,5 persen, Malaysia 8,5 persen, dan Indonesia 6,7 persen, ekonominya relatif stabil. (Sumber: *Far Eastern Economic Review*, Pebruary, 1994). Untuk tahun 1994, sampai dengan kuartal ke III atau sampai bulan September, ekonomi Korea Selatan tumbuh sebesar 6,3 persen, Taiwan 6,2 persen, Singapura 6-8 persen, Thailand 7,8-8,5 persen, Malaysia 8,4 persen, dan Indonesia 7 persen. (Sumber : *Far Eastern Economic Review*, October, 1994).

Pesatnya kemajuan perekonomian negara-negara Asia, yang terjadi pada saat mundurnya perekonomian negara-negara Eropa dan Amerika Utara, tentu saja mengkhawatirkan Eropa dan Amerika Serikat. Usaha memperkuat blok-blok ekonominya melalui Pasar Tunggal Eropa 1992 dan *North Atlantic Free Trade Area* (NAFTA) yang beranggotakan AS, Meksiko, dan Kanada, justru mulai mendatangkan masalah baik dari luar maupun dari dalam wilayahnya.

MERUMUSKAN ATURAN MAIN YANG "fair play"

Terlepas dari terjadinya reformasi dalam aliansi blok perdagangan dunia , bagi negara-negara ASEAN (terutama naga- naga kecil baru: Indonesia, Thailand, dan Malaysia), meningkatnya persaingan bukan saja dilihat dari menguatnya gelombang proteksionisme yang jelas-jelas dilarang dalam GATT. Akan tetapi, belakangan ini pemberian fasilitas bagi kemudahan ekspor dari negara-negara Asia melalui *"Generalized System of Preferences"* (GSP) semakin dikurangi, bahkan terancam untuk dihapuskan.
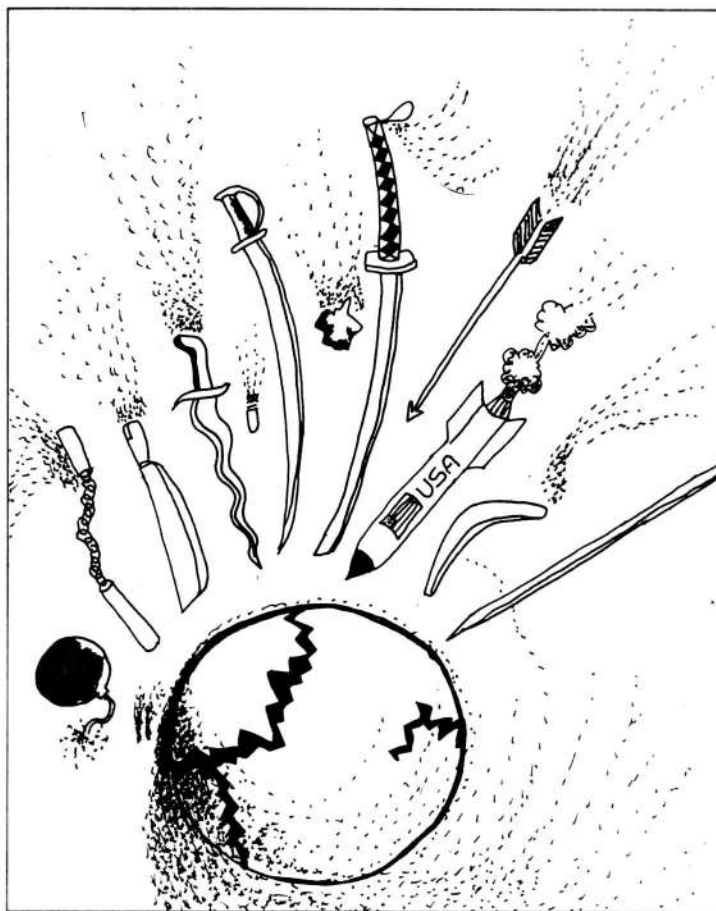
Dengan menggunakan alasan, bahwa telah terjadi lonjakan ekspor dari beberapa produk Asia di pasaran negara-negara maju (Uni Eropa dan Amerika Utara), terutama untuk barang-barang seperti sepatu, pakaian jadi, mainan anak-anak, barang-barang kerajinan, sepeda, dan beberapa jenis lainnya, maka negara-negara maju tersebut cenderung berinisiatif membatasi volume ekspor produk-produk yang selama ini diberikan fasilitas GSP. Usaha untuk memperoleh GSP baru terancam oleh prasyarat yang berat, seperti tingginya *local content* yang harus terpenuhi.

Sementara itu dalam hal perdagangan tekstil, tampaknya negara-negara penghasil tekstil Asia juga menghadapi kendala yang meningkat. Diberlakukannya perjanjian serat ganda *(Multi Fibre Agreement - MFA)* yang merupakan deviasi atau penyimpangan dari GATT, walaupun dinyatakan sebagai penyimpangan sukarela *(voluntary restraint)*, merupakan fasilitas yang *'convinient'* bagi negara-negara maju untuk mengamankan posisi pasarnya. Penerapan sistem kuota, diikuti dengan sikap proteksionisme yang makin ketat dalam MFA, menunjukkan usaha keras negara-negara maju dalam meredam kemajuan Asia. Jika sikap ini di-*counter attack* oleh sikap proteksi negara-negara Asia, maka

ini pasti akan berimplikasi pada semakin meningkatnya persaingan yang tidak sehat dalam peta perdagangan internasional. Beruntunglah perundingan GATT telah mencapai kesepakatan.

Dalam analisis historis, perundingan GATT hingga tahun 1993 telah merampungkan delapan putaran perlindungan multilateral yaitu : Genewa (1947), Annecy (1949), Torquay (1950- 1951), Genewa (1955-1956), Dillon (1961-1962), Kennedy (1963- 1967), Tokyo (1973-1979) dan Uruguay (1986-1993). Tetapi tidak semua putaran GATT menghasilkan keputusan yang memuaskan. Setelah memakan waktu 6 tahun, akhirnya *Final Act* putaran Uruguay ditandatangani

Tabel 4.

Neraca Perdagangan Indonesia dengan Asia Timur ($juta)

Negara	1992		1993		1994	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Jepang	10.766	6.327	10.760	6.013	11.172	6.248
Hongkong	703	232	881	229	900	247
Korea Utara	16	24	14	23	8	16
Korea Selatan	1.947	1.439	2.083	1.894	2.220	2.103
Taiwan	1.056	1.328	1.279	1.292	1.435	1.315
Cina	1.191	835	1.396	751	1.249	936
Asia Timur lainnya	2	0,2	3	0,7	4	0,6
Total	**15.683**	**10.186**	**16.418**	**10.205**	**16.990**	**10.867**

Sumber : Biro Pusat Statistik

di Marrakesh pada bulan April 1994. Perbaikan akses pasar yang tertuang dalam skedul masing-masing negara atau kelompok negara peserta WTO (World Trade Organization) adalah salah satu persetujuan terpenting. Penghapusan secara bertahap MFA, yang manifestasinya berupa penghilangan semua kuota impor bahan baku tekstil dan pakaian jadi secara bertahap dalam kurun waktu 10 tahun. Penghapusan MFA mengandung dua aspek utama, yaitu *integrasi* dan *pertumbuhan kuota*. Integrasi kuota berhubungan dengan persentase impor yang hanya terkena tarif, sehingga tidak ada lagi *quantity import restriction* untuk barang yang terintegrasi. Sedangkan pertumbuhan kuota berhubungan dengan kenaikan produk yang tidak terintegrasi.

Menghadapi kendala perdagangan global rupanya diperlukan keterbukaan semua kekuatan ekonomi (blok perdagangan) dunia di semua kawasan untuk mencari jalan keluar, sehingga tidak terjadi kekisruhan penetapan kebijaksanaan-kebijaksanaan perdagangan internasional, akibat timbulnya persaingan tidak sehat. Jalan keluar yang cukup efektif adalah kemauan bersama seluruh kawasan, terutama Asia, Eropa, dan Amerika Utara untuk melaksanakan segala keputusan *Final Act* dari GATT sehingga masalah tarif, pengendalian proteksi, pengaturan kuota perdagangan, serta aturan-aturan lainnya di seputar hubungan perdagangan multilateral yang selama ini menyimpang dari GATT dapat dikurangi, serta hambatan-hambatan tersebut dibuat secara transparan untuk semua negara, dan diterapkan dengan asas non- diskriminatif.

IMPLIKASI BAGI INDONESIA

Indonesia saat ini telah terikat dalam tiga kerangka perjanjian ekonomi dan perdagangan. Dalam forum ASEAN, telah disepakati untuk: Mempercepat tercapainya jadual perdagangan bebas menjadi tahun 2003; Pada tahun itu tarif dari produk- produk industri diturunkan menjadi 0-5 persen dan hambatan non tarif dihapus; Peningkatan volume perdagangan produk pertanian non-sensitif dan kerjasama jasa-jasa. Dalam memanfaatkan pola kerjasama ASEAN Indonesia telah mengembangkan tiga kerjasama sub-regional, yaitu: Sub-regional SIJORI (Singapura,Johor, Riau); Pengembangan sub-regional Sumatera Bagian Utara, Malaysia Bagian Barat dan Thailand Bagian Selatan; dan Kerjasama Brunei Darussalam, Indonesia (Kalimantan, Sulawesi), Malaysia (Serawak, Sabah), Philipina (Mindanao).

Dalam GATT/WTO Indonesia memperoleh manfaat dengan banyak mitra dagang dan memberikan keuntungan yang cukup besar. Sebagai imbalannya Indonesia harus membuka perekonomiannya bagi mitra dagangnya. Jika Indonesia menginginkan manfaat dari perdagangan internasional maka bergabung dalam GATT/WTO memang langkah yang tepat. Permasalahannya adalah cakupan GATT/WTO yang semakin meluas mulai menyulitkan posisi Indonesia, misalnya peraturan Hak cipta (property rights). Sedangkan dalam APEC kesepakatan yang dibuat tidaklah mengikat tetapi mendorong pada langkah-langkah yang mendukung perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik.

Untuk menganalisis manfaat perdagangan bebas dalam ketiga kerangka tersebut, dapat disimak dari pola perdagangan Indonesia dewasa ini khususnya menyangkut perdagangan non- migas. Di Asia Tenggara mitra dagang utama Indonesia adalah Singapura, dan di kawasan Asia Pasifik terdapat negara Jepang, Amerika Serikat (AS), Korea, dan Taiwan. Dalam lingkup internasional maka negara-negara anggota Uni Eropa juga merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Ekspor Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 13,8 persen. Sumbangan ekspor non migas telah mencapai 73,53 persen dari total ekspor tahun 1994. Sekalipun demikian pangsa ekspor Indonesia dalam perdagangan internasional masih sangat kecil. Pada tahun 1994 pangsa ekspor Indonesia hanya sebesar 0,9 persen. Pola perdagangan Indonesia menunjukkan konsentrasi pada kawasan tertentu sebagai mitra dagang. Ekspor Indonesia terutama ditujukan ke Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat,

-ra-negara industri baru (Korea, Hongkong, Tai- dan disusul oleh ASEAN dan Timur Tengah. -gkan impor Indonesia terutama juga berasal kawasan tersebut. Tabel 4 memperlihatkan -a perdagangan Indonesia dengan Asia Timur -asuk Jepang. Tampak ekspor Indonesia terus -alami peningkatan hingga mencapai US $ 11,2 padatahun 1994. Pada tahun tersebut ke Korea mencapai $ 2,2 miliar, ke Tai- $ 1,4 miliar, dan ke Cina mencapai $ 1,2 Total ekspor Indonesia ke negara Asia termasuk Jepang dan Cina , mencapai $ -iliar.

-al ekspor Indonesia ke ASEAN pada tahun hanya mencapai $ 4,7 miliar, dengan -inasi oleh ekspor ke Singapura $ 3,4 miliar. 5 memperlihatkan neraca perdagangan In- -sia dengan ASEAN.

-angkan total ekspor Indonesia ke Uni Eropa -atahun 1994 baru mencapai 5,3 miliar, -an pasaran utama di Britania Raya, Belanda, -erman yang nilai ekspor ke masing- masing -ra tersebut besarnya sekitar $ 1 miliar. Tabel -mperlihatkan neraca perdagangan Indone- -engan Uni Eropa. Ekspor Indonesia ke -ika Serikat pada tahun 1994 mencapai $ -iliar, yang berarti sebanding dengan ekspor -ni Eropa.

-ri data-data tersebut jelas sekali bahwa -gangan Indonesia dengan Asia Timur -ma Jepang mendominasi pola perdagangan -nesia. Selain itu aliran modal asing dari -ng dan negara Asia Timur lainnya juga -pakan aliran modal asing terbesar. Fenomena -elas memperlihatkan bahwa perdagangan dan -asi yang berkaitan dengan negara-negara Asia adalah yang paling substantif bagi Indonesia. -riknya proses ini berlangsung terutama karena

-bel 5.
-eraca Perdagangan Indonesia - ASEAN ($ juta)

-egara	1992		1993		1994	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
-hailand	267	277	352	344	467	235
-ngapura	2.409	1.698	3.313	1.670	3.372	1.793
-lipina	167	81	181	52	285	57
-alaysia	341	406	487	524	586	517
-runai	10	0,3	25	0,7	35	0,9
-otal	3.196	2.464	4.360	2.592	4.745	2.604

-ber: Biro Pusat Statistik

-et *driven*, bukan karena kerangka kerjasama -agangan formal. -rdasarkan pada data tersebut dapat pula ditarik konklusi bahwa sebenarnya pembentukan dan integrasi ke dalam blok- blok perdagangan seperti AFTA dan APEC sebenarnya kurang begitu relevan bagi Indonesia dan negara-negara Asia Timur lainnya. Hal ini mengingat selain mereka saling berdagang dan melakukan investasi diantara mereka sendiri, perdagangan mereka dengan kawasan lain juga

Tabel 6.
Neraca Perdagangan Indonesia - Uni Eropa ($ juta)

Negara	1992		1993		1994	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Britania Raya	654	602	843	719	1.005	782
Belanda	837	505	1.100	506	1.086	626
Perancis	386	543	494	816	499	853
Jerman	907	2.067	977	2.141	1.178	2.072
Belgia, Luksemburg	257	353	401	324	365	339
Denmark	74	49	86	124	97	158
Irlandia	43	12	46	23	40	21
Italia	381	535	582	558	614	523
Spanyol	169	131	254	178	332	261
Portugal	14	4	15	2	29	1
Yunani	18	5	29	7	45	9
Total	**3.196**	**2.464**	**4.360**	**2.592**	**4.745**	**2.604**

Sumber : Biro Pusat Statistik

sangat penting. Langkah yang lebih penting bagi negara-negara Asia Timur adalah membuat kondisi kawasan ini cukup kondusif dan menarik bagi iklim investasi dan perdagangan dengan negara-negara dari kawasan lain, tanpa harus membentuk kerangka kerjasama perdagangan yang formal seperti blok-blok perdagangan. Keikutsertaan dalam GATT/WTO sudah memadai untuk membuat tetap menariknya kawasan Asia Timur ini.

AGENDA NASIONAL DALAM ERA MILENIUM KETIGA

Menghadapi kecenderungan lingkungan ekonomi internasional di era milenium ketiga yang mengarah pada globalisasi, yaitu terjadinya perdagangan bebas dan glokalisasi, yang menciptakan blok-blok perdagangan, pemerintah Indonesia mengantisipasinya dengan menderegulasikan sektor-sektor ekonomi. Dimulai dari sektor keuangan, perdagangan, dan belakangan ini sektor riil. Menderegulasikan perekonomian memang lebih mudah daripada memperkuat kemampuan bersaing produsen dalam negeri, karena langkah yang pertama

adalah merubah kebijaksanaan dalam tingkat makro dengan memberikan kesempatan lebih luas untuk bekerjanya mekanisme pasar, sedangkan yang kedua adalah tindakan yang lebih memperkuat basis mikro ekonomi yang sasarannya tentu lebih sulit ditetapkan.

Kendati demikian, menderegulasikan perekonomian saja sebenarnya tidak menjamin bahwa Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar (Ramli,1995). Indonesia seharusnya menetapkan agenda nasional apa yang harus dilakukan untuk memperkuat kemampuan daya saing produsen nasional sebelum melangkah lebih jauh dalam perdagangan bebas. Untuk menetapkan agenda nasional tersebut ada baiknya terlebih dahulu diperhatikan komposisi ekspor Indonesia. Hal ini penting untuk menentukan skala prioritas dalam kebijakan pengembangan ekspor nasional.

Tabel 7 memperlihatkan ekspor Indonesia untuk produk Migas dan Non migas.

Dari tabel 7 tampak bahwa ekspor manufaktur merupakan kontributor terbesar bagi komoditi ekspor Indonesia dan merupakan 84,7 persen ekspor non-migas. Ekspor manufaktur ini terutama adalah produk-produk padat karya seperti tekstil, garmen, produk kayu, alas kaki, dan produk olahan ikan dan makanan laut. Kelima jenis produk tersebut memilki nilai ekspor masing-masing lebih dari $ 1 miliar.

Karena perubahan kondisi eksternal terutama di

Tabel7.
Ekspor Indonesia Migas dan Non-Migas 1990-1994 ($juta)

Komoditi	1991	1992	1993	1994
Pertanian	2.282	2.212	2.297	2.819
Manufaktur	15.068	19.613	23.293	25.702
Pertambangan	898	1.471	1.488	1.839
Sub total Non Migas	**18.248**	**23.296**	**27.078**	**30.360**
Migas	10.895	10.671	9.745	9.694
TOTAL	**29.142**	**33.967**	**36.823**	**40.053**

Sumber: Biro Pusat Statistik, diolah.

negara- negara produsen yang menjadi pesaing Indonesia, pada tahun 1995 tiga diantara lima komoditi andalan tersebut mengalami penurunan nilai ekspor, yaitu kayu (menurun sebesar 6 persen), pakaian/garmen (menurun sebesar 8 persen), dan tekstil menurun sebesar 5 persen. Ekspor kayu ke Jepang dan Korea mengalami penurunan cukup besar. Sedangkan penurunan ekspor tekstil dan pakaian terjadi hampir ke seluruh negara tujuan ekspor. Hal yang menggembirakan adalah terjadinya peningkatan ekspor yang cukup tinggi pada produk-produk furnitur, batubara, peralatan listrik, kertas, dan peralatan telekomunikasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekspor manufaktur Indonesia terutama bergantung pada produk-produk padat karya yang sensitif terhadap gejolak lingkungan eksternal. Fakta menunjukkan, penurunan ekspor produk manufaktur Indonesia terjadi pada 3 komoditi di mana negara produsen lain berhasil merubah struktur ongkos tenaga kerjanya menjadi lebih murah. Ini dilakukan dengan mengimpor tenaga kerja murah dari luar negeri. Yang memberikan harapan cerah adalah meningkatnya produk manufaktur lain seperti peralatan listrik dan telekomunikasi. Permasalahannya adalah tingkat keterampilan tenaga kerja Indonesia yang masih sangat rendah untuk proses manufaktur berteknologi tinggi. Jika Indonesia menginginkan untuk lebih mampu bersaing dalam ekspor produk-produk manufaktur maka kemampuan Sumber Daya Manusia dan teknologi harus ditingkatkan terutama pada industri menengah seperti peralatan listrik dan permesinan.

Produk agrobisnis terutama hortikultura, sayuran dan buah-buahan juga mempunyai prospek baik. Disinipun dibutuhkan pengembangan pola tanam yang lebih bersifat komersial dan pengembangan teknologi pembibitan dan pemrosesan. Dalam hal ini teknologi Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi. Di sini pemerintah mungkin perlu meninjau ulang bagaimana metode yang tepat untuk mengembangkan produk unggulan berdasarkan *resource-based intensity* karena sumber daya alam (darat dan Laut) yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan tenaga kerja sebanyak 1,8 - 2 juta orang yang masuk pasar kerja setiap tahun. Serta yang tidak kalah penting adalah segera melaksanakan riset terapan yang intensif dalam bio-teknologi untuk melakukan rekayasa genetikayang menghasilkan varietas unggul.

Agenda nasional dalam menghadapi persaingan bebas jelas tidaklah cukup dengan kebijaksanaan deregulasi semata, tetapi bagaimana memperkuat potensi kemampuan produksi yang dapat mendorong ekspor produk-produk manufaktur dan hortikultura yang lebih beragam dan berkualitas tinggi. Karena itu kebijaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia dan teknologi secara sinergis adalah kata kunci dari keberhasilan pembangunan di masa depan.

Disamping itu bagi dunia usaha, persaingan yang akan dihadapi adalah persaingan domestik dan global, yang berartipraktis tidak ada *influx* investor asing membawa teknologi baru, kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan modal yang lebih kuat. Perbedaan yang akan menonjol dan menentukan laku tidaknya produk pada situasi yang market driven ini, akan terletak pada kualitas dan produktivitas hasil produk/jasa, daya beli dan selera/pilihan konsumen. Dengan kata lain, pasar konsumenlah yang akan membentuk harga dan nilai pasar, bukan produsen dan produknya semata.***

Pendidikan Indonesia Mendayung Di Antara Dua Karang Kepentingan

MEMIKIRKAN FORMAT STRATEGI PENDIDIKAN DI INDONESIA IBARAT MENDAYUNG DI ANTARA DUA KARANG. DI SATU SISI NEGARA SEBAGAI PELAKSANA DOMINAN PENDIDIKAN MEMBUTUHKAN TENAGA-TENAGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENOPANG STRUKTUR SOSIAL DAN POLITIK YANG DIBANGUNNYA, DISISI LAIN PENDIDIKAN MODEL INI MEMBERI PELUANG YANG AMAT BESAR BAGI DEHUMANISASI LEWAT PENDIDIKAN. MAKA TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN MASA DATANG TIDAK LAGI HANYA SEKEDAR MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI DUNIA INDUSTRI. IA HANYA HARUS MEMIKIRKAN BAGAIMANA PROSES PENDIDIKAN YANG MEMBERIKAN KEMUNGKINAN SEADIL-ADILNYA BAGI SETIAP ORANG. YANG PALING MENDESAK ADALAH BAGAIMANA MENCIPTAKAN PENDIDIKAN ALTERNATIF YANG MEMBERIKAN RUANG KEBEBASAN ANAK DIDIK.

Dalam sejarah pendidikan nasional rezim Orde Baru, rupa-rupanya kita tidak lagi asing akan ...stulat yang berlaku di ...ngan tersebut: ganti menteri ... kebijakan. Dalil berbau satir ...kelahirannya merupakan ...ses dan hasil pemaknaan ...dap strategi dan kebijakan ... dihasilkan oleh setiap menteri ... pernah singgah di singgasana ...ebut.

...ari dalil itu kita bisa ...gajukan gugatan, apakah ...ma ini kebijakan dan strategi ...didikan di Indonesia tidak ...m pernah diletakkan dalam ...ah arus utama (*mainstream*), ...na pendidikan dilakukan demi ...an pendidikan itu sendiri[1] ...ndidik, membebaskan dari ...daktahuan) dengan fokus ...ma si anak didik, tetapi justru ... sebagai pendidikan demi ...atu hal -entah itu bernama ...bangunan, industrialisasi, ...ek, atau apapun namanya- ...gan fokus utama bernama negara (*state*)[2].

Istimewa

A. Wisnuhardana,
Sempat kuliah setahun di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Kini mahasiswa tingkat akhir Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Pernah terlibat sebagai reporter di Majalah Mahasiswa BALAIRUNG UGM dan kini menjabat Koordinator Umum Forum Kajian Sosial Humaniora (FKSH), sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang kajian dan penelitian. Aktif menulis di media massa antara lain Bernas, Kedaulatan Rakyat, Surabaya Post, Kompas dan sebagainya.

...pa yang kita soalkan itu, nampak pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana yang selalu memetik buahnya adalah makhluk bernama negara. Kebebasan akademik dalam lingkungan pendidikan tinggi dibatasi dalam tingkat minimal, supaya tiada lagi kritik-kritik berterbangan dari perguruan tinggi, pemberantasan buta aksara dilakukan pertama-tama agar masyarakat secara efektif lebih dapat menangkap pesan-pesan pembangunan dalam bentuk tulisan, kurikulum pendidikan selalu mengalami perubahan[3], semata-mata karena pembangunan membutuhkan *output* pendidikan yang menguasai jenis keahlian tertentu.Tetapi perubahan itu acapkali kurang memperhitungkan beban ekonomis yang harus ditanggung oleh pemakai pendidikan (masyarakat luas)[4].

Kalau asumsi yang mendasari pertanyaan tersebut benar, lalu apakah mungkin dunia pendidikan mampu melepaskan diri dari himpitan kepentingan negara, sementara pada saat yang sama kita menyaksikan peran dominan negara

dalam pendidikan[5]. Kiranya kita boleh dan perlu melelehkan air mata melihat anak-anak yang tiada dapat menikmati pendidikan yang murah dan bebas (dari jangkauan kekuasaan negara)[6]. Bahkan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintahpun, masih banyak anak yang tiada daya menggapainya.

Soal yang secara nyata dirasakan dalam masyarakat dan kemudian memberi legitimasi pada negara dalam menebarkan ideologi mendidik untuk membangun[7] adalah sangat minimnya jumlah masyarakat terdidik pada awal tahun 1970-an, terutama karena pemerintahan sebelumnya (Orde Lama) meninggalkan prasarana dan infrastruktur pendidikan yang terlampau minim bagi msyarakat.

Maka, sejak awal kekuasaannya sampai dengan akhir tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru lebih menekankan segi kuantitas masyarakat yang memperoleh kesempatan pendidikan, dan kemudian menempatkan kualitas pendidikan serta muatannya pada prioritas nomor ke sekian sesudah yang kuantitatif tersebut tercapai. Pada titik itu, yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pendidikan adalah sampai berapa banyak bangunan sekolah bisa didirikan, berapa banyak anak-anak usia sekolah yang dapat memperoleh kesempatan untuk bersekolah, sejauh mana program pemberantasan buta huruf dilakukan, dan berbagai kegiatan dengan ukuran fisik yang lain[8].

Politik pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru, persis mengikuti logika pertumbuhan ekonomi yang dijalankannya, dimana pertumbuhan ekonomi inilah yang menjadi sumber energi untuk menjalankan mesin-mesin penggerak Orde Baru. Dalam dunia pendidikan, logika ini muncul dalam kebijakan-kebijakan seperti Instruksi Presiden untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah, terutama tingkat dasar, program wajib belajar, kejar paket A, B dan seterusnya. Hampir secara fisik seluruh kebijakan itu bisa segera dilihat dan dirasakan oleh masyarakat luas. Ini persis sama dan sebangun dengan model pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan fisik material *per se*[9].

Karenanya, amatlah mustahil melakukan kajian terhadap seluruh kebijakan dan strategi pendidikan nasional tetapi meninggalkan faktor-faktor politik, ekonomi, sosiologi, psikologi yang ada dalam masyarakat sebagai faktor yang memberikan kontribusi signifikan, baik langsung maupun tidak langsung bagi hitam putihnya dunia pendidikan nasional.

"MASYARAKAT IPTEK SEBAGAI KATA KUNCI BAGI MODERNISASI MASYARAKAT, AKHIRNYA MENGALAMI NASIB YANG SAMA DENGAN YANG TERJADI DI BARAT. IPTEK JATUH PADA SEBUAH INSTRUMEN YANG PALING MENINDAS DAN MENJADIKAN DEHUMANISASI."

Di dalam tulisan ini akan diperlihatkan, bagaimana kepentingan negara (pemerintah) dalam mendapatkan sumber daya manusia yang unggul untuk menggerakkan roda-roda gigi sebuah mesin maha besar bernama pembangunan itu mendapatkan legitimasi, sementara pada detik yang sama, begitu banyak manusia lain (massa rakyat kebanyakan) tidak lebih dari sekedar pelumas-pelumas yang terjepit di antara himpitan roda-roda pembangunan, atau bahkan menjadikan massa rakyat yang bodoh dan tak terdidik sebagai korban yang kemudian keluar dari sistem sosial masyarakat menjadi ampas-ampas tak bersantan lagi. Mereka inilah yang kemudian mengalami marginalisasi struktural dan hidup sehari-hari dibuai mimpi-mimpi tentang pembangunan.

Maka, dalam interpretasi negara sumber daya manusia (SDM) adalah faktor paling dominan (dalam penyelenggaraan pendidikan). Penguasaan iptek menjadi sebuah tujuan akhir yang harus dikejar. SDM dan iptek ini boleh jadi merupakan kata kunci untuk melihat bagaimana relasi-relasi yang terjadi antar faktor yang ada. Akan dilihat bagaimana kemudian tujuan yang ingin diraih itu (SDM super dan penguasaan iptek), pada akhirnya justru menempatkan manusia pada fakta baru bernama dominasi dan penaklukan. Masyarakat Iptek sebagai kata kunci bagi modernisasi masyarakat, akhirnya mengalami nasib yang sama dengan yang terjadi di Barat. Iptek jatuh pada sebuah instrumen yang paling menindas dan menjadikan dehumanisasi.

Lalu timbul pertanyaan, kalau demikian yang terjadi, apa, bagaimana dan dengan cara apa kita harus memaknai pendidikan. Pertanyaan yang lebih mendasar lagi, mungkinkah transformasi sosial (*social transformation*) dapat dilakukan melalui pendidikan (yang sudah seperti itu nasibnya)?

I. Sumber daya manusia dan Iptek

Sumber daya manusia (*human resources*), dalam konteks luas dimengerti sebagai manusia yang memiliki keunggulan dibanding manusia lain dalam bidang tertentu. Tentu saja keunggulan yang dimaksud tidak hanya yang bersifat fisik. Bahkan SDM sudah dipersepsikan dengan keunggulan yang bersifat nirfisik seperti (1) kualitas pribadi yang melekat pada diri; (2) kualitas yang melekat dengan pihak lain seperti dengan Tuhan, alam lingkungan, masyarakat dan sesama manusia; (3) kualitas kekaryaan sebagaimana tercermin dalam

produktivitas, disiplin kerja, keswadayaan, ...karsaan dan wawasan masa depan[10].

B.J. **Habibie**, Menteri Negara Riset dan Teknologi ... pelopor teknologi tinggi (*high technology*) di Indonesia, dalam berbagai kesempatan yang ...nya selalu menekankan bahwa apabila Indonesia memiliki satu persen saja manusia-manusia yang menguasai teknologi, Indonesia akan tumbuh menjadi negara industri dan dapat disejajarkan dengan negara-negara maju. Maka, melalui puluhan lembaga-lembaga yang dipimpinnya[11], Habibie berupaya untuk merealisasikan gagasannya ini dengan mengirimkan pemuda-pemuda Indonesia mengikuti pendidikan di berbagai negara maju, terutama Jerman, Jepang dan Amerika Serikat[12].

Dalam cara berpikir di atas, penguasaan teknologi rupanya menjadi modal yang paling penting untuk melakukan transformasi masyarakat. Memahami cara berpikir seperti ini penting karena dalam konteks Indonesia, transformasi masyarakat yang dipahami oleh negara dan seluruh birokrasi yang menopangnya seringkali sama sekali berbeda dengan transformasi yang dimaksudkan dalam wacana masyarakat warga (*civil society*). ...nya, muncul pertanyaan, ...kah yang sebenarnya menjadi ... transformasi sosial: penguasaan ... ataukah meletak pada ... pendidikan yang menyentuh ...aikan seluruh masyarakat?

> **PRINSIP KEADILAN JOHN RAWLS INILAH YANG PERSIS DIHANCURLEBURKAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN KITA, DIMANA DISTRIBUSI KESEMPATAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN SDM. HANYA MEREKA YANG UNGGULLAH YANG AKAN SENANTIASA DIBERIKAN KESEMPATAN KARENA HANYA DARI YANG UNGGULLAH PRODUKTIVITAS DAPAT DIHARAPKAN. BEASISWA SELALU DIBERIKAN, HANYA KEPADA YANG MEMILIKI BATAS KEMAMPUAN TERTENTU (PINTAR).**

A. Wajah Teknologi

Teknologi, dalam pandangan **Norman Faramelli** memiliki ciri-ciri tertentu antara lain efisiensi dan keuntungan[13]. Dengan menekankan efisiensi dan pencapaian keuntungan semaksimal mungkin, manusia harus mampu mengendalikan teknologi yang dihasilkannya. Seringkali, manusia gagal mengendalikan teknologi yang dihasilkannya sehingga secara sadar ataupun tidak, teknologi yang dikuasai justru mengancam kehidupannya sendiri ataupun kehidupan orang lain. Efisiensi, memang merupakan sebuah faktor penting dalam kamus teknologi.

Tetapi ketika kata ini dipahami dalam kerja produktif dan itu berarti teknologi, yang kemudian terjadi adalah eksploitasi habis-habisan atas manusia dan alam yang belum terkena sentuhan ilmu pengetahuan terapan[14]. Dengan demikian, demi pembangunan pemerintah sekali lagi mendapatkan pengabsahan untuk berbuat apa saja.

Karenanya, sumber daya manusia yang dikembangkan seharusnya tidak hanya manusia yang ahli tetapi sungguh-sungguh profesional[15]. Profesionalitas seseorang biasanya tidak hanya ditentukan oleh penguasaannya secara matang pada satu bidang tertentu saja, tetapi lebih-lebih karena perhatian dan komitmennya pada kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam buku *Masyarakat Teknologi*, **Jacques Ellul** merumuskan suatu filsafat sosial yang relatif komprehensif mengenai kebudayaan teknik dewasa ini. Dia menyelidiki peranan teknik dalam masyarakat modern dan menyajikan suatu sistem pemikiran yang dapat membantu memahami kekuatan-kekuatan di belakang kemajuan budaya dan peradaban teknik yang terjadi dalam masyarakat. Teknologi merupakan suatu fenomena yang ngeri dan impersonal, suatu kekuatan otonom yang mampu mengubah setiap orang dan bidang kehidupan manusia menjadi lingkup teknis. Teknik, kata Ellul merupakan suatu keseluruhan metode yang dicapai secara rasional dan memiliki efisiensi mutlak dalam setiap bidang kegiatan manusia. Dengan kata *teknik*, ia menunjuk pada serangkaian cara atau metode yang sudah distandarisasi untuk mencapai hasil yang telah diprediksikan sebelumnya.

Dari situ, Ellul menggolongkan teknik dalam tiga bidang utama yaitu (1)bidang ekonomi, (2)bidang organisasional (administrasi, pemerintahan, manajeman, hukum, militer) dan (3)bidang manusiawi (pendidikan, olah raga, hiburan, obat-obatan). Dalam bidang organisasi negara atau politik, di situ terjadi pertentangan antara berbagai teknik. Bagi seorang ahli teknik, negara semata-mata merupakan suatu ruang lingkup untuk menerapkan alat-alat yang dihasilkannya. Negara bukanlah ekspresi kehendak rakyat tetapi suatu perusahaan yang memberikan jasa dan harus dibuat berfungsi secara efisien. Jadi, ahli teknik menilai negara atau pemerintah menurut kemampuannya menggunakan teknik secara efisien, bukan menurut konsep keadilan sosial (*social justice*)[16]. Padahal, konsep keadilan sosial dalam pergumulan di tengah masyarakat ini akan senantiasa relevan untuk dijadikan paradigma dalam kerangka humanisasi total peradaban manusia.

Keadilan sosial, seperti yang digagas **John Rawls** memiliki dua prinsip utama yakni prinsip kebebasan
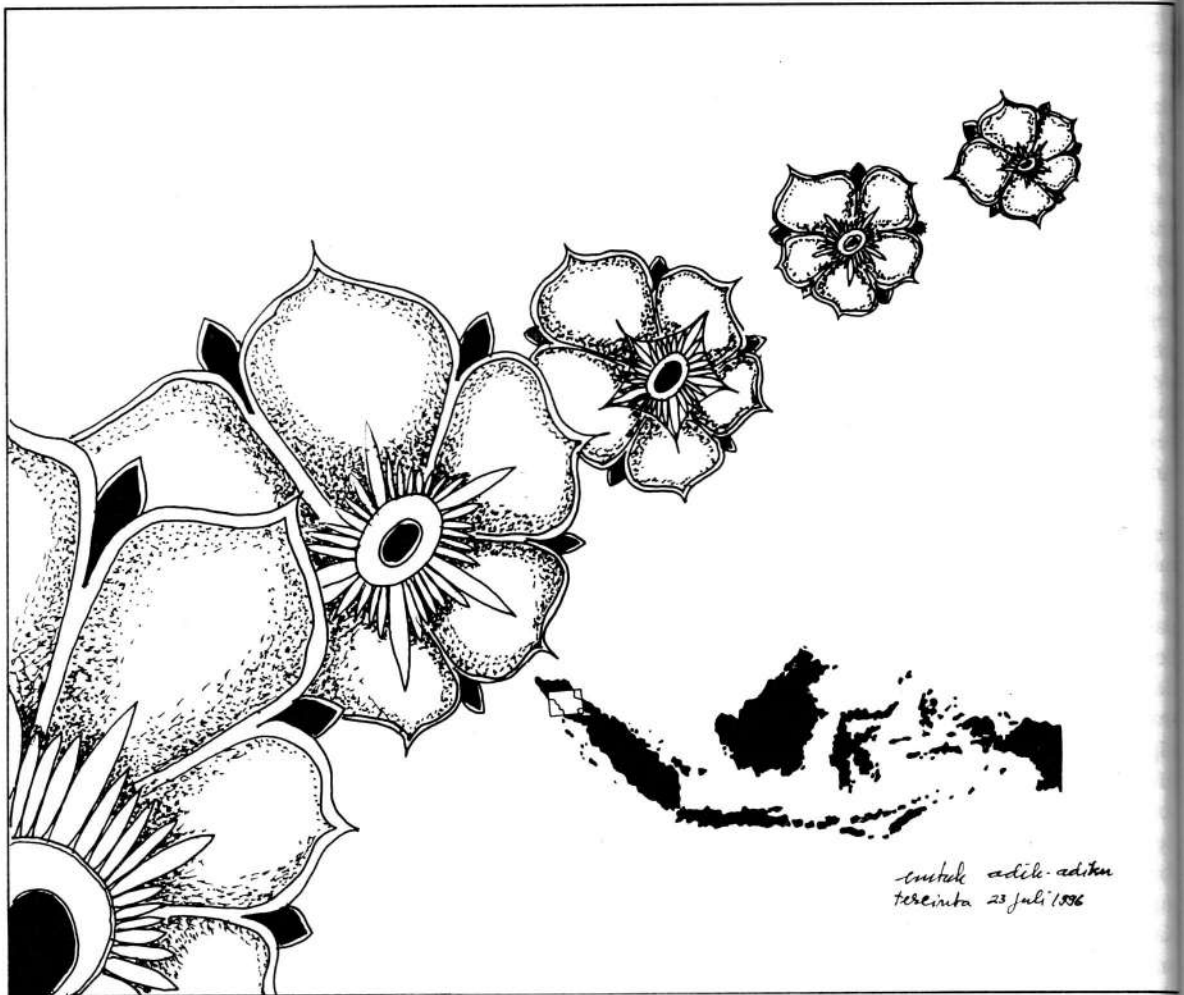
yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*), kesamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip yang terakhir adalah bagaimana perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung atau mereka yang paling kurang memiliki peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas[17].

Prinsip keadilan John Rawls inilah yang persis dihancurleburkan dalam dunia pendidikan kita, dimana distribusi kesempatan yang berorientasi pada pengembangan SDM. Hanya mereka yang unggullah yang akan senantiasa diberikan kesempatan karena hanya dari yang unggullah produktivitas dapat diharapkan . Beasiswa selalu diberikan, hanya kepada yang memiliki batas kemampuan tertentu (pintar).

B. Proyek Historis Kekuasaan

Pengelolaan SDM di Indonesia sebagai upaya menyusun batu bata modernisasi sekaligus membentuk proses ideologisasi atas masyarakat, dilakukan dengan terus menerus membenamkan kosa kata ini ke dalam masyarakat luas. Dalam GBHN sangat jelas ditunjukkan, bagaimana SDM dan penguasaan iptek lalu menjadi semacam *euforia* yang seolah-olah akan merealisasikan mimpi-mimp masyarakat tentang sebuah masyarakat modern.

Istilah modernisasi secara pepat dituang dalam ruang berpikir masyarakat warga bahwa *imagin communities* (meminjam istilah **Bennedict Anderson**) mengenai sebuah masyarakat modern adalah sebuah masyarakat yang dikatakan oleh para pejabat Manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang menjaga keseimbangan dan harmoni, dan *bla bla bla* lainnya yang biasa didengar dalam penataran-penataran atau acara-acara formal resmi. Dalam kemasan yang sanga indonesianistik, konsep mengenai modernitas adalah kalimat-kalimat yang selama ini didengung dengungkan (dan harus diterima oleh masyaraka sebagaimana dikatakan atau dikhotbahkan). Bukan Barat, bukan sosialis atau komunis.

Secara jelas **Herbert Marcuse** menunjukkan bahwa iptek (teknologi menurut bahasa Marcuse sebagai sebuah derivasi ilmu pengetahuan (alam tidak akan pernah mampu membebaskan diri dar kepentingan-kepentingan. "Ia hanyalah merupakan sebuah proyek historis (*historical project*) yang mencerminkan atau memproyeksikan kepentingan kepentingan suatu masyarakat dan kelas-kelas yang berkuasa", ujarnya. Tak lebih tak kurang.

Dimana dikutip oleh **Nasikun**, pernyataan Presiden Soeharto agar dalam pengembangan ilm

...an dan teknologi kita tidak mengulang ... yang telah dilakukan oleh negara-negara ... saja tidak mampu menjadi sebuah pesan ... rasionalitas teknis yang tiada bedanya dengan ...tas yang telah mengantarkan negara-negara ... tingkat perkembangan mereka saat ini, ... telah kita gunakan untuk menjawab ...bangan iptek, seperti yang selama ini ...an oleh negara-negara maju. Jadi, tanya ... apakah yang sebenarnya dikehendaki dari ...ksanaan pengembangan iptek bagi ...gunan nasional kita yang tengah memasuki ...aling kritis dalam sejarah perkembangan ...itas sebagaimana yang terjadi di Barat ... waktu yang lalu[18].

...s diakui, perkembangan teknologi yang ...mulai di Inggris dan kemudian menghasilkan ... Industri itu, mengalami gejala amplifikasi ... dalam bentuk dan model yang berbeda, sejak ... Perang Dunia II hingga sekarang. Namun ...ngan teknologi yang dirasakan masyarakat ... itulah yang kemudian juga menimbulkan ... tragedi paling besar dalam peradaban umat ... Berbagai macam kerusakan fisik dan moral ... umat manusia. Ketimpangan hubungan antar ...an dan kelompok menjadi semakin menggila. ...nkfurt School yang melahirkan Teori Kritis ...ba mengatasi kebekuan yang terjadi dalam ... modernitas dengan menuduh bahwa ada ... diabaikan dalam melihat perkembangan ...akat, yakni menganggap paradigma dan cara-...aksis dianggap tidak lebih dari sekedar ilmu ...belaka. Teori Kritis menuduh ipteklah biang ... semuanya. Tetapi **Jurgen Habermas**, salah ... pemikir Frankfurt School generasi kedua ...patkan ilmu dan teknologi bukan sebagai ...an. Iptek yang dicap sebagai bentuk-bentuk ...dasan oleh para pendahulunya justru ...pakan faktor penting dalam proyek konstruksi ... masyarakat. Akan tetapi ia mensyaratkan ...a keseimbangan dalam bidang yang lain seperti ...m, seni, psikologi, sastra, humaniora dan ...litas.

...pas dari itu, muatan kepentingan sebagaimana ...alir Marcuse, tampaknya tetap menjadi sebuah ... moral bagi dunia pendidikan di Indonesia. ...a pendidikan, mau tidak mau harus ...erahkan kepalanya untuk diformat ulang dari ... ke waktu agar ia dapat selalu menghasilkan ... yang sesuai dengan keinginan negara. Dunia ...dikan hidup dalam dua dunia dan ditarik ke ...ke sana sini. Di satu sisi, ia harus tunduk pada ... kekuasaan yang menekankan pendidikan ...gai pabrik orang-orang pintar yang mampu ...p di lapangan industri, di sisi lain ia senantiasa ... mampu menolak fungsi etis dan normatif yang ... boleh diabaikan begitu saja.

II. Mencermati Beberapa Model Pendidikan

...ari sudut perkembangan teknologi, Barat boleh ...takan masih memegang kunci utama ...embangan teknologi. Model pendidikan ala Barat diyakini mampu menghasilkan seperti apa yang kini mereka dapatkan. Tradisi-tradisi besar yang diwariskan oleh pendidikan abad Pertengahan dengan model *collegge-college* dan *skolastik* yang ketat melahirkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Akan tetapi narasi-narasi besar (*grand narrative*) yang dihasilkan itu menimbulkan paradoks kegagalan yang tak kalah besarnya dengan mitos-mitos mengenai kemajuan yang berhasil digapainya.

Karenanya, di banyak negara mulai muncul model-model pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, terutama di negara yang paling merasakan bagaimana Barat, secara eksploitatif menghancurkan pola keseimbangan dalam alam dan masyarakatnya. Amerika Latin misalnya. Dari sanalah model-model pendidikan alternatif yang menolak pendekatan yang digunakan oleh negara muncul. Pertama-tama karena masyarakat di sana pulalah yang pertama kali merasakan penindasan dan dominasi serta ketidakadilan.

Model pendidikan semacam ini, sebagaimana yang ditulis **Mudji Sutrisno** ketika melihat model pendidikan alternatif di Brasil, merupakan kontekstualisasi model pendidikan yang memberikan ruang amat efektif untuk menimbulkan kesadaran baru bagi anak-anak didik di sana. "Proses menamai dan merajut makna yang sekaligus merajut gambar dengan kesadarannya sendiri, bergulat melalui perumusan, penggambaran dan pembatinan sendiri dengan bahasa anak, mendasarkan inti pendidikan pada pemekaran yang aktif dan hidup dari kesadaran si anak," tulis Mudji[19].

Mudji mencontohkan, seorang anak berumur tiga tahun dan duduk pada sekolah maternal awal, diajarkan untuk merekatkan benang tipis warna kuning dan benang tebal wol berwarna coklat untuk sekaligus menamai dan meresapi perbedaan kuning dan coklat, tebal dan tipis. Dalam proses ini anak amat, aktif karena ia melakukan sendiri penempelan benang pada kertas dan memegang sendiri tipis tebalnya, melihat sendiri mana yang kuning dan mana yang coklat.

Guru, tidak lebih besar perannya daripada sekedar memberi fasilitas dan kondisi yang memungkinkan si anak mengalami proses pemekaran berpikir. Ia tidak mendikte apalagi mencetak seragam perkembangan cara berpikir anak. Guru sekedar menemani si anak dalam merumuskan dengan bahasa mereka apa yang dinamakan dunia. Maka, pengaksaraan atau alfabetisasi menjadi sebuah proses pembukaan kesadaran anak lalu si anak sendiri menamainya dalam kata-kata tertentu.

Dengan menamai sendiri dunianya dan memberi makna atas realitas, si subyek berproses membentuk kemandiriannya. Otonomi yang dibahasakan dengan membuat kata, nama dan makna sendiri, sehingga melahirkan kepercayaan diri sendiri dan dengan demikian si anak mengendapkan dalam keunikan pribadinya masing-masing. Inilah yang dinamakan

pencerdasan sejati yang berpusat pada diri anak sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak.

Dalam realitas konkrit yang tumbuh di masyarakat, model pendidikan yang mendasarkan pada subyek, akan senantiasa berhadapan dengan model pendidikan gaya bank[20], dimana dalam model pendidikan gaya bank, anak dianggap merupakan obyek yang tidak tahu apa-apa, sehingga setiap pemaknaan atas realitas harus dilakukan oleh seorang guru. Dalam model pendidikan gaya bank, alfabetisasi dan pemaknaan dilakukan oleh guru dan tidak pernah sampai menyentuh kesadaran si anak, karena apa yang diberikan padanya bukanlah dunia yang dilihat dan dihadapinya sehari-hari. Otak anak dianggap sama dengan kotak uang di bank yang beku dan statis.

Bentuk atau model pendidikan yang lain adalah Sekolah Mettray di Perancis. Sekolah Mettray yang menjadi fokus kajian **Michael Foucoult** -seorang filsuf beraliran postmodernisme dari Perancis- dalam masalah disiplin dan hukuman, memiliki lima model pendidikan. Model pertama adalah **model keluarga**, dimana anak didik dikelompokkan dalam unit-unit kecil berdasarkan hubungan keluarga (kakak adik). Model kedua adalah **model militer** dimana setiap unit terkecil memiliki kepala unit sebagai komandan dan kepada setiap anggota dilatihkan latihan dasar kemiliteran dengan pemeriksaan kebersihan dan kerapian setiap hari. Ketiga adalah sekolah dengan **model bengkel kerja** yakni unit dimana pengawas dan pelatih bertanggung jawab melatih anggota yang lebih muda dan mengatur seluruh pekerjaan. Keempat adalah **model sekolah** dimana pelajaran diberikan antara satu hingga satu jam setengah dalam satu hari. Model terakhir adalah **model pengadilan** dimana setiap pelanggaran sekecil apapun dikenai hukuman[21]. Dari kelima model ini, perkembangan anak diamati secara teliti oleh Foucoult sampai kemudian ia menemukan individu-individu yang berbeda dalam setiap model itu.

Sebagaimana dalam cara berpikir postmodern, Sekolah Mettray bukanlah sekolah yang beken di Perancis[22], karena Foucoult (dan juga filsafat postmodern) menolak data-data yang berasal dari sumber-sumber hebat tetapi justru menggunakan data-data dari sumber-sumber tak terkenal dan tersingkir.

Model pendidikan di Indonesia, tampaknya belum menjadi proses penyadaran bagi keseluruhan massa rakyat, karena sifatnya yang sangat instrumentatif bagi kebutuhan subyektif pemerintah. Konsep *link and match*[23] sebagai sebuah konsep yang memberikan orientasi pada penyediaan tenaga siap pakai dalam bidang industri, menjadikan proses pendidikan sebagai proses reifikasi[24]. Penumpulan kesadaran kritis yang kemudian diproyeksikan dalam bentuk-bentuk yang material seperti uang, jabatan, kedudukan dan sebagainya ini, tampaknya tidak terlalu menjadi problem berarti bagi pemerintah, karena sepintas keduanya mendapatkkan keuntungan yang memadai. Seakan-akan terjadi simbiosis yang bersifat mutualistis, karena sampai pada titik tertentu simbiosis itu terjadi dan hanya bisa terjadi ketika kesadaran anak didik tidak diberikan ruang aktualisasi.

Institusi pendidikan yang ada sekarang menerapkan model *panoptikan*[25], dimana hasil perkembangan kemampuan anak didik dicatat terus menerus dalam buku rapor, tingkah laku mereka dicatat dan dalam tingkat tertentu dijinakkan.

Bahkan, kini anak-anak yang memiliki kemampuan unggul dan hebat dikelompokkan dalam kantong-kantong tersendiri, diberikan fasilitas yang lebih dibanding dengan anak didik pada umumnya, diawasi lebih ketat, sehingga keunggulannya semakin nampak. Pada level tertentu, kebebasan anak didik untuk memaknai dunianya tidak lagi mendapatkan ruang, karena pengamatan *panoptikan* memungkinkan segala tingkah laku anak dipantau, dianalisis, dikontrol dan kemudian dijinakkan. Penjinakan dilakukan melalui sebuah mekanisme kontrol yang bersifat hukuman (sebagaimana dilakukan dalam model pengadilan Sekolah Mettray), disiplin (seperti model militer), ataupun normatif dan etis (seperti dalam model keluarga).

"PADA LEVEL TERTENTU, KEBEBASAN ANAK DIDIK UNTUK MEMAKNAI DUNIANYA TIDAK LAGI MENDAPATKAN RUANG, KARENA PENGAMATAN *PANOPTIKAN* MEMUNGKINKAN SEGALA TINGKAH LAKU ANAK DIPANTAU, DIANALISIS, DIKONTROL DAN KEMUDIAN DIJINAKKAN."

Dengan demikian, negara yang dapat melakukan dan menerapkan setiap model pendidikan yang demikian, akan mendapatkan *output* yang secara teknis bisa diandalkan kemampuannya dan secara ideologis bisa didomestifikasi, demi kepentingan tertentu yang bernama pembangunan atau industrialisasi

A. Tiga Paradigma Pendidikan

Model pendidikan, menurut **Mansour Fakih** bisa dikategorikan dalam tiga paradigma[26]. Paradigma

Pertama adalah **paradigma konservatif**. Asumsi yang mendasari paradigma ini adalah: pada dasarnya ketaksejajaran dalam masyarakat adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan yang alamiah. Perubahan sosial melalui pendidikan, dengan demikian bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan. Institusi pendidikan merupakan salah satu institusi pendidikan yang melanggengkan keadaan ketidaksederajatan. Mereka yang bodoh, miskin menderita, mengalami nasib seperti itu karena takdir Tuhan dan salah mereka sendiri. Paradigma pendidikan seperti ini menafikan bentuk-bentuk konflik dan kontradiksi dan amat mengagungkan harmoni sosial (*social harmony*)[27].

Paradigma yang kedua adalah **paradigma liberal**. Filsafat yang menopang paradigma ini adalah Liberalisme, yakni suatu pandangan yang menekankan pengembangan, perlindungan hak dan kebebasan individu, identifikasi problem dan upaya perubahan sosial secara inskrimental demi menjaga stabilitas jangka panjang. Konsep pendidikan dalam tradisi liberal berakar pada cita-cita Barat tentang individualisme. Pengaruhnya pada pendidikan dapat dilihat dan dianalisis dengan mencermati komponen-komponennya.

> "KEKHAWATIRAN BAHWA BANGUNAN SOSIAL YANG TERSUSUN MENJADI SEPERTI YANG TERJADI DALAM MASYARAKAT BARAT HARUS DIJADIKAN SEBUAH HALUAN, BAHWA KITA TIDAK MENGHENDAKI KONSTRUK SOSIAL SEMACAM ITU, DIMANA EKSPLOITASI MANUSIA YANG SATU ATAS MANUSIA YANG LAIN MENJADI SATU HAL YANG WAJAR."

Pengaruh liberal dalam pendidikan kelihatan dalam pendidikan yang mengutamakan hasil unggul, prestasi, kemampuan akademik, yang semuanya dilakukan dalam suasana yang kompetitif. Kategorisasi sekolah unggulan dan nonunggulan, rankingisasi, insentif dan beasiswa hanya kepada mereka yang menonjol secara akademik, merupakan bentuk-bentuk paling konkrit, bagaimana pendidikan dengan paradigma ini dijalankan.

Paradigma yang terakhir adalah **paradigma kritis**. Dalam perspektif ini, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, membuat metodologi dan muatan pendidikan yang bertujuan menghancurkan ideologi dominan (*dominant ideology*) yang menghambat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Tugas utamanya adalah menciptakan ruang dan media supaya sikap kritis terhadap sistem yang menindas dan tidak adil dapat tumbuh, disertai dengan upaya advokasi masyarakat yang paling tidak diuntungkan sehingga tercipta tatanan yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dapat berdiri netral dan obyektif. Setiap orang dan institusi dimungkinkan untuk melakukan upaya ini karena wilayah pendidikan bukanlah wilayah yang netral. **Paulo Freire** menyebutkan, " *Concsiousness is not a blank page; school dan society are not neutral fields of social equals. Not acknowledging or not challenging inequality in society is to cooperate in hiding reality, hiding conditions that would weaken dominant ideology. The teachers who pretends that reality is not problematic thus reduces the students own power to perceive and to act on social issues. An opaque reality disempowers people, by holding a screen in front of what they need to see to begin transformation*[28].

B. Tiga bentuk Kesadaran

Freire tidak hanya menjelaskan bagaimana dehumanisasi telah menjadi bagian yang lekat dengan pendidikan. Proses dehumanisasi ini, oleh Freire dilihat sebagai akibat ketidaktahuan manusia yang berimplikasi pada struktur kesadaran. Freire kemudian mengklasifikasikan beberapa bentuk kesadaran mulai dari yang paling primitif sampai yang paling kritis.

Kesadaran magis, yakni kesadaran yang hanya berhenti melihat dan merasakan ketidakadilan sebagai bagian dari hidup sehari-hari dan tidak mampu melihat kaitan antara faktor yang satu dengan faktor lainnya. Akibatnya dalam dunia pendidikan, guru adalah kebenaran tunggal yang harus selalu *digugu dan ditiru*[29] oleh anak didik.

Kesadaran tahap berikutnya adalah kesadaran naif, yang menekankan peranan dan aspek manusia sebagai penyebab timbulnya persoalan. Maka, pembenahan dan perbaikan atas seluruh bangunan masyarakat harus diarahkan pada si manusianya sendiri. Anak didik harus diberi motivasi, dorongan, kursus, *training* dan sebagainya sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan sistem dalam masyarakat yang dianggap benar itu.

Yang paling radikal adalah bentuk kesadaran kritis, yang melihat bahwa sistem dan struktur yang menopang masyarakat cenderung timpang. Paradigma ini dalam lingkup pendidikan berusaha memperkenalkan cara-cara berpikir struktural dalam menganalisis masyarakat, lalu secara kritis mengajak anak didik untuk mampu memposisikan diri dalam struktur masyarakat dan mengidentifikasi setiap

bentuk ketimpangan dan ketidakadilan dalam struktur tersebut.

yang ingin dicapai dari sana adalah bagaimana merombak tatanan yang timpang tersebut dan mentransformasikannya dalam situasi yang lebih baik. Tugas pendidikan yang menggunakan pendekatan ini adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar anak didik terlibat dalam proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik[30]. Dengan paradigma ini , konflik sosial bukan merupakan sesuatu yang ditabukan. Bahkan secara mutlak ia dianggap mutlak penting. *"In the last analysis, conflict is the midwife* (bidan bagi lahirnya) *consciousness"*, ujar Freire[31].

III. Mendayung Di Dua Karang

Bagaimanapun, pendidikan di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan obyektif. Industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat telah melahirkan sebuah kegairahan baru, dimana masyarakat berlomba-lomba mengejar berbagai bentuk pendidikan yang berfungsi pragmatis. Berbagai sekolah formal maupun kursus-kursus yang diadakan bisa dikatakan masuk dalam wilayah kerja yang sangat kapitalistis, karena ia kemudian berfungsi semata-mata sebagai produsen tenaga kerja trampil dan ahli. Hipotesis bahwa institusi pendidikan telah menjadi bagian dari industri tampaknya merupakan sebuah kesahihan.

Dalam konteks demikian, tantangan dalam dunia pendidikan pada masa sepuluh duapuluh tahun mendatang tidak lagi hanya sekedar bagaimana memberikan kontribusi bagi dunia industri. Ia juga harus memikirkan bagaimana konstruksi sosial yang tersusun sebagai akibat langsung proses pendidikan di negeri ini memberikan kemungkinan yang seadil-adilnya bagi setiap orang. Kekhawatiran bahwa bangunan sosial yang tersusun menjadi seperti yang terjadi dalam masyarakat Barat harus dijadikan sebuah haluan, bahwa kita tidak menghendaki konstruk sosial semacam itu, dimana eksploitasi manusia yang satu atas manusia yang lain menjadi satu hal yang wajar.

Dalam batas tertentu, memikirkan bagaimana format strategi dan kebijakan yang harus diterapkan dalam pendidikan di Indonesia ibarat mendayung di antara dua karang. Di satu sisi negara sebagai pelaksana dominan pendidikan membutuhkan tenaga-tenaga yang digunakan untuk menopang sstruktur sosial dan politik yang dibangunnya, di sisi lain pendidikan dengan model seperti itu juga memberikan peluang yang amat besar bagi dehumanisasi lewat sektor pendidikan. Dalam kacamata tertentu, tampaknya teori negatif tentang pendidikan yang dikemukakan **Bertrand Russell** dalam batas-batas tertentu menjadi relevan untuk melihat kondisi yang tengah terjadi. Pendidikan pada hakekatnya adalah pembentukan pribadi yang utuh , tetapi ketika proses ideal itu dijalani, akan terjadi peluang bahwa ia tidak akan patuh pada negara dan menjadi warga negara yang baik[32].

Bisa jadi, tantangan pendidikan yang harus dipecahkan oleh kalangan pendidikan bukanlah bagaimana menjawab kebutuhan industri seperti yang sekarang ini menjadi arus utama pendidikan kita. Tampaknya problem paling besar yang harus dihadapi adalah bagaimana arus utama yang seperti itu tidak lagi menjadi jalan satu-satunya. Bahkan yang nampak paling mendesak adalah bagaimana menciptakan pendidikan alternatif yang memberikan ruang kebebesan anak. Secara parsial, barangkali gerakan pendidikan semacam itu telah menjadi pilihan beberapa praktisi pendidikan. Tetapi mitos-mitos tentang pendidikan yang selama ini telah ada dalam benak masyarakat terdidik, yang lebih bersifat egoistis dan narsistik tidak akan runtuh melalui sebuah gerakan yang bersifat parsial. Struktur kesadaran yang telah tertanam secara massif dalam logika berpikir masyarakat harus dibongkar dengan sebuah praksis pendidikan yang bersifat membebaskan.

Maka, seperti yang dikatakan Ira Shor[33], konflik justru memberikan ruang bagi terciptanya struktur sosial yang baru. Transformasi sosial melalui pendidikan tidak mungkin dilakukan oleh negara karena seperti yang telah diuraikan di atas, negara memiliki logikanya sendiri dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan dalam perspektif negara, berfungsi melakukan fabrikasi manusia untuk menghasilkan produk yang sudah terdomestifikasi.

Karenanya, pendidikan yang dimaksudkan untuk sebuah transformasi sosial adalah pendidikan yang membentuk kesadaran kritis masyarakat. Dengan pendekatan ini, kesadaran bahwa struktur pendidikan yang demikian mengungkung masyarakat pada kesadaran palsu harus dianggap cacat dan dengan demikian perlu dibongkar, mutlak perlu ditumbuhkan dalam ruang-ruang pembelajaran. Konsep pendidikan yang dibatasi oleh empat dinding tebal bernama sekolahan adalah konsep keliru karena bagaimanapun, penting untuk menempatkan sekolah itu dalam relasi-relasi dengan struktur-struktur yang lainnya.

Memahami pendidikan yang memiliki relasi dengan struktur-struktur lainnya penting terutama karena kesadaran semacam inilah yang akan menjadi bola salju dalam sebuah transformasi sosial masyarakat. Di sinilah kemudian akan terjadi perang gagasan dan praksis dalam sebuah wilayah yang sama. Tantangan yang harus pertama harus dijawab adalah dimana masing-masing akan menempatkan diri dalam dua kepentingan besar yang amat kontradiktif itu. Menentukan pilihan seperti itu mutlak memerlukan resiko dan konsekuensi. Lalu upaya selanjutnya bagaimana kita memberikan respon positif untuk masing-masing pilihan itu sehingga transformasi sosial yang diharapkan tidak lalu berubah menjadi disrupsi sosial.***

CATATAN AKHIR

1Menurut Bertrand Russell, ada tiga aliran dalam melih tujuan pendidikan. Yang selama ini dilakukan oleh negar adalah aliran ketiga yang mengganggap bahwa pendidika bertujuan untuk melatih individu hidup dalam komunitas da mendidik menjadi warganegara yang baik. Aliran yang la

...anggapan bahwa tujuan pendidikan adalah memberikan ...ang tumbuh bagi perkembangan anak dan menyingkirkan ...garuh yang merintangi (aliran pertama). Yang lain lagi ...at bahwa tujuan pendidikan adala melatih individu dan ...ngembangkannya hingga batas maksimal (aliran kedua).

2 Meski secara teoritis negara tidak sama dengan ...erintah, dalam tulisan ini tidak dibedakan secara tegas, ...ata-mata karena dalam realitas konkrit menyangkut soal ...ndidikan di Indonesia terlampau sulit membedakan ...anya.

3 Selama pemerintahan Orde Baru, minimal telah ...kukan perubahan kurikulum pendidikan dasar dan ...engah sebanyak tiga kali. Pada setiap pergantian ...kulum, selalu juga diiringi dengan pergantian diktat-diktat.

4 Bahkan menurut kabar berita yang tidak dipublikasikan, ...erlakuan kurikulum nasional di Dilli Timor-Timur ...mbulkan persoalan serius karena tidak sesuai dengan ...at perkembangan anak didik di daerah tersebut. Untuk ...masi ini saya harus berterima kasih pada Cahya Widiyanto.

5 Institusi pendidikan menurut Luis Althusser termasuk ...h satu jenis ***ideological state apparatus***. Lihat Hari ...adi, **Luis Althusser: Telaah Negara dan Ideologi ,** ...m buku *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan,* ...media Pustaka Utama ,1993,Jakarta,hal. 56.

6 Gagasan mengenai sekolah yang bebas dari kekuasaan ...ara, sejauh ini baru merupakan sebuah utopia di negeri ... Sebaliknya, di negara-negara Amerika Latin seperti Brazil ... El Salvador, sekolah yang bisa bebas dari intervensi negara ... menjadi praksis. Dalam taraf tertentu, Dinamika Edukasi ...rya Romo Mangunwijaya memiliki tipologi yang mirip ...gan yang dilakukan oleh para pendidik di Amerika latin ...akni menyelenggarakan pendidikan untuk-anak-anak ...g miskin dan tersingkir. Dari model pendidikan seperti ... kemudian muncul nama besar dalam pendidikan ...formatif seperti Paulo Freire.

7 Mohtar Mas'oed menulis bahwa ideologi paling kentara ...am rezim Orde Baru adalah pembangunanisme (*...elopmentalism*) dan atas nama itu pula kemudian negara ...mplementasikannya dalam seluruh bidang kehidupan ...yarakat. Lihat dalam bukunya MochtarMas'oed, ... *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

8 Sebagai sebuah ilustrasi, penurunan angka penduduk ...ersekolah dari tahun 1980 hingga tahun 1990 mencapai ...uh lebih, yakni dari 5,4 % di tahun 1980 menjadi 2,1 % ...tahun 1990. Lihat Mita Noveria ,1994, dalam ...antoTirtosudarmo, *Dinamika Pendidikan dan ...agakerjaan Pemuda di Perkotaan Indonesia,* PPT-LIPI ... Gramedia, Jakarta 1994.

9 Dalam sebuah *slide* yang dibuat oleh Studio Audio Vi... Puskat Yogyakarta, digambarkan bagaimana ikan-ikan ... dalam sebuah lautan dididik, dipelihara, digemukkan ... setelah gemuk ia menjadi mangsa ikan-ikan yang lebih ...

10 Emil Salim,1989, **Sumber Daya Manusia dalam ...spektif ,** dalam *Analisis CSIS,* tahun XVIII no 3 Mei - ... CSIS,Jaskarta.

11 Habibie merupakan menteri yang paling banyak ...mimpin lembaga-lembaga strategis, terutama yang ...bungan dengan teknologi. Saat ini, lebih dari 40 lembaga ...a dalam tangannya, mulai dari BPPT, IPTN, PAL, sampai ... Otorita BATAM.

12 Model yang sama pernah digunakan oleh Meiji ketika ...kukan pembaharuan yang dikenal dengan Restorasi Meiji. ...ingkan dengan Michio Nagai, *Pergulatan Jepang dalam ...dernisasi Pendidikan*, Gramedia Pustaka Utama, ...arta 1993

13 Lihat Norman,J. Faramelli, *Technetics,* Friendship ... 1971.

14 Bandingkan dengan Claude Avares pada tulisannya "... Pengetahuan" dalam buku *Kritik Atas ...bangunanisme,* Wolfgang Sachs (ed), CPSM, Jakarta, 1995. Di situ Avares menunjukkan seringkali Ilmu Pengetahuan dianggap memiliki hubungan kongenital (bawaan) dengan pembangunan.

15 Pembedaan ini penting karena secara substansial keduanya berbeda. Ahli adalah orang yang menguasai satu bidang tertentu tetapi tidak berpikir untuk apa keahlian yang dimilikinya itu akan digunakan. Sementara profesional lebih menekankan pada peran etis yang disandangnya. Keahliannya hanya digunakan sejauh bagi kepentingan kemanusiaan. Profesional berasal dari kata Yunani *professio* yang berarti sumpah. Pada zaman itu, yang layak mengucapkan sumpah hanyalah tabib, tentara, pemuka agama dan hakim. Karena, keempat profesi inilah yang dipandang merupakan profesi yang menentukan kebaikan masyarakat. Maka kalau sekarang seseorang mengaku profesional, orang itu terikat dengan sumpah untuk mempergunakan keahliannya demi kebaikan masyarakat.

16 Lihat J. Inocencio Menezes, dalam *Manusia dan Teknologi, telaah filosofis J. Ellul,* Kanisius, Yogyakarta, 1986, halaman 12-14.

17 Lihat Herry Priyono, **Teori Keadilan John Rawls** , dalam buku *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993

18 Nasikun, **Isu Obyektivitas dan Sumbangan Ilmu Sosial bagi Pembangunan Nasional** , makalah dalam Seminar yang diselenggarakan AIPI, Desember 1994

19 Mudji Sutrisno, **Sekali Lagi Pengaksaraan,** makalah, tidak dipublikasikan

20 Istilah ini berasal dari Paulo Freire dalam bukunya *Pendidikan Kaum Tertindas,* terjemahan LP3ES.

21 Lihat Petrus Sunu Hardiyanto, *KUASA DAN PENGETAHUAN DALAM KELAHIRAN INDIVIDU MODERN, Telaah Foucoult atas Hubungan Kuasa dan Pengetahuan dalam Teknologi Politis Terhadap Tubuh,* Skripsi STF Driyarkara, Jakarta.,1992.

22 Tempat persisnya Sekolah Mettray berada, tidak sempat disajikan dalam tulisan ini. Prakiraan bahwa Sekolah Mettray ini merupakan sekolah biasa dan bahkan tersingkir merupakan hasil diskusi dengan penulis dengan Sunu Hardiyanto. Meski demikian tanggung jawab atas prakiraan ini sepenuhnya ada pada penulis.

23 ***Link and match*** adalah konsep resmi yang dicetuskan oleh Mendikbud Wardiman, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tenaga-tenaga pembangunan, terutama di sektor industri.

24 Proses ***reifikasi*** dalam pendidikan berarti menjadikan hubungan antar manusia sama seperti hubungan antar benda, yang kehilangan dimensi psikologis dan humanisnya.

25 Model panoptikan yang dimaksud di sini berarti sebuah mekanisme pengamatan dimana si pengamat bisa melihat secara keseluruhan setiap proses perkembangan fisik dan intelegensi si anak. Panoptikan berasal dari kata *pan* yang berarti keseluruhan;seluruhnya dan *optic* yang berarti melihat.

26 Lihat Mansour Fakih, **Pendidikan untuk Transformasi Sosial** , makalah dalam sarasehan di Wisma Realino yang diselenggarakan oleh Yayasan Cakra Indonesia.

27 Dalam film ***Riding The Tiger***, Roeslan Abdulgani menuturkan bagaimana anak-anak pribumi pada zaman kolonial Belanda, mengalami perlakuan diskriminatif dengan anak-anak bangsa Belanda.

28 Lihat Paulo Freire , dan Ira Shor, *A Pedagogy for Liberation, Dialogues on Transforming Education;* Bergin & Garvey Publisher Inc, Massachusets, 1987,hal. 171 dan seterusnya.

29 Pandangan ini merupakan konsepsi Jawa dimana guru adalah orang yang wajib ***digugu*** (dipercaya) dan ***ditiru*** (dicontoh). Dalam realitas konkrit, masih banyak dijumpai konsepsi yang semacam ini dalam masyarakat kita.

30 Mansour Fakih, *Pendidikan untuk Transformasi* ...

31 Paulo Freire, dan Ira Shor, *opcit* h. 176

32 Lihat,Betrand Russell,*Pendidikan dan Tatanan Sosial,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,1993.

33 Freire,Paulo, dan Shor, *Iraibid* h.177***

Peran Publik Perempuan Menjelang Integrasi Dunia :

Beberapa Akar Masalah Yang Tertinggal

ASPEK MENARIK DARI KECENDERUNGAN MASA DEPAN ADALAH PEREMPUAN. DIMANA TERJADI PERGESERAN DARI DOMINASI LAKI-LAKI KEPADA MUNCULNYA PERAN PEREMPUAN. HAL INI DITANDAI OLEH MAKIN BANYAKNYA PEREMPUAN YANG MEMASUKI SEKTOR PUBLIK DAN MUNCULNYA PENGUSAHA-PENGUSAHA PEREMPUAN. DALAM KONTEKS INDONESIA, TREND PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKTOR PUBLIK SUDAH TERASAKAN. HANYA SAJA BANYAK KESURAMAN YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI KONDISI RIIL PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK. KEBANYAKAN PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKTOR PUBLIK BERADA DALAM STATUS "RENDAHAN" YANG BERGAJI MURAH. KEPUTUSAN POLITIK TETAP SAJA DI TANGAN LAKI-LAKI. DENGAN KATA LAIN, BANYAKNYA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN TIDAK PARALEL DENGAN ADOPSI IDEOLOGI EMANSIPASI PEREMPUAN.

Paramasinta Sitaresmi,
Kini sedang menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi UGM jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.
Tahun 1992 -1995 aktif di Badan Penerbit Pers Mahasiswa UGM.
Tahun 1994 - 1995 aktif di Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
Sejak tahun 1993 menjadi staf di Lembaga Studi & Pengembangan Perempuan & Anak (LSPPA) Yogyakarta.

Kecenderungan dan kegelisahan

Pada penyusunan Megatrend 2000 Naisbitt mendapati suatu trend yang spektakuler berupa peningkatan arus perempuan[1] di pasar kerja dan hal ini mendorongnya mencermati pergeseran tersebut secara khusus. Pokok kesimpulan Naisbitt menyebutkan bahwa transformasi struktural di pasar kerjalah yang semakin mendorong banyaknya perempuan di sektor kerja. Menguatnya sektor jasa, terutama sektor jasa informasi, mengakomodasi kemampuan spesifik perempuan, yang tidak membutuhkan banyak tenaga fisik dalam bekerja.

Sebuah survai yang dilakukan oleh majalah *Asia Business* memperlihatkan kenyataan serupa. Kenaikan pekerja perempuan di Asia mencapai banyak kemajuan dari sisi kuantitas maupun kualifikasinya dalam lima tahun terakhir[2].Fenomena tersebut muncul pula dalam lingkup Indonesia. Naiknya partisipasi angkatan kerja di Indonesia dari 50% pada periode 1970-1980 menjadi 55% pada 1990 senantiasa diikuti dengan kenaikan partisipasi angkatan kerja perempuan, dari 33% menjadi 36%[3]. Transformasi lain terjadi di bidang pendidikan tenaga kerja Indonesia. Pencapaian tingkat pendidikan terjadi secara mengesankan. Dalam sepuluh tahun terakhir terjadi tambahan sekitar enam juta tenaga kerja berpendidikan menengah , dimana dua juta diantaranya adalah perempuan, dan 1,2 juta tenaga kerja lulusan akademi dan universitas, dimana hampir setengah juta lulusan tersebut adalah perempuan. Secara keseluruhan, 37% kenaikan tingkat pendidikan tenaga kerja dari dasar ke menengah atau tinggi, 12% diantaranya adalah tenaga kerja perempuan[4]. Tampak bahwa kenaikan kesejahteraan generasi pendahulunya yang di sebabkan oleh tingkat pendidikan, telah membentuk kesadaran baru untuk menyediakan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi bagi keturunannya.Situasi ini memperlihatkan keselarasan arah keterlibatan perempuan dalam pasar kerja secara

kuantitas maupun kualitas di Indonesia dan trend serupa yang terjadi secara global.

Sampai disini masyarakat telah dibawa pada sebuah fakta akan adanya penguatan arus perempuan di pasar kerja. Namun fakta ini hanya akan menghasilkan suatu pembahasan *trendy* bila kita melewatkan begitu saja sebuah pertanyaan yang sebenarnya menjadi dasar diskursus perempuan di pasar kerja, yaitu; *mengapa kita masih dan nampaknya akan terus membahas secara khusus keterlibatan perempuan di sektor publik, dalam hal ini pasar kerja?* Sedangkan pembahasan serupa di kalangan tenaga kerja laki-laki tidak dilakukan, maupun ketika dilakukan, kelompok tersebut dibahas sebagai representasi umum, bukan sebagai satu kelompok yang khusus. *Sedemikian spesifiknyakah kondisi perempuan di sektor publik hingga mendorong banyak keingintahuan untuk menganalisanya? Bagaimanakah kondisi riil perempuan di sektor publik saat ini? Apakah yang menjadi handicapped bagi pengembangan aktualisasi kemanusiaannya? Mampukah transformasi menuju struktur informasi menyediakan kondisi sektor publik yang lebih nyaman bagi perempuan?*

Kodrat dan Domain Perempuan

Besarnya keingintahuan yang pada akhirnya mendorong banyak studi mengenai perempuan di sektor publik sebenarnya diawali oleh sebuah anggapan atau asumsi umum bahwa perempuan tidak berdomain di sektor publik, tetapi lebih di sektor domestik. Kenyataan bergeraknya perempuan ke sektor publik akhirnya menimbulkan suatu keterperanjatan di kalangan pengamat sosial dan membuahkan berbagai perdebatan atas peran publik perempuan.

Peran publik perempuan, dalam hal ini, menjadi sebuah titik masuk perdebatan yang amat majemuk, menyangkut eksistensi manusia berjenis kelamin perempuan tersebut. Pluralitas pendapat ini pada dasarnya mencerminkan keragaman latar belakang sosiologis para pengamat, sehingga tidak atau belum pernah dijumpai sebuah pendapat dan sikap yang cukup universal dan tidak bersentrum pada pandangan sosiokultur tertentu mengenai perempuan. Pandangan universal ini sebetulnya amat dibutuhkan untuk membentuk sosok perempuan sebagai manusia utuh, yang tidak melulu dinilai berdasar kodrat biologisnya belaka. Kodrat biologis mencakup kondisi yang *given* atau berasal dari Pencipta—oleh karenanya digunakan kata kodrat—dan bersifat biologis khas perempuan. Dengan definisi tersebut maka yang disebut sebagai kodrat perempuan hanya_mencakup menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui.

Beberapa Pendekatan

Dalam khasanah antropologi terdapat pendekatan antropologis feminis milik Ortner[5] yang menjelaskan pembedaan peran tersebut melalui fenomena domestik *versus* publik ini sebagai suatu pandangan sosiologis, yang merelasikan perempuan dengan alam *(nature)* karena kemampuannya melangsungkan keturunan, sedangkan laki-laki dengan budaya *(culture),* teknologi dan kekuatan, yang senantiasa berperilaku mengatasi alam.

Model ini yang kemudian mendisagregasi peran jenis kelamin sesuai lingkup kodrati-biologis masing-masing. Perempuan bertempat di lingkup domestik dengan tugas menjaga kelangsungan hidup, sedang laki-laki bertempat atau berdomain di sektor publik yang senantiasa bergerak dinamis mengatasi alam. Sifat mengatasi alam dari budaya ini pada konkretnya mengejawantah dalam relasi antar jenis kelamin dalam kesehariannya.

Pendekatan diatas pada perkembangan teoritiknya berbaur dengan dua jenis analisa, yang secara garis besar dapat di kelompokkan sebagai; *pertama,* **pendekatan gender atau analisa gender**. Analisa ini mendasarkan pada konsekuensi-konsekuensi akibat adanya rekayasa, kodifikasi, dan pelabelan pada masing-masing jenis kelamin menurut konteks sosiokultur setempat. Kodifikasi ini dikonstruksikan dan diimplementasikan ketika melangsungkan interaksi antar jenis kelamin dalam berbagai aspek.

Pengaruh positif dari proses konstruksi ini akan diterima pihak yang mendapat kode dan label yang positif, menurut sosiokultur setempat. Dalam situasi ini keberpihakan dan kepentingan pranata sosiokultur pada salah satu jenis kelamin mempengaruhi kesejajaran atau ketimpangan gendernya. Bila pranata sosialnya tidak mengindahkan kepentingan spesifik perempuan -yang secara kodrati biologis berbeda dari laki-laki- terbentuklah suatu sistem sosial yang disebut *sistem patriarki,* yakni suatu sistem yang berpusat pada sosok laki-laki yang dituakan dalam hierarki keluarga, dimana ia berperan absolut dalam pengambilan keputusan dan perwalian anggota keluarganya[6], untuk itu pula mendapatkan berbagai *previlege* atas peran publik yang diperolehnya tersebut.

Istilah patriarki mengacu pada relasi kekuasaan dimana kepentingan perempuan disubordinasikan oleh kepentingan laki-laki. Kekuasaan patriarkal berlaku pada pengertian sosiologis yang dibentuk dari perbedaan kodrati biologis perempuan-laki-laki. Peran perempuan berbeda dengan peran laki laki dikarenakan kondisi kodrati biologisnya[7]. Disini tampak kedekatan konsepsi patriarki dengan penjelasan antropologis Ortner.

Patriarki berada dalam kemasyarakatan dalam berbagai bentuknya, mulai dari pembagian kerja secara gender, pelembagaan prokreasi[8], sampai internalisasi norma-norma feminitas, yang lebih banyak menggariskan pada keindahan fisik perempuan, melalui berbagai media. Kaum strukturalis melihat fenomena penyerapan nilai-nilai patriarki ke dalam struktur sebagai pokok analisa untuk menjelaskan berbagai subordinasi yang dialami perempuan.

Yang *kedua* adalah pendekatan **feminin-maskulin**. Analisa ini melihat bahwa ketimpangan

The Museum of Modern Art, New York TIME

Woman I, 1950-1952

relasi yang berbentuk subordinasi perempuan dan pengakuan atas supremasi laki-laki juga berawal dari patriarki melalui asumsi yang menyatakan bahwa sifat kultur yang bersifat mengatasi dan mengekspolitasi alam memiliki kedudukan dan nilai yang lebih positif. Ini berimplikasi pada pemberian nilai yang lebih positif pada sifat dan bentuk tindakan eksploitatif, agresif, penuh kekuatan, rasional, publik, yang didefinisikan sebagai sifat maskulin, dan dilekatkan pada laki-laki sebagai wakil dari kultur. Sebaliknya nilai-nilai memelihara, melestarikan, perdamaian, kelembutan, domestik, dan emosional-yang dilekatkan pada perempuan sebagai wakil dari alam-dinilai lebih rendah dan harus diatasi oleh nilai maskulin.

Pendekatan ini lebih melihat penilaian *bias*(berat sebelah) akan sifat maskulin yang masih terus di supremasikan atas sifat feminin, sebagai penyebab subordinasi perempuan. Masalah struktural ditempatkan sebagai satu dari sekian faktor yang mempengaruhi penilaian *bias.* Analisa ini tidak mengkaji secara khusus proses penstrukturan nilai-nilai feminin-maskulin ke dalam masyarakat, dan aspek politis yang timbul dari tarik-menarik kepentingan pihak-pihak dalam struktur, yang mendorong terjadinya penstrukturan tersebut.

Beberapa Masalah

Suatu kajian statistikal lanjutan dan beberapa riset pendahuluan dilingkup Indonesia , akan memperjelas ilustrasi-ilustrasi suram yang masih merupakan bagian dari kondisi riil perempuan di sektor publik. Kesuraman tersebut, beserta segala dilema yang menyelimuti peran publik perempuan, mempertegas indikasi ada dan bekerjanya kedua analisa diatas.Bias gender dan bias nilai pada dasarnya menjadi kerangka penjelas tentang ketimpangan kualitatif kesejahteraan perempuan di pasar kerja, dan secara khusus melihat faktor-faktor non ekonomis yang melandasinya.

Dilema Peran Publik. Kondisi kodrati biologis sebagai salah satu penerus kehidupan yang *fixed dan given* ini kemudian menjadi semacam ukuran pembeda bagi peran sosial perempuan yang *dynamic,* berkembang sesuai konteks Karenanya tak jarang muncul keganjilan dan ambivalensi yang disebebkan inkontekstualisasi itu. Mayoritas dari analisa ini menyatakan ketidakberatannya atas peran sosiopublik perempuan yang memang menjadi wajar dengan tuntutan konteks kebutuhan saat ini, namun berbagai syarat konservativ tetap dipikulkan. Pada

...nya ini membuat perempuan di sektor publik ... sepenuhnya dapat mengaktualisasikan ...mpuan kemanusiaannya sebab ia masih dilekati "keharusan" untuk menunaikan kerja domestik/ ...rumahtanggaan yang diidealkan oleh masyarakatnya[9].

Ambivalensi pendapat mengenai peran perempuan ini membuahkan hasil yang pahit. Pertama, mayoritas perempuan akan tetap dalam ...imbangan psikologis untuk memilih peran yang ...betul diyakininya. Kondisi penuh keraguan ini ...ikasikan dengan maraknya perbincangan mengenai peran publik perempuan dalam berbagai perspektif. *Kedua*; perempuan dituntut berhasil di ... pekerjaan besar sekaligus. Perempuan menanggul beban ganda, dan bukan peran ganda. ...nya mitis ideal atas peran domestik yang ...pakan warisan internalisasi kultural lampau juga ...adikan *double* peran ini semakin memperoleh pembenaran. Dengan terdapatnya kedua konsekuensi ini, peran publik perempuan akan tetap menjadi persoalan yang dilematis.

Kepentingan Melembagakan Gender. Salah satu fenomena ketenagakerjaan dari perempuan yang mampu memperlihatkan bekerjanya beberapa kepentingan adi kuasa adalah fenomena kelenturan ... adaptasi pekerja perempuan terhadap pergeseran struktur perekonomian. Pekerja perempuan akan bergerak mengisi sektor-sektor perekonomian yang dijadikan prioritas pembangunan. Bila dalam suatu periode sektor jasa menggeser dominasi sektor industri, maka secara empirik akan tampak pergeseran pekerja perempuan dari industri ke jasa. Pola semacam ini tampak dengan ... di negara-negara berkembang yang pergeseran strukturalnya berlangsung cepat , atau tepatnya selalu diusahakan, dalam waktu singkat untuk mengejar keterbelakangannya.

Faktor yang mendasari transparansi pola semacam ... di negara berkembang adalah ketergantungan negara tersebut secara ekonomis dan teknologis pada negara atau lembaga pemberi bantuan. Ketergantungan tersebut membawa implikasi berupa perubahan kebijakan pembangunan di negara pemberi bantuan akan segera berimbas pada kebijakan negara penerima bantuan.

Gejala ini menonjol manakala perekonomian Indonesia mulai mendasarkan perkembangannya pada sektor industri dan memekanisasikan sektor pertaniannya serta meningkatkan produktivitasnya dengan paket teknologi Revolusi Hijau. Teknologi pertanian, meliputi mesin dan jenis benih padi yang dipilih pada kenyataannya lebih sesuai dengan kemampuan spesifik laki-laki. Konsekuensi dari pola pengembangan teknologi pertanian yang banyak menuntut kerja fisik demi efisiensi waktu dan hasil semacam itu, adalah penurunan keterlibatan perempuan di pasar kerja, sementara tenaga kerja laki-laki meningkat menggantikannya.[10] Tetapi kelebihan tenaga kerja perempuan ini tidak mengalami kepercumaan sebab secara selaras terjadi kenaikkan jumlah angkatan kerja perempuan di sektor manufaktur, sektor yang sedang dijadikan *leader* pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar tenaga kerja perempuan ini berada di sektor industri pengolahan makanan. Kenaikan jumlah tenaga kerja perempuan di sektor manufaktur tersebut dapat dilihat sebagai gejala adanya pergeseran bidang kerja

Tabel.1.
Rata-rata pendapatan/gaji bersih sebulan (Rp) menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin.

Lapangan kerja	Gaji Bersih	
	Perempuan	Laki-laki
Pertanian	27. 225	53. 219
Industri	51. 257	110. 199
Perdagangan	71. 896	114. 288
Jasa	80. 528	123. 648
Lain-lain	51. 714	90. 198

Sumber: BPS, **Indikator Kesejahteraan Wanita 1992.**

perempuan sejalan dengan perubahan struktur perekonomian.[11]

Dalam kasus tersebut, adanya kepentingan ekonomis antar dua pihak yang memiliki kekuasaan—dalam konteks ini negara donor dan negara penerima bantuan—secara langsung telah mengakibatkan marjinalisasi pekerja perempuan dari sektor pertanian. Benih padi dan teknologi perontok padi yang mereka ciptakan ternyata tidak lepas dari bias gender. Artinya, dalam proses penciptaan teknologi perontok padi dan dalam pemilihan kebijakan pembangunan sektor pertanian, kepentingan spesifik perempuan tidak diakomodasi. Perontok padi dan varietas padi unggul yang pendek mendiskriminasikan perbedaan fisik pekerja perempuan yang biasa menuai dengan *ani-ani*.12

Tabel.2.
Rata-rata Pendapatan/gaji bersih sebulan (Rp) menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin.

Capaian Pendidikan	Gaji Bersih	
	Perempuan	Laki-laki
Tidak/belum/tidak tamat SD	30 149	61 699
Sekolah Dasar (SD)	34 970	69 333
SLTP	61 920	115 809
SLTA, Dipl I & II	101 194	137 732
Akademi, Universitas	177 880	260 227

Sumber: *Ibid.*

Tampak jelas adanya marjinalisasi atau penyingkiran perempuan dari sektor pertanian yang tak terhindarkan. Tak terhindarkannya marjinalisasi—yang pada dasarnya membuahkan pemiskinan perempuan secara masal ini— tentu tak lepas dari

hal ihwalnya, yaitu *bargain* yang dilakukan antar kedua negara tersebut. Satu pihak menghendaki modernisasi sektor pertanian, sedang pihak lain yang bersedia membantu, butuh mengalihkan berbagai teknologi usang dinegerinya. Kedua kepentingan diatas bertemu dan berbalut program pembangunan.

Sejauh ini terlihat bahwa nilai-nilai *patriarki* yang tidak mengindahkan kepentingan spesifik perempuan telah *diabsorbsi* oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk lebih jauh lagi, dilembagakan salah satunya melalui program pembangunan intensifikasi pertanian. Mekanisme ini berulang lagi pada era industrialisasi di Indonesia. Kembali pengacuhan kebutuhan spesifik perempuan, menghasilkan kebijakan industrialisasi yang bias.

Negara melalui pemerintah menggunakan kelimpahruahan tenaga kerja Indonesia sebagai pembenar untuk memberlakukan upah murah. Upah murah ini dimaksudkan sebagai pemancing kedatangan para penanam modal di Indonesia.[13] Kebijakan ini tidak memperbaiki keadaan pekerja umumnya. Namun bagi pekerja perempuan, kondisinya menjadi lebih sulit. Sebab selain penekanan upah yang rendah, mereka juga mengalami tindak diskriminasi, yaitu suatu tindakan pembedaan yang didasarkan pada asumsi atau steriotipe tertentu. Dalam konteks diskriminasi pekerja perempuan maka asumsi yang dipakai berkenaan dengan kondisi kodrati biologisnya.

Tabel.3.
Prosentase penduduk diatas usia 10 tahun yang menjadi kepala rumah tangga menurut daerah dan jenis kelamin.

Tahun	Kota		Desa	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1980	7,06	45,75	8,52	52,61
1985	7,15	46,88	7,68	53,09
1990	7,30	47,40	7,90	53,60

Sumber: *Ibid.*

Sebagaimana pekerja manufaktur laki-laki, mereka mengalami persoalan independensi serikat yang seharusnya dapat memperjuangkan hak-hak berupa upah minimum, tunjangan kesejahteraan dan cuti. Namun kembali pada kekhasan kondisi fisiknya, pekerja perempuan masih mengalami berbagai kesulitan akibat adanya tindakan diskriminatif yang berkaitan dengan hak reproduksinya. Dalam rekapitulasi faktor penyebab unjuk rasa yang dilakukan Departemen Tenaga Kerja urgensi pengakuan hak reproduktsi pekerja perempuan tampak jelas. Daftar tersebut memperlihatkan bahwa persoalan upah dan tunjangan menduduki tempat teratas, disusul oleh persoalan cuti hamil dan cuti haid diperingkat selanjutnya.

Rendahnya penilaian fungsi reproduktif ini dimata kepentingan penumpuk kapital memunculkan suatu premis bahwa pekerja perempuan tidak produktif. Tuntutan alamiah berupa kehamilan dan menstruasi yang melemahkan fisik sebagian besar perempuan dijadikan argumen untuk menyatakan ketidakproduktifan mereka.

Disini, kepentingan untuk melembagakan gender berikut nilai-nilai patriarkinya, muncul di pihak industrialis yang bertujuan mengumpulkan laba maksimum. Di Indonesia, kelompok pengusaha yang tergabung dalam Apindo pernah mendorong ditiadakannya cuti haid dan hamil karena dianggap tidak mengefisienkan kerja perusahaan.14

Ketimpangan gender ini diperburuk dengan masih dipandang remehnya fungsi reproduktif perempuan yang bersifat domestik dan alamiah tersebut. Jaminan-jaminan kesejahteraan untuk melangsungkan fungsi reproduksi belum secara konsekuen dilaksanakan, sekalipun secara formal telah dijamin dengan UU No 7/1984.[15] Campur tangan dari kelompok patriarkal lain, seperti pemuka masyarakat dan agama,[16] semakin membantu pelembagaan gender. Dari premis ketidakproduktivan itu kemudian diturunkan kebijakan untuk menggaji pekerja perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki.

Kesenjangan, Diskriminasi, Tekanan. Tanpa bermaksud menimbulkan kehebohan statistik, angka-angka berikut dapat menggambarkan senjang pengupahan antara pekerja perempuan dan laki-laki, yang nyata terjadi. Di sektor pertanian prosentase perbedaannya mencpai 95,48%, sektor industri sebesar 115,01%, sektor perdagangan 58,96%, dan sektor jasa sebesar 53,59%. Pekerjaan lain-lain yang tak terdefinisi dalam keempat sektor tersebut—termasuk didalamnya sektor informal— mencapai angka kesenjangan 74,42%.

Kesenjangan besar terjadi di lapangan pekerjaan yang lebih banyak membutuhkan kerja fisik seperti pertanian dan industri, bahkan sektor industri menempati urutan kesenjangan yang paling tajam. Pada jenis-jenis lapangan kerja yang tidak banyak membutuhkan ketrampilan fisik, angka kesenjangan tampak semakin mengecil. Disini, terlihat bahwa diskriminasi upah semakin menonjol pada kondisi dimana pekerja perempuan tidak mampu memenuhi kriteria keunggulan fisik pada jenis-jenis pekerjaan pertanian dan industri. Kedua sektor ini juga merupakan sektor yang memberikan renumerasi terendah, dibanding ketiga sektor lain. Jadi tampak bahwa perempuan pekerja dari golongan berpendapatan rendah mendapatkan *double* tekanan; pertama dari nominal upahnya yang rendah, kedua dari kesenjangan upah yang terjadi.

Pendapatan pekerja juga bervariasi menurut capaian pendidikan yang diperolehnya. Terlihat bahwa kesenjangan terbesar terjadi bila capaian pendidikannya rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikannya kesenjangan upah ini semakin menyempit. Tampaknya situasi terburuk kembali

...ma golongan pekerja kasar yang berpendidikan ...dah.

...ontribusi Ekonomis Pekerja Perempuan. Faktor ...bedaan upah menurut jenis kelamin pekerja juga ...cu oleh asumsi bahwa pendapatan dari pekerja ...mpuan hanya sebagai suplemen dan bukan ...ber pendapatan utama. Namun dalam hal ...genaan pajak penghasilan, baik pendapatan ...ja laki-laki maupun perempuan dikenai proporsi ... sama besarnya. Perhitungan ini menjadi penting ...k melihat kontribusi perempuan kepada ...konomian nasional.

...anpa berbagai tunjangan untuk anggota ...arga, nilai nominal pendapatan pekerja ...mpuan akan lebih kecil daripada laki-laki. ...gan dikenakannya pajak yang sama besarnya, ... nilai upah riil yang diterima mereka menjadi ... lebih kecil lagi, padahal baik laki-laki maupun ...mpuan bekerja dalam jumlah jam_yang sama. ...ti untuk setiap satu satuan jam kerja, pekerja ...mpuan menyumbang produktivitas lebih besar ...ada pekerja laki-laki. Penilaian yang lebih kecil (...*dervalued*) atas produktivitas perempuan ini ...berikan suatu keuntungan produktif bagi negara.

...ersoalan kriteria pemimpin rumah tangga juga ...adi faktor penyebab pendapatan perempuan ...ggap sebagai suplemen belaka. Di Indonesia, ...mpin keluarga dianggap selalu laki-laki. Hal ini ...ku sebagai sebuah *common belief*, sekalipun ...efinisinya, yang disebut sebagai kepala rumah ... adalah, " setiap orang yang bertanggung jawab ... ekonomis dan psikologis terhadap anggota ...rganya."[17]

...ecara empirik tampak adanya perempuan-...mpuan yang berperan sebagai kepala rumah ...gga. Secara umum jumlah perempuan yang ...adi kepala rumah tangga mengalami kenaikan ...kipun kecil. Kelompok perempuan desa yang ...adi kepala rumah tangga relatif lebih besar dari ...mpok perempuan kota. Gejala ini merupakan ...sekuensi logis dari bermigrasinya para suami ke ... untuk menjamah lapangan kerja non pertanian ... menjanjikan pendapatan lebih tinggi. Keabsenan ...n suami menuntut mereka memperluas peran ...adinya, termasuk dalam hal peran-peran publik.[18]

...ontribusi ekonomis perempuan dalam skala ...onal pada akhirnya akan terhitung kecil, sebab ... pekerjaan di sektor publik saja yang dihitung ...gai ukuran kontribusi angkatan kerja. Pekerjaan ...gurus Rumah Tangga kemudian digolongkan ...m kategori Bukan Angkatan Kerja. Disini berarti ... pekerjaan tersebut tidak memiliki proksimasi ...terial, sehingga sekalipun pekerjaan itu ...mpunyai jam kerja 12 jam per hari, tidak tampak ... perolehan materi. Dan karena masih banyaknya ...lah perempuan di sektor Mengurus Rumah ...ngga, maka secara agregatif,nilai yang ...mbangkan perempuan melalui produktivitas ...erialnya, tidak akan besar.

...impulan dan Saran

...ampaknya, kaum perempuan baru boleh sedikit berlega nafas oleh prospek yang diramalkan Naisbitt. Deretan masalah yang tertinggal menuntut kerja keras dan kerjasama dengan berbagai pihak yang bervisi egaliter dalam pengentasannya. Tanpa perubahan struktural—misalnya dengan perbaikan UU pajak penghasilan, proksimasi material atas pekerjaan domestik— dan transformasi kultural yang akan membuahkan eliminasi segala asumsi dan steriotip tentang peempuan yang tidak kontekstual lagi, kondisi perempuan dalan pasar kerja informasi secara hakiki tidak akan membaik. Masih akan tertingal persoalan pelembagaan gender dan diskriminasi dalam kemasan-kemasan yang baru.

Disini visi egaliter menjadi semakin mendesak untuk diintrodusir kepada setiap pihak, tanpa membedakan jenis kelaminnya, untuk mengatasi permasalahan gender dan bias penilaian feminitas yang telah mengurat akar akibat peninggalan kultur patriarkal. Problem tersebut menjadi semakin *complicated* dengan terjadinya *intertwined* antara kultur dan pihak-pihak dalam struktur yang senantiasa berupaya melanggengkan kedudukannya. Karenanya,upaya penyelesainnya perlu ditempuh melalui jalur kultural maupun struktural.

Dan kesadaran *kognitif-afektif* akan ketertindasan perempuan akibat tebaran dan pelembagan nilai patriarki saat ini, menjadi modal utama perjuangan kesetaraan.[19] Pada dasarnya, perjuangan ini tidak berbeda dengan usaha pemanusian lainnya yang menentang segala bentuk penindasan dan kekerasan terhadap pihak tertentu. Ini pula yang menjadi *main idea* dari gerakan perempuan, dan bukan persamaan mutlak yang sudah jelas kemustahilannya. Misi gerakan perempuan justru berada pada pengakuan atas perbedaan kodrati biologis perempuan-laki-laki dan upaya untuk menempatkan perbedaan tersebut secara proporsional dan adil, melalui sebuah proses tawar-menawar yang seimbang.

Disini, dengan jujur kita harus mulai mengakui riil dan eksisnya ketidakadilan yang dirasakan perempuan, dan berhenti menuduh setiap upaya yang menuju kesana, sebagai upaya yang sia-sia bahkan mengada-ada.***

CATATAN AKHIR

1. Tanpa bermaksud mendiskreditkan kata wanita yang lebih sering dipakai sekarang, kata perempuan akan digunakan dalam seluruh tubuh tulisan ini.. Bagi penulis, kata perempuan justru memiliki *sense* yang lebih tinggi karena berakar dari kata empu, sosok yang dianggap memiliki kemampuan lebih dalam bidangnya atau pakar, dalam istilah sekarang . Alasan *kedua*, bersifat historis, yaitu dari Konggres Perempuan Indonesia. Konggres tersebut merupakan capaian yang luar biasa dari perempuan Indonesia, sebuah kemenangan politis nasional sekaligus politis personal bagi kaum perempuannya.

2 *Asia Business*, November 1993, halaman 24.

3 Data bersumber dari Biro Pusat Statisitik, *Sakernas*, terbitan berbagai tahun yang terkait.

4. Sumber data, *ibid*.

5. Ortner (1974), dalam Henrietta L. Moore, *Feminism and Anthopolgy*, Polity Press dan Basil Blackwell, halaman

21.

6. Diadaptasi dari Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, *Feminisme dan Relēvansinya*, 1995,Gramedia & Kalyanamitra,Jakarta, halaman 25.

7. Chris Weedon(1987), *Feminist Practice & Poststructuralist Theory*, Basil Blackwell, Oxford dan New York, halaman 2.

8. Keluarga Berencana sebagai sebuah program pembangunan merupakan gambaran akan intervensi struktur, yang diwakili negara, kedalam persoalan prokreasi yang masih dianggap sakral dan privat, menurut pandangan konservatif .

9. Salah satu dari pendapat yang ambivalen muncul dari Irwan Abdullah, **Kehidupan Wanita dan Peran yang Beragam**, *Kedaulatan Rakyat*, 15 Agustus 1995. Kebimbangannya tergambar dari tuduhan pada gerakan feminis yang semakin maskulin yang dianggapnya tidak memahami kebutuhan khas perempuan.

10. Pudjiwati Sajogo (1983), *Peranan Wanita dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, diterbitkan untuk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS) oleh CV Rajawali, Jakarta.

11. *Ibid.*

12. **Ani-ani** adalah sejenis pisau kecil yang ringgan. Digunakan dengan cara digenggam. Oleh karenanya alat ini lebih sesuai dipakai untuk jenis padi lokal yang berbatang tinggi. Untuk varietas unggul yang jauh lebih pendek, ani-ani sulit digunakan. Penuaian dilakukan dengan menebas, dan tenaga laki-lakilah yang sesuai dengan alat sabit penebas ini.

13. Celia Mather (1985), **Rather than make trouble, it's better just to leave'; behind the lak of industrial strife in the Tangerang region of West Java**, dalam Haleh Afshar (eds): *Women Work and Ideology in the Thirld World*, pp.153,Tavistock Publication,London.

14. *Kompas*, 22 Desember 1994, halaman 13.

15. UU No 7/1984 memuat persoalan diskriminasi terhadap perempuan. UU ini merupakan konsekuensi dari peratifikasian *CEDAW atau Convenstion on Eliminating All Forms of Discrimination Againts Women* Atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan.

16. *Ibid.*, deskripsi sepanjang halaman 166-172.

17. Definisi ini berasal dari BPS, *Indikator Kesejahteraan Wanita 1992.*

18. Dua kelompok perempuan di Desa Jothangan, Kecamatan Bayat, Klaten yang sedang dalam proses penelitian internal saya, menunjukkan fenomena-fenomen ini dengan lugas.

19. Istilah *kesetaraan* mengacu pada konteks politis personal, yakni setara atau sama kuat baik posisi maupun peluangnya dalam melakukan tawar-menawar atas kepentingan spesifiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Afshar, Haleh ,1985, (eds), *Women Work and Ideology in The Third World,* Tavistock Publication,London.

Bashin, Kamla dan Nighat Said Khan ,1995, *Feminisme dan Relevansinya,* Gramedia dan Kalyanamitra, Jakarta.

------,1992,Biro Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Sosial Wanita,* Biro Pusat Statistik.,Jakarta.

Moore, Henrietta L ,1988, *Feminism and Anthropology*, Polity Press and Basil Blackwell.,Oxford and New York.

Weedon, Chris,1987, *Feminist Practice & Poststructuralist Theory,* Basil Blackwell, Oxford and New York.

◆◆◆◆◆

Birokrasi Indonesia : Kegagalan Transformasi Modern

BIROKRASI, IDEALNYA DIORIENTASIKAN DALAM KERANGKA FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT (PUBLIK SERVICE), RASIONAL , DAN DIPOSISIKAN BEBAS DARI PENGARUH KEKUATAN POLITIK TERTENTU. BIROKRASI INDONESIA SAAT INI MENYERUAK KE SEMUA SEKTOR KEHIDUPAN DAN SEKALIGUS MENGARAH KEMANA-MANA. TIDAK MENGHERANKAN , SEGALA PENYELEWENGAN DI DALAMNYA MENDAPAT LEGITIMASI PADA DIRINYA SENDIRI. PERILAKU BIROKRASI LEPAS DARI KONTROL SOSIAL. PROYEKSI KE MASA DEPAN, DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN, BIROKRASI HARUS DISTERILKAN DARI KEKUATAN POLITIK. KARENA DIYAKINI BIROKRASI MASIH DIJADIKAN ALAT KEPENTINGAN POLITIK, DAN CENDERUNG MENGABDI KEPADA KEPENTINGAN ELITE DOMINAN MISI YANG DIEMBANNNYA, HARUSLAH MISI SOSIAL, BUKAN MISI POLITIK.

Belakangan ini gerakan pembongkaran borok-borok birokrasi marak dilakukan, kendatipun sebenarnya gebrakan ini bukan hal yang baru. Praktek korupsi, manipulasi, kolaborasi maupun politik konspirasi —yang kian dikokohkan menjadi live style, bahkan menjadi ideologi?— tidak lain adalah bagian integral patologi birokrasi di Indonesia dengan watak dan karakter patrimonial. Gejala ini kian berskala massif, baik pada aras struktur birokratik yang paling bawah dalam taraf kelas teri (baca:birokrasi pedesaan) sampai pada kelas elit dalam skala kuantitas dan kualitas yang cukup besar.

Catatan paling aktual, setelah kemelut kolaborasi antara Edy Tansil-Sudomo terbongkar dan berlalu, disusul kemudian "keberanian" dari Irjenbang Kentot Harseno membeberkan borok-borok kinerja birokrasi di Dephub di bawah kendali Haryanto Danutirto, kendatipun pada akhirnya hanya menjadi cukilan kecil dan hilang ditelan gegapnya isu politik lainnya. Beberapa waktu berselang, kebijakan spektakuler telah ditempuh Gubernur Jawa Tengah Suwardi dengan melakukan pemecatan dua orang penjabat elit birokrasi di daerah Jawa Tengah yang kemudian sempat menjadi bahan perdebatan serius. (Forum, Maret 1996). Sebenarnya kita masih bisa memperpanjang catatan ini, selain banyaknya korupsi pajak yang dilakukan oleh penjabat desa, penggelapan Banpres, proyek manipulasi program IDT dsb, yang terekam akan tetapi tidak terekspos di tingkat masyarakat.

Apa yang tereksplanasi di atas barangkali hanya bagian kecil dari praktek birokrasi di Indonesia, bahwa kemudian banyak kalangan yang menginterpretasikan sekaligus memberikan penilaian birokrasi era Orde Baru; korup, nepotisme, kapitalistik, hanya menjadi instrumen kelas sosial atau

TRI WASONO SUNU

Arie Sujito,
Sedang menyelesaikan studinya di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Pernah menjabat Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fisipol UGM tahun 1994-1995. Juga Aktivis (presidium) Dewan Mahasiswa UGM tahun 1995-1996.
Pernah sebagai Aktivis Forum Kajian "Bebas Sekolah" Yogyakarta. Saat ini menjabat Pemimpin Umum Majalah Sintesa Fisipol UGM.
Tahun1995 sempat meraih Juara II penghargaan Hardjana Award Fisipol UGM dengan karya tulis berjudul "Perspektif Gerakan Mahasiswa era 90-an".

bahkan birokrasi hanya sebagai alat penindas. Bukankah hal demikian secara implisit mengisyaratkan Orde Baru kiranya belum tuntas dalam proses pencarian format politiknya yang secara obyektif bisa diterima masyarakat luas.

Pada konteks birokrasi demikian, institusi ini relatif gagal dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat (public sevice). Dimana negara terlalu dominan untuk senantiasa mengendalikan kinerjanya, kekuatan proses adiministrasi birokrasi hanyalah dijadikan salah satu alat yang mereprenstasikan ideologi negara. Dengan kata lain birokrasi telah terintegrasi ke dalam state yang menguasai masyarakat (society). Dalam istilah Ben Anderson, negara yang ada sekarang tidak lebih dari "state qua state", proses pembangunan dan birokratisasi hanyalah memperkuat posisi negara dihadapan rakyatnya.[1]

"BANYAK KALANGAN YANG MENGINTERPRETASIKAN SEKALIGUS MEMBERIKAN PENILAIAN BIROKRASI ERA ORDE BARU; KORUP, NEPOTISME, KAPITALISTIK, HANYA MENJADI INSTRUMEN KELAS SOSIAL ATAU BAHKAN BIROKRASI HANYA SEBAGAI ALAT PENINDAS."

Karena tidak ada hal yang baru secara subtanstif dalam lintas dinamika birokrasi kontemporer, tulisan ini berusaha membatasi dengan hanya mencoba mengungkap fenomena birokrasi pada perkembangan terakhir dengan pretensi melihat proyeksi birokrasi ke depan dalam batasan ideal. Tentu saja ti dak luput dari kontekstualisasi sejarah sepanjang perkembangan birokrasi dalam sistem politik Orde Baru.

Konsepsi Birokrasi

Pembahasan yang cukup mendalam tentang birokrasi (bureaucracy) oleh ilmuwan kontemporer pada umumnya diilhami dari pemikiran klasik (ortodoks) Max Weber. Pemikiran univikasi teoritik ideal birokrasi Weber secara jenial dirumuskan dalam kerangka teori tentang kewenangan (authority) dan dominasi. Tesis utama Weber bahwa, birokrasi modern yang rasional diperlukan untuk ekonomi modern. Hal demikian dicirikan oleh Weber sebagai idealtype yakni; a) kegiatan birokrasi dilaksanakan secara teratur dengan batas-batas otoritas yang jelas; b) ada hierarkhi kewenangan; c) ada aturan yang jelas tentang perilaku, otoritas dan tanggung jawab pegawai dan; d) pegawai diterima atas dasar merit bukan ikatan kekerabatan[2]. Rasionalitas demikian diorientasikan untuk terciptanya produktifitas dan efisiensi dalam proses administrasi birokrasi.

Berbeda dengan perpektif Weberian, pada dasarnya kaum Hegelian bukan memandang birokrasi sebagai sumber efisiensi. Menurutnya fungsi utama birokrasi adalah sebagai penghubung (mediator) antara negara dan civil society. Negara memanifestasikan kepentingan umum (*general interest*), sedangkan civil society merepresentasikan kepentingan khusus (particular interest) yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian tingkat keberhasilan sebuah birokrasi diukur melalui kapasitasnya untuk mengartikulasikan kepentingan khusus, dan selanjutnya menyatakan di dalam kepentingan negara[3].

Sementara kaum Marxis menempatkan birokrasi dalam teori dominasi atau konflik kelas dalam dimensi yang luas, dan melibatkan kekuasaan birokratis sebagai sumber dari fungsi yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Birokrasi adalah instrumen kelas dominan dalam merealisasikan dominasinya terhadap kelas bawah (rakyat). Kelompok ini secara optimis memandang perkembangan birokrasi tidak harus dikaji dengan berdasarkan pada rasionalitas masyarakat berkembang[4]. Akan tetapi, senada dengan Hegelian, kaum Marxis memandang efisiensi bukanlah nilai absolut dalam birokrasi, ia mempunyai toleransi terhadap fenomena inefisiensi. Dengan kata lain, pada dasarnya pendekatan learning process percaya bahwa terjadinya inefisiensi harus dilalui untuk menuju pembinaan kapasitas birokrasi. Dalam proses ini, terjadinya suatu kesalahan dapat ditoleransikan demi tercapainya gagasan yang lebih besar, yakni terbentuknya birokrasi.

Dialektika Perspektif

Bahwa kita sering mendengar argumen kalangan kulturalis yang menilai, kendatipun modernisasi tentu saja membawa implikasi terhadap perkembangan birokrasi di Indonesia, akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi variabel determinan. Namun sebaliknya budaya —dalam hal ini kultur Jawa— secara dominan mewarnai perilaku birokrasi di Indonesia. Ben Anderson misalnya, berpendapat bahwa kebangkitan kembali bentuk- bentuk patrimonial di Indonesia era modern berkaitan dengan kegigihan perpektif budaya Jawa akan kekuasaan. Pemegang kekuasaan dan gejala-gejala yang berhubungan dengan kekuasaan yang dipandang sebagai suatu kesatuan yang nyata. Hal demikian juga didukung Willian Liddle, bahwa keputusan yang dihasilkan teknokrat Orde Baru bukan berpijak pada upaya rasionalitas demi kepentingan sosial dan politik jangka panjang dalam rangka membangun suatu masyarakat yang secara merata dan struktur politik yang lebih liberal. Hal demikian menurut Liddle, rezim Orde Baru bersandar pada jaringan pribadi secara patron klien. Dengan kata lain elit Orde Baru memandang dunia melalui lensa budaya Jawa, sehingga mereka tidak mampu bertindak dalam rangka mengejar tujuan modernisasi dan rasionalisasi birokrasi[5].

Sebaliknya, kalangan strukturalis menilai, bahwa

...es modernisasi yang secara akseleratif ...mbuhkan teknologi modern, angka demografis ... tinggi peningkatan aras pembangunan yang ... oleh tuntutan kebutuhan yang semakin ...eks serta peran pemerintah sebagai pelaku ... menjadi basis proses birokratisasi di Era Orde ... ini[6].

...nesia sebagai bagian entitas dunia dalam ...ahan global perkembangan dan intervensi ... ideologi modernisasi yang kian akseleratif ...adi sulit dielakkan. Penetrasi yang kian ...mbes kepada wilayah jangkauan ekonomi-... ini semakin mengkontruksi kehidupan ...rasi di Indonesia. Akan tetapi sayangnya, ...yakan dari birokrasi di negara- negara ...mbang sebagai proses transformasi sosial yang ... hegemonik didiktekan oleh barat, pada ...ataannya tidak menghasilkan modernisasi ...aimana yang berlangsung di negara-negara ... Pertumbuhan dan kemajuan di bidang teknik ...gai perangkat teknologi yang merupakan ...arat masyarakat modern tidak secara simultan ...engi dengan insight modern: rasionalisasi, ...kratisasi, anti feodalisme.

...perti yang diuraikan Sujatmoko secara eksplanatif ... birokratisasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan ... konteks sisi sosio-ekonomi, yakni bagaimana ...nya perkembangan kelas menengah di Indo-... mempunyai kontribusi proses ini. Asumsinya, ...nya kelas menengah merupakan conditio sine ...n menebalnya kekuasaan birokrasi di Orde ... Dicatat Sudjatmoko bahwa:

> ...ebanyakan negera-negara berkembang di Asia, baik ... kelemahan kelas menengah yang produktif, atau ... prefferensi ideologis kanan maupun golongan kiri, ... pemerintah menjadi alat pembangunan yang utama, ... dalam beberapa negara bahkan menjadi alat utama. ...ugas yang diberikan kepada birokrasi pemerintah, ...ebabkan konsentrasi kekuasaan di dalam birokrasi, ...abiskan kekuatan dari partai politik dan pers yang pada ...nya berhenti sebagai kekuatan pengimbang yang ...ertahankan kontrol sosial terhadap birokratisasi dalam ... tertentu[7].

...mikian halnya dijelaskan Dwight King, bahwa ... negara-negara sedang berkembang pada ...usnya, terdapat suatu kenyataan yang kuat ... tingkat ketidakberdayagunaan yang ada dari ...krasi hanya bisa dijelaskan dengan melihat ...mahan-kelemahan yang terdapat dalam prinsip-...sip dasar atau sistem yang diterapkan. Berbagai ... konseptual yang menaruh perhatian urgensi ...wesan dan desentralisasi dari sistem ...ganisasian, seperti perusahaan-perusahaan besar ...sta, juga mempersoalkan ciri-ciri birokrasi yang ...rki dan terkotak-kotak.

...engan kata lain, kelompok inilah yang menurut ... —seperti yang dikutip Dwight King— ...mpersoalkan keberadaan birokrasi, pada dasarnya ...ra politik bukanlah merupakan kelompok-...mpok pinggiran, tetapi sebaliknya justru kelompok yang sangat berpengaruh baik di dunia kapitalis maupun sosialis[8].

Dengan lain perkataan sangat problematik memilah secara dikotomis antara pendekatan kultural (cultural approach) dengan pendekatan struktural (structural approach) dalam menjelaskan fenomena patologi birokrasi di Indonesia. Kedua perpektif harus menempatkan sisi-sisi analisis secara dialektis, dan bukan dikotomis untuk bisa mengungkapkan dinamika birokrasi era Orde Baru secara komprehensif. Karena dimensi kultural yang merangsang lahirnya patrimonialisme politik beradaptasi pada modernisasi yang tidak berproses secara mulus menyebabkan dalam tubuh birokrasi bukan berkembang tingkat persaingan aparat yang kompetitif dalam meningkatkan profesionalisme. Akan tetapi sebaliknya, justru birokrasi sendiri menjadi lahan pembiakan kekuasaan yang efektif dalam mengeksploitasinya untuk menghasilkan resoursis atau basis material yang sangat potensial. Gejala korupsi dan nepotisme yang senantiasa menjangkiti birokrasi bisa dikerangkakan pada analisa ini.

> "... TUGAS YANG DIBERIKAN KEPADA BIROKRASI PEMERINTAH, MENYEBABKAN KONSENTRASI KEKUASAAN DI DALAM BIROKRASI, MENGHABISKAN KEKUATAN DARI PARTAI POLITIK DAN PERS YANG PADA AKHIRNYA BERHENTI SEBAGAI KEKUATAN PENGIMBANG YANG MEMPERTAHANKAN KONTROL SOSIAL TERHADAP BIROKRATISASI DALAM TINGKAT TERTENTU."

Kembali kepada pemaparan realitas birokrasi yang kian bergerak kepada proses perubahan — kendatipun masih bersifat spekulatif— seperti yang terjadi dalam fenomena belakangan ini. Pertanyaannya adalah, benarkah birokrasi Orde Baru yang telah sekian lama mengalami stagnasi akan melakukan pemberdayaan diri (empowerment) melalui reformasi? Apakah desakan untuk pembenahan menuju konsepsi ideal —meminjam karakteristik Weber: rasional, efektif, efisiensi— akan dipraktekkan dalam proses birokrasi, ataukah kebijakan yang terjadi hanya spontan —yang tanpa preseden— dan tanpa diikuti kesadaran sekaligus landasan ideologis yang jelas?

Retrospeksi Historis

Setelah birokrasi era Orde Lama mengalami banyak kekacauan, dengan ditandai inefisiensi serta tidak bertanggung jawab, pada akhirnya pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan tindakan pembaharuan (reformation). Bersamaan dengan ini, rezim Suharto melakukan konsolidasi kekuasaan pada birokrasi

pemerintah. Donald K. Emerson mencatat[9], pemerintah ini memotong sejumlah birokrat yang menjadi basis pendukung masa Sukarno. Pembersihan ideologis dilakukan dengan menyingkirkan ribuan orang yang terasosiasikan dengan PKI pada masa sebelum 1966. Pertama, membatasi rekruitmen pejabat baru seraya mempercepat masa pensiun. Kedua, Suharto membangun legitimasi dengan membuat aparat birokrasi lebih loyal. Karakteristik dan style komando militer menjadi pendekatan dalam rekruitmen jaringan birokrasi. Termasuk di dalamnya dilakukan departainisasi dengan melakukan resuffle sejumlah menteri yang terlibat dalam partai politik untuk selanjutnya digantikan kelompok sipil yang steril dari partai. Ketiga, Jenderal Suharto mengaktifkan aparat birokrasi. Sementara panerimaan pajak digalakkan dalam pembiayaan pembangunan, gaji pegawai dinaikkan untuk memperbaiki penampilan (performance). Pembenahan dan operasionalisasi birokrasi ini tentunya diproyeksikan dalam upaya menopang suksesnya repelita.

Pada dasarnya pemerintah menghendaki birokrasi sebagai primum mobile program pembangunan. Dengan demikian, reformasi lebih diarahkan pada: pertama, mengalihkan wewenang pemerintah ke tingkat birokrasi yang lebih tinggi. yaitu pemusatan proses pembuatan kebijaksanaan. Kedua, membuat birokrasi agar lebih efektif dan tanggap pada perintah pimpinan pusat; dan yang ketiga, memperluas wewenang pemerintah baru dan mengkonsolidasikan pengendalian daerah[10].

Salah satu agen yang potensial selama Orde baru diawali masa oil boom oleh pertamina masa 70-an dengan pengawasan militer. Kekuatan ini sangat potensial dijadikan sebagai basis material selama membangun struktur kekuasaan Orde baru. Jamie Mackie[11] menyebutnya era ini telah semakin memperkuat sifat rezim patrimonial di era Orde baru. Kendatipun cerita sukses terjadi, toh hal demikian tidak bisa bertahan lama, ketika birokrasi sudah terjangkiti secara besar-besaran korupsi yang dilakukan oleh kalangan birokrat.

Sementara bangunan basis material lain yang menjadikan sumber kapitalisme birokrasi di Indonesia juga diperkuat oleh BULOG (Badan Usaha Logistik). Jikalau pertamina diawasi secara langsung oleh militer, demikian halnya BULOG secara langsung diawasi oleh pejabat militer baik pada tingkat pusat sampai daerah. Dengan kata lain, hal ini tidak terlepas upaya untuk menopang dana maupun memenuhi kepentingan pribadi para pejabat militer. Pengembangan sayap militer secara otoritatif dalam sektor bisnis menjadikan basis material dalam menopang pembiayaannya[12].

Secara keseluruhan munculnya Orde Baru telah menjadikan perusahaan swasta sebagai sasaran utama untuk penanaman modal dan produksi group-group kapitalis birokrat. Disaat mereka masih memegang kendali kekuasaan sehingga dengan cepat telah mendirikan perusahaan swasta sebagai alat akumulasi modal dalam memperkaya dirinya[13].

Gejala Kapitalisasi Birokrasi

Jikalau birokrasi diproyeksikan dan diorientasikan dalam kerangka fungsi pelayanan masyarakat *(public service)* yang mengemban nilai netralitas —dalam arti sebagai medium penghubung masyarakat dan pemerintah—, rasional sekaligus subyektif maka haruslah diposisikan bebas dari pengaruh dan jalinan (patronage) dengan kekuatan-kekuatan politik tertentu, yang sewaktu-waktu dapat masuk dalam jaringan birokrasi[14]. Dengan kata lain, misi yang diembannya adalah misi sosial, dan bukan sebaliknya yakni misi politis.

Hal ini berarti bahwa efektifitas birokrasi modern bisa berjalan jika memenuhi dua prinsip dasar: pertama, birokrasi harus menuruti tata cara, yaitu peraturan-peraturan yang telah diciptakan sesuai dengan norma yang ada. Artinya tidak bisa birokrasi itu berproses dan bekerja karena digerakkan dorongan perasaan atau kekeluargaan. Akan tetapi harus ada norma tertentu yang merefleksikan suatu kepastian (*certainty*), baik bagi pemerintah maupun untuk masyarakat. Dengan kata lain ada semacam predictability yang bisa diciptakan oleh birokrasi, artinya birokrasi harus menuruti peraturan yang telah ditetapkan bersama. Kedua, birokrasi seharusnya tidak dikaitkan dengan masalah kekuasaan, yang berarti apolitis. Sebab, jika birokrasi sudah dicampuradukkan dan terjerembab dalam logika kekuasaan, maka secara otomatis akan terjadi disfungsional, yang cenderung mengabaikan fungsi pelayanan masyarakat[15].

Kembali kepada pemikiran Weber, bahwa salah satu ciri penting dari birokrasi rasional ala Weber adalah suatu sistem penggajian bagi pegawai sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas birokrasi tadi. Sulit dipungkiri bahwa penampilan *(performance)* birokrasi era Orde Baru yang banyak pengamat mengidentifikasi sebagai patrimonial[16] mempunyai pola yang agak unik. Dimana sistem penggajian lebih mendekati pola imbalan dengan menyandarkan hubungan *patron* dan *client* atau yang lebih dikenal dengan "bapakisme". Barangkali untuk menjadi catatan, bahwa selama sistem penggajian dan honor ini seimbang dengan beban tugas maka ia akan memacu produktifitas pegawai. Sebaliknya, jika tidak bisa, sistem ini akan diragukan kemampuannya untuk menghasilkan birokrasi yang berdaya guna dan berhasil guna seperti yang dikonseptualisasikan secara ideal oleh Weber. Dan mengikuti alur perkembangan sejarah birokrasi Orde Baru hingga perkembangan kontemporer agaknya masih relatif sulit kalau tidak dilakukan perombakan secara foundamental (baik kultural mauppun struktural) menuju efisiensi, rasionalisasi dan demokratisasi birokrasi.

Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja birokrasi kian menyeruak dalam setiap sektor kehidupan *(omnipresent)* dan sekaligus menjarah kemana-mana *(omnipotent)*. Dengan kata lain tidak mengherankan, di era Orde Baru distorsi birokrasi dan segala penyelewengan di dalamnya

...dapatkan legitimasi pada dirinya sendiri. Hal ...kian karena perilaku birokrasi luput dari kontrol ... (*public*). Secara historis realitas demikian adalah ...ikasi politis kuatnya peran negara dalam ...batasi dan sekaligus tidak menyisakan ruang ... secara oposisi yang bersifat *non-state* yang ...berikan kontrol dan pengawasannya.

...gkapan Supomo tentang konsepsi negara ...gralistik yang kemudian diadopsi sekaligus ...roduksi Orde baru menjadi landasan justifikasi ...fis. Bahwa masyarakat Indonesia merupakan ... kesatuan organis (bersifat kekeluargaan) dimana ...ng-masing individu dalam massyarakat harus ...iliki loyalitas terhadap dasar kebersamaan yang ...dian direpresentasikan oleh negara. Kekuatan ...idu dilebur sebagai komunitas yang kemudian ...makan oleh negara[17].

...gumen teoritiknya bahwa struktur patrimonial ... terbangun secara kultural dalam birokrasi Orde ... tidak melancarkan perkembangan ekonomi ... bercirikan kapitalis, sebab ada indikasi ...ksselarasan antara patrimonial dengan ekonomi ...talis. Karena pertumbuhan ekonomi kapitalisme ...dern membutuhkan perhitungan-perhitungan ...nal, pemilikan sarana produksi sebagai milik ...adi, komersialisasi pasar, teknologi rasional yang ...hkan untuk kegiatan ekonomi, buruh bebas serta ... hukum dan administrasi yang rasional pula.

...gumen demikian juga didukung oleh Robison, ...wa Kapitalisme yang sedang mengalami ...biakan di Indonesia bukan kapitalisme negara, ... tetapi kapitalisme birokrasi dan kapitalisme ...ganan (*client capitalim*). Jikalau kapitalisme ...ara adalah produk dari kewenangan legal-rasional ... birokrasi, dimana fungsi produksi dengan ...ntingan pribadi terpisah secara jelas. Sementara ...alisme birokrasi yang berlaku di rezim Orde baru ...ah produk birokrasi patrimonial, yang di ...nya tidak terdapat pemisahan secara jelas antara ...si produksi dan kepentingan pribadi[18].

...pitalisme birokrasi terjadi melalui kombinasi ...a jabatan birokrasi dan kegiatan ekonomi, ...ifat personal, informal maupun secara tidak ...sung dengan boneka-boneka atau klien-klien ... tergantung. Ia menunjukkan hubungan antara ...s pribadi dan administrasi negara yang sebe-...ya merupakan model klasik yang dewasa ini ...galami revitalisasi dalam ekonomi kapitalis mod-...

...ri kapitalisme birokrat teridentifikasi secara de-... dan spesifik oleh Yoshihara Kunio[20], yaitu; 1) ...reka yang memenuhi syarat sebagai kapitalis ...krat pernah memegang jabatan birokrat, yang ...reka gunakan sebagai akumulasi modal awal; 2) ... tidak lagi memegang jabatan birokratis, mereka ...sih mempertahankan hubungan dengan ...erintah dan dimanfaatkan untuk kegiatan ...isnya; dan 3)mereka mempunyai bisnis sendiri ... menjalankannya sendiri seperti yang dilakukan ... kapitalis lainnya.

...stem kapitalisme birokrasi sebenarnya mudah sekali untuk diadaptasikan dalam lingkungan kapitalisme post- kolonial di Indonesia. Sumber-sumber penghasilan di jaman sekarang ini terjadi dalam bentuk-bentuk jabatan birokrasi, yang dibagikan diantara orang-orang sipil dan militer di dalam bermacam-macam cabang pemerintahan. Kelompok paling beruntung dari sumber-sumber itu adalah jabatan-jabatan yang memiliki kekuasaan untuk membagikan kontrak-kontrak pengeboran minyak, kontrak pertambangan, konsesi hutan, lisensi- lisensi ekspor-impor, kontrak-kontrak pemerintahan untuk bangunan dan pembekalan serta kredit bank negara.

Myrdal (1968), atas dasar penelitian di beberapa negara di Asia selama lebih kurang satu dekade, menyimpulkan bahwa kelahiran kapitalisme birokratik di negara-negara Asia tenggara amat menghambat pembangunan ekonomi, penciptaan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Begitupun birokrasi pemerintah yang kurang independen, patrimonial dan tidak efisien, tidak bersih serta memiliki konsentrasi kekuasaan yang besar adalah salah satu sebab utama kegagalan pembangunan di negara kawasan ini. Termasuk di dalamnya Indonesia[21].

Lebih menariknya, perkembangan mutakhir ekspansi semangat kapitalisme dalam birokrasi dengan pengentalan nilai- nilai patrimonial ini bisa disimak dalam terjadinya proses manipulasi rekruitmen pegawai —di daerah Jawa tengah— yang, belakangan ini menjadi sorotan tajam birokrasi di Indonesia. Bahwa apa yang dilakukan oleh elit birokrasi untuk memperkuat basis modal dengan mengeruk resoursis ekonomi dengan jalur kekuasaan birokrasi bisa dikerangkkan ke dalam analisa ini[22].

Dalam disain sistem yang terbangun dengan memposisikan ekonomi sebagai panglima yang dipandu ideologi pembangunan modernisasi dan penciptaan stabilitas politik, menjadikan lahan pembiyakan yang cukup intensif dalam penguatan negara sebagai aktor utama. Dalam strategi politik yang demikian secara bersamaan didukung oleh aliansi tiga kekuatan politik: militer, teknokrat dan birokrat plus masyarakat bisnis oligopolistik.

Gagasan dan Prospek

Beberapa hambatan paling mendasar dalam praktek birokrasi saat ini, tentunya adalah adanya sentralisasi birokratik yang amat besar. Sementara secara kultural masih lemah makna budaya pelayan publik dalam birokrasi kita. Dengan menyimpan "dualisme" ideologi administrasi birokrasi. Disatu sisi dimana birokrasi sebagai administrasi tradisional yang menghasilkan ritualisme administratif yang tidak efisien dan di sisi lain sistem administrasi modern yang menekankan rasionalisme administratif yang efisien. Termasuk terjadinya hambatan pada pola pengawasan yang relatif lemah. *Political control* yang dilakukan oleh DPR, DPRD terhadap birokrasi kurang mempunyai kekuatan[23]. Hal demikian, untuk konteks di Indonesia selain DPR masih diperlakukan sebagai perpanjangan tangan eksekutif, juga karena terlalu besarnya kekuasaan eksekutif di banding legislatif.

Dengan kata lain, gejala cultural yang patrimonial bersintesis pada kondisi struktural kian memproduksi kegagapan dalam melakukan kontrol terhadap birokrasi.

Tidak berlebihan kiranya, bahwa kinerja birokrasi yang demikian karena proses transformasi nilai-nilai modernisasi yang kian tak terelakkan dan menunut rasionalisasi relatif gagal ketika dipraktekkan di banyak negara dunia ketiga yang diidentifikasi sebagai negara sedang berkembang. Proses adopsi ideologi tidak secara kondusif didukung oleh kesadaran masyarakat, akan tetapi secara kultural justru terjadi proses penghambatan.

Akhirnya, kendatipun gagasan Weber jika kita proyeksikan dan dikontektualisasikan kedepan dalam banyak negara berkembang seperti Indonesia terkesan utopis. Akan tetapi belakangan ini proses modernisasi dengan tuntutan profesionalime, ditambah desakan eksternal untuk terjadinya proses rasionalisasi secara struktural, dimana struktur birokrasi yang merupakan bagian dari program penyesuaian misalnya justru dianjurkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) dan Dana Moneter Internasional (IMF), maka gagasan Weber untuk merasionalisasi menuju efisiensi birokrasi menjadi kian relevan.

Karena pada dasarnya masalah pembaharuan administrasi- birokratik pada lintas empirik dalam kerangka ekonomi-politik telah melampaui batas-batas nasional dan ideologi suatu negara, dan bahkan lebih jauh dari itu, telah menjadi debat ideologi yang tidak hanya berlangsung di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun juga di negara- negara maju. Penjelasan Samuel Huntington (1995) yang mendiskripsikan proses transformasi —dengan belajar dari perkembangan 1974-1990 pada negara-negara di Eropa Selatan, Asia Timur, Amerika Latin maupun Eropa Timur— politik dari otoriter menuju demokratis dalam gelombang demokratisasi ketiga patut untuk memperkuat argumen ini. Bahwa kinerja pemerintah (birokrasi) yang buruk dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang bersifat demokratis akan melemahkan legitimasi para penguasa maupun legitimasi sistem itu[24]. Para pejabat birokrasi yang memiliki keterikatan yang kuat terhadap tujuan organisasi yang mereka pimpin, cenderung memiliki keterikatan pada identitas profesional yang kuat[25]. Identitas ini akan menimbulkan sikap melawan terhadap segala bentuk penggunaan birokrasi untuk kepentingan pribadi yang tidak sewajarnya, baik itu oleh orang dalam sendiri maupun orang luar.

Apalagi ditengah bergeraknya akselerasi global yang kian menembus sudut-sudut dunia menuntut persaingan kompetitif dan terjadinya proses differensiasi sosial. Penetrasi nilai-nilai perubahan yang kian mendesak harus terespon secara aktif. Dengan kata lain, wilayah perubahan agar senantiasa terkontrol hendaknya antisipasi baik pada tingkat kultural maupun struktural harus dikreasikan secara konstruktif.

Birokrasi sebagai institusi yang bergerak pada sektor publik yang demikian dituntut untuk mengembangkan derajat rasional yang tinggi ditempuh dengan melakukan pemberdayaan (*empowermant*) dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Untuk menghindari tercerabutnya (*disembedded*) birokrasi —sebagai fungsi sosial— dan keberpihakannya kepada pelayanan publik, posisi birokrasi yang saat ini terintegrasi ke dalam state harus dilepaskan. Akhirnya, kesenjangan politik dan jarak sosial yang selama ini terbangun antara bayangan kekuasaan birokrasi dan masyarakat dengan posisi antagonistik tidak terjadi lagi.

Untuk diproyeksikan kepada perubahan kedepan dan dikontekstualisasikan dengan tuntutan percepatan pembangunan, hendaknya birokrasi disterilkan dari kekuatan politik —yang saat ini dikuasai oleh Golkar dan militer. Karena diyakini asumsi yang terbangun atas real politic saat ini bahwa birokrasi hanyalah merepresentasikan ideologi dan kekuatan negara yang cenderung bergerak dalam logika kekuasaan. Sejauh posisi yang demikian, dimana birokrasi masih dijadikan alat kepentingan politik, implikasinya akan cenderung lebih mengabdi kepada kepentingan (baca:kelas) elit dominan. Karenanya, *political will* dari pemerintah dengan kebijakan deregulasi maupun debirokratisasi —yang hanya membius masyarakat— niscaya tidak akan menuju reformasi kearah proses demokratisasi birokratik. Akan tetapi, ia tidak lain hanyalah bersifat involutif untuk dikreasikan negara dalam melegitimasi dan mempertahankan *status quo* kekuasaannya.***

DAFTAR PUSTAKA

Giddens,Anthoni, 1986,*Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, UI-Press, Jakarta.

Beetham, Donald, 1990, *Birokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Dieter Evers, Hans, 1990,*Kelompok-Kelompok Strategis*, Yayasan Obor Indonesia,Jakarta.

Info Bank, no. 15 tahun 1992.

Jakson, D, Karl, & Pye,Lucian (eds.), *1994,Political Power and Communication in Indonesia*, Berkeley University California Press, California.

Budiardjo ,Miriam(eds.), 1991,*Aneka Pemikiran Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.

Simanjuntak, Marsilam, 1994,*Pandangan Negara Integralistik*, Grafiti, Jakarta.

Thoha,Miftah, 1991,*Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*, Widya Mandala, Yogyakarta.

Mas'oed,Mochtar,1989, *Ekonomi dan Struktur Politik, Indonesia 1966-1971*, LP3ES, Jakarta.

Blau, Peter,M., 1987,*Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, UI- Press, Jakarta.

Prisma, No. 7 Juli 1982.

Prisma, No. 6/tahun XVIII/1989.

Tanter,Richard, & Young,Kenneth (eds),1993, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

Martin, Roderic, 1990,*Sosiologi Kekuasaan*, Rajawali Press, Jakarta

Huntington, Samuel,1995,*Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta.

Effendi, Sofyan, 1990, **Debirokratisasi dan Deregulasi: Beberapa Hambatan Pelaksanaan di Daerah**, makalah seminar BAPPENAS-OTO-UNHAS, Ujung Pandang,

...atmoko, 1990, *Dimensi-dimensi Manusia dalam ...ngunan*, ,LP3ES, Jakarta.
... Yunanto,Sutoro, *1994,Budaya dan Birokrasi*, Fisipol-... Yogyakarta.
...,Syamsudin & Sihbudi,Riza, 1995, *Menelaah Kembali ... Politik Orde Baru*, Gramedia, Jakarta.
... Yoshihara,1990, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, ... Jakarta ***

...ATAN AKHIR

...roses birokratisasi dengan logika korporatisasi yang ...kan oleh oerde baru bukan saja menyebabkan bias ... lebih dari itu memperlemah peran masyarakat. Baca ...asan ini pada Indria Samego, **Politik Pembangunan ... Baru : Beberapa Interpretasi Teoritik Mengenai ...an Negara Dalam Mengembangkan Pengusaha ...onal**, dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi (ed.) *...aah Kembali Format Orde Baru*, Gramedia,Jakarta, 1995, ... 128.

... Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan*, Rajawali Press, ... 1990. Juga baca Peter M. Blauw, *Birokrasi dalam ...arakat Modern*, UI Press, Jakarta, 1987, atau Anthony ...ens, *Kapitalisme dan Teori Sosial* Modern, UI Press, ... 1986.

... Nicos O. Mouzelis, **Organization and Bureaucracy: ... Analysis of Modern Theories** dalam Sutoro Eko, Budaya ... Birokrasi, *Skripsi Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 1994*, ...

... Baca David Beetham, *Birokrasi* , Bumi Aksara, Jakarta ...

... Penjelasan ini ada pada Ben Anderson, **Gagasan Tentang ...kuasaan Dalam Pandangan Budaya Jawa,** dalam Miriam ... (ed.) *Aneka Pemikiran Tentang kuasa dan Wibawa*, ... Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

... Baca John Ihalauw, **Birokratisasi dan Pembangunan,** ... No VII, Juli 1982.

... Soedjatmoko, **Sistem Politik dan Pembangunan dalam ...nda Penelitian Asia: Sebuah Renungan** dalam ...ulan karangannya *Dimensi Manusia Dalam ...angunan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 176-177

... Dwight Y. King, **Pengawasan dan Birokrasi di Negara ...rkembang,** *Prisma* no 6 th 18, 1989, hal. 19.

... Donald K. Emerson, **The Bureaucracy in The Politi... Contex: Weakness in Sthrenght**, dalam Karl D. Jackson ... Lucian W.Pye (ed.), *Politcal Power and Communication ... Indonesia*, Berkeley University, California Press, 1984, hal. ...

... Mochtar Mas'oed, *Ekonomi dan Struktur Politik*, LP3ES, ... 1989, hal. 151.

... Hal ini bisa dibaca pada Jamie Mackie, **Pemilikan dan ...kuasaan di Indonesia,** dalam Richard Tanter dan Keneth ... ed.) *Politik Kelas Menengah Indonesia*, LP3ES, Jakarta, ... hal. 85.

... Dokumen *Info Bank* no 15, November 1992 ...unjukkan; bisnis AD melalui yayasan Kartika Eka Paksi ...ak 26 unit usaha bisnis, AU melalui Adi Upaya memiliki ... unit usah, AL melalui yayasan Bumyamca memiliki 15 unit ... dan Polri memiliki usaha bisnis 7 unit. Kesemuanya ...akan usaha patungan dengan beberapa bisnisman ... maupun BUMN.

... Bahwa sedikitnya 10 perusahaan swasta besar yang ...a oleh komando-komando militer, lihat data lengkap ... Richard Robinson, **Toward A Class Analysis of The ...donesia Militery Bureucratic State,** dalam *Indonesia*, no. ... April 1978, hal.27. (dikutip dari Sutoro Eko Yunanto, op.cit., ... 269).

... Penjelasan ini baca Miftah Thoha, Beberapa Aspek ...kan Birokrasi, Widya Mandala, Yogyakarta, 1991, hal.44.

... Penjelasan ini baca Yahya A. Muhaimin, Birokrasi Harus ...tis. Prisma, no. 6/ Tahun XVIII/ 1989, hal. 75-76.

... Birokrasi yang demikian dicirikan oleh kedudukan, tingkah laku dan keseluruhan hierarki dalam birokrasi sebagian besar tergantung pada hubungan personal kekeluargaan atau antara bapak buah *(patron)* dan anak buah *(client)*. Pembahasan lengkap tinjauan kultural terhadap birokrasi Orde Baru baca Sutoro Eko Yunanto, *op. cit.*

17) Landasan filosofis yang demikian memberikan justifikasi pemerintahan Orde Baru untuk meminimalisisr potensi politik masyarakat yang memberikan kekuatan kritis dalam mengontrol kinerja pemerintah. baca penjelasan Marsilam Simanjutak, *Pandangan Negara Integralistik*, Grafiti, Jakarta, 1994. Juga pada Arbi Sanit, **Sistem Kepartaian dan Perwakialan Orde Baru : Masalah dan Prospek** dalam Samsudin Haris dan Riza Sihbudi, *op. cit.*, hal 42-43.

18) Richard Robison, **Toward Class Analysis of The Indonesia Bureaucratic Military State**, dalam *Indonesia*, No. 25, April 1978, hal.24 seperti dikutip oleh Sutoro Eko, *op.cit.* hal.265.

19) Hans Dieter Evers, *Kelompok-Kelompok Strategis, Yayasan Obor*, Jakarta, 1990, hal. 244-245.

20) Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1990 hal. 100.

21) Sofian Effendi, **Debirokratisasi dan Deregulasi: Beberapa Hambatan Pelaksanaan di Daerah**, *Seminar Bappenas-OTO Unhas*, Ujung Pandang, 1990.

22) Fenomena manipulasi yang dilakukan oleh pejabat elit birokrasi desemikian sebenarnya punya tradisi historis yang panjang. bahwa jabatan birokrasi(terutama jabatan elit) dirasakan mempunyai keuntunghan strategis ekonomi. selain model manipulasi lewat rekrutmen atau dana siluman dari klien juga didapati sumber basis ekonomiu lainnya lewat "dana teknis" anggaran pembangunan, konsesi, lisensi-lisensi yang diberikan kepada masyarakat, kontrak-kontrak proyek pembangunan, anggaran kesejahteraan rakyat dsb.

23) Riggs,(1957) seperti yang dikutip Sofian Effendi, *Op.Cit.*, hal. 14-15.

24) Samuel Hutington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 62.

25) Dwight Y. King, **Pengawasan dan Birokrasi di Negara Berkembang**, *Prisma, Op. cit.*, hal 19-25.***

KOALISI OPOSISI PRO-DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK

PERUBAHAN POLITIK DI INDONESIA SEBAGAI JALAN MENUJU MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS DI MASA ORDE BARU, DI MANA NEGARA MENJADI INSTITUSI YANG KUAT CENGKERAMANNYA DAN INTERVENSINYA TERHADAP MASYARAKAT, SELALU TERBENTUR KEPADA KENDALA PERILAKU STRUKTUR DAN STRUKTUR PEMIKIRAN YANG TERUS MENGUAT. TERMINAL POLITIK LIMA TAHUNAN SEPERTI KAMPANYE, PEMILIHAN UMUM DAN SIDANG UMUM MPR BISA JADI MERUPAKAN WAHANA UNTUK MENDOBRAK STATUS QUO. PERUBAHAN POLITIK BISA TERJADI JIKA ADA KOALISI ANTARA PARTAI POLITIK NON PEMERINTAH DENGAN PARA PROMOTOR DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASAI.

Ada dua kekuatan politik yang sama-sama menghendaki perubahan politik di tanah air ini dengan berbagai ciri khas masing-masing. *Pertama*, adalah partai politik PPP dan PDI, yang membuktikan usaha kerasnya mendesakkan perubahan politik melalui kampanye-kampanye politik mereka serta lebih spesifik lagi perjuangan mereka di sisang umum MPR 1992/1993 yang lalu. Dari laporan-laporan media massa dapat kita ikuti bagaimana usulan-usulan pembatasan masa jabatan presiden, perubahan undah-undang pemilu, penghapusan SIUPP, Tatib MPR, undang-undang lembaga kepresidenan, hubungan antar lembaga tinggi/tertinggi negara, demokrasi Pancasila dan beberapa masalah politik lainnya diperdebatkan untuk menjadi ketetetapan Majelis.[1]

Sutopo Sasmito Edy

Mahasiswa FISIPOL jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 91.Aktif dalam berbagai organisasi diantaranya staf redaksi majalah CAFNE FNE UGM, pengurus korps mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan sebagainya. Aktif pula dalam penelitian dan penulisan baik makalah maupun di media massa.

Kedua partai politik tersebut tampil progresif dengan argumentasi-argumentasi perubahannya, walaupun tidak cukup kuat menembus benteng TRI FRAKSI (F-ABRI, F-KP, F-UD) yang tampil sangat konservatif dan ortodoks.[2]

Sebagai suatu lembaga politik formal, kedua partai politik ini memiliki kesempatan mempengaruhi pengambilan keputusan terutama di lembaga MPR (yaitu hak menentukan calon presiden/wapres dan mengusulkan ketetepan keputusan yang memiliki jenjang yuridis setingkat di atas UU), kesempatan memperebutkan kursi di DPR melalui pemilu, dan hak-hak lain untuk menggalang dukungan massa setiap 5 tahun sekali. Tetapi dalam menjalankan fungsinya sebagai partai, mereka

menghadapi cukup banyak restriksi dari penguasa, mengakibatkan mereka tidak bisa tampil maksimal sebagai kekuatan politik pembaharu.[3]

Kekuatan politik *kedua* adalah para promotor demokrasi dan demokratisasi yang terdiri dari para *elite-dissidents*, LSM-LSM, aktivis mahasiswa, aktivis buruh / tani, aktivis perempuan, para penulis, jurnalis, intelektual ataupun budayawan, dan intelektual religius, yang secara konseptual sering disebut aktor-aktor *pro-democracy*.[4]

Mereka tersebar di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan tidak begitu jelas afiliasi politiknya,[5] tetapi sangat aktif dalam usaha penyebaran dan peresapan gagasan perubahan politik, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, transformasi struktural maupun kultural. Melalui akses mereka pada media massa, forum- forum akademik, organisasi sosial kemasyarakatan, atau LSM-LSM, mereka membentuk berbagai opini publik dan melakukan proses penyadaran (pendidikan politik) masyarakat akan pentingnya sebuah orde yang lebih menghargai hak-hak politik warga, hak-hak asasi, keadilan politik-ekonomi, atau dengan bahasa yang lebih populer "memberdayakan masyarakat". Mereka sangat progresif dalam menggagas perlunya perubahan-perubahan struktural dan kultural, dan melalui kontak maupun interaksi mereka dengan aktivis serupa di luar negeri (termasuk mencari simpati dan dukungan pada LSM dan negara-negara yang yang berpengaruh terhadap Indonesia [6] membuat aktor-aktor pro-demokrasi sangat potensial sebagai suatu kekuatan politik yang lebih riil dalam mendesakkan reformasi politik.

Hanya saja masalahnya, kedua kekuatan tersebut tampak berjalan sendiri-sendiri dan berusaha menjaga jarak, sekalipun disadari yang mereka hadapi adalah suatu rezim otoriter. Di hadapkan pada posisi negara yang kuat dan otonom, mungkinkah suatu perubahan atau demokratisasi bisa berlangsung searah dengan gagasan-gagasan mereka, sementara mereka tidak cukup memiliki *pressure-power*?. Apakah tidak mungkin memanfaatkan terminal politik lima tahunan : kampanye, pemilihan umum, dan SU MPR dengan membentuk aliansi oposisi yang lebih kuat untuk mendobrak status-quo ?

POLITIK ORDE BARU

Gagasan menuju suatu masyarakat yang demokratis mendapati kendala-kendala berupa *perilaku struktur* dan *struktur pemikiran* yang hidup dan berkembang di masa Orde Baru, yang mana menurut Anders Uhlin[7], keduanya menyokong sifat *authoritarian* rezim ini.

Negara pada masa Orde Baru menjadi institusi yang kuat cengkeraman dan intervensinya terhadap masyarakat, serta relatif otonom dari jangkauan peran politik rakyat. Struktur politik Orde Baru digambarkan sebagai menyerupai piramida kekuasaan, dimana proses-proses politik utama didominasi oleh Presiden Suharto (lembaga kepresidenan) sendiri sebagai pusat pengambilan keputusan di puncak piramida.[8] Baru pada lapis kedua militer dan birokrasi yang dikendalikan presiden menjalankan kekuasaan dan mengotrol sebagian besar aspek kehidupan masyarakat. Militer dan birokrasi memonopoli kekuasaan dan partisipasi politik pada level atas pengambilan keputusan.[9] Terutama militer, pada orde Baru ini banyak sekali menduduki posisi-posisi strategis dalam proses-proses pemerintahan [10] maupun dalam lapangan bisnis bersama-sama dengan birokrasi.[11] Sementara itu dominasi dan personal militer di parlemen (DPR) menyebabkan lembaga konservatif ini lebih berfungsi sebagai pengabsah kebijakan-kebijakan eksekutif daripada sebagai lembaga pengontrol pelaksanaan GBHN. [12]

Dalam kehidupan kepartaian berlangsung sistem kepartaian *hegemonic*,[13] dimana Golkar sebagai partainya pemerintah mendapatkan dukungan maksimal dari militer dan birokrasi [14], dan selalu keluar sebagai mayoritas mutlak dalam setiap pemilu karena diuntungkan oleh keberpemihakan di atas, serta adanya peraturan-peraturan perundangan yang lebih menguntungkan Golkar.15)

Sementara itu kedua partai politik, PPP dan PDI, terus menerus 'dikerjain' elit penguasa supaya tetap tergantung dan tunduk pada kendali pemerintah. Peran mereka sangat minimal dalam *policy-process*, paling banter sebagai pembentuk agenda (*agenda-setter*), pembentuk opini publik, menciptakan suasana-suasana tertentu dalam proses politik, tetapi bukan sebagai determinasi yang diperhitungkan pemerintah yang berkuasa.[16] Dalam kehidupan intern organisasi, keduanya tidak pernah lepas dari berbagai bentuk intervensi pemerintah, sehingga konflik-konflik internal semakin menjadi-jadi dan melemahkan organisasi.[17] Konsep *floating mass* diterapkan untuk memotong basis dukungan parpol terutama di pedesaan, dan konsep *monoloyalitas* dipaksakan untuk mencegah birokrasi keluar pagar membantu parpol.[18] Garis afiliasi ormas-ormas dengan parpol dilenyapkan dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1995 [19] dan sejak awal Orde Baru sistem perwakilan kepentingan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dikooptasi melalui korporatisme [20]

Pada masa Orde Baru ini, ada semacam kebangkitan kembali nilai-nilai kultur Jawa yang paternalistik dan feodalistik yang sangat mendukung pola patronase politik kepemimpinan elit penguasa dalam struktur kekuasaan. Paham kekuasaan Jawa yang konsentris menjadi manifes dalam lembaga-lembaga politik yang tidak bisa otonom dalam mengembangkan dirinya, karena kekuasaan terpusat pada pemegang kekuasaan paling atas (presiden)[21] Masih dari dasar yang sama, konsepsi negara integralistik yang berasal dari gagasan Supomo, dimunculkan kembali untuk melegitimasi perilaku otoriter negara, seperti penolakan terhadap prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, kontrol yang

kuat terhadap kehidupan politik rakyat, serta penolakan terhadap gagasan-gagasan demokrasi liberal.[22] Ideologi negara Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945 yang interpretasinya dimonopoli (dan sering dimanipulasi) oleh negara, dimanfaatkan elit penguasa untuk menyingkirkan setiap bentuk oposisi politik.[23] Dan akhirnya ideologi pembangunan sebagai dasar legitimasi penertiban dan stabilisasi politik menyebabkan dibatasinya segala bentuk partisipasi politik yang pluralistik untuk membebaskan masyarakat dari konflik-konflik ideologis.[24]

Kondisi di atas, masih ditambah dengan kondisi obyektif masyarakat yang multikultural, perbedaan suku bangsa dan agama, struktur sosial ekonomi yang timpang, minimalnya kultur kelas menengah yang independen, serta struktur global ekonomi Indonesia yang terkait erat dengan sistem kapitalis dunia.[25]

Di bawah kondisi semacam inilah kedua kekuatan pro- perubahan tetap berusaha mengambil peranan. Partai politik dengan segala keterbatasan sumber daya politik dan pembatasan struktural masih berusaha menjalankan fungsi-fungsinya dalam taraf yang sangat minimal. Sementara para aktivis pro-demokrasi melalui LSM-LSM, ormas-ormas, gerakan-gerakan advokasi masyarakat tertindas, mimbar-mimbar akademis, media massa, baik di dalam ataupun di luar negeri, sangat aktif dalam memberikan kritik, koreksi atau oposisi terhadap rezim yang berkuasa. Aktivitas mereka mendapat 'toleransi' bukan semata-mata karena rezim berkuasa bergerak ke arah demokratisasi, tetapi karena dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi politik, agar Orde Baru dipandang demokratis oleh negara-negara lain.[26]

OPOSISI DAN PERUBAHAN POLITIK

Menurut Charles F. Andrain P[27], setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan perubahan suatu sistem politik ke sistem yang relatif baru. Pertama, adalah munculnya konflik dan kontradiksi-kontradiksi dalam suatu rezim politik, terutama bila pola kebijaksanaan yang ada gagal mengatasi kontradiksi-kontradiksi itu dan ketegangan-ketegangan sistemik akibat oposisi berlangsung terus ataupun karena munculnya kelompok/aktor-aktor pembaharu yang pro-demokrasi dilingkaran elit yang memerintah.[28]

Perubahan akan terjadi manakala incumbent-regime gagal membangun koalisi di antara sekutu-sekutunya dan tidak bisa menggunakan coercion-power untuk meredam penentang-penentangnya, sementara di sisi lain pihak oposisi berhasil membangun solidaritas organisasional secara masif, memperoleh dukungan koalisi domestik maupun dukungan asing,[29] dan bisa merongrong kewibawaan elit penguasa. [30]

Faktor kedua yang menyebabkan perubahan politik adalah mundurnya legitimasi politik. Elite yang memerintah semakin menampakkkan diri menjauh dari komitmen-komitmen dasar ideologi, sementara para penentangnya justru semakin kuat pada dasar-dasar yang berlawanan. Pada keadaan ini elit penguasa kehilangan kepercayaan atas haknya untuk memerintah masyarakat, sebaliknya para pemimpin oposisi mampu memperkuat image legitimasi mereka untuk memerintah.[31] Legitimasi menurun juga karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan material masyarakat dan kebutuhan akan *moral values* (keadilan, kebenaran, moral dan etika politik, serta hak-hak asasi). Adanya kontradiksi-kontradiksi dalam nilai-nilai politik yang selama ini dibangun, dimana nilai-nilai yang dikumandangkan penguasa menjadi tidak berarti lagi di mata masyarakat, sementara kelompok oposisi berhasil mempromosikan nilai-nilai baru, maka keabsahan elit berkuasa akan berangsur runtuh.

Faktor ketiga adalah buruknya *policy performance* yang dihasilkan oleh sistem politik. Legitimasi akan turun manakala berbagai alternatif telah dipilih dan janji-janji politik tidak terealisasi, dan frustasi masyarakat berkembang luas.[32] Pada saat yang sama oposisi berhasil memperbesar rasa tidak puas masyarakat serta menunjukkan kesenjangan-kesenjangan antara tujuan dan hasil yang dicapai. Akan tetapi buruknya *policy performance* sendiri tidak cukup mengubah sistem bila tidak disertai dengan kontradiksi-kontradiksi dan konflik-konflik struktural maupun kultural seperti yang disinggung sebelumnya.[33]

Lebih tegas lagi dinyatakan oleh Huntington, bahwa kondisi-kondisi obyektif seperti perubahan-perubahan sosial-ekonomi, dukungan eksternal, maupun perubahan kondisi politik sendiri tidak akan pernah memadai bagiterciptanya perubahan politik ke arah demokratisasi. Sebuah rezim demokratis tidak dibangun oleh kecenderungan-kecenderungan umum, melainkan oleh manusia. Demokrasi tidak diciptakan oleh faktor penyebab non-manusia, melainkan oleh faktor manusia. Sejumlah pemimpin politik, apapun motifnya, harus mengambil resiko dan langkah-langkah ke arah liberalisasi politik.[34]

Dari kerangka pikir di atas maka adanya kekuatan oposisi yang kuat dan utuh, mampu menawarkan *moral values* baru, bisa merongrong legitimasi elit penguasa, menawarkan pola kebijaksanaan baru, memperoleh dukungan internasional, mampu menggiring opini publik, dan pada saat yang sama terdapat konflik-konflik struktural dan muncul kelompok-kelompok pembaharu di tubuh elit berkuasa, adalah kondisi-kondisi yang mengawali suatu perubahan politik. Oposisi politik tampaknya menjadi syarat mutlak untuk sebuah reformasi politik.

PEMBERDAYAAN POLITIK PARTISAN

Barangkali masih terlalu jauh berharap

...ulnya semacam koalisi antara aktor-aktor pro-...krasi dengan partai politik. Ada perbedaan ...asar dan kesulitan-kesulitan yang sangat serius ... merealisir gagasan tersebut. Kekuatan pro-...krasi sendiri sebenarnya lebih berdimensi in-...al jauh dari sebentuk kekuatan politik yang ...dan utuh.

Selain berbeda dalam hal kepentingan, ...gi, organisasi, dan metode perubahan yang ...endaki mereka juga berbeda aktivitas, berbeda ...p antara yang konfrontasional dan non-...ontasional, berbeda sikap dalam menghadapi ...m-hukum yang berlaku, perbedaan dalam ...enerima atau menolak rezim Orde Baru, ...edaan pandang tentang Suharto ataukah struktur-...tur yang merupakan persoalan, serta perbedaan ... terhadap keterlibatan militer dalam politik.[35]

Berikutnya, kemunculan aktor-aktor non-...tural yang berjuang di luar parlemen tersebut ...merupakan wujud ketidakpusan terhadap sistem ...taian dal politik perwakilan yang diberlakukan. ...ka menjaga jarak dengan partai politik untuk ...hindari koptasi dan ketergantungan kepada ...rintah, suatu kecenderungan yang tidak bisa ...dari partai politik. Terjun mendukung partai ... bisa berarti harus menerima sikap-sikap dasar ... misalnya harus menerima mutlak *dwi fungsi* ...er, sebuah keharusan yang justru mereka ...alkan selama ini.[36] Mungkin bagi mereka ...dukung partai politik tertentu sama saja dengan ...hanyutkan diri dalam *maistream* rezim dan ... ada bedanya dengan hipokrisi politik belaka.

Bagi partai politik, kerjasama politik, dengan ...-aktor oposan tersebut sama saja berarti ...ggali liang kubur sendiri. Partai politik banyak ...ar dari pengalaman bagaimana wajah partai ...adi babak-belur gara-gara mereka tampil sebagai ... oposan, memiliki para vokalis, pemimpin yang ...erung radikal, atau bahkan sekedar menjadi ... independen. Gulungtikarnya Naro cs di PPP, ...surnya Soerjadi sebagai ketua PDI dalam ...gres PDI 1993 lalu, terdepaknya Sri Bintang ...ngkas oleh rekan-rekan sendiri di PPP serta ... digoyangnya kepemimpinan Megawati di ...ak PDI (yang mencapai klimaksnya dengan ...ta terhadap Megawati oleh beberapa ...sionaris DPP PDI yang di-*back up* oleh Mendagri ... Pangab) adalah bukti kegerahan orang-orang ...ol yang konservatif oleh karena panasnya ...vensi dan tekanan politik pemerintah.

Namun dari sisi pandang lain terlihat, ...uasaan relatif dan toleransi terhadap gerakan-...an pro-demokrasi, selain sebagai alat legitimasi ... rezim, juga karena mereka tidak berpengaruh ...ak terhadap massa atau tidak memiliki basis ...sa sebagai mana halnya partai politik.[37] ...alisme mereka akan dengan gampang akan ...uh sebagai tindakan subversif dan diredam ...er manakala mereka mencoba melibatkan dan ...ggalang massa dalam jumlah besar melampaui ...s toleransi (lihat kasus SBSI-nya Mokhtar Pakpahan).

Sementara sifat konservatif partai politik dan penolakannya pada oposisi terbuka terhadap pemerintah bisa dipandang sebagai pilihan politik untuk tetap *survive* mengingat kuatnya pengaruh dan intervensi,[38] serta hak pemerintah membekukan kepengurusan partai politik.[39] Argumentasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa elemen-elemen radikal umumnya masih dipertahankan ada dalam partai sepanjang tidak menyebabkan konfrontasi langsung antara partai dengan pemerintah.

Tidak banyak ruang tersedia bagi arogansi kedua kekuatan politik itu dalam menggagas perubahan politik yang tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan banyak pihak. Harus muncul kesadaran bahwa aktor-aktor pro-demokrasi beserta organisasi-organisasinya kurang kuat secara struktural dan mereka sendiri saja tidak akan cukup kuat menggalang basis dukungan untuk mengusahakan suatu perubahan politik. Sementara bila partai politik masih tetap seperti sekarang dan tetap lebih memilih sikap akomodatif atau konservatif, merekapun tak akan pernah memiliki cukup *pressure power* bila mereka menghendaki perubahan-perubahan politik minimal sekalipun.

Maka saya sampai pada pendapat bahwa, apapun bentuk dan nama kerjasama keduanya untuk mengadakan bargaining, negoisasi, atau kompromi-kompromi dengan pemerintah agar melakukan perubahan politik, adalah perlu. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari pendapat tersebut :

Pertama, berkaitan dengan potensi masing-masing kekuatan politik. Kekuatan pro-demokrasi mempunyai pandangan yang jauh ke depan tentang masalah HAM, prinsip-prinsip demokrasi universal, penolakan kesewenang-wenangan negara dan tuntutan diterapkannya *rule of law* serta desakan agar pemilu diselenggarakan secara *fair* yang mana semua itu menyediakan *moral Values* alternatif.[40] Melalui jaringan komunikasi domestik maupun internasional, mereka berpeluang mendapatkan dukungan internasional terhadap proses demokratisasi. Berikutnya melalui advokasi-advokasi kemasyarakatan, kemampuan membentuk opini publik, serta sumber daya manusianya, kekuatan pro-demokrasi adalah potensi politik yang kaya. Progresivitas ide-ide perubahan serta kemampuan mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat terhadap buruknya *policy performance* pemerintah membutuhkan agregasi dan artikulasi.

Di lain pihak, partai politik memiliki basis massa yang luas dan posisi struktural yang lebih bagus. Bagaimanapun juga, penerimaan atas gagasan-gagasan demokrasi dan demokratisasi guna mewujudkan perubahan membutuhkan basis massa. Semakin luas penerimaan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembaharuan politik ke arah demokrasi, maka semakin besar pula tuntutan timbul dalam masyarakat. Akibatnya semakin kuat pula oposisi terhadap penguasa yang otoriter.

Partai politik juga memiliki saluran

institusional terpenting yaitu di MPR dimana fraksi mereka berhak menentukan calon presiden/wakil presiden, termasuk memilihnya, dan juga hak mengusulkan berbagai bentuk perubahan politik melalui ketetapan-ketetapan MPR. Dalam forum inilah sesungguhnya siapapun yang concern dengan liberalisasi politik bisa mendesakkan perubahan dan secara absah dapat melakukan oposisi terbuka terhadap pemerintah.

Kedua, menyangkut imbangan politik di MPR/DPR. Sejak pemilu 1971-1992, Golkar selalu menang mutlak dengan dukungan sepenuhnya dari militer dan birokrasi yang menyebabkan mereka mendominasi MPR/DPR. Ini berbeda dengan kedua parpol non-pemerintah yang boleh dibilang tampil sendiri, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai. Dalam Sidang Umum MPR 1992/1993 misalnya, koalisi konservatif Golkar-militer-birokrasi menguasai 82,3% keanggotaan majelis, dan parpol hanya 17,7%,[41] sebuah komposisi keanggotaan yang tidak realistis bagi terwujudnya perubahan politik.

Sekalipun kenaikan suara parpol non-pemerintah tidak memiliki signifikansi dengan perubahan komposisi pemerintahan, namun tetap memiliki relevansi secara moral dalam memerosotkan legitimasi penguasa. Berapapun jumlah kenaikan suara parpol dalam pemilu sebagai pengaruh keterlibatan atau dukungan aktivis-aktivis pro-demokrasi, berkemungkinan menciptakan imbangan baru bagi proses tawar menawar politik. Terciptanya imbangan baru dalam komposisi anggota MPR/DPR adalah pijakan awal tawar-menawar perubahan-perubahan politik.

Akan tetapi, aliansi oposisi pro-demokrasi dengan partai politik adalah sebuah pilihan politik berdimensi kompleks dengan konsekuensi-konsekuensi politik berkemungkinan banyak.

CATATAN AKHIR:

1) Lihat *Pelita* 24 Oktober 1992, *Kompas* 24 Oktober 1992, dan *Editor* 7 November 1992.

2) Lihat *Editor* 21 November 1992, *Media Indonesia* 24 November 1992, dan *Prospek* 5 Desember 1992.

3) Afan Gaffar, *Javanese Voters : A Case Study Elections Under The Hegemonic Party System*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1992, hal. 38-50.

4) Anders Uhlin, *Democracy and Diffusion : Transnational Lesson-Drawing Among Indonesian Pro-Democracy Actors*, Lund University, Departement of Political Science, Sweden, 1995, hal. 58

5) Afiliasi politik yang dimaksud di sini adalah afiliasi kepada partai politik tertentu.

6) Uhlin, *op.cit.*, hal. 152-157

7) Ibid., hal. 71-73.

8) R. William Liddle, **Soherto's Indonesia : Personal Rules And Political Institution**, *Pacific Affairs*, Vol. 58, no. 1, tahun 1994, hal. 71-73.

9) Karl D. Jakcson, **The Prospect for Bureaucratic Polity in Indonesia**, dalam karl D. Jackson dan Lucian W. Pye (eds), *Political Power and Communications in Indonesia*, Barkeley, University of California Press, 1995, hal. 395-397.

10) John Mac Dougall, **Patterns of Military Control in the Indonesia Higher Control Bureaucracy**, dalam *Indonesia*, no. 33 April 1982.

11) Pierre James, **State Theories and New Order Indonesia, dalam** Arif Budiman (ed), *State and Civil Society*, Clayton, Victoria, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990, hal. 18-19.

12) Amir Santoso, **Democracy and Parliament : Future Agenda**, dalam *The Indonesian Quarterly*, XX/1, CSIS, hal 88-89. Lihat pula Mohtar Masoed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta, LP3ES, hal. 157-160.

13) Untuk pengertian sistem kepartaian hegemonik, lihat Giovani Sartori, *Parties adn Party System : A Framework for Analysis*, Cambridge University Press, 1976, hal. 230. Untuk kasus di Indonesia, lihat Afan Gaffar, *op.cit.*, hal. 186-187.

14) Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer : Studi tentang Budaya Politik di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1992, hal. 15 Lihat pula Afan Gaffar, *Op. cit.*, hal. 38-48.

15) Gaffar, *ibid.*, hal. 76-79.

16) Afan Gaffar, **Partai Politik, Elit, dan Massa dalam Pembangunan Nasional**, dalam Ahmad Zaini Abar (ed), *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*, Solo, Rahmadani, 1990, hal. 16

17) Untuk mendapatkan gambaran tentang konflik-konflik internal partai serta campur tangan pemerintah dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut, lihat Samsudin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta, Grasindo, 1991, dan lihat juga Adriana Elizabeth (ed al), *PDI dan Prospek Pembangunan Politik*, Jakarta, Grasindo, 1991.

18) Riswanda Imawan, **Peranan Organisasi Massa dan Organisasi Politik**, dalam *Prisma* 4 April 1995, hal. 33.

19) *Ibid.*, hal. 39

20) Mohtar Masoed, *op.cit.*, hal. 166-175

21) Facry Ali, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, Jakarta, gramedia, 1986, hal. 195.

22) Uhlin, *op. cit.*, hal. 80, Adnan Buyung Nasution, **Staatside Integralistik dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia**, makalah dalam *Sarasehan Fakultas Hukum UGM*, Yogyakrta, 13 September 1993, hal. 14-19, dan untuk uraian yang lebih mendalam lihat Marsilam Simanjuntak, *Pandangan negara Integralistik*, Jakarta, Graffiti Press, 1994, terutama Bab III dan VI.

23) Uhlin, *op. cit.*, hal 80-81.

24) Masoed, *op.cit.*, 132-149.

25) Uhlin, *op. cit.*, hal. 75-78.

26) *Ibid.*, hal. 23 dan 75.

27) Charles F. Andrain, *Political Change in the Thirld World*, Boston, Unwin Hyman, 1988.

28) Lihat pula Samuel P.Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*: Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 158-190

29) Huntington, ibid., hal. 146.

30) *Ibid.*, hal 58-59, dan 63

31) *Ibid.*, hal. 61

32) Huntington *ibid., hal.60*

33) *Ibid.*, hal. 64

34) Huntington, *op. cit.*, hal.. 130-131

35) Uhlin., *op. cit.*, hal. 127-144

36) *Ibid.*, hal. 144, 148-149.

37) *Ibid.*, hal. 75.

38) Affan Gafar dalam beberapa kesempatan seminar maupun tulisan-tulisannya menyatakan bahwa berdasarkan kalkulasi taktis-politis sikap politik *akomodatif* adalah pilihan politik *paling rasional* untuk saat ini, tanpa menjelaskan batas waktu perlunya bersikap seperti itu.

39) Periksa UU No. 3 Tahun 1985 pasal 14.

40) Uhlin, *op. cit.*, hal. 146-148.

41) Arbi Sanit, MPR : **Cermin Birokrat**, dalam *Forum Keadilan*, 29 Oktober 1992, hal. 40-41.

Diplomasi Pasca Perang Dingin :

Agenda Indonesia

DIPLOMASI PASCA PERANG DINGIN MENGHADAPI BABAKAN BARU. BERKEMBANGNYA ORGANISASI NON PEMERINTAH (NGO) YANG BERJANGKAUAN INTERNASIONAL, SEBAGAI AKTOR DOMINAN. DI SAMPING PERKEMBANGAN REVOLUSIONER DALAM TEKNOLOGI KOMUNIKASI-INFORMASI MENEMPATKAN INDIVIDU DALAM TEMPATNYA YANG BARU DALAM INTERAKSI TRANSNASIONAL . DALAM DUNIA YANG "SEMAKIN MENYEMPIT" TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI MENCIPTAKAN "DUNIA LAPIS KEDUA", DENGAN MENGINTEGRASIKAN INDIVIDU DALAM JARINGAN GLOBAL. DALAM SITUASI SEPERTI INI , INDONESIA MEMPUNYAI AGENDA UNTUK IKUT MEMBUKA KATUP-KATUP PENYUMBAT YANG MENGHAMBAT BERKEMBANGNYA DIPLOMASI. SELAIN KEMAMPUAN MENGELOLA ISU-ISU GLOBAL SEPERTI PERDAMAIAN INTERNASIONAL, HAK MENETUKAN NASIB SENDIRI, PERSAMAAN DERAJAT DALAM EKONOMI INTERNASIONAL, KESEIMBANGAN EKOLOGIS DAN SEBAGAINYA.

Akhir Perang Dingin walaupun merupakan suatu cakrawala baru yang lama dinanti-nantikan semua bangsa di dunia, ternyata bukan merupakan antitesa sederhana atas konstelasi politik dunia sebelumnya yang penuh konflik. Tata dunia yang damai bukan menjadi kesertamertaan era baru hubungan internasional sampai saat ini.

FX Bambang Irawan,
lahir di Yogyakarta 27 Oktober 1970. Kini sedang menyelesaikan studinya di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Pernah meraih juara III kategori penulis opini dalam Lomba Karya Tulis Teknologi Telekomunikasi-Informasi yang diselenggarakan PT Indosat tahun 1995, melalui artikel "Gender dan Teknologi Telekomunikasi-Informasi", Harian BERNAS.

Pertanyaan-pertanyaan tentang hakekat hubungan internasional kontemporer justru secara menonjol lebih mengemuka dari pada keajegan-keajegan yang mengisyaratkan kepastian akan dunia sedikit konflik. Keadaan itu selain memunculkan problem praktis dalam hubungan antarnegara-negara di dunia, juga akan memperkaya problem teoretis dalam ilmu hubungan internasional.

Diplomasi tidak terkapsul dari kecenderungan-kecenderungan dalam hubungan internasional seperti itu. Bahkan terhadap konstelasi politik dunia macam apapun, diplomasi dituntut mengelolanya untuk memaksimalkan artikulasi kepentingan nasional. Walaupun untuk itu diplomasi, sebagai moda interaksi politik antarbangsa, sendiri harus melakukan tuning terhadap kecenderungan kecenderungan baru yang terus meningkat secara kualitatif-kuantitatif, seperti halnya haluan politik luar negeri. Pertanyaan tentang hakekat diplomasi dalam masa Pasca-Perang Dingin ini, dengan demikian, patut diajukan sama seperti ketika bertanya soal hakekat hubungan internasional, karena memang keduanya tidak bisa berada dalam ruang dan perjalanan waktu yang berbeda.

Diplomasi mungkin boleh digambarkan sebagai "infrastruktur" hubungan internasional. Sedang "struktur" (baca: hubungan internasional) ideal yang dilayaninya adalah struktur

interaksi yang damai dan nirkonflik. Sampai kini, struktur yang ideal tersebut masih belum dapat terwujud sementara "infrastruktur" lain sebut saja misalnya, perang lebih sering digunakan. Oleh karenanya, tulisan ini ingin mengangkat moral cerita bahwa diplomasi adalah infrastruktur utama hubungan internasional yang harus terus dibangun sesuai kebutuhan-kebutuhan baru umat manusia agar perdamaian dan struktur hubungan internasional yang nirkonflik segera terwujud. Untuk itu tampaknya tugas bagi praktisi dan teoritisi adalah memperluas kanvas diplomasi lagi, lebih luas dari pada kanvas yang telah dibentangkan sampai saat ini.

Agenda global ini tidak bisa ditolak untuk menjadi tantangan bagi semua negara, juga tak terkecuali Indonesia. Adakah Indonesia mempunyai konsep tentang, katakanlah, diplomasi Pasca-Perang Dingin? Apakah konsep- konsep selama ini sudah memadai? Konsekuensi-konsekuensi apakah yang harus mejadi agenda diplomasi? Siapkah kita untuk menjawab agenda itu? Yang harus dicatat, adalah bahwa tampaknya tugas memperluas kanvas bagi diplomasi ini, bukan sesuatu yang masih jauh di angan-angan. Ia sudah dimulai sejak munculnya praktek diplomasi itu sendiri dan dengan situasi seperti berakhirnya Perang Dingin, ini akselerasinya akan memperoleh momentum yang setepat-tepatnya. Inilah agenda hubungan internasional Indonesia, khususnya diplomasinya.

Dalam uraian berikut kita pertama-tama akan menelusuri prospek diplomasi dalam dua cara pandang utama terhadap hakikat dan praksis hubungan internasional, yakni antara kubu cendekiawan realis dan yang banyak disebut sebagai globalis atau transnasionalis. Keduanya mewakili sikap-sikap pesimis dan optimis akan masa depan diplomasi akibat tantangan-tantangan baru yang dihadapinya. Setelah cenderung terhadap pandangan yang lebih optimistik, ulasan akan dilanjutkan dengan menempatkan rekaman pengalaman diplomasi Indonesia selama ini dan agendanya di masa datang.

DIPLOMASI DALAM PERSPEKTIF REALIS

Diplomasi mengalami perubahan besar sejak berakhirnya Perang Dunia I, walaupun bukan dalam prinsip dan tujuan. Kebangkitan Rusia Sosialis, munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemonik, kebangkitan Asia secara bertahap, kebangkitan pendapat umum dan perkembangan sistem komunikasi memunculkan moda diplomasi baru, yang disebut sebagai diplomasi terbuka. Dalam perspektif cendekiawan-cendekiawan idealis, pergeseran ke arah keterbukaan praktek diplomasi ini merupakan kemajuan diplomasi. Menurut mereka, diplomasi yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa partisipasi publik yang menghasilkan persetujuan-persetujuan rahasia antarnegara, merupakan salah satu sumber konflik utama.

Perang Dunia II secara lebih dalam juga mengubah wajah diplomasi ketika mengharuskan politik internasional memasuki era persaingan hebat antara dua adikuasa AS dan Uni Soviet begitu perang berakhir. Saat itu, konflik segera dilanjutkan dengan perang baru yang menggunakan segala macam cara kecuali kekuatan militer, yaitu Perang Dingin.

Terhadap akumulasi berbagai kecenderungan global dan implikasinya pada diplomasi tersebut, penganut perspektif realis berbeda jalan dengan kaum idealis, dengan melihat bahwa semua itu justru membuat kemunduran-kemunduran dalam diplomasi. Hans J. Morgenthau, cendekiawan realis utama, memandang setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan kemunduran dalam diplomasi, yakni:

Pertama, *perkembangan komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi sperti pesawat terbang, radio, telegraf, telepon jarak jauh, membuat perwakilan-perwakilan tetap di suatu negara mengalami degradasi fungsi. Negosiasi bisa dilaksanakan oleh delegasi-delegasi khusus yang boleh jadi menteri luar negerinya langsung, pejabat Deartemen Luar Negeri atau ahli-ahli teknis. Teknologi komunikasi modern memungkinan diplomasi ulang alik* (shuttle diplomacy).

Kedua, *menurunnya nilai diplomasi. Maksud Morgenthau dalam hal ini adalah faktor hilangnya nilai ketertutupan proses diplomasi. Diplomasi terbuka, sebagaimana dirumuskan oleh pelopornya, Woodrow Wilson, menghendaki diplomasi "harus selalu berlangsung terus menerus dan disaksikan oleh umum".*

Ketiga, *diplomasi melalui prosedur parlementer. Terbentuknya Liga Bangsa-bangsa dan Perserikatan Bangsa- bangsa berperan penting dalam mempopulerkan diplomasi parlementer, melalui meja perundingan multilateral dalam badan-badan internasional.*

Keempat, *munculnya negara-negara adikuasa dengan tradisi diplomasi yang lain dari yang sudah-sudah.*

Kelima, *hakikat politik internasional yang diwarnai dengan rivalitas AS-Uni Soviet, membuat tidak ada kompromi yang bisa dibuat oleh diplomat, tidak ada kata mundur bagi masing-masing adikuasa yang saling berhadapan.*

Diplomasi hanya dapat dibangkitkan dengan mengeliminir keburukan-keburukan tersebut dan membangkitkan kembali teknik-teknik tradisional. Walaupun untuk itu kita tidak dapat mengeliminir kemajuan teknologi-teknologi modern. Oleh karenanya, hanya pengaruh universialisne nasionalis- lah —yang merupakan asumsi utama perspektif idealis— yang harus dihilangkan dalam praktek diplomasi.

Dengan demikian, dalam pandangan realis, Perang Dingin merupakan saat-saat yang buruk bagi diplomasi. Struktur bipolar menunjukkan bahwa potensial lawan bisa diketahui dengan pasti. Dalam kondisi demikian, diplomasi tidak bisa jalan karena proses tawar menawar tidak dapat berjalan dengan sempurna. Diplomasi juga tidak diselenggarakan secara serius karena para negarawan tahu bahwa

rang tidak akan terjadi. Kata Robert Gilpin:

Today, the destructiveness of war has decreased the probability that war will result from diplomacy impasse, and as a consequence statesmen feel less pressumed to make or accept the compromises required for peaceful resolution of disputes.

Dewasa ini, dengan politik dunia yang sedang bergeser masuk ke kurun Pasca-Perang Dingin, apakah serta merta prospek diplomasi semakin cerah? Menurut realis, tampaknya bukan begitu, sebab harapan realis yang terkabul demi hidupnya kembali diplomasi hanyalah pada faktor berakhirnya struktur bipolar Perang Dingin dan juga belum terwujudnya apa yang dicita-citakan kaum idealis sebagai Pemerintahan Dunia. Itu saja. Faktor-faktor lain, seperti kemajuan teknologi, prosedur terbuka diplomasi, diplomasi model parlementer, publikasi, justru mengalami kemajuan- kemajuan signifikan.

Singkat kata, praktek diplomasi saat ini dan prospeknya di masa depan, walaupun politik dunia sudah memasuki era Pasca-Perang Dingin, tampaknya akan tidak begitu menggembirakan penganut perspektif realis. Kelemahan realis tampak pada saat pendekatan keamanan mulai ditinggalkan seperti saat ini, yakni dengan tetap bersikukuh bahwa negara harus memonopoli urusan politik luar negeri, sementara tidak ada cukup sarana yang memadai untuk tetap menjaga ketertutupan dan kerahasiaan mekanisme komunikasi mereka. Juga tidak ada cara untuk mencegah masyarakat untuk tidak melakukan komunikasi melewati batas negaranya, apalagi membatasi hal-hal yang dibicarakannya.

PERSPEKTIF GLOBALIS-TRANSNASIONALIS

Kompleksitas permasalahan dalam hubungan antarbangsa memaksa cendekiawan hubungan internasional merumuskan asumsi-asumsi baru. Pendekatan realis yang terlalu menekankan pendekatan kekuatan dan negara sebagai unit tunggal dan mendasar dalam hubungan internasional, tidak dapat lagi secara sahih digunakan untuk melihat realitas politik dunia ini. Setidaknya mulai akhir tahun 60-an, pendekatan baru yang mengedepankan asumsi-asumsi baru mulai bermunculan. Banyak ahli berpendapat bahwa pendekatan- pendekatan yang muncul pascarealis tersebut memunculkan suatu perspektif baru dalam memandang hakikat hubungan internasional. Perspektif tersebut menekankan bahwa hakikat hubungan internasional saat ini adalah transnasionalisme.

Asumsi-asumsi dasar perspektif transnasionalisme mencakup asumsi tentang aktor, isu, berkembangnya interdependensi dan perang sebagai pilihan politik luar negeri.

Ketika perspektif realis memandang aktor utama hubungan internasional adalah semata-mata negara, perspektif transnasionalis melihat adanya eskalasi peran aktor non- negara dan, sebaliknya, adanya erosi peran negara. Pada sisi aktor, transnasionalis melihat bahwa pendekatan realis sangat mengalami keterbatasan, kuno. Aktor-aktor selain negara memegang peranan dalam interaksi internasional dan membuat ciri khusus pada hubungan tersebut, yakni "interaksi transnasional".

Sifat interaksi transnasional menurut Joseph S. Nye, Jr dan Robert O. Keohane dapat dijabarkan sebagai pergerakan benda yang nyata maupun tidak nyata melintasi batas negara dimana setidaknya satu aktor adalah bukan agen pemerintah atau organisasi antarpemerintah.

Dengan demikian, terdapat perbedaan berarti antara hubungan internasional "tradisional" dengan hubungan transnasional. Gambar berikut ini dapat

IGO
G1 G2
S1 S2

— — — Politik domestik
· — · — Interaksi transnasional
——— Politik antar negara klasik
G : Pemerintah (Goverment)
S : Masyarakat (Society)
IGO : Organisasi Antar Pemerintah (Intergoverment Organization)
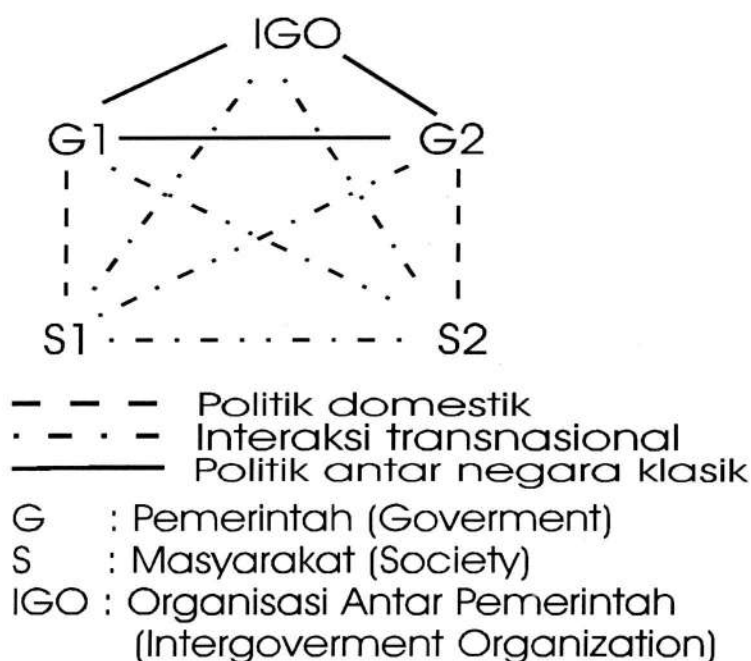
memperjelas perbedaan tersebut (lihat bagan1)

Gambar 1. Interaksi transnasional dan politik antarnegara

Sesuai dengan gambaran Nye dan Keohane tersebut, banyak penulis tentang aktor-aktor "baru" dalam hubungan transnasional ini meletakkan organisasi nonpemerintah Non- Governmental Organization *(NGO) terutama yang berjangkauan internasional,* International Non-Governmental Organi zations *(INGO), sebagai aktor dominan. Aktor-aktor lainnya adalah Perusahaan Multi-Nasional (PMN) selain tentu saja, aktor yang "berbau" pemerintah,* Inter-Governmental Organizations *(IGO).*

Penelitian Mansbach dan kawan-kawan, dalam kajian terhadap data dari projek aktor non negara (NOSTAC, Non- State Actors Project*), yang diselenggarakan oleh Universitas Rutgers, yang meliputi studi di kawasan Amerika Latin, Timur Tengah dan Eropa Barat, memperlihatkan bahwa*

antara tahun 1948-1972 aktor non-negara sudah berperan dalam interaksi internasional, walaupun keterlibatan mereka di masing-masing kawasan tersebut berbeda-beda intensitasnya.

Jumlah NGO mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tahun 1855 baru ada 10 buah NGO, hampir seratus tahun kemudian, tahun 1950, telah mencapai jumlah sekitar 300- an. Tahun 1954 lembaga itu telah berjumlah 1012 buah dan sampai tahun 1968 menjadi 1899 buah, yang berarti meningkat rata-rata 4.7 persen per tahun. Sementara IGO pun juga mengalami peningkatan jumlah. Mulai dengan kurang dari 25 buah di tahun 1820, mengalami jumlah stabil sampai dengan tahun 1900 dan terus bertambah hingga mencapai 175 buah pada tahun 1960.
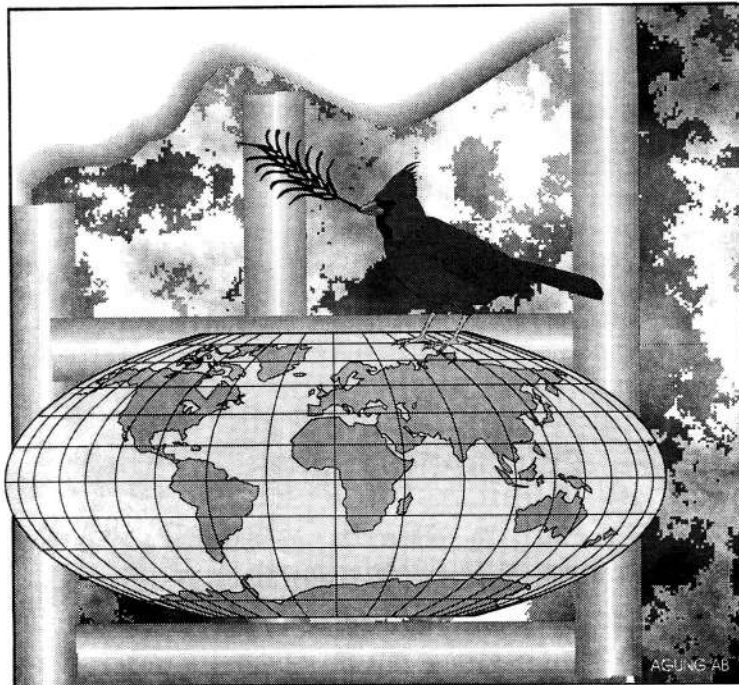
Bagaimana peranan aktor-aktor tersebut dalam politik global? Pertanyaan ini khas dikemukakan oleh pandangan, terutama realis, yang melihat bahwa mereka tidak punya kekuatan politik, militer maupun catu dana yang dapat diperhitungkan.

*Peter Willetts mengatakan bahwa keterlibatan mereka dalam politik antara lain mengambil peran sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Mereka bergerak dalam perubahan sosial, namun suatu saat bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Praktek seperti ini membawa mereka menggunakan tekanan (*pressure*) dan masuk ke dalam dataran politik.*

Masalahnya adalah bagaimana dengan mekanisme yang seperti itu mereka harus diperhitungkan dalam hubungan internasional? Sebetulnya dari sisi isu yang mereka adopsi secara intrinsik bersifat internasional, dan karenanya kegiatan meraka membuat isu-isu berkembang dan menjadi penting bagi individu yang dilibatkan sebagai bagian dari proses transnasional. Selain itu, sasaran kegiatan mereka bukan hanya semata-mata masyarakat domestik suatu negara, namun juga pemerintah dan organisasi internasional.. Kegiatan kelompok-kelompok penekan yang bersifat ekonomi membentuk interdependensi ekonomi, sedang yang bersifat promotional, *menciptakan interdependensi politik.*

Berkembangnya NGO juga mempunyai kontribusi pada hubungan transnasional yang damai. Interaksi transnasional, kegiatan dan rekrutmen dalam organisasi mereka bersifat mengeliminir kekerasan dengan relasi positif fungsional dan ekstra-ideologi.

*Dalam wacana aktor hubungan internasional ini pembicaraan kita sampai saat ini telah merambat ke wilayah tingkat analisa (*level of analysis*) baru di luar negara sebagai tingkat analisis tradisional pendekatan realis. Tampaknya kita harus terus mengelaborasi ke tingkat- tingkat lain seperti halnya tingkat individu. Dalam analisa hubungan internasional sampai saat ini aktor jenis ini belum mendapat tempat yang layak, lagi-lagi karena dianggap tidak mempunyai kapabilitas yang berkaitan dengan kekuatan politis.*

Namun perkembangan revolusioner dalam teknologi komunikasi-informasi menempatkan individu dalam tempatnya yang baru dalam interaksi transnasional. Di dunia kita yang sudah "semakin menyempit" ini teknologi komunikasi dan informasi menciptakan "dunia lapis kedua", dunia maya dengan mengintegrasikan individu ke dalam jaringan komputer pribadi global. Hampir tak ada lagi tempat belahan dunia —bahkan Antartika— ini yang tidak terlilit oleh jaringan global tersebut. Dalam angka, titik-titik jaringan yang terintegrasi semakin bertambah, apalagi penggunanya.

Sebuah jaringan komputer yang paling mondial, Internet, *telah mengintegrasikan lebih dari tiga juta komputer dengan pengguna sekitar 25 juta orang.* Boom *yang sedang terjadi tahun-tahun terakhir akan meningkatkan jumlah-jumlah tersebut secara berlipat ganda. John Naisbitt (1994), memprediksi bahwa pada tahun 2001 nanti pemakainya akan tumbuh menjadi 1,5 milyar atau seperempat penduduk dunia. Proliferasi yang begitu hebat ini akan membuat semua umat manusia terhubung ke dalam jaringan Internet tidak lama lagi, pada tahun 2010. Karakteristik signifikan interaksi transnasional dalam jaringan ini adalah demokrasi, tanpa hirarki, sesuatu yang sangat ideal bagi hubungan internasional dan telah menjadi dambaan selama berabad-abad: demokratisasi global.*

*Bagaimana interaksi antarindividu politik dalam jaringan komunikasi global ini berlangsung? Ada beberapa moda, misalnya, pertama, komunikasi dengan agen pemerintah atau organisasi antarpemerintahan internasional. Kedua, dengan membahas isu-isu politik dalam kelompok-kelompok diskusi (*usenet*). Ketiga, dengan melancarkan perang informasi yang menjurus propaganda terhadap kebijakan suatu negara.*

Kita beralih ke sisi isu dalam pandangan penganut transnasionalisme. Menurut mereka, isu dalam interaksi transnasional mengalami pergeseran dan perluasan dari isu berbasis "power" seperti militer, keserasan dan perang. Isu-isu baru yang dilansir lebih merupakan persoalan "sehari-hari" umat manusia seperti kependudukan, pangan, sumber daya alam (energi), pemanfaatan laut dan angkasa luar, dsb. Pada dasarnya, isu-isu baru ini lebih merupakan akibat dari berkembangnya aktor dalam hubungan internasional seperti kita bahasa di depan. Proliferasi aktor non-negara dalam interaksi transnasional mengedepankan isu yang sangat beragam tersebut dan tidak jarang berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mekanisme seperti ini berlangsung intensif hingga pemerintah menjadi bagian dari pengelolaan isu tersebut. Pada saat inilah sebuah isu menjadi "isu global".

Tekanan perspektif transnasionalis lainnya menyangkut kecenderungan interdependensi dunia. Interdependensi dapat dikatakan sebagai suatu kondisi saat mana kejadian di suatu bagian dari sistem global akan mempengaruhi kejadian di bagian lain dalam sistem yang sama. Derajat interdependensi yang semakin besar ditunjukkan dengan semakin besarnya keterpengaruhan satu bagian atas bagian lainnya.

Asumsi tentang interdependensi umumnya menyangkut hubungan-hubungan ekonomi internasional seperti dalam perdagangan, hubungan moneter, investasi asing, bantuan asing dan transfer teknologi yang semuanya terselenggara dalam situasi yang saling bergantung satu sama lain. Interdependensi ini adalah bentuk ideal hubungan ekonomi internasional, yakni yang paling demokratis, hingga tidak mengherankan apabila merupakan kondisi yang sangat diharapkan oleh negara-negara berkembang dan menjadi jargon dan asas utama kebijakan ekonomi-politik luar negerinya.

Perkembangan dalam aktor, isu dan interdependensi politik global membuat perang, menurut pandangan transnasionalis, tidak lagi merupakan pilihan bagi pembuat keputusan politik luar negeri untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan-pendekatan yang lebih kompleks akibat munculnya aktor-aktor baru dengan membawa isu-isu baru menambah perbendaharaan negara akan cara-cara mendekati konsep kepentingan nasional. Alasan ekonomistik juga dikemukakan, bahwa biaya perang adalah pengeluaran yang sangat irasional jika dibandingkan dengan pilihan penyelesaian lewat saluran lain.

Demikianlah, asumsi-asumsi perspektif transnasionalis atau globalis dalam melihat hakekat hubungan antarbangsa. Dengan asumsi-asumsi tersebut kita bisa melihat masa depan diplomasi secara lebih optimis dan untuk kepentingan tersebut perspektif globalis-transnasionalis ini tampaknya menyediakan kesempatan besar untuk memperluas kanvas dalam rangka mencoba menggambarkan cakrawala diplomasi kontemporer.

TRANSNASIONALISME, ERA PASCAPERANG DINGIN DAN DIPLOMASI

Transnasionalisme bukan akan menafikan peran negara dalam hubungan internasional. Peran negara sebagai pemegang kekuasaan tetap dianggap pokok dalam politik internasional. Namun fakta-fakta tentang interaksi transnasional yang berintikan pelaku non-negara mendesak untuk memperhitungkan aktor tersebut dalam memandang hubungan internasional. Penulis berpendapat bahwa agen diplomasi tradisional mau tak mau harus melibat dengan sudut pandang tersebut, setidaknya karena aktor non-negara mempunyai kapasitas untuk berhadapan dalam level interaksi kemanusiaan (yang low-politics*), jika* toh *masih sulit untuk dapat dikatakan berinteraksi dalam aras* high-politics.

Seperti dikemukakan oleh Nye dan Keohane, bahwa interaksi internasional setidaknya melibatkan setidaknya satu aktor yang bukan agen pemerintah atau organisasi antarpemerintah, maka pandangan ini jika diletakkan dalam konteks diplomasi akan memperkaya saluran-saluran interaksi diplomasi, dan bukan menggantikan saluran diplomasi tradisional antarnegara yang telah ada. Ada kemungkinan bahwa agen diplomasi pemerintah harus melakukan diplomasi, dalam pengertian luas, terhadap NGO, misalnya. Ada pula kemungkinan bertemunya mereka secara tripartit dengan IGO. Ada pula kemungkinan yang tampil adalah antara sipil dengan sipil, dan varian-varian lainnya.

Konsekuensi dari mekanisme tersebut terhadap isu publisitas dan asas ketertutupan-keterbukaan diplomasi menjadi jelas dimana kecenderungan teknologis seperti telah dimulai setidaknya sejak Perang Dunia I memaksa ke arah semakin terbukanya proses dan resultan diplomasi serta akses publik yang juga semakin besar terhadapnya.

Dengan begitu apa yang dinamakan "diplomasi publik" (public diplomacy) *semakin menemukan momentumnya dewasa ini. Menurut Gareth Evans dan Bruce Grant, diplomasi publik berbeda dengan yang tradisional dalam hal metodologi dan tentang objeknya. Diplomasi publik tidak hanya menjangkau pembuat keputusan dan pembuat opini, namun menelusup jauh ke mereka-mereka dari sejumlah kecil yang terpengaruh sampai ke yang bahkan tidak terlibat yang jumlahnya lebih banyak lagi. Diplomasi publik biasanya terbagi ke dalam program informasi yang tegas dan diplomasi kultural yang lebih halus, subtil.*

Kunci sukses diplomasi publik adalah adopsinya terhadap proses demokratisasi. Walaupun objeknya jelas kepentingan nasional, namun metodenya bergantung kepada wacana yang berkembang dalam masyarakat. Ia tak akan berhasil bila pemerintah mencoba memanipulasi apa yang dikerjakan di dunia internasional. Diplomasi publik bukan untuk mengikat masyarakat ke dalam agenda politik luar

negeri pemerintah. Juga bukan untuk membentuk front organisasi. Ini adalah respon terhadap realitas hubungan multidimensional dengan negara-negara lain sekaligus masyarakatnya yang tidak dapat dibangun hanya oleh pemerintah. Ini harus juga mencakup pertukaran warga masyarakat dan ide-idenya, pada tingkat yang sepenuhnya non-pemerintah.

Nomenklatur-nomenklatur lain untuk diplomasi bermunculan untuk diberikan kepada diplomasi dalam konteks yang hampir sama, oleh banyak cendekiawan dan praktisi hubungan internasional. David C Korten, yang berkecimpung sekian lama dalam dunia NGO, menyebutnya sebagai citizen diplomacy. *Menurutnya, warga masyarakat sipil semakin lama semakin semakin yakin bahwa perdamaian dan hubungan antarumat manusia terlalu penting untuk diserahkan kepada pemerintah yang pemimpin-pemimpinnya sering terlalu jauh terpisah dari nilai dan aspirasi warganya. Akibatnya, pemerintah lokal di berbagai belahan dunia menanggapi desakan penduduk untuk mengembangkan kebijakan luar negeri mereka sendiri dan menetapkan hubungan kota bersaudara (*sister city*) untuk mengembangkan diplomasi penduduk- dengan-penduduk secara langsung.*

Kekuatan militer dan ancaman perang sebagai alat diplomasi semakin lama juga semakin tergusur, apalagi dengan berakhirnya Perang Dingin dan persetujuan- persetujuan pembatasan senjata nuklir. Psikologi diplomasi dalam era Pascaperang Dingin lebih terarah kepada tujuan- tujuan kompromi dan negosiasi.

Sementara itu, interdependensi global membawa perkembangan volume dan jangkauan diplomasi. Semakin interdependen dunia ini, akan melibatkan lebih banyak negara yang saling berdialog satu sama lain secara bilateral maupun kolektif. Diplomasi juga cenderung lebih bersifat teknis dan melibatkan pakar-pakar di bidangnya, yang merupakan pelaku-pelaku di luar agen diplomasi tradisional.

Perkembangan pada tingkat aktor dan isu itu pulalah yang mendorong praktek kontemporer dalam diplomasi, yakni pemanfaatan perusahaan-perusahaan terpercaya dalam bidang public relations *untuk membantu tugas-tugas diplomasi.*

AGENDA DIPLOMASI INDONESIA

Pengalaman diplomasi Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan telah melewati tiga fase penting: pada masa kolonialisme Belanda sampai sesaat setelah proklamasi kemerdekaan; pada masa Orde Lama; dan pada masa Orde Baru. Kita akan melihat pengalaman mutakhir diplomasi Indonesia, yakni dalam era Orde Baru.

Sejak naiknya Orde Baru ke pentas politik, politik luar negeri Indonesia mengalami permak total dan diarahkan untuk memecahkan kesulitan ekonomi dalam negeri, menghindari tindakan tidak realistik yang berorientasi prestise, penyelesaian secara damai konflik dengan Malaysia, masuk kembali ke PBB dan ikut serta dalam lembaga-lembaga internasional. Oleh karenanya pada tahun-tahun pertama Orde Baru tersebut semua kekuatan diplomasi diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan ekonomi dari luar negeri. Konsekuensinya, Indonesia terpaksa harus menjalankan diplomasi yang cocok untuk itu. Istilah yang dipakai "diplomasi pembangunan", menunjukkan sikap low policy *politik luar negeri Indonesia saat itu. Diplomasi pembangunan ini kemudian mewarnai sebagian besar sejarah politik luar negeri Orde Baru.*

Namun demikian, secara konseptual, gagasan diplomasi Indonesia ternyata bukan (hanya) itu. Konsep yang lebih mendasar adalah konsepsi yang diturunkan dari asas politik luar negeri Indonesia yang "bebas-aktif" dan dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada rapat kerja yang diselenggarakan oleh Departemen Luar negeri pada bulan Maret 1977 dan diulangi lagi pada pelantikan para Dubes RI, 12 September 1978. Konsepnya adalah "diplomasi perjuangan"

Diplomasi perjuangan bukanlah sikap gagah-gagahan atau radikal-radikalan. Diplomasi perjuangan adalah keuletan dan kelincahan dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi, cita- cita dan kepentingan nasional. Diplomasi perjuangan mengharuskan diplomat kita tidak hanya mengikatkan diri pada kebiasaan-kebiasaan resmi dan keprotokolan saja, malainkan harus dapat menemukan dan mengembangkan cara-cara lain yang lebih efektif.

Konsep "diplomasi perjuangan" ini tidak sama dengan konsep "diplomasi heroik" atau "diplomasi pejuang" di Jerman (sebagai negara terkuat di Eropa pada masa Bismarck sampai Hitler) dan negara-negara "power politics" yang menganggap diplomasi adalah perang dengan cara lain sehingga kebijakan dikembangkan lebih dalam perspektif militer dari pada sipil. Keuletan, kelincahan dan pengembangan cara-cara efektif lain dalam diplomasi lebih mendapat tekanan. Artinya, diplomasi yang dianut oleh Indonesia harus fleksibel terhadap perubahan da perkembangan diplomasi.

Presiden juga menyebutkan 6 ciri khusus yang harus dimiliki setiap diplomat Indonesia, diantaranya berakar dan menghayati serta mampu memnatulkan cara hidup serta alam pikiran dan alam perasaan Indonesia. Dengan kata lain, seorang diplomat Indonesia harus memiliki sikap "keindonesiaan" dan setiap tindakannya harus sesuai dengan sifat-sifat bangsa Indonesia. Tampaknya aspek kebudayaan telah mendapat tekanan yang cukup sejak masih di tingkat diplomat, sebelum nantinya melancarkan juga konsep "diplomasi kebudayaan".

Diplomasi kebudayaan cukup gencar dicanangkan oleh Departemen Luar Negeri. Salah satu jalan yang ditempuh misalnya adalah festival kebudayaan di luar negeri. Langkah ini diambil untuk meningkatkan citra

positif Indonesia melalui aset kebudayaan yang bernilai sangat tinggi dan beraneka ragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Aset kebudayaan tersebut ditempatkan sebagai "subjek" sekaligus "objek". Ini berarti sumber daya manusia yang berperan dalam kebudayaan bisa merupakan pelaku diplomasi utama.

Tekanan pada diplomasi ekonomi dan kebudayaan tersebut masih langgeng sampai saat ini. Ini kelihatan dari wejangan-wejangan yang diberikan Presiden pada setiap upacara pelantikan Duta Besar baru, yang selalu menekankan sektor yang harus terus diusahakan peningkatannya, yaitu sektor investasi, ekspor nonmigas dan pariwisata.

Sementara itu, hambatan terhadap upaya-upaya diplomasi yang maksimal bagi Indonesia bukannya tidak mengalami hambatan lain. Ini karena masih adanya "a little pebble on the shoe", yakni persoalan Timor Timur yang masih menjadi agenda pembicaraan yang dianggap belum final di dunia internasional. Para praktisi, diplomat dan pengamat melihat bahwa banyak kasus dimana Indonesia terganjal dalam diplomasi internasional karena satu masalah tersebut. Contoh kasus terakhir yang bisa melukiskan hal tersebut, yang langsung mengarah ke sisi praksis hubungan diplomatik, adalah ketika calon Duta Besar untuk Australia, HBL Mantiri, harus dibatalkan penunjukannya akibat protes sebagian masyarakat Australia karena salah satu ucapan yang menyangkut soal insiden Dili pada tahun 1991.

Dari kartu-kartu diplomasi yang dimainkan Indonesia tersebut di kancah politik global, dipandang dari perspektif realis, tampaknya haluan diplomasi tersebut lebih mencerminkan pragmatisme saja yang membuat kepentingan politik luar negeri kita relatif tetap aman dan berjalan pada rel yang persis dengan konsep low profile, high profit. Penjelasannya adalah karena ingin mencari selamat dari resiko rivalitas adikuasa dalam Perang Dingin. Dan karenanya, harus ada perubahan ke arah profil diplomasi yang lebih tinggi derajatnya.

Padahal, dengan rekaman praksis diplomasi Indonesia yang secara pragmatis telah ditempuh, dengan melihat konsep "diplomasi perjuangan" yang telah ditetapkan, dan dengan fakta bahwa "sepatu" politik luar negeri yang masih menyimpan "kerikil" di dalamnya, tampaknya, dari sisi postur, diplomasi Indonesia yang banyak dipandang sebagai "low profile" tersebut adalah jalan yang telah sejak awal (Orde Baru) dan akan terus ditempuh.

Burukkah fenomena tersebut? Tidak jika dipandang dari sudut lain dari pada dari semata-mata sudut realis. Dari cara pandang lain dapat dikatakan bahwa jalan diplomasi yang demikian memang konsekuensi dari berubahnya sistem politik global yang indikasi-indikasinya telah diuraikan oleh penganut pandangan transnasionalis. Akibat perubahan-perubahan tersebut diplomasi memang telah bergeser dari kegiatan high-politics negara menjadi kegiatan multidimensional dalam sisi pelaku, isu dan metodologi.

Akhir Perang Dingin menandai intensitas multidimensionalitas diplomasi tersebut yang berkembang ke arah yang luar biasa. Indonesia, untungnya, sudah banyak belajar akan hal itu dengan pendekatan multidimensional untuk setiap aspek kehidupan bernegara. Hanya, dasa warsa menjelang pergantian abad sekaligus millenium ini menandai percepatan luar biasa dalam segala dimensi-dimensi, juga dalam dimensi-dimensi diplomasi. Dengan demikian, dalam suasana betul-betul berlalunya ketegangan Perang Dingin, Indonesia mempunyai agenda untuk ikut membuka katup-katup penyumbat yang menyebabkan hambatan terhadap berkembangnya aspek dan dimensi diplomasi.

Jalan diplomasi Indonesia akan semakin relevan dengan membuat penyesuaian dalam konsep diplomasi perjuangan yang telah dirumuskan secara fleksibel. Relevansi diplomasi perjuangan akan menemukan tempatnya dalam pertama, kesediaan dan kemampuan untuk menggalang aktor-aktor baru di luar negara: profesional, cendekiawan, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Kedua, kemampuan mengelola isu- isu global seperti perdamaian internasional, hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa, pembangunan nasional, persamaan derajat dalam ekonomi internasional, keseimbangan ekologis, negara, kebutuhan dasar manusia dan partisipasi.

Inti dari permasalahan tersebut ada dalam politik domestik: demokratisasi, yang memungkinkan akses aktornya kepada isu-isu global tersebut tanpa halangan. Demokratisasi juga yang memungkinkan diplomasi multidimensional terselenggara secara bersama-sama, sederajat dan tidak berdasarkan subordinasi, antara negara dengan pelaku-pelaku lain di masyarakat. Kita yakin Indonesia mampu untuk itu, setidaknya karena akan sangat buruk akibatnya bagi bangsa ini jika mengandalkan prospek dalam arus tantangan global (tema BALAIRUNG edisi khusus ini) hanya dengan kekuatan negara yang encapsulated dan terasing dari masyarakatnya.***

CATATAN AKHIR

1. SL Roy, *Diplomasi,* Rajawali Press, Jakarta, 1994,hal 78-82.
2. Ray Maghoori, 1982, **Introduction: Major Debates in International Relations,** dalam Ray Maghoori dan Bernet Ramberg(eds): *Globalism Versus Realism, International Relations, Third Debate*, Westview Press, Boulder Colorado,1982, hal. 10.
3. Hans J Morgenthau dan Kenneth W thompson, *Politik Antar Bangsa,* terjemahan dari *Politics Among Nations, The Strugle for Power and Peace,* sixth editions, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia , 1991 , hal 304-312.
4. Ibid hal 325-326.
5. SL Roy, *Diplomasi,* hal.105.
6. Robert Gilpin, *War and Change in World Politics*, New york, Cambridge University Press, 1981, hal 217.
7. Michael P Sullivan, "**Transnnationalism, Power Politics, and the Realities of the Present System** dalam Ray Maghoori dan Bennet Ramberg , eds., *Globalism Versus Rrealism, International Relations,* Third debate hal 196.
8. Richard W. Mansbach, Yale H, Ferguson, Donald E . Lampert *The Web of World Poltics, Non State Actors in The Global System,* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.,1976) hal 273.

9. Joseph S. Nye, Jr and Robert O. Keohane, *Translational Relations and World Politics*, (Cambridge, Harvard University Press, 1971) hal 12.

10. Ibid., hal 15. .

11. Mansbach, dkk., *The Web of World Politics*, hal. 275.

12.Kjell Skejelsbaek, **The Growth of International Nongovermental Organization in The Twentieth Century** dalam Joseph S. Nye, Jr and Robert O. Keohane , eds . *Tranational Relations and World Politics*, hal 74-75.

13. James N. Schubert, **Toward a 'Working Peace System' in Asia Regionalism** International Organitationas 32 (Spring, 1978) hal 472. Data ini dikutip dari Michael Sullivan dalam Ray Maghoori, eds., *Globalism Versus Realism*, hal 198.

14. Peter Willets, **Pressure Group as Transnational Actors** dalam Peter Willets, ed., *Pressure Group in The Global System*, (New York : Sst Martin 's Press , 1982) hal 1. Kelompok penekan yang dibahas di sini meliputi tipe-tipe *sectional clubs , welfare agencies , religious organizations, comunal groups, political parties, danspecific-issues, promotional groups*.

15. Peter Willets, **The Impact of Promotional Pressure Group on Global Politics** dalam ibid., hal 175-180.

16. Ibid., hal 181-185.

17. Ibid., hal 196.

18. Kjell Skjelsbaek, *The Growth of International Nongovermental Organizations in The Twentieth Century* , hal 88-91.

19. Kompas, 26 Desember 1994.

20. Michael P Sullivan, **Transnationalism , Power Politics and The Realities of Present System** , dalam Ray Maghoori, eds ., *Globalism Versus Realism*, hal 196.

21. Oran R. Young, **Interdependencies in World Politics** dalam Ray Maghoori eds., *Globalism Versus Realism*, hal 57-58.

22. Gareth Evans dan Bruce Grant, *Australia's Foreign Relations in The World of 1990's* (Carlton Victoria: Melbourn University Press, 1991, hal 67-68.

23. Ibid., hal 22.

24. David C. Korten, *Getting to The Global Agenda* (West Hamford, Connecticut: Kumarian Press, 1990) hal.27.

25. Adam Watson, *Diplomacy, The Dialogue Between State* (New York: Mc Graw-Hill Book Company, 1983) hal 179-194.

26. Ini merupakan rumusan hasil simposium **Kebangkitan Semangat' 66: Menjelajah Tracee Baru** yang diselenggarakan Universitas Indonesia tahun 1966, dikutip dari Mochtar Mas'oed, *Dinamika Diplomasi Ekonomi Indonesia*, **1966-1969**,laporan penelitian jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol UGM Yogyakarta 1993, hal 34.

27. Bantarto Bandoro, **Pendahuluan** dalam Bantarto Bandoro, ed , *Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru* , Jakarta CSIS, 1994, hal 2 , Mochtar Mas'ud, ibid.

28. M Sabir, *Politik Bebas Aktif, Tantangan dan Kesempatan*, Jakarta, CV Haji Masagung, 1987, hal 229-230.

29. SL Roy, *Diplomasi*, hal.76-77.

30. Irawan Abidin, **Wired Diplomacy** atau **Weird Diplomacy ?** Tanggapan atas artikel FX Bambang Irawan, *Kompas*, 15 September 1995, hal 4.

31. Balitbang Deplu RI, *Kerja Sama Kebudayaan Indonesia Dengan Negara- Negar Kawasan Asi Pasifik Dalam Rangka Penigkatan Citra Indonesia*, Surakarta, UNS, 1993, hal.8.

32. Dian Wirengjurit, **Menyorot Diplomat Indonesia: Sebuah Tanggapan** , *Suara Pembaruan*, 22 November 2995, hal.2.

33. Chadwick Alger, **Values in Global Issues : The Global Dialectics in Value Clarification** (Unpublished paper, 1980) dikutip dari Mochtar Mas'oed, **Relevansi Gerakan Non Blok** dalam *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, hal.74.

◆◆◆◆◆

11 tahun

Majalah Mahasiswa

BALAIRUNG

Universitas Gadjah Mada

MENCOBA MEMBERI WARNA
dINAMIKA KEMAHASISWAAN
di NEGERI INI
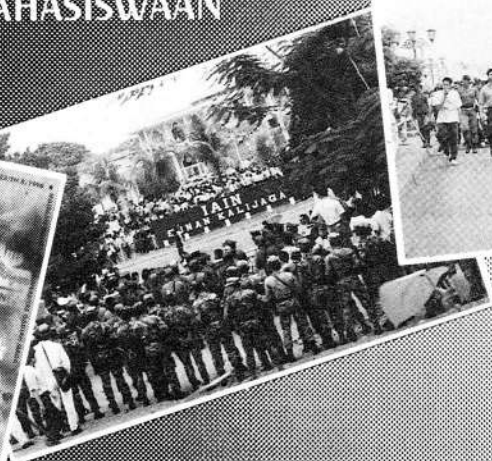
bundel majalah BALAIRUNG
merekam dinamika pemikiran
di kampus Gadjah Mada
Volume III (edisi 17-22)
Harga Rp 25.000,00
Hubungi bagian distribusi
Bulaksumur B-21 Yogyakarta

Merdeka berarti
berani melihat kelemahan diri sendiri
dan mau mengoreksi dan dikoreksi

hore....horree.....
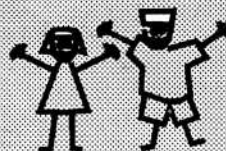
Merdeka bukan milik pribadi!
di Indonesia ia milik seluruh rakyat...

Dari Majalah Mahasiswa BALAIRUNG UGM
menjelang 51 tahun kelahiran hasrat merdeka republik ini

Paradoks Antara Modernitas Dan Pencarian Identitas

"Bertukar Tangkap Dengan Lepas"

MODERNISME, SERINGKALI DIANALOGKAN SEBAGAI KOTAK PANDORA. KOTAK YANG BILA DIBUKA AKAN MENYEBARKAN KEREPOTAN- KEREPOTAN YANG BERBAHAYA DAN TAK TERTANGGULANGI. IA JUGA ACAPKALI DICURIGAI SEBAGAI PEMBIKIN CARUT-MARUT TATANAN YANG TELAH MAPAN DAN TERTIB. SECARA HIRUK- PIKUK IA DATANG KE DUNIA. MENGAMBIL ALIH KEKUASAAN KUNO DARI MITOLOGI TANPA PROSEDUR, TANPA MATERAI. KEMUDIAN MELANGSUNGKAN ORDE BARU YANG DIDASARI HUKUM-HUKUM KEKERASAN INOVATIF SECARA PROGRESIF.

Hary Prabowo
Mahasiswa Filsafat Barat angkatan 1993. Pembaca sastra dan penikmat film. Saat ini menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Majalah Balairung UGM.

PROLOG

Sejarah kebangsaan di kolong jagat ini, agaknya tidak akan luput dari tiga tirani waktu. Masa lampau, masa kini, dan hari esok. Ketiganya sejenis "gril sejarah" yang saling bertaut-berkelindan, sulit diputuskan. Masa lampau sebagai *frame of reference* bagi akar tradisi yang mengikat tonggak-tonggak secara arkhaik. Sedang masa kini merupakan garis dinamik yang tak putus dan menggandeng sejarah menuju oase masa depan. Posisi, kontradiksi, kontemplasi, komposisi, terjadi dalam pergumulan dan pertautan ketiga tirani waktu tersebut.

Dalam kaitannya dengan pemikiran-pemikiran kebudayaan di masa lampau, pada tahun 1935, ada seorang pemuda yang menulis di majalah **Poedjangga Baroe.** Judul tulisan itu "Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia Baru". Tulisan itu ingin mengelupas pakaian Indonesia lama — yang disebutnya sebagai zaman jahiliyah. Melalui tulisan itu ada pesan moral yang kuat untuk meng-inaugurasi kebudayaan Indonesia lama menuju Indonesia baru. Suatu "*exiting of history* ", proses penginaugurasian kebudayaan yang dicarikan ruh dan jasadnya bukan dari paradigma sejarah kebudyaan bangsa sendiri, melainkan dari peradaban Barat yang jauh. Kita tahu, pemuda protagonis itu bukan Cipto, Sukarno, atau Sjahrir. Melainkan Takdir.

Sejarah Indonesia lama (Nusantara) bagi Takdir merupakan museum kuno yang harus ditutup rapat-rapat. Sebab ia hanya akan menjadi parasit bagi pohon kebudayaan Indonesia baru, yakni mentalitas pra-sejarah Indonesia yang tak ada sangkut pautnya dengan cita-cita pembentukan kebudayaan Indonesia baru. Maka terang, Takdir mempersilahkan kita untuk mengubur dalam-dalam sejarah masa lampau Majapahit, Sriwijaya, Mataram, Prambanan, Hang Tuah, Gadjah Mada, Diponegoro.[1] Sebab sejarah di masa lampau tersebut di luar paradigma keindonesiaan kita yang bakal dibangun. Bukankah sebarisan kerajaan-kerajaan di masa lampau tersebut berdiri secara otonom dan tidak bisa dikatakan dalam rumpun negara kebangsaan Indonesia? Barangkali demikian kesimpulan Takdir.

Secara bergelora, Takdir agaknya mencoba memutus tali ritus yang menghubungkan secara sakral antara masa lalu yang agung(?) dengan masa kini yang profan. Dalam Surat Kepercayaan Gelanggang, ide Takdir juga berkata nyaring bahwa, " kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia kami tidak ingat kepada melap-lap kebudayaan lama lagi. Tapi bangkit menuju zaman baru untuk mengumpulkan harta dunia (materialisme, intelektualisme, egoisme)".[2] Dalam Surat kepercayaan Angkatan 45 pun pada hakekatnya juga sama belaka idenya: "Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia

dan kemudian dilontarkan kembali ke dalam bentuk suara sendiri".[3] Demikianlah pandangan universalis berbicara.

Pada usia muda Takdir memang dikenal sebagai seorang bigot yang ilusionis, kagum pada *pasuryan*-nya Barat yang mempesona. Peradaban Barat yang sudah tiga abad silam terimbas zaman Pencerahan sebagai simbol kemenangan akal budi (Sapere Aude! kibarkan akal budi). Revolusi Perancis yang merombak konfigurasi sistem sosial-politik-kultural lama, kemudian dikibarkannya bendera *Liberty, Equelity, dan Fraternity*. Dan Revolusi Industri yang menginspirasikan kemajuan baik di bidang sains maupun ekonomi.

"DALAM WACANA MODERNITAS, KEIMANAN BARU BUKANLAH KEIMANAN PROFETIK YANG DITURUNKAN DARI LANGIT SEBAGAI PEWAHYUAN TUHAN MELALUI AGAMA-AGAMA BESAR MASEHI. KEIMANAN MODERNISME MENEMUKAN PENGERTIANNYA PADA KEIMANAN YANG DISEMANGATI OLEH LOGOS, TEKNOLOGI, KEMAJUAN DIGITAL, IDEAL POLITIK, KEMAKMURAN EKONOMI. SUATU KEKUATAN ZAMAN YANG MENGGIRING MASYARAKAT SECARA AGRESIF-EVOLUSIF, YANG BERADA DI ATAS KEKUATAN TRADISI, MORAL, ETIKS, MAUPUN RELIGIOSITAS SENDIRI."

Pandangan Takdir yang radikal tersebut kontan mendapat perlawanan yang sengit dari para tokoh nasionalis. Dr. Sutomo mencela perguruan Goverment Belanda yang terlalu mengagung-agungkan akal. Dan Ki Hajar dewantoro berkata bahwa kecerdasan pikiran, ilmu dan pengetahuan itu selalu mempengaruhi pertumbuhan egoisme dan budi keduniawian, materialisme. Dalam kesimpulan singkat bisa dicatat, bahwa pandangan-pandangan yang dilontarkan Takdir jelas tidak sesuai dengan kepribadian, semacam wewangian yang khas Indonesia sebagai rumpun bangsa Timur. Ciri masyarakat Indonesia yang sosialis, tentu akan terfragmentasi oleh egoisme. Materialisme tentulah keserakahan pada duniawi yang berlawanan dengan kerokhanian "Timor" kita. Apa jadinya bila keselarasan lama tiba-tiba terjadi chaos dan meluluhlantakkan tatanan kosmis, lantaran pembelokan konsepsi secara fundamental?

Pertentangan pemikiran kebudayaan yang terjadi kira-kira enam dasawarsa silam di atas, menggambarkan suatu pertentangan atas pilihan-pilihan yang harus dijatuhkan sebagai desain kebudayaan atau suku cadang bagi sejarah Indonesia baru. Takdir, bisa saja kita dakwa sebagai penganiaya secara disformatif terhadap adat atau tradisi. Sebab Takdir mencoba menolak parenialisme-historis dengan cara memutuskannya dari benang sejarah masa lampau. Satu hal yang tak tak bisa dipahami dari pemikiran Takdir adalah, bangsa manusia mana yang bisa menyetip begitu saja perenialisme-historis; kekuatan akar, local genius, kekhasan, wewangian alam, identitas, sebagai ruang bercermin untuk mengaca dan memperbaharui diri? Meskipun waktu (sejarah) berjalan secara linear, namun bisakah suatu masyarakat tumbuh di atas permukaan tanah, di atas angin, terombang-ambing rapuh dan linglung? Lantas bagaimana bila masyarakat ternyata menemukan simbol-simbol penyelamatannya pada sakralitas masa lampau, disebabkan keperihan-keperihan modernitas yang keras saat ini? Ke mana mereka harus mencari psicological-teurapic? Sederetan Daftar pertanyaan yang tentu luput diperhitungkan oleh Takdir yang telah almarhum (semoga arwahnya damai di sisiNya).

MONOLOG

Oke, baiknya kita sudahi mempermasalahkan pertentangan konseptual masa lampau tersebut. Toh, itu permasalahan masa lalu. Dan kita berdiam di masa kini, dengan permasalahannya yang lebih kompleks. Permasalahan di paruh abad 20 saat ini telah beranjak jauh dari kebingungan pilihan antara Barat atau Timur. Modernitas, sejak menancapkan pakunya di atas episode sejarah sejak tiga abad silam, telah melahirkan sebakul permasalahan peliks. Modernitas yang bermula dari kritik terhadap filsafat, agama, hukum, sejarah, ekonomi, politik,[4] telah membiakkan permasalahan yang luas dan mendasar. Dalam wacana modernitas, keimanan baru bukanlah keimanan profetik yang diturunkan dari langit sebagai pewahyuan Tuhan melalui agama-agama besar Masehi. Keimanan modernisme menemukan pengertiannya pada keimanan yang disemangati oleh logos, teknologi, kemajuan digital, ideal politik, kemakmuran ekonomi. Suatu kekuatan zaman yang menggiring masyarakat secara agresif-evolusif, yang berada di atas kekuatan tradisi, moral, etiks, maupun religiositas sendiri. **Lord Acton**, seorang intelektual Eropa yang berpengaruh, sewaktu dilantik dalam pengukuhannya di Cambridge di tahun 1895, mengemukakan keyakinannya tentang adanya suatu "garis bukti yang nampak" yang membatasi abad modern Eropa dengan sebelumnya. Zaman modern menggantikan abad pertengahan bukan dengan cara penggantian biasa, tanpa syarat-syarat ketentuan yang sah. Sebuah pengalihan kekuasaan yang tanpa prosedur atau di atas perjanjian bermaterai. Lord Acton dalam hal ini mengilustrasikan, tanpa gembor-gembor, zaman modern mendirikan orde baru yang didasari oleh suatu hukum inovasi, yang terus melemahkan berlangsungnya kekuasaan kuno. Dalam masa-masa itu Columbus menumbangkan gagasan-gagasan dunia, dan memutarbalikkan kondisi produksi, kekayaan dan kekuasaan; dalam hari-hari tersebut Machevielli membebaskan pemerintahan dari pengekangan hukum; Erasmus Huis mengalihkan arus ajaran lama dari alam duniawi ke saluran-saluran kristen; Martin Luther memutuskan rantai kekuasaan dari tradisi pada mata rantai yang terkuat; dan Copernikus menanamkan suatu kekuatan yang tidak terkalahkan, menandai kemajuan pada masa yang akan datang untuk selama-lamanya..... Sehingga zaman modern merupakan kelahiran kehidupan baru; dunia berputar pada orbit baru, yang ditentukan oleh pengaruh-pengaruh yang sebelumnya tidak dikenal

orang.[5]

Lantas, satu realitas historis berikutnya adalah semangat zaman yang telah melompat jauh dari dekapan lokalisme, logosentrisme, maupun fundamentalisme. Pluralitas telah menggeser hegemoni-hegemoni yang terlalu fanatik pada keserbatunggalan. Semangat pluralitas yang ditandai dengan dekonstruksi atas bangunan regime-regime primordial dan pencarian kembali wajah-wajah kontemporer. Sederetan realitas fenomenal historis menuturkan; rubuhnya aristokrasi dan feodalisme, melemahnya hegemoni ideologi, dan ditolaknya wajah keserbatunggalan. Kerajaan-kerajaan bersistem monarkhi masa lampau di pedalaman Jawa, Inggris, Malaysia, kini hanya menjadi simbol yang tak berdaya oleh proses peminggiran modernitas. Mereka tak bisa secara kuat memaksakan konsep *sabda pandika ratu* pada kawula. Ideologi sejenis komunisme di Soviet, telah ambruk dengan patung Lenin sebagai simbol bapak Komunisme ramai-ramai dicincang oleh anak cucunya. Di Cina, Mao Tse Sung sudah dulu-dulu membocorkan gentong revolusinya, dan membukakan jalan bagi masuknya kapitalisme yang diperlebar sendiri oleh Deng Xio Ping, generasi penerusnya. Dalam aras waktu di paruh abad 20 ini, bangsa mana yang bisa luput dari deru-debu perubahan, modifikasi, modernisasi, sebagai kekuatan sejarah? Sedang suku Dayak Bukit yang bertebaran di lereng-lereng perbukitan lebat Kalimantan Selatan pun, telah diperkenalkan tv dan parabola!

Dalam situasi yang kompleks ini, permasalahan identitas yang berkorelasi dengan kebangsaan (nasionalisme) menjadi satu paradoks yang tak bisa ditolak. Ide kebangsaan (keindonesiaan) yang lebih pada permasalahan politik, agaknya terjepit pada posisi yang serba *rikuh*. Pada satu sisi suatu bangsa bersikukuh untuk menjaga orisinalitas sebagai identitas yang musti dilap-lap selalu agar tampak necis dan mengkilat. Sehingga ia tidak membuat krisis percaya diri masyarakatnya, dan menemukan pengertian sebagai lokasi personal-titik pusat individualitas yang stabil dan mantap.[6] Namun pada sisi lain, semangat *manunggaling jagat* (globalisasi) yang telah menempatkan ide-ide lokalitas, etnisitas, rasialitas, dominasi gender, tergusur oleh perubahan-perubahan yang ditebarkan oleh *mainstream* modernisme.

Pada konteks politik kenegaraan, paham chauvinisme yang berasal dari pemikiran **Nicolas Chauvin,** seorang prajurit setia Napoleon Bonaparte, yang mengagung-agungkan kesadaran nasionalisme dan membenci bangsa lain jelasa telah tamat. Suatu negara tak mampu lagi mencengkeramkan doktrin ideologi dan fanatisme sempitnya dengan cara menutup diri dari lalu-lintas nilai-nilai kosmopolitan. Sebab logosentrisme telah digantikan oleh sejenis semangat universalitas; egalitarian, persaudaraan, kebebasan, rasionalitas, emansipasi, demokrasi, kapitalisasi. Dan dalam wacana pemikiran, kehadiran aliran pemikiran post-modernisme yang tampil dengan kekenesannya; dekontruksi-dekontrusi dan segepok absurditasnya, jelas semakin meramaikan kompleksitas nilai pada konstelasi kosmopolitanisme.

Dalam konteks ini, pencarian identitas bernama "keindonesiaan" jelas tak kuasa menjaga orisinalitas pada simbol-simbol arkhaik masa lampau. Indonesia masa kini tidak bisa lagi bersembunyi di ketiak primordialitas Prambanan, Majapahit, Mataram, atau melalui pengejawantahan sosok Gadjah Mada, Pangeran Diponegoro, atau Bung Karno sekalipun. Pencarian identitas (kebudayaan) adalah proses panjang tanpa tapal batas ruang dan waktu, yang tak pernah berhenti melakukan pembaharuan diri dalam sintesa-sintesa abadi. Atau meminjam kata-kata penyair Amir Hamzah, pencarian identitas akan selalu "bertukar tangkap dengan lepas".

> "REALITAS HISTORIS BERIKUTNYA ADALAH SEMANGAT ZAMAN YANG TELAH MELOMPAT JAUH DARI DEKAPAN LOKALISME, LOGOSENTRISME, MAUPUN FUNDAMENTALISME. PLURALITAS TELAH MENGGESER HEGEMONI-HEGEMONI YANG TERLALU FANATIK PADA KESERBATUNGGALAN. SEMANGAT PLURALITAS YANG DITANDAI DENGAN DEKONSTRUKSI ATAS BANGUNAN REGIME-REGIME PRIMORDIAL DAN PENCARIAN KEMBALI WAJAH-WAJAH KONTEMPORER. SEDERETAN REALITAS FENOMENAL HISTORIS MENUTURKAN; RUBUHNYA ARISTOKRASI DAN FEODALISME, MELEMAHNYA HEGEMONI IDEOLOGI, DAN DITOLAKNYA WAJAH KESERBATUNGGALAN."

Taufik Abdullah, seorang sejarawan Indonesia, mencurigai bahwa konsep identitas atau jati diri yang selama ini coba dilap-lap, dipertahankan, tak lain daripada kemampuan sistem hegemoni suatu kekuasaan. Sebagai *discourse,* konsep hakekat kebudayaan yang adiluhung dan luhur, adalah wilayah eufimisme dan hiperbol. Dan ketika penghayatan bangunan kebudayaan hanya pada tahap verbal yang serba eufimistis, maka kaburlah batasan antara deskripsi, yang disusun melalui kata-kata, kotbah-kotbah kenegaraan para birokrat, dengan kenyataan sebagaimana adanya. Dengan dukungan kekuasaan, eufimisme dan hiperbol atas jati diri yang lebih bermakna *pseudo-reality* tersebut, menjadi representasi kenyataan. Sehingga keberadaannya hanya menjadi instrumen, alat kekuasaan; yakni legitimasi bagi kelangsungan suatu sistem kekuasaan yang tengah berlangsung.[7]

Pencarian identitas dalam era pluralitas memang tidak searti dengan pembekuan atau pendusunan. Pemaknaan kontekstual atas pencarian ini sama artinya dengan mengarungi perjalanan abadi di medan terbuka yang siap menanggung segala resiko dari keberhasilan atau kegagalan, keperihan atau kebahagiaan, penemuan atau keterasingan, tenggelam atau muncul, di atas aras-aras sinkretisme dan hibriditas sebagai hukum pluralitas. Suatu kondisi
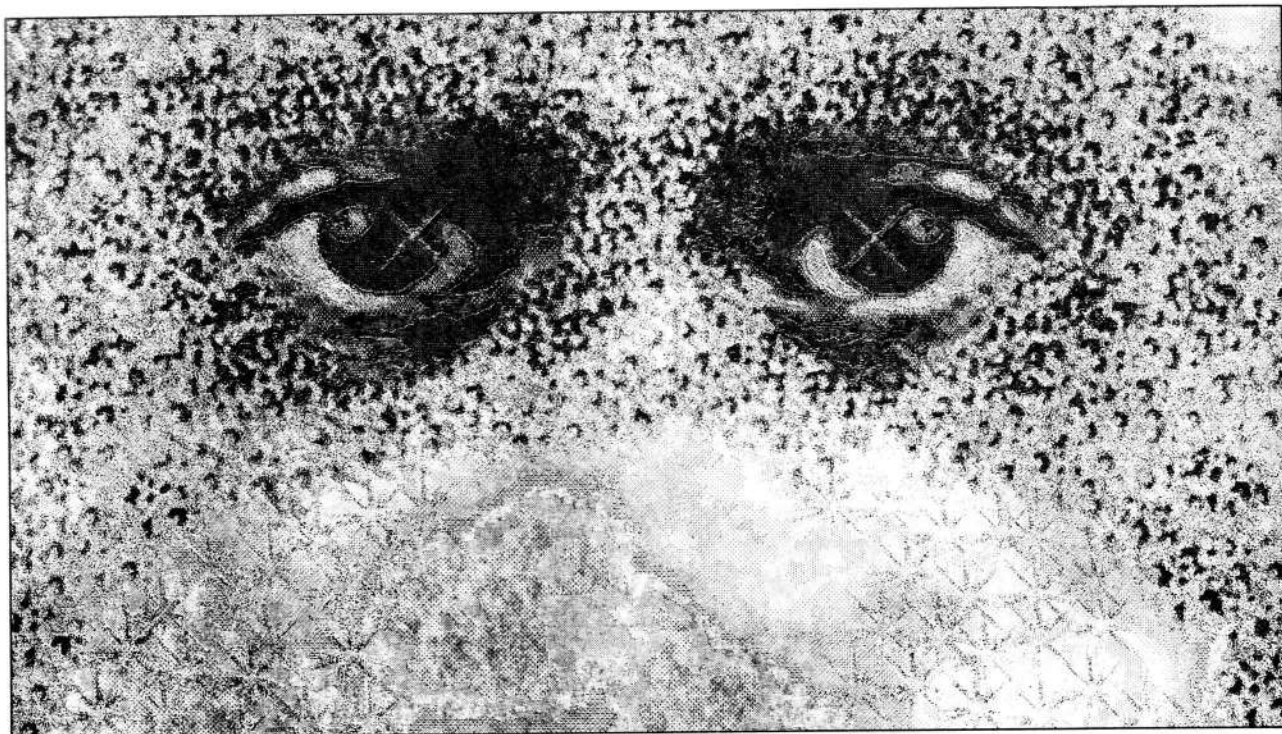
yang memaksa setiap identitas untuk *open-minded*, terlibat dalam pertarungan dan perkawinan global yang tak terelakkan. Atau, jumbuh dalam keserbaragaman yang berjalan secara linear-simetris mengarungi labirin-labirin waktu utopianistik yang menggoda, sebagaimana telah diproyeksikan oleh modernisme.

Dan mengarungi ruang-waktu sejarah yang centang-perenang dalam hiruk-pikuk ini, jadinya tak ubahnya perjalanan Ulises dalam epos **Odysseus** cerita mashur Yunani Kuno karangan **Homerus**, yang diperbaharui secara modern oleh **James Joyce**, seorang pembaharu sastra Inggris. Cerita yang memaparkan perjalanan Ulises, raja Itaka yang sepulang dari perang Troya yang dahsyat dan mendapat murka dari dewa, Ulises dan pasukannya menuju tanah dusun yang dirinduinya. Perjalanan yang dilalui Odyseus bukanlah perjalanan yang lenggang dan damai. Namun perjalanan terjal bertualang penuh aral dan godaan. Mereka bertemu dengan masyarakat kampung Lotopaga yang hobby mengunyah teratai. Teratai yang dihidangkan kepada pengiring Ulises dan membuat mereka mengantuk dan lupa rumah. Namun beruntung, Ulises dengan kekuatannya mampu menarik mereka keluar dari zona tersebut. Berikutnya mereka dihadang oleh Polifemus, raksasa bermata satu yang berwatak jahat, sempat memenjarakan mereka di dalam gua. Berkat kecerdikan Ulises pula, mereka bisa keluar dari perangkap. Godaan lain datang lagi dari seorang penyihir jelita bernama Sirse. Karena kerakusan pengikut Ulises sendiri, Penyihir yang jelita ini mengubah pengikut Ulises menjadi babi-babi. Karena ancaman Ulises yang perkasa, tukang sihir itu mau melepaskan mereka dari pengaruhnya. Namun sialnya, selepas mereka dari pengaruh sihir ternyata malah membuat mereka betah tinggal di istana Sirce, sehingga lupa rumah. Di akhir perjalanan, datang lagi godaan dari pesona nyanyian Sirena yang sahdu. Makhluk-makhluk cantik yang menyerupai burung itu ingin menjerumuskan Ulises dan pengikutnya dengan nyanyiannya. Namun lagi-lagi berkat Ulises, mereka berhasil melewatinya. Kemudian sampailah mereka di rumahnya. Lantas apa yang terjadi ketika Ulises sampai di dusun kerajaan dan istananya? Ternyata siksaan dari rasa kangen yang laten (home-sickness) pada dusun impianya selama kepergiaannya ke medan perang dan petualangannya: ia yang mendamba sebuah tempat yang damai, sejuk dan tentram, tak dirasakannya. Apa yang dirindukan Ulises malah tarikan kuat untuk bertualang lagi, bukan suatu *happy-ending*. Maka Ulises minggat kembali dan melakukan perjalanan abadi menuju keentahan yang tak terkirakan. Pemaknaan atas teks sastra ini adalah, Ulises mengembara mencari harapan-harapan yang tak tertafsirkan, di zona-zona waktu akan datang.

Pencarian bersama modernitas (inheren dengan pluralitas) memang suatu perjalanan kekerasan progresivitas serta utopianistik. Perjalanan bersama modernisme, bila disketsakan mirip perjalanan bersama sepur senja super-ekspres. Sebuah perjalanan di atas lintasan rel besi yang keras, di mana masa lampau berkelebatan secara cepat di balik kaca tebal yang ditarik keras oleh gerbong-gerbong yang dihubungkan dengan rantai besi. Dan kita yang menumpang di dalam gerbong tak pernah tahu mau di bawa ke mana. Seperti *Gone with the Wind* pada galibnya. Sedang bila kita berkawan dengannya, ia adalah sosok abstrak yang suatu kali bisa berparas malaikat dan lain kali menjelma bertopeng setan. Dalam pengertian, ia mengandung berkah sekaligus

malapetaka bagi siapa saja. Ilustrasi tentang hal ini digambarkan secara apik oleh Octavio Pas sebagai berikut:

"Kami mengejar modernitas dalam metamorfosisnya yang tiada henti, tanpa mencoba menjebaknya. Ia selalu melarikan diri. Kami mencoba memeluknya dan ia menghilang segera: sebab ia hanyalah udara segar. Ia memang serba dan merta, seperti burung yang berada di mana-mana dan tak di mana pun. Kami ingin menjebaknya hidup-hidup, tetapi ia selalu mengepakkan sayap dan menjelma menjadi segenggam suku kata. Kami tetap tinggal dengan tangan hampa. Kemudian pintu-pintu penerimaan terbuka, dan waktu lain pun muncul — sesuatu yang nyata, yang kita cari tanpa kita sadari: masa kini, kehadiran".[8]

Dalam dunia sastra pun, paradoks modernitas tak salah banyak disastrakan dengan penggambaran yang hampir sepenuhnya tragik.Yakni menyastrakan demistivikasi modernisme. Dengan kata lain, bangsa Barat yang menjadi wilayah pertama menerima "penitahan perih" modernitas, personalitas mereka digambarkan sebagai "manusia rongga kosong dalam negeri keji" (T.S. Elliot), dan manusia "mahkota ciptaan, si babi yang kehilangan aku-nya" (Gottfrend Benn), kemudian "manusia terbuang percuma" (George Orwell), manusia sebagai "manusia demon" (Dostoyevsky), manusia yang "tercampak dalam kemuakan kedaulatan absurd, neraka adalah orang lain" (Jean. P. Sartre), yang bagaikan "Sysiphus mengangkat batu ke puncak gunung, digelindingkan ke bawah, agar ia bisa mengangkat kembali ke puncak" oleh Albert Camus, yang dalam wacana Nietzche dinamakan *eternal recurrence*; bahwa dunia dengan segala kebaikan dan kebejatan, keagungan dan kekerdilan, kebajikan dan kebajinganan, akan hancur kemudian muncul lagi dengan segala detailnya secara persis, berkali-kali secara tak terhingga. Kenyataan inilah yang selanjutnya melahirkan absurditas; kecemasan, kekerasan, jijik, sumpek, terhadap kehidupan. Namun ini merupakan kenyataan dasar yang tak bisa ditolak. Karya sastra lain, manusia adalah "telur-telur ular Adder" (Francois Maurice) dan manusia itu hanyalah makhluk percuma yang "waiting for Godot" yang tak pernah ada. (Samuel Becket).[9]

Film Garin Nugroho bertajuk **Bulan Tertusuk Ilalang**, secara implisit juga memaparkan realisme sosial dari gejala skizofrenia salah seorang tokohnya yang bernama Bulan (Paquita Wijaya). Wanita muda yang telah mengenal jagat modernitas di negeri asing ini mencoba feedback dan masuk dalam tarikan mistik di wilayah keraton; suatu faset dunia yang mempesona di masa lampau. Di sana ia duduk bersimarah. Menikmati pembentukan kembali wajah identitasnya. Namun film romantik yang belepotan pemaksaan efek-efek estetik ini, mengakhiri tokoh Bulan dengan miris sekali. Ditinggal mati pak Waluyo, bapak pengasuh masa lampaunya, ia tak mampu melepas tarikan jagat global, kosmopolitan. Bulan "sakit" dan mengalami deindividuasi. Menjeduk-dejukkan kaki di tembok dan berbicara di telepon umum dengan entah siapa (kekosongan) menggunakan bahasa Perancis dan Inggris, menyiksa diri (masokhis) sebagai pembocoran-pembocoran kecil skizofrenianya, kemudian tertinggal sendirian di wilayah masa lampau, jelas ia tak bisa mengelak untuk tidak berdiri di dua dunia dengan dua kakinya. Masal lampau dan masa kini. Sebab hidup di abad ini seolah dipersyarati untuk mengidap skisofrenia. Yakni kecenderungan untuk mengungsikan keperihan-keperihan hari ini dengan cara mencari simbol-simbol penyelamatan dengan cara menziarahi masa lampau. Sementara ia juga ingin meladeni pendambaan-pendambaan pada masa depan yang tengah bergerak dengan perkasa, dan membetot dengan keras.

DIALOG

Pencarian identitas di antara kecamuk pluralitas, menjadi satu keniscayaan untuk melakukan eklektisisme; secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ek-lego yang artinya memilih. Dengan eklektisisme, yang semula mempunyai konteks dalam filsafat ini, tidak dimaksudkan sebagai suatu madzab atau aliran, melainkan suatu kecenderungan secara umum untuk memilih kemudian mengkombinasikan menjadi sebentuk pemahaman yang padu dari pungutan varian-varian pemikiran, kebudayaan, identitas. Eklektisisme dalam *discourse* kebudayaan, berarti berdialog, mengadakan kombinasi-kombinasi, pembentukan dari pemilihan-pemilihan wacana yang pas dan fix yang dipungut dari dunia kosmopolitan. Penjumbuhan yang mempertemukan tidak hanya fisik peradaban, namun melibatkan tata nilai, roh, spirit dari sesuatu.

Robert Marcel, seorang seniman teater Eropa kawan Peter Brook, pada tahun 1983 pernah mencoba mengupayakan kerja sinergetik, dengan mementaskan karya eksperimen repertoar karya Shakespear yang mashur berjudul **Mackbet**, yang dikawinkan dengan medium wayang kulit pakeliran Bali. Wayang performance yang menampilkan tokoh-tokoh yang sama persih dalam repertoar Mackbet tersebut. Pengakuan Robert Marcel yang pada tahun 1995 pernah berbincang-bincang dengan penulis di Padepokan Lemah Putih milik Suprapto Suyodarmo di Solo, cukup penting untuk melengkapi wacana ini. Menurutnya, kerja yang dilakukan adalah dalam rangka menapaktilasi, dengan apa yang dikatakannya dengan teater sakral, "dunia inspirasi Timur" sebagai gumpalan nilai yang berdiam di alam universal. Sebab ia merasa jengah dengan wacana Barat dengan teater profannya. Jiwa kebudayaan Barat, terutama dalam konteks wacana seni, teater, sastra, dari Tostloy sampai Bertold Brech, menurutnya selama ini hanya menampakkan parasnya yang melulu "dunia imajinatif". Imajinasi yang hanya mampu bersemayam di kubangan subyektivisme yang bersifat pribadional, dan tak mampu menguniversal.

Untuk itulah Robert Marcel minggat dari Barat

mampu menguniversal.

Untuk itulah Robert Marcel minggat dari Barat dan melakukan perjalanan spiritual (meditasi kolektif) bersama dunia Timur. Merambahi pedalaman India, Tibet, Solo, Bali, untuk memyelami pusaran nilai-nilai sakral pada wayang, Mahabarata dan Ramayana, kemudian memproses perkawinan yang sinergetik (bukan gado-gado, katanya!). Yakni antara inspirasi Timur yang diwakili dengan pakeliran wayang Bali dan Mackbetnya Shakespeare sebagai wakil inspirasi Barat.

Pada kasus Robert Marcel ini, dunia nampak menjadi dua pasang mata yang tengah *sawang-sinawang*, saling melihat, berdialog dan mengintropeksi; apa yang tak dimiliki oleh satu kebudayaan dan apa yang dimiliki sebagai kekayaan kebudayaan lainnya. Dua pasang mata yang saling memandang dan berkaca, pada nilai-nilai, identitas, spiritualitas, untuk kemudian saling melengkapi dan memperkaya. Demikianlah proses eklektisisme menemukan satu konteks pengertiannya. Saling intropeksi untuk memperbaharui diri.

Bila coba kita komparasikan dengan apa yang menjadi pandangan Takdir di awal tulisan ini, nampak sekali kerapuhan asumsi yang dibangun Takdir -- yang barangkali terlalu memandang bahwa Barat itu hebat dan gilang-gemilang, dan bahwa bangsa Timur itu bodoh, malas, kotor, kasar dan sangat pengtakhayul; bahwa kebudayaan Indonesia itu bukanlah sesuatu yang lahir dari *novum testamentus*, tetapi kebudayaan yang merangkak dengan gamang di atas dasar kebudayaan Indonesia yang miskin dan rapuh. Kelemahan Takdir dengan wacananya adalah kelemahan spiritual kategoris. Takdir agaknya mirip bocah "Timur" yang terkagum-kagum melihat paras Barat yang diraba dengan tangan fisiknya. Takdir hanya "melihat" dengan mata wadagnya. Ia tidak sampai "menghayati".

Perbincangan antara Barat dan Timur, kalau kategori dikhotomi klassik ini boleh dipakai, saat ini hampir tak kentara lagi sebagai dua blok yang berseberangan. Keduanya tidak bisa lagi berpretensi untuk saling menyisihkan dan merumuskan klaim-klaim arogansinya. Bahwa *west is west and east is east, never the twains meet*. Dalam tataran politik kebudayaan (kenegaraan), bisa saja suatu regime menolak kebudayaan asing secara fisik, dengan cara melarang beredar majalah Play Boy, atau warta politik yang mendeskriditkan pemerintahannya. Namun mereka jelas tidak berdaya untuk menjadi "malaikat penangkal" atas kemajuan teknologi syber-netic, di mana semua arus informasi bisa menyelinap via internet, e-mail, atau kawat internasional. "Aku tak punya bangsa, aku punya imajinasi," teriak Derek Walcott, suatu kali. Dan tangan kekuasaan tentu mustahil bisa membawa anjing pelacak untuk mengejar sampai ke alam pikiran masyarakatnya.

Dalam proses tawar-menawar kebudayaan, pada akhirnya selalu menemukan pengertian dalam bentuk eklektisisme, sinkretisme, hibridisme, yang memadukan berbagai elemen dari aras jagat kosmopolitan. Dalam perkawinan kosmopolitas ini, perbedaan tidak musti dimatikan. Identitas suatu kebudayaan tidak harus dilenyapkan Ia bisa eksis secara bersama dengan kemajukan identitas. Meskipun merayakan pluralitas cukup menakutkan secara politis (nasionalisme), namun siapa mampu melawan kekuatan sejarah yang tengah membola salju, menggelembung dan membesar. Tantangan bagi kita adalah bagaimana meletakkan posisi dalam proses tawar-menawar ini secara tepat dan harmoni. Sebab kesalahan penempatan secara anatomik dalam tubuh kita sebagai penjelajahan menemukan bentuk yang harmonis, tentu mengakibatkan disharmoni di sana-sini. Lihat saja, bagaimana bila komposisi dari sapuan dan dedahan kosmetik tidak tepat pada wajah kita; lipstik untuk berbedak, eye-shadow digunakan gincu bibir, kemudian wajah bopeng-bopeng belepotan cat warna-warni. Tentu bangsa badut kenes yang menggelikan, jadinya. Identitas sonder harmoni; adalah bertukar lepas dengan entah! ***

Catatan Akhir

1 Lihat artikel STA **"Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru"** di majalah *Horison*, nomor 7 Juli 1986. Pada foot-note artikel tersebut dijelaskan bahwa pada waktu itu (tahun 1935) tengah ramai dipercakapkan tentang *restauratie*, perbaikan candi Prambanan sehubungan dengan pembicaraan subsidi Kolonial Instituut. Dalam isu ini STA berpendapat, boleh jadi dengan perbaikan Prambanan itu beberapa puluh orang akan dapat pekerjaan, dan boleh jadi, bila Prambanan sudah diperbaiki kelak akan banyak pelancong yang datang membawa uang. Tetapi pertama sekali sekali harus diingatkan, bahwa perbaikan Prambanan itu tiada lebih mempertahankan Mumie, mayat yang tiada berjiwa.

Pekerjaan ini menurut STA adalah pekerjaan mereka yang botak kepalanya dan kabur matanya oleh penyelidikan dan mempelajari masa silam dari buku dan batu yang telah merana dirusak zaman. Pekerjaan Indonesia muda seharusnya ialah *cultuurscheppen*, membangun kebudayaan baru yang sesuai dengan gelora jiwa zamannya. Untuk itu diperlukan semangat yang segar, mata yang terang, dan hati yang gembira berani serta terbuka untuk menerima wahyu.

2 ibid.

3 Surat Kepercayaan Angkatan 45 dicetuskan sebelum Surat Kepercayaan Gelanggang.

4 Lihat Octavio Pas, Puisi dan Modernitas, *Kalam* edisi. 5, 1995, hal 70

5 Lord Acton; *Lectures on Modern History*, London 1960, hal 19

6 Lihat Yasraf Amir Piliang, *Kalam* 5, 1995, hal 91

7. Lihat *Kalam*, edisi 2, 1994, hal 103.

8. Dikutip dari *Senjakala Kebudayaan*, Nirwan Dewanto, 1996, hal 27.

9. Lihat *Sastra dan Religiositas*, Romo Mangun, 1988, hal 96.***

◆◆◆◆◆◆

Quo Vadis Pertanian Indonesia Di Era Pasar Bebas

ERA PERDAGANGAN DUNIA MENGHENDAKI PERSAINGAN PASAR SECARA KOMPETITIF. PADAHAL KONDISI PERTANIAN INDONESIA MASIH DALAM POSISI LEMAH. UNTUK TAWAR-MENAWAR DENGAN PASAR GLOBAL. PERSOALAN PENTING DI ERA PASAR BEBAS ADALAH INTELECTUAL PROPERTY RIGHT. HAK CIPTA NEGARA MAJU ADALAH INDIVIDUAL SEDANGKAN NAGARA BERKEMBANG ADALAH SOAIAL. MASALAHNYA JIKA HAK MILIK SOSIAL DIPATENKAN MENJADI MILIK INDIVIDU. KEKURANGPEKAAN DALAM MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI UNGGUL MENYEBABKAN KOMODITI ASLI INDONESIA TIDAK TERSELAMATKAN DAN DIMANFAATKAN

Jika kita mendengar kata "petani" sekilas pintas bayangan kita menerobos pada suatu sosok yang agak terbelakang kalau tidak disebut sangat tertinggal, berkubang lumpur dan terik matahari.

Bayangan diatas memang tidak sepenuhnya salah, karena sampai saat ini dunia pertanian identik dengan dunia marjinal yang selalu diselimuti kemiskinan dan kebodohan.

Lantas bagaimana kondisi petani dan dunianya dalam rangka menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat dengan adanya pasar bebas dunia.

Sebagian besar petani tidaklah tahu makhluk apa itu pasar bebas, akan tetapi mereka akan segera dapat merasakan dampak dari perubahan yang cepat itu.

Dampak semakin sulitnya mendapat tenaga kerja disektor ini, terhadap pemasaran hasil-hasil produk pertaniannya yang semakin seret, dampak semakin membanjirnya buah-buah impor dan lain sebagainya.

B. Farid Wazdi,
Lahir di Karawang 22 Juli 1972. Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada angkatan 1991.
Tahun 1989-1990 menjabat Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tahun 1993-1994 menjadi Pimpinan Wilayah untuk organisasi yang sama. Sempat menjabat Pimpinan Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM. Terakhir tahun 1993-1994 sempat menjabat Ketua Bidang Penelitian Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Aktif menulis di media masa.

Dari itu semua kita berfikir mau kemana dan harus bagaimana dunia pertanian kita arahkan dalam mengahadapi era pasar bebas dunia.

Tulisan singkat ini akan mencoba membahas seputarpermasalahan di atas.

SEKILAS PERTANIAN KITA

Pembagunan pertanian Indonesia pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) sudah banyak mengalami kemajuan, diantaranya adalah penduduk pedesaan di bawah garis kemiskinan telah turun dari 44,2 juta atau 40% pada tahun 1976 menjadi 17,7 juta atau 14,3% untuk tahun 1990. Tenaga kerja yang dapat terserap pada bidang agroindustri adalah 2,74 juta orang pada tahun 1975 menjadi 3,65 juta orang pada tahun 1980. Produksi ternak meningkat tajam, yaitu produksi daging naik 5,9%, telur 10,4% dan susu 12,1%. Kemudian ekspor sayuran meningkat dengan

mengesankan dengan nilai hampir tiga kali lipat dari US 6 juta dollar tahun 1975 menjadi US 17 juta dollar pada tahun 1990. Begitu pula dengan tanaman hias, ekspor buah-buahan juga meningkat dari 840 ton tahun 1985 menjadi 3000 ton tahun 1991(Aziz, 1994).

Jika kita hanya melihat sektor pertanian berdasarkan data di atas maka prestasi tersebut sungguh menakjubkan. Akan tetapi sektor pertanian untuk awal dekade 1990-an mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah. Selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 1991-1993, laju pertumbuhan rata-rata hanya 3,45. Hal ini mempengaruhi sumbangan untuk PDB yang juga semakin merosot. Pada tahun 1991 sumbangan sektor ini hanya 18,5%. Untuk pelita VI rata-rata pertumbuhan sektor pertanian diproyeksikan hanya 3,4% (Raharjo,1994).

Keadaan tahun 1992 penduduk yang bekerja disektor pertanian diperkirakan masih sebesar 42,3 juta orang, ini berarti merupakan 54,3% dari seluruh penduduk yang bekerja.

Sumbangan yang kecil terhadap Produk Domestik Brutto(PDB) dan persentase yang bekerja disektor pertanian masih cukup besar ini menunjukkan tingkat produktifitas relatif sektor ini rendah. Selain tingkat produktifitas yang rendah, tingkat upah rata-rata perjam juga kecil. Ini memberikan bukti bahwa sektor pertanian kita masih lemah. Data Biro Pusat Statistik(BPS) tahun 1992 diperoleh informasi untuk persentase rumah tangga miskin pada sektor pertanian sebesar 60,9%. Klasifikasi daerah pedesaan 82% dan kota 23,9% (Mubyarto, 1992).

> "LINGKARAN KEMISKINAN INI MENGAKIBATKAN POSISI TAWAR PETANI MENJADI LEMAH DALAM PERSAINGAN PASAR DIBANDING SEKTOR YANG LAIN. DITAMBAH DENGAN ADANYA FASILITAS BAIK KERAS ATAUPUN LUNAK YANG TIDAK DIMILIKI OLEH KAUM PETANI, SEHINGGA MEMPUNYAI IMPLIKASI PADA DERAJAT KESEJAHTERAANNYA."

Lingkaran kemiskinan ini mengakibatkan posisi tawar petani menjadi lemah dalam persaingan pasar dibanding sektor yang lain. Ditambah dengan adanya fasilitas baik keras ataupun lunak yang tidak dimiliki oleh kaum petani, sehingga mempunyai implikasi pada derajat kesejahteraannya.

Disepakati GATT pada tanggal 15 Desember 1993 yang selanjutnya ditandatangani secara resmi pada tanggal 15 April 1994 merupakan babak baru perdagangan internasional. Dengan adanya era baru perdagangan dunia maka setiap pasar harus siap bersaing secara kompetitif. Padahal kondisi pertanian Indonesia masih dalam posisi yang lemah, untuk itu diperlukan pengkajian secara mendalam terhadap tantangan, peluang dan strategi alternatif untuk menghadapi pasar bebas khususnya produk hasil pertanian yang semakin tajam persaingannya.

ARAH PEMBANGUNAN PERTANIAN

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 menyebutkan secara rinci tentang arahan pembangunan pertanian Indonesia yakni: pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta mengisi dan memperluas pasar baik dalam negri maupun luar negri melalui pertanian yang maju, efisien, dan tangguh (GBHN, 1993).

Untuk mencapai tujuan di atas maka pembangunan pertanian memakai konsep agribisnis. Konsep ini akan berusaha direalisasikan serta terus dipacu karena ini merupakan komitmen nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh GBHN. Pengembangan sektor ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani baik melalui pendapatan sebagai penerimaan nilai tambah dari proses lanjutan secara kesinambungan, menciptakan lapangan kerja yang memadai di daerah pedesaan maupun peningkatan ekspor nonmigas. Peluang untuk pengembangan agribisnis cukup besar karena bertumpu di atas landasan keunggulan komparatif dalam memproduksi berbagai bahan mentah berupa komoditi perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan dan peluang pasar baik di dalam maupun di luar negeri (Baharsyah, 1993).

Agribisnis menurut Arsyad dalam Soekartawi(1991), didefinisikan sebagai satu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari matarantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti yang luas yaitu kegiatan usaha yang menunjang dan ditunjang oleh pertanian.

Dengan demikian agribisnis dapat memfokuskan pada bidang kegiatan satu segmen atau keseluruhan industri maupun keseluruhan kegiatan secara terintegrasi. Agribisnis bisa merupakan perusahaan besar, seperti perkebunan, pabrik pupuk, pabrik pestisida dan lain sebagainya. Dapat pula merupakan perusahaan kecil, misalnya; perkebunan rakyat, pemeliharaan ternak, maupun petani itu sendiri. Kemudian termasuk pula kegiatan yang berkecimpung dalam jasa pendukung dan penyedia input material. Pengertian itu dapat diperluas kepada kegiatan petani selama tidak mengerjakan usaha tani ditanah pertaniannya untuk menambah pendapatan. Pengertian yang lebih luas lagi mencakup pemerintah, pasar, asosiasi perdagangan, koperasi, lembaga-lembaga keuangan dan bahkan sekelompok pendidik dan lembaga lain yang mempengaruhi dan mengarahkan bermacam-macam tingkatan arus komoditi (Balbis dan L. Lemesta Jr., 1986 cit Masyhury,

1993).

Konsep agribisnis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Agribisnis adalah sudut pandang yang bermuka banyak, yang mengakui bahwa sebuah industri biasanya kompleks berstruktur vertikal. Dimana tiap-tiap komponen secara terpisah (berdiri sendiri) tetapi dalam arti yang lebih luas, saling tergantung dengan komponen yang lain.

2. Pengambilan keputusan yang berhasil baik pada tingkat perusahaan maupun pada tingkat kebijakan pemerintah memerlukan pengertian yang baik tentang keseluruhan struktur industri dan harus mampu memahami titik sentral demi berbagai bailan sistem struktur bagi pemutusan pemecahan masalah sekarang maupun perencanaan di masa yang akan datang.

3. Kelangsungan hidup sebuah industri dapat dilacak dari kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan tersebut untuk mampu melakukannya. Penampilan industri terbentuk dari kekuatan dan kelemahan hidup atau matinya perusahaan dalam industri.

4. Agribisnis berorientasi pasar.

Konsep agribisnis ini mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya:

1. Agribisnis mempunyai pengadaan distribusi yang besar, karena sektor ini mempunyai kegiatan ke depan dan ke belakang yang besar dan bersifat padat karya.
2. Komponen impornya sangat kecil.
3. Bersumber pada sumberdaya yang dapat diperbaharui.
4. Dapat dipakai sebagai pemicu pertumbuhan daerah.
5. Agribisnis memperkuat struktur ekspor.
6. Agribisnis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam jumlah besar (Masyhury, 1993)

"DARI PENGALAMAN SELAMA INI DAPAT DITUNJUKKAN BAHWA PERKEMBANGAN EKONOMI YANG MENGANDALKAN PADA KEKUATAN PASAR JUSTRU HANYA DINIKMATI OLEH KELAS MENENGAH KE ATAS. MASYARAKAT EKONOMI LEMAH TERMASUK DI DALAMNYA PETANI KECIL DIPEDESAAN TIDAK MAMPU UNTUK MEMANFAATKANNYA."

PELUANG, TANTANGAN DAN KENDALA

Agribisnis sebagai tulang punggung pembangunan Indonesia tentu saja mempunyai peluang yang besar untuk terus dikembangkan menuju tercapainya pertanian yang efisien dan tangguh.

Peluang yang ada diantaranya; pertama, Indonesia telah lama berpengalaman dalam meningkatkan pembangunan pertanian selama PJPT I. Kedua, keberhasilan alam produksi pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan. Ketiga, kestabilan ekonomi dan politik. Keempat, letak geografis Indonesia yang strategis di kawasan Asia Pasifik. Kelima, penduduk Indonesia yang ebsar merupakan pasara domestik yang potensial. Keenam, potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah dimana hal ini akan mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Ketujuh, berkembangnya budaya iptek, pemanfaatan dan penguasaan untuk peningkatan efisiensi dan produktifitas.

Setiap peluang pasti mempunyai tantangan dan kendala yang tidak kecil. Tantangan untuk terus mengembangkan sektor agribisnis ialah sebagai berikut:

1. Kebutuhan pangan akan terus meningkat, pendapatan dan jumlah penduduk meningkat. Sehingga permintaan akan produk agribisnis akan bertambah dan beranekaragam dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumen.

2. Produktifitas sektor pertanian ,asih rendah.

3. Kemampuan menyerap tenaga kerja dipedesaan juga rendah.

4. Daya saing yang masih rendah karena mutu produk yang masih rendah.

Peluang itu masih dapat kita raih dan tantangan dapat kita atasi jika berbagai kendala dapat kita lalui. Berbagai kendala yang ada diantarnya; 1) Kondisi kultural masyarakat petani yaitu sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. 2) Menyangkut pendidikan, karakter, motivasi dan rendahnya penanaman modal di bidang pertanian. Sebagai ilustrasi data kumulatif Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) sampai 31 Januari 1994 menunjukkan investasi PMDN hanya 13, 55%. Selain itu aspeke dukungan perbankan dalam investasi di bidang pertanian di pedesaan dirasakan sangat tinggi. 3) Adanya kegagalan pasar. Dari pengalaman selama ini dapat ditunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang mengandalkan pada kekuatan pasar justru hanya dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Masyarakat ekonomi lemah termasuk di dalamnya petani kecil dipedesaan tidak mampu untuk memanfaatkannya. 4) Kebijakan yang cenderung bersifat *uniform*. Seperti kita ketahui bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang mempunyai keragaman tinggi. Homogenitas kebijakan pembangunan baik itu regional maupun sektoral tanpa memperhatikan keragaman diatas akan menghasilkan respon yang berebda antar pelaku ekonomi yang kuat dan yang lemah maupun antar daerah yang kaya dan yang miskin (Abdul Aizi, 1993). 5) Aspek kelembagaan dan tataniaga. Tataniaga yang masih dikuasai pengusaha agribisnis skala besar

mempunyai implikasi kurang efisiennya proses produksi atau tingginya harga produk di dalam negri, sehingga pelaku agribisnis kecil semakin sulit (Atmanto, 1995).

PERDAGANGAN BEBAS

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) merupakan perjanjian multilateral yang disepakati pertama kali pada tahun 1948. GATT bertujuan untuk menciptkan perdagangan bebas dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan manusia.

Dibanding dengan praktek perdagangan internasional berlaku selama ini maka ada beberapa manfaat yang dicapai melalui GATT sebagai kesepakatan yang bersifat multilateral, dalam perdagangan internasional. Pertama, sifat dari GATT yang bersifat menyeluruh yang menggantikan berbagai kesepakatan dalam suatu komoditi atau kesepakatan yang bersifat unilateral. Kedua, GATT mengurangi atau meniadakan hambatan yang bersifat non tarif yang sering menghambat kelancaran perdaganganinternasional dan merugikan konsumen karena membayar lebih mahal. Ketiga, memperkuat aturan hukum pada tingkat multilateral sehingga upaya menyelesaikan masalah yang mungkin timbul seperti sengketa perdagangan akan lebih mudah. Keempat, GATT memperkuat infrastruktur yang memberikan kesepakatan dan akses yang sama pada tiap negara (Anonim, 1993).

> "LEMBAGA PENELITIAN DAN PELAKU PERTANIAN SEHARUSNYA MENINGKATKAN JALINAN KERJASAMA DI LAPANGAN, SEHINGGA KEINGINAN PETANI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA, HASIL PRODUKSI SERTA PENINGKATAN PENDAPATAN SECARA NYATA MUDAH DAN CEPAT DILAKUKAN, TIDAK HANYA MENUNGGU PROGRAM DARI ATAS."

Di bidang pertanian kesepakatan yang tercapai dapat dibagi menjadi tiga:

1. *Border Measures* meliputi beberapa aspek sebagai berikut; a) *Comprehensive Tariffication* yakni mengubah kebijakan non tarif measures (NTM) menjadi tarrif ekivalen. b) *Tariff Reduction*, merupakan komitmen untuk menurunkan tarif rata-rata sebesar 36% atau minimal 15% untuk setiap mata tariff dalam jangka waktu 6 tahun. Khusus untuk negara-negara berkembang penurunan tarif sebesar 24% atau minimal 10% untuk setiap mata tariff dalam jangka waktu 10 tahun. c) *Current/Minimum Acces,* bila dilakukan tarifikasi maka komoditi tersebut terkena ketentuan akses pasar. Akses pasar ini dapat berupa *current acces* yakni mempertahankan volume impor pada tahun anggaran dasar 1986- 1988 apabila jumlah impor masih lebih rendah dari 3% maka terkena minimum acces sebesar 3% dari konsumsi melalui awal tahun implementasi.

2. *Domistik Support*: merupakan komitmen penurunan subsidi untuk produksi maupun dalam bentuk pengalihan dana kepada produsen. Dalam hal ini pada prinsipnya terdapat dua macam subsidi yakni subsidi yang diperbolehkan (*green box*) seperti bantuan kepada bencana, bantuan pangan, bantuan pembinaan sumberdaya alam dan lain sebagainya. Yang kedua adalah subsidi yang terkena komitmen pengurangan (amber box) misalnya; *market price support, direct payment to producer, input and marketing cost reduction* dan lain sebagainya.

3. Ekspor Subsidi: Ini menyangkut komitmen pengurangan terhadap subsidi ekspor baik dalam bentuk subsidi ekspor maupun dalam bentuk *budgetary outlays.* Untuk pengurangan dalam bentuk budgetary *outlays* ditentukan kewajiban penurunan sebesar 36% dan penurunan kuantatif volume sebesar 24% dari total ekspor dalam kurunwaktu 6 tahun dengan penggunan base periode 1980- 1990. Sedangkan untuk negara berkembang kewajiban pengurangan *budgetary outlays* adalah sebesar 24% dan kewajiban pengurangan volume adalah sebesar 16% dalam jangka waktu 10 tahun (Amang B, 1994).

IMPLIKASI GATT

Pasar bebas merupakan babak baru perdagangan internasional. Dengan itu semua pasar harus siap diinternasionalkan. Semua pasar harus siap menjadi pasar global. Dengan demikian akan terbuka peluang-peluang baru sekaligus berbagai konsekuensinya.

Secara umum dengan berlakunya kesepakatan GATT peluang pengembangan berbagai produk untuk dipasarkan dalam pasar global semakin terbuka. Perkiraan sekretariat dengan adanya perdagangan bebas akan mampu mendorong volume perdagangan dunia sebesar 12% atau senilai US $ 145 milyar dibanding jika tidak ada perdagangan bebas. Peningkatan tertinggi pada sektor pakaian 60%, tekstil 34%, pertanian, kehutanan dan hasil perikanan 20% dan makanan olahan dan minuman 19%.

Gambaran ekspor dari negara berkembang untuk produk pertanian tidak sebesar ekspor barang manufaktur yakni hanya sebesar 13% dari total nilai ekspornya. Dari jumlah tersebut produk pertanian yang memberikan pendapatan devisa terbesar bagi negara berkembang adalah tropical product seperti coklat, teh dan kopi sebesar 28%, buah-buahan dan sayuran sebesar 22%, oilseeds, minyak dan lemak sebesar 16% produk pertanian lain sebesar 12%

peternakan dan hasilnya sebesar 7%.

Jika mengamati hal tersebut diatas maka akan timbul harapan terciptanya tatanan dunia yang lebih adil. Dimana perdagangan dunia akan meningkat, memperluas lapangan kerja serta pendapatan tiap negara. Hal itu akan memberikan peluang pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara kecil akan menikmati akses yang lebih baik pada pasar negara yang lebih besar dari pada harus bernegosiasi sendiri. Perselisihan dagang akan semakin berkurang karena sebab proteksionisme berkurang (Republika, 1994).

Selain membawa harapan yang besar kesepakatan GATT juga sangat merisaukan jika kesepakatan itu tidak dilaksanakan secara adil. Hal itu karena GATT tidaklah hanya kesepakatan yang bersifat ekonomi semata tetapi juga terkait erat dengan kepentingan-kepentingan negara pencetus GATT. Implikasi lain yang nantinya muncul dari kesepakatan GATT seperti *Intelectual Property Right* sebagai contoh basis hak cipta negara-negara barat adalah individual sedangkan negara-negara berkembang adalah sosial sehingga menjadi milik masyarakat umum, yang menjadi masalah ialah jika hak milik masyarakat dipatenkan menjadi milik individu. Dengan demikian orang yang memegang hak paten bisa menarik royalty. Sebagai contoh komoditi tempe atau gudeg yang sudah menjadi milik masyarakat jika dipetenkan oleh seseorang maka seseorang tersebut bisa menarikroyalty dari orang yang menjual *tempe* atau *gudeg* tersebut (Dahlan, 1994).

Dengan adanya penurunan subsidi dan dihapusnya proteksi di era perdagangan bebas sebenarnya dapat berimplikasi pada kerugian petani Indonesia karena posisi mereka masih lemah dalam memasuki era pasar global, walaupun dihapuskannya subsidi ini akan lebih memudahkan ekspor karena tidak ada distorsi pasar di dalam negri negara tujuan. Sehingga di era pasar bebas ini lebih cenderung pada penerapann hukum rimba karena siapa yang kuat merekalah yang menjadi penikmat dunia. Atau dengan kata lain pasar bebas akan melahirkan neo imperialisme (Martin Kor Kok Peng, 1995).

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dan mampu memanfaatkan peluang yang ada maka pembangunan pertanian Indonesia harus memperhatikan masalah keunggulan teknologi, sumberdaya manusia, kekuatan kolektif petani dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

TEKNOLOGI UNGGUL DAN TEKNOLOGI UNGGULAN

Keunggulan di era pasar bebas tidak lagi akan bertumpu pada keunggulan upah buruh yang murah atau tersedianya sumber daya alam yang melimpah. Keunggulan yang hanya bertumpu pada dua hal itu sudah banyak tersaingi oleh India, Vietnam, dan kemudian menyusul Kamboja (Basri Faisal, 1995).

Sebagai contoh ilustrasi di atas, pada awal kebangkitan Hongkong dan Taiwan mempunyai industri yang menghasilkan produk- produk dengan harga yang murah karena industri Hongkong dan Taiwan didukung oleh keunggulan tenaga kerja yang murah. Saat ini industri yang bertumpu pada kekuatan tersebut telah bergeser ke industri berteknologi unggul dan padat modal.

Selain mengembangkan teknologi unggul, yakni inovasi teknologi tepat guna yang mampu membawa manfaat besar bagi petani juga harus dikembangkan teknologi unggulan, yakni pengembangan teknologi rekayasa genetik. Dimana riset-riset dibidang pertanian di masa depan sebagian besar harus diarahkan kepada penciptaan teknologi unggulan tersebut.

Hambatan utama melakukan riset untuk menciptakan teknologi unggul dan teknologi unggulan ialah kurangnya sumberdaya keuangan. Untuk itu diperlukan intervensi pemerintah, berupa pemberian subsidi yang dipandang sebagai imbalan bagi produk-produk pertanian yang tidak dibayar, misalnya oksigen, pemandangan, tatruang yang indah dari perkebunan, hutan, rasa aman dari tercegahnya bahaya banjir dan lain sebagainya. Pengembalian terhadap subsidi yang diberikan pemerintah akan berupa pajak tanah yang semakin produktif (Jatileksono, T., 1995).

Kekurang pekaan kita dalam mengembangkan teknologi unggul dan teknologi unggulan menyebabkan komoditi asli Indonesia yang mempunyai keunggulan alami tidak terselamatkan. Jika sejak duku kita sadar mempunyai keunggulan beragamnya jenis komoditi hasil pertanian yang dinegara lain tidak ada, maka kehilangan komoditi unggulan tidak akan terjadi seperti sekarang. Sebagai misal tanaman jambu biji asli Indonesia yang semakin tergeser keberadaanya oleh jambu Bangkok padahal

jambu biji asli Indonesia banyak mempunyai keunggulan terutama ketahanannya terhadap lalat buah dan hama-hama lainnya.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah terhambatnya pengembangan inovasi teknologi pada taraf petani. Fenomena ini disebabkan karena kemandirian petani dalam menentukan teknologi dan kegiatan usaha taninya tidak mempunyai kebebasan seperti yang kita harapkan.

Perusahaan atau lembaga swasta besar, petani dan para ahli harus meningkatkan kerjasama dalam menciptakan inovasi teknologi. Bukan hanya memakai teknologi impor, dan tidak berusaha mengembangkan inovasi teknologi yang mandiri.

Jika kita tengok keberhasilan negara tetangga Indonesia seperti Thailand yang dapat menghasilkan banyak jenis tanaman buah yang berkualitas baik dan unggul yang terkenal di Indonesia sebagai tanaman Bangkok, kemudian Malaysia yang berhasil mengembangkan perkebunannya. Hal itu dikarenakan telah terciptanya kerjasama diantara mereka dalam mengembangkan teknologi.

SUMBER DAYA MANUSIA

Keberadaan sumberdaya manusia dalam pembangunan pertanian mempunyai peran yang utama. Untuk itu pemberdayaan bagi pelaku riil pertanian sudah seharusnya didukung para peneliti baik yang berasal dari para petani sendiri, akademisi ataupun lembaga- lembaga swasta dan negara.

Keberadaan peneliti dan laboratorium pengembangan sumberdaya manusia tani sekarang ini harus ditumbuhkembangkan guna mendukung kemajuan pertanian dalam menghadapi globalisasi.

Hal di atas bertujuan untuk menciptakan manusia tani yang lebih inovatif terhadap teknologi dan responsif terhadap informasi yang datang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.

Namun salah satu hambatan yang terjadi adalah belum adanya budaya menghormati penemuan baru baik itu dari pemerintah, masyarakat ataupun swasta. Sehingga pengembangan sumber daya manusia tani hanya sebatas program.

Lembaga penelitian dan pelaku pertanian seharusnya meningkatkan jalinan kerjasama di lapangan, sehingga keinginan petani untuk meningkatkan kualitas sumberdaya, hasil produksi serta peningkatan pendapatan secara nyata mudah dan cepat dilakukan, tidak hanya menunggu program dari atas.

Keberhasilan dari pengembangan sumberdaya manusia tani adalah membentuk petani sebagai manajer dimana ia berhak menetukan kemerdekaan dalam memilih tanaman dan pengelolaan usahataninya. Sehingga petani akan berusaha secara mandiri. Hal ini merupakan upaya memberdayakan manusia tani menuju pertanian yang tangguh.

KEKUATAN KOLEKTIF PETANI

Salah satu yang menjadikan petani itu lemah adalah kepemilikan terhadap tanah yang sempit. Kunci untuk memecahkan masalah ini adalah menciptakan usaha tani bersama. Usaha tani ini dapat berwujud suatu bentuk pertanian kolektif atau usaha tani koperasi. Dalam sistem pertanian kolektif sejumlah petani bersepakat untuk menggarap lahan pertaniannya secara bersama-sama dalam suatu menejemn bersama (Raharjo Dawam, 1993).

Upaya menciptakan kekuatan kolektif bagi petani juga dapat diwujudkan melalui intervensi pemerintah dengan membentuk lembaga asuransi petani berskala nasional. Hal ini berlandaskan pada pemikiran bahwa pada dasarnya petani ingin mendapatkan jaminan keamanan bagi aset pertaniannya.

Seperti kita ketahui saat ini jaminan keamanan bagi aset petani tidak ada. Lain halnya dengan industri atau perusahaan besar, dimana juika mereka tertimpa musibah ada badan asuransi yang mengganti kerugian akibat musibah tersebut. Sedangkan jika petani mengalami kegagalan panen akibat musibah petani tidak mendapatkan ganti rugi karena tidak adanya lembaga asuransi bagi petani.

Lembaga asuransi ini berfungsi untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen karena musibah banjir, kekeringan, tanah longsor, kecelakaan kerja seperti disambar petir dan lain sebagainya. Jadi melalui lembaga ini petani akan saling membantu sesamanya (Farid, 1994).

Kekuatan kolektif yang berupa pewilayahan komoditas juga perlu diciptakan. Seperti kita ketahui bahwa mayoritas usaha pertanian di Indonesia dilakukan oleh petani kecil serta beraneka ragam. Keadaan semacam ini tidak efisien karena itu perlu diadakan perwilayahan komoditas berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing daerah. Dengan memperhatikan kesesuaian fisik dan keadaan sosial ekonomi dalam satu wilayah dan satu komoditas perlu adanya keseragaman varietas sehingga meudahkan dalam pengendalian kualitas produk dan pemasarannya. Selain itu dengan adanya pewilayahan akan memudahkan pembentukan kelompok usaha tani sehingga kedudukan petani menjadi lebih kuat.

KEBIJAKAN TATANIAGA

Dengan adanya berbagai perubahan baik regional nasional dan internasional maka kebijakan pemerintah di bidang pertanian harus mengalami perubahan yakni perubahan dari orientasi produksi ke orientasi bisnis. Konsekwensi logis dari perubahan orinetasi itu maka dilakukan pendekatan dari skala subsistem ke skala komersial, dari pendekatan komoditas ke pendekatan sumberdaya, dari komoditi primer ke produk bernilai tambah, dari substitusi impor ke promosi ekspor, dari peningkatan pendapatan menuju peningkatan kesejahteraan petani, dari teknologi padat karya ke alat dan mesin, dari kawasan barat ke kawasan timur, dari pendekatan terpusat ke otonomi daerah dan dari peran pemerintah ke peran masyarakat (Baharsyah, 1993).

Saat ini pada tataran operasional kebijakan pemerintah lebih berorientasi pada stabilitas masyarakat bukan pada kesejahteraan petani. Akibat dari itu adanya kebijakan yang emngatur beberapa komoditi strategis melalui kerjasama dengan beberapa

erusahaan swasta tertentu untuk mengatur pemasaran, seperti pemasaran pakan ternak, DOC, cengkeh, jeruk dan lain sebagainya. Sehingga struktur pasar yang ada cenderung pada pasar monopoli atau pasar oligopoli. Sehingga pelaku agribisnis berskala kecil lebih banyak menderita akibat permainan harga.

Melihat situasi seperti itu maka harus ada kebijakan pemerintah yang mengatur sistem tataniaga yang mengarah (mendekati) sistem pasar persaingan murni.

KESIMPULAN

Di era globalisasi ini pembangunan pertanian Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin besar sekaligus terbuakannya peluang yang semakin lebar. Dengan keadaan yang demikian itu maka setiap pelaku dalam pembangunan pertanian Indoensia harus mampu menghadapi setiap tantangan dan kendala yang dihadapi.

Pengkajian terhadap peluang, tantangan dan kendala di era globalisasi sangat diperlukan agar kita mampu membuat strategi yang baik. Untuk itu maka perlu menciptakan teknologi unggul dan teknologi unggulan, menciptakan kekuatan kolektif petani, memperbaiki sistem tataniaga dan meningkatkan sumber daya manusia***

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1993, **Apa dan Siapa GATT**, *Republika* 17 **Desember 1993.**

———,1993, Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Adjid, Dudung A. **Sistem dan strategi Pembangunan Agribisnis,** Bahan *Rapat Dengar Pendapat Badan Agribisnis DEPTAN dengan komisi IV DPR RI,* Badan Agribisnis DEPTAN RI. Jakarta.

Amang Beddu, 1994, **Strategi Agribisnis Menghadapi Pasar Global Pasca GATT.** Makalah *Seminar Badan Eksekutif Mahasiswa Fak. Pertanian UGM,* Yogyakarta.

Atmanto, S. 1993, **Sistem Tataniaga Agribisnis di Indonesia** *dalam Prisma* Edisi 89 Agustus 1993.

Aziz, Amin M., 1993, *Permodalan Agroindustri.*,Bangkit. Jakarta.

Baharsyah, S., 1993, **Pidato Pengarahan Menteri Pertanian RI Pada Seminar dan Munas ISMPI.** BEM Fak. Pertanian UGM. Yogyakarta.

Basyry, Faisal H., 1995, **Retrospeksi dan Reorientasi Pembangunan Ekonomi di Indonesia,** Makalah *Dialog Ramadhan I jamaah Shalahuddin UGM,* Yogyakarta.

Dahlan, Harwanto, 1994, **Udang Di balik GATT: GATT Sebagai Pengontrol Dunia dalam** *Inovasi* Edisi September 1994. No. 9 Th. VI, UMY. Yogyakarta.

Farid B. Wazdi, 1994, **Menggagas Asuransi Kegagalan Panen,** *Lampung Post* 17 Desember 1994, Bandar Lampung.

Jatileksono, T.,1995, **Intervensi Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian,** *Pidato Pengukuhan guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian Fak. Pertanian UGM,* Yogyakarta.

Kor Kok Peng, Martin, 1993, *Imperialisme Ekonomi Baru,* Gramedia, Jakarta.

Masyhury, *1994,* **Pembangunan Agribisnis di Indonesia,** makalah *Kuliah Umum Fak. Pertanian UNIKA,* Malang.

———,1994, **Strategi Agribisnis Menghadapi Pasar Global,** makalah *Seminar Strategi Pengembangan Agribisnis Indonesia pasca GATT,* BEM Fak.PertanianUGM, Yogyakarta.

Mubyarto, 1992, **Perilaku Orang Kaya Perlu Dikendalika** dalam Jurnal *Prospektif,* No 2-3 Vol. IV 1992. PPSK, Yogyakarta.

Soekartawi, 1992,*Agribisnis Teori dan Aplikasi,* Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Wardoyo, *1994,* **Pengembangan Teknologi dalam Rangka Pemanfaatan Agribisnis,** makalah *Seminar Strategi Agribisnis Indonesia Pasca GATT,* BEM Fak. Pertanian UGM, Yogyakarta. ***

◆◆◆◆◆

Masa Depan Lahan Kering Indonesia, Masa Depan Pertanian Indonesia

INDONESIA SAAT INI BOLEH BERBANGGA TELAH MELAKUKAN SWASWMBADA PANGAN. TETAPI SEBAGAIMANA DIPREDIKSIKAN FAO BERBAHAYA KETAHANAN PANGAN TETAP MENGHANTUI, SEBAB PERTUMBUHAN PRODUKSI KIAN LAMA KIAN MENURUN . HAL INI DIKARENAKAN KECENDERUNGAN BERKURANGNYA TANAH GARAPAN YANG BERALIH FUNGSI UNTUK KEBUTUHAN NON PERTANIAN -PABRIK, JALAN, PEMUKIMAN DAN SEBAGAINYA. DI SAMPING BERTAMBAHNYA TANAH YANG TIDAK PRODUKTIF, LAHAN GARAPAN YANG KRITIS AKIBAT EROSI, PENEBANGAN HUTAN DAN PENDANGKALAN AIR TANAH. DIPERKIRAKAN DEWASA INI TERDAPAT 57 JUTA HEKTAR LAHAN KERING, DILUAR KAWASAN HUTAN. DIMASA DATANG, PERTANIAN TANAMAN PANGAN INDONESIA TIDAK BOLEH LAGI BERGANTUNG PADA LAHAN IRIGASI, TETAPI JUGA MEMANFAATKAN LAHAN KERING. DISAMPING PRAKTEK PERTANIAN YANG SELARAS DENGAN ALAM.

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka sejak 50 tahun yang lalu melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Pembangunan bagi suatu bangsa dapat diartikan sebagai semua kegiatan mengelola sumber daya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut, atau meningkatkan manfaat yang telah diperoleh daripadanya, bagi masyarakat dan negara yang lebih maju dan berkelanjutan

Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun Tahap Pertama telah dinyatakan berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua sebagai awal proses tinggal landas menuju Kebangkitan Nasional Kedua. Pembangunan pertanian diarahkan pada tercapainya suatu sistem pertanian yang tangguh dan efisien.Dalam makalah Rachman Sutanto disebutkan ciri-ciri Sistem Pertanian yang tangguh adalah ketangguhan petani, kelembagaan sosial, aparat pertanian, dan sektoral.[1)]

Garis-garis besar haluan negara telah menggariskan bahwa untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pendayagunaannya agar tetap memperhatikan keseimbangan lingkungandan kelestarian fungsi serta kemampuannya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan harus

Wahyu Juliarso,
Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM angkatan 1990.
Tahun 1992-1993 menjabat Staf bidang Humas Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM . Pernah menjadi Staf divisi Ilustrasi dan Produksi Majalah Primordia Fakultas Pertanian UGM antara tahun 1992-1993. Tahun 1993-1994 menjabat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM. Tahun 1994-1995 menjabat Ketua Bidang Pengembangan Organisasi KMIT Fakultas Pertanian. Karya Tulis yang pernah dipublikasikan antara lain Karya Tulis Ilmiah untuk LKTI FOKUSHIMITI BEW III di Malang Jawa Timur, dengan judul :
Pemanfaatan Tabanan Silika untuk Menurunkan Sematan Fosfat pada Tanah Kaya Oksida.

mempertimbangkan asas keterlanjutan sumberdaya agar tetap dapat dimanfaatkan bangsa Indonesia secara langgeng. Saat dunia mengalami proses globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ukuran-ukuran yang dianut suatu bangsa akan berubah mengikuti tren dunia, sehingga penilaian terhadap hasil pembangunan akan berubah. Prioritas pembangunan pada pertumbuhan ekonomi telah menempatkan semua sumberdaya alam, termasuk tanah, sebagai faktor produksi bagi suatu proses ekonomi, sehingga produktivitas suatu sumberdaya alam dinilai dengan ukuran-ukuran ekonomi.

Penilaian atas tanah sebagai faktor produksi semata cenderung menimbulkan anggapan bahwa tanah tahan lama sehingga tidak mengalami penyusutan. Saat ini tanah dianggap sebagai investasi yang menguntungkan karena nilai tanah naik dengan sendirinya. Anggapan demikian dinilai kurang tepat, karena bagaimanapun juga tanah yang dikerjakan terus menerus akan berkurang kesuburannya.[2]

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akibat perkembangan jumlah penduduk, tuntutan-tuntutan terhadap tanah semaikin komplek. Berbagai kepentingan saling bersaing dan saling bentur untuk memanfaatkan tanah, sehingga menimbulkan tumpang tindih penggunaan tanah. Luasan lahan-lahan pertanian yang subur sampai sangat subur menyempit akibat beralih fungsi menjadi daerah non pertanian. Penebangan hutan hujan tropis secara besar besaran untuk memenuhi tuntutan ekspor mengakibatkan rusaknya fungsi hutan sebagai penutup tanah sehingga mutu tanah mengalami kemerosotan. Eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam, termasuk tanah, mengakibatkan tanah tidak mampu lagi menjalankan fungsinya sebagai bagian dari ekosistem dengan baik, hingga mencapai pada tahap kritis. Penggunaan lahan harus disusun berdasarkan persyaratan tertentu sebaik-baiknya seperti yang disyaratkan oleh GBHN. Notohadiprawiro menyatakan bahwa atas dasar kepentingan, keterbatasan sumber daya alam, persyaratan yang harus dipenuhi dan manfaat total yang ingin diperoleh, maka susunan hirarki penggunaan lahan berdasarkan prioritasnya, yaitu : 1) pertambangan, 2) pertanian, dalam skala lebih kecil berturut-turut: pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, 3) penggunaan bukan pertanian seperti: pemukiman, industri, perhubungan, dan sebagainya.[3]

Pengelolaan lahan yang salah akan berakibat pada terancamnya ketersediaan bahan pangan bagi manusia. Saat ini tanah masih merupakan media tumbuh tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman industri, yang belum tersaingi oleh media tumbuh yang lain. Sehingga ketersediaan lahan subur akan mempengaruhi ketersediaan bahan pangan. Tercatat di beberapa negara lahan subur suaitani hilang 0 ,1-5% setiap tahun untuk non pertanian.[4] Luasan lahan subur yang terus-menerus berkurang akibat penggunaan lahan untuk bidang luar pertanian menyebabkan perhatian beralih pada lahan-lahan marginal yang umumnya merupakan lahan kering. Lahan kering memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian menggantikan lahan berpengairan yang telah beralih fungsi.

Gatra biofisik merupakan kendala pengembangan lahan kering sebagai lahan pertanian disamping gatra sosial ekonomi. Oleh karena itu pemanfaatan lahan kering memerlukan perencanaan yang matang untuk menghindari degradasi mutu lahan atau produktivitasnya. Perencanaan dan pelaksanaan yang tidak sesuai kemampuan lahan kering akan menyebabkan menurunnya kemampuan lahan kering sebagai lahan yang produktif. Penurunan produktivitas lahan kering selanjutnya akan memunculkan permasalahan lahan kritis.

Lahan Kering dan Lahan Kritis

Pengertian lahan kering umumnya dikaitkan dengan pengertian lahan sawah. Pengertian tersebut mengacu pada ketersediaan air pada kedua jenis lahan tersebut untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman. Menurut Notohadiprawiro, et.al., perbedaan pokok antara pertanian lahan kering dengan pertanian lahan sawah ialah cara penyediaan air untuk pertumbuhan tanaman.[5]

Lahan kering tersebar di seluruh Indonesia, terutama di empat pulau besar. Luasan lahan kering beragam pada masing-masing pulau. Dalam tulisannya tahun 1977, Mulyadi menyebutkan luas lahan kering di Indonesia sekitar 28.8 Juta hektar.[6]

Tabel 1.
Daya Serap Beberapa Tekstur Tanah

Tekstur Tanah	Daya serap(mm/jam)
Pasir Kasar	19,00-25,5
Pasir halus	12,5-19,00
Lempung berpasir	sekitar 12,5
Lempung berdebu	sekitar 10,5
Lempung berliat	sekitar 7,5

dari: **Majalah Aku Tahu**[12]

Dewasa ini di Indonesia terdapat sekitar 57 juta hektar lahan kering di luar kawasan hutan.[7] Umumnya lahan kering memiliki sifat-sifat tanah sebagai berikut: bereaksi masam, kadar unsur hara umumnya sangat rendah sampai rendah, KPK (CEC) rendah, daya simpan lengas (*Water Holding Capacity*) rendah, struktur tanah tidak stabil dan rentan terhadap erosi. Memperhatikan sifat-sifat di atas, lahan kering mempunyai kemungkinan besar menjadi lahan kritis sangat besar, jika tanpa perencanaan pemanfaatan lahan kering yang matang dan hati-hati. Dalam tulisannya Susilo menyebutkan lahan kritis dapat diartikan sebagai lahan yang saat ini tidak produktif ditinjau dari segi pertanian, karena pengolahan dan penggunaannya yang tidak atau kurang memenuhi syarat-syarat konservasi tanah. Lahan kritis juga dapat diartikan sebagai lahan yang karena penggunaannya tidak sesuai dengan kemampuan lahan, sehingga mengalami kerusakan fisik, kimia, dan biologis, yang pada akhirnya

Tabel 2.
Pengaruh Kemiringan Lahan terhadap air hujan dan erosi tanah

Tipe Kemiringan Lahan	Tanggapan
Klas A:0%sampai 1„3%	run off lambat- sangat lambat, tak tampak tanda-tanda erosi
Klas B:1„3% sampai 5„8%	run off lambat sampai sedang, erosi tergantung pada sifat tanahyang lainperlu dibuat teras
Klas C:5„8%sampai 10„16%	run off sedang sampai cepat, tampak bekas-bekas erosi yang tergantung pada sifat dan penggunaan lahan
Klas D:10-16% sampai 20-30%	run off cepat sampai sangat cepat tampak tanda-tanda erosi
Klas E:20-30% sampai 45-65%	run off sangat cepat dan terkena erosi
Klas F:di atas 45-65%	tersingkapnya batuan

dari : **Klasifikasi Tanah**[13)]

membahayakan fungsi hidrologis, produksi pertanian, pemukiman, dan sosial ekonomi.[8)] Data-data dari BPS Jakarta tahun 1981 menunjukkan bahwa luas lahan kritis di Indonesia mencapai luasan sebesar 5.085.642 hektar untuk dala mkawasan hutan dan 3.422.536 hektar untuk luar kawasan hutan, sehingga luas total lahan kritis mencapai 8.508.178 hektar dari luasan daratan Indonesia yang mencapai 191.944.300 hektar.[9)]

Dewasa ini terdapat sekitar 18,4 juta hektar lahan kritis dari 57 juta hektar lahan kering di luar kawasan hutan. Luas lahan kritis tersebut belum termasuk sekitar 11,8 juta hektar areal perladangan berpindah yang melibatkan sekitar 5 juta penduduk, yang memiliki potensi menjadi lahan kritis sangat besar. Areal lahan kritis ini terus bertambah dengan kecepatan pertambahan antara 400.000 sampai 1.250.000 hektar tiap tahun.[10)] Dengan percepatan tersebut diperkirakan luasan lahan kritis di Indonesia akan mencapai 24.400.000 hektar sampai 37.150.000 hektar pada tahun 2010, apabila percepatan rehabilitasi lahan kritis yang ada tidak bertambah.

Tabel 3.
Besarnya Aliran Permukaan dan Erosi pada Beberapa Kondisi Penutup Tanah Aliran Permukaan (%) Tanah yang tererosi(kg/ha/th)

Hutan rimba	0,80 20 t
Hutan terbakar	2,60 47 g ß
Tanah berumput	1,51 50 J
Tanah ditanami Jagung	17,59
Tanah ditanami kapas	19,97 46.900
Tanah gundul	49,00 51.400

dari : **Majalah Aku Tahu.**[14)]

Kelakuan air di daratan

Kriteria ketersediaan air hujan pada pertanian lahan kering terdiri atas dua gatra utama: (1) ketersediaan lengas (air) tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanaman, (2) kelebihan curah hujan yang potensial dapat menjadi aliran permukaan(*run off*) yang dapat menimbulkan persoalan erosi tanah.[11)] Lebih lanjut dijelaskan bahwa acuan penduga ketersediaan lengas dan resiko erosi dibuat berdasarkan pada kebolehjadian keadaan atmosfir dan kebolehjadian keadaan tanah dan timbulan(relief) Indonesia termasuk dalam daerah tropika basah dengan ciri yang khas yaitu curah hujan tahunan rata-rata yang tinggi dan suhu yang tidak begitu banyak berubah, dan Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada antara bulan Oktober sampai April, dan musim kemarau biasanya terjadi pada antara bulan April sampai Oktober. Air curahanhujan yang jatuh ke bumi, yang terdiri dari daratan dan lautan, akan mengalami perputaran. Tanggapan bumi terhadap air hujan berbeda-beda. Hujan yang turun di daratan akan mengalami berbagai perlakuan, seperti infiltrasi, perkolasi, dan aliran permukaan, tergantung kondisi lahan dan sifat tanahnya. Jenis tanah tertentu memiliki sifat tanah tertentu, terutama sifat fisik yang berkaitan dengan air. Pada tabel 1 ditunjukan tanggapan daya serap tanah pada berbagai jenis tekstur tanah.

Pada jenis tanah dengan tekstur pasir air akan segera terserap kedalam tanah, sedang pada tanah-tanah dengan tekstur lempung berliat air akan lambat terserap dalam tanah sehingga memungkinkan terjadinya genangan air pada lahan cekungan dan aliran permukaan pada lahan miring. Kemiringan lahan atau lereng(*Slope*) memiliki tanggapan tersediri terhadap air hujan, sehingga pada kemiringan lahan pada tingkatan tertentu memberikan tanggapan yang berbeda dengan tingkatan kemiringan lahan yang lain.seperti tampak pada tabel 2.

Selain faktor di atas, kondisi penutup lahan mempengaruhi kelakuan air hujan setelah mencapai daratan.Besar kecilnya erosi dapat digambarkan pada tabel 3. yang menunjukkan adanya pengaruh penutup tanah dengan tanah yang tererosi akibat kelakuan air. Tanah yang gundul tanpa tanaman penutup akan mudah mengalami erosi, sebab air hujan akan langsung menerpa permukaan tanah, yang pada akhirnya akan mengikis lapisan tanah bagian atas dan menyebabkan terbetuknya lapisan kerak pada bagian atas permukaan tanah.

Air hujan yang mengalami infiltrasi dan perkolasi, sebagian mengalami evaporasi dan tersimpan dalam tanah, serta sebagian lagi menuju pada lapisan kedap air menjadi air bawah tanah untuk mengalir ke laut dalam bentuk sungai bawah tanah.

Air, dengan berbagai cara, dari daratan pada akhirnya akan tertampung pada daerah yang rendah sehingga membentuk waduk atau danau dan laut. Air yang berada di daratan dan lautan akan naik

mengalami evaporasi membentuk awan yang pada suatu kondisi di suatu tempat akan mengalami presipitasi menjadi hujan.

Air tanah merupakan salah satu faktor keragaan (*perfomance*) tanaman yang sangat penting. Pada saat faktor-faktor lain dalam keadaan mencukupi, air tanah dapat menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman. Kekurangan air dalam tanah dapat menim bulkan berbagai masalah kesuburan tanah, karena air tanah hampir selalu terlibat dalam reaksi-reaksi di dalam tanah, baik reaksi kimia maupun reaksi fisika, misalnya : air sebagai media pelarut garam-garam mineral, senyawa asam dan basa, serta ion-ion dan gugus organik maupun anorganik di dalam tanah.

Tanah-tanah yang kekurangan air atau mengalami kekeringan belum tentu menyebabkan kematian bagi tanaman. Umumnya keadaan ini dapat kembali normal setelah dilakukan pemberian air sesuai kebutuhan dengan segera. Namun apabila keadaan kekeringan berlangsung terus maka dapat terjadi keadaan titik layu tetap (*permanent wilting point*), yaitu suatu kondisi apabila kandungan air terus berkurang sehingga tidak mampu lagi mengimbangi kehilangan air akibat evapotranspirasi.[15] Pada titik ini tanaman tidak mampu lagi melakukan pertumbuhannya dan mengalami kematian

Akibat kekeringan yang lain adalah terjadinya penggaraman tanah, yaitu kejadian yang menyebabkan konsentrasi garam-garam mineral tanah menjadi meningkat tajam. Hal ini dapat terjadi akibat naiknya larutan koloid tanah yang mengandung garam-garam mineral yang berada di dalam tanah agian bawah ke permukaan tanah akibat tarikan kapiler. Air yang terkandung dalam koloid mengalami evaporasi sedang garam mineral tertinggal pada tanah bagian atas. Kejadian ini dapat juga menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan tanaman, bahkan menyebabkan kematian tanaman. Dalam hubungannya dengan ketersediaan air bagi tanaman, tanggapan tiap jenis tanah berbeda atas kekeringan tanah. Pada tabel 4. ditunjukkan bahwa kadar lengas (air) pada indeks kelengasan tiap macam jenis tanah berbeda-beda. Di antara keempat jenis tanah tersebut tanah Vertisol memiliki indeks TKC dan TKB yang paling tinggi. Dari data tersebut dapat dihitung kadar lengas pada titik layu tetap (TLT) pada tanah Vertisol, karena persamaan dari TKB adalah TKB ditambah TLT dibagi dua. Data tersebut menunjukkan bahwa tanah Vertisol telah menyebabkan layu tetap pada tanaman pada titik yang lebih tinggi dari jenis tanah yang lainnya.

Kekeringan yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan kerusakan tanah secara fisik, seperti terjadinya pengkerutan. tanah yang tidak dapat kembali (*irreversible*), contohnya tanah gambut. Pengkerutan pada 3& tanah Gambut akan menyebabkan gambut tidak mampu lagi menahan air. Pada tanah jenis Vertisol kekeringan dapat menyebabkan tanah membentuk retakan yang cukup dalam tergantung dari kadar lempung tipe 2:1 nya dan membentuk struktur baji yang sangat kuat dan keras. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan sulirnya pengolahan tanah untuk pertanian

Erosi: Masalah Mutu Tanah

Mutu tanah yang seringkali dikaitkan dengan usaha tani disebut sebagai kesuburan tanah. Sehingga batasan kesuburan tanah dapat dijabarkan sebagai mutu tanah untuk bercocok tanamyang ditentukan oleh sifat salingtindak (*interaction*) sejumlah sifat fisika, kimia, dan biologi bagian tubuh tanah yang menjadi habitat akar-akar aktif tanaman.[17] Batasan tersebut, mengkaitkan kesuburan tanah hakiki dengan produktivitas tanah. Namun Schroeder tidak

Tabel 4.

Kadar lengas pada Indeks Kelengasan Tiap Jenis Tanah

Jenis Tanah²	TKC % b	TKB %	KL %	TKA %
Entisol2	13,42 b	16,15º	21,60 j	37,35 a
Oxisol Z2	14,43 b	18,62º	26,99 j	48,54
T Alfisol Z2	22,62 b	26,23º	33,76 j	56,83
VertisolZ2	27,17b	32,33º	42,66j	61,44

Sumber : **Prosiding Diskusi Panel Fakultas Pertanian UGM, Dirjen PU dan UGM.**[16]

membedakan keduanya. Ia mengartikan kesuburan tanah sebagai hasil panenyang diukur dengan bobot bahan kering yang dipungutItiap satuan luasn dan pada tiap satuan waktu.[18] Dengan demikian dapat dicakup akibat dari variasi keadaan habitat akar tanaman karena musim. Erosi merupakan penyebab utama penurunan tingkat mutu tanah. Erosi menyebabkan hilangnya tanah tanah yang mempunyai kandungan bahan organik dan nitrogen dalam jumlah yang besar, sehingga merugikan pertumbuhan tanaman. Terbukanya horizon Argilik akibat erosi dapat mengurangi peresapan dan meningkatkan aliran permukaan, sehingga mengakibatkan erosi yang lebih besar dan menurunkan ketersediaan air bagi tanaman.[19] Erosi dapat terjadi karena berbagai sebab. Faktor manusian sangat berperan dalam peningkatan laju erosi, karena manusia memiliki potensi besar untuk mengusik keseimbangan alam. Pengolahan tanah secara serampangan akan menyebabkan terjdainya erosi. Sistem pengolahan tanah secara secara konvensional, seperti,m yang banyak dilakukan oleh pelaku usahatani di Indonesia, yang dilakukan secara intensif dapat merusak terutama sifat fisik tanah. Struktur yang terbentuk secara alami oleh penetrasi akar, pelapukan bahan organik, danaktifitas hewan menjadi rusak, sehingga stabilitas agregat menurun.[20] Akibat selanjutnya adalah : (1) kerusakan 4 agregat tahan air yang berukuran lebih besar dari 50% dapat mencapai 30-80% (Osborne dan Rowell. 1978),[21] (2)terjadinya penyumbatan pori-pori besar oleh

Gambar 1 : Perubahan Produktifitas Tanah karena Erosi (dikutip dari Eiswalfy,dkk 1990)[26]

Kerusakan geologi
Kerusakan dipercepat
Y1
Y2
Y3
Y4
Tingkat kerusakan
Tingkat kerusakan potensial
Masa Lalu
Sekarang
Akan datang
Waktu
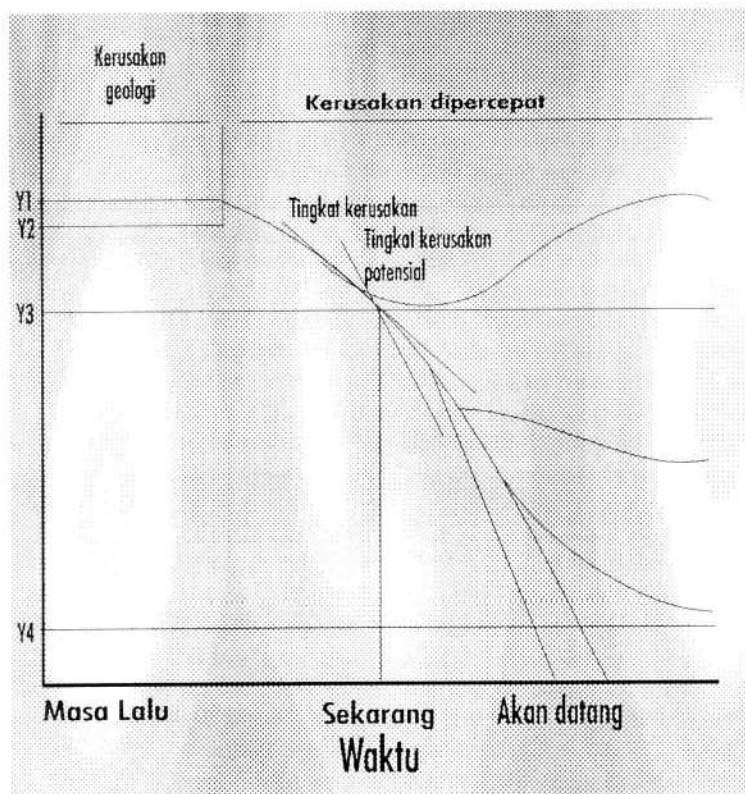
Keterangan : Y1 = produktifitas awal
Y2 = produktifitas pada saat terjadi kerusakan
Y3 = produktifitas sekarang
Y4 = produktifitas minimum tanpa pengelolaan
Y5 = produktifitas dengan pengelolaan
Y6 = produktifitas dengan pengelolaan optimal

agregat yang lebih kecil sehingga mengurangi peresapan air (Sanchez. 1976),[22] penurunan kandungan bahan organik akibat aerasi yang berlebihan (Hakim.1986;Suwadjo dan Sinukaban. 1986),[23] sehingga menyebabkan daya simpan air menurun, dan tanah peka terhadap erosi, karena bahan organik mempunyai fungsi sementasi dan pengikatan air.

Produktivitas atau mutu tanah akan menurun tajam jika kerus akan akibat erosi tidak ditanggulangi segera. Tanpa pengelolaan lahan, produktivitas makin lama semakin menurun. Namun pengelolaan secara optimum akan dapat meningkatkan produktivitas, seperti ditunjukkan oleh gambar 1. Walaupun demikian kenyataan menunjukkan bahwa setiap bentuk usaha tani akan selalu mengakibatkan percepatan erosi.[24] Tinggal bagaimana cara pelaku usahatani mengurangi tingkat erosi sampai pada tingkat yang masih dapat ditolerir.

Masa Depan Pertanian Tanaman Pangan Indonesia

Keberhasilan sektor pertanian Indonesia dalam kurun waktu 1945-1992 ditandai dengan keberhasilan Indonesia menjadi negara yang berswasembada beras pada tahun 1984, mengubah samsekali negara pengimpor beras terbesar menjadi swasembada beras. Kalau diamati dengan teliti keberhasilan ini lebih banyak dilaksanakan di lahan bawahan (sawah) dengan infrastruktur yang mendukung. Keberhasilan ini tercapai melalui : (a) penggunaan bibit unggul secara luas, (b) penggunaan pupuk kimia terutama N dengan dosis tinggi secara luas, (c) pengembangan fasilitas irigasi secara besar-besaran, perluasan lahan sawah, peningkatan intensifikasi pertanaman padi sawah, (d) mengatur produksi secara sentral dan ketat dengan paket tekniologi masukan(input) tinggi.[25] Dewasa ini lahan-lahan subur suaitani beririgasi baik setengah teknis maupun teknis telah mengalami alih fungsi dari lahan pertanian ke bukan pertanian. Kompensasi dari kenyataan tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan yang ada yaitu lahan kering, karena bagaimanapun luas daratan di Indonesia tidak bertambah, walaupun kesuburan dan produktivitas lahan kering lebih rendah dari lahan subur suaitani beririgasi.

Pemanfaatan lahan kering yang ada di Indonesia untuk pertanian bukan tanpa kendala. Selain sifat-sifat lahan kering itu sendiri yang umumnya bereaksi masam, kadar unsur hara rendah, dan daya simpan air rendah, serta kemungkinan terjadinya keracunan tanaman oleh mineral tanah, lahan kering juga dibayangi oleh bahaya erosi. Tercatat 18,4 juta hektar lahan dari 57 juta hektar lahan kering saat ini dalam keadaan kritis dan akan terus bertambah. Keadaan ini tentu saja tidak menguntungkan bagi masa depan pertanian, terutama tanaman pangan Indonesia, karena pertanian tanaman pangan Indonesia masih sangat tergantung pada lahan beririgasi.

Bertambahnya lahan kritis Indonesia dapat menyebabkan kemungkinan pemanfaatan secara optimal lahan kering yang potensial bagi pertanian menjadi berkurang. Sebagai gambaran Jumin dalam bukunya menyebutkan, di Amerika Serikat setiap tahunnya terjadi pengikisan lapisan tanah sebesar 4.000 juta ton. Apabila hasil analisa tanah menunjukkan 0,1% nitrogen,0,15% P2O5, dan 0,5% K2O maka berarti bahwa lebih dari 50juta ton unsur hara utama hilang dari lahan pertanian dan kehutanan tiap tahunnya.[27]

Penyelesaian masalah kesuburan tanah tersebut tidak cukup dengan pemberian masukan dalam jumlah tinggi (High Input). Pengolahan secara intensif dan pemberian pupuk dalam jumlah tinggi sebagai usaha meningkatkan produktivitas secara cepat belum tentu berhasil meningkatkan produktivitas lahan. Kenyataan pada lahan sawah yang selama ini dipergunakan untuk tanaman padi telah menurun laju produktivitasnya, dari 6% per tahun pada pelita III menjadi 1,3% pada Pelita IV, dan sejak tahun 1989-1992 kenaikan produktivitasnya hanya sekitar 1%, walaupun pemakaian pupuk meningkat terus.[28] Analogi ini menunjukkan pengelolaan lahan kering akan lebih sulit untuk meningkatkan laju pasokan pangan Indonesia, sedangkan laju pertambahan penduduk Indonesia masih lebih tinggi dibanding laju pasokan pangan yang dihasilkan sendiri.

Persoalan semakin bertambah apabila dikaitkan dengan usaha konservasi lahan kering, Karena saat ini pengusahaan lahan kering seluas satu hektar

ngan hak milik belum dapat mengangkat petani han kering yang berjumlah sekitar 11,9 juta KK atau 5 juta jiwa dari kemiskinan.[29] Padahal teknologi nservasi merupakan investasi dalam suatu ahatani? Akibatnya pemeliharaan produktivitas han kering dapat terbengkalai, dan usaha empertahankan produktvitas seringkali empergunakan teknologi masukan tinggi yang nderung mengabaikan usaha konservasi.

Penutup

Menilik permasalahan yang muncul dalam manfaatan lahan kering berasal dari baik dari gatra fisik maupun sosial ekonomi, maka penanganan rmaslahan lahan kering dan lahan kritis perlu akukan secara serbacakup(komprehensif).Lebih as lagi, perlu adanya prioritas berdasarkan endesaknya suatu masalah untuk ditangani sampai nanganan masalah jangka panjang dengan berasas da keterlanjutan sumberdaya lahan yang ada agar pat dimanfaatkan secara lestari.

Saat ini sistem pertanian yang berlaku merupakan tem modern dengan teknologi masukan tinggi *gh Input technology*) dengan ciri intensif dan rtitik berat pada hasil secara fisik yang tinggi dan pat tercapai. Akibat dari paradigma ini adalah runnya produktivitas lahan, serta pencemaran ibat pemakaian bahan kimia secara berlebihan. dang pertanian selaran alam mengarahkan ngelolaan lahan untuk membangun kesuburan nah yang menitik beratkan pada produktivitas dan lestarian sumberdaya lahan dengan memberi knologi masukan rendah (*low input technology*). Hasil dari paradigma ini adalah terciptanya suatu onsep yang disebut sebagai sistem gizi tanaman rpadu(*Integrated Plant nutrient System*).Pendidikan ecara terus-menerus kepada pihak-pihak yang erkepentingan terhadap pertanian perlu dilakukan ntuk melembagakan ilmu pengetahuan dan esadaran lingkungan dalam membangun usahatani ang berkelanjutan. Lembaga diartikan sebagai ranata yang menandakan kemapanan hukum, aidah, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi, dan sikap serta andangan hidup yang berlaku pada masyarakat rtentu. Sehingga melembagakan lingkungan berarti enjadikannya suatu unsur dalam pola hidup dalam asyarakat.[30]Dengan demikian dapat diharapkan rbentuknya suatu mayarakat yang sadar lingkungan engan landasan pengetahuansehingga tercipta suatu stem usahatani yang berkelanjutan.

CATATAN AKHIR

1)Rahman Sutanto.**Konservasi Sumberdaya Lahan Dlam Pemapanan Sistem Pertanian Berasaskan Usahatani Rakyat Di Indonesia Dalam Cerapan UU RI No. 12/1992**, Makalah Seminar Nasional ISMPI Fakultas Pertanian UGM, 19-24 April 1993, hal.1.

2)Mubyarto,1984. **Pengantar Ekonomi Pertanian**, Edisi III, LP3ES. Jakarta, hal. 104.

3)**Pertanian Dalam Konsep Tata Guna Lahan**, dalam *Buletin Pedon*, Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM,Vol.2. No. 1, Desember 1988, hal. 4.

4)Buringh,1993.*Pengantar Pengajian Tanah Tanah Wilayah Tropika dan SubTropika* (Alih bahasa oleh Tejoyuwono Notohadiningrat). Cetakan ketiga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta,

5)Notohadiprawiro. T.S. Wisnubroto. dan S. Soekodarmodjo, **Acuan Penduga Ketersediaan Lengas Tanah dan Resiko Erosi untuk Budidaya Pertanian Lahan Kering**. Makalah pada Pertemuan Teknis Penelitiandan Pengembangan Lahan Kering di Bogor, 1982.

6)Muljadi,D. 1977. **Sumberdaya Tanah Kering. Penyebaran dan Potensinya untuk Kemungkinan Budidaya Pertanian.** Kongres agronomi di Jakarta,1997.

7)A.S. Karama dan Irawan, **Penguasaan Lahan untuk Penerapan Teknologi dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Tani.**Buku Panduan Kongres Nasional VI HITI tanggal 12-15 Desember 1995 di Jakarta, hal 67.

8) Susilo. 1988. **Peranan Geomorfologi dalam Identifikasi Lahan Kritik**. Buletin *Pedon* vol.2 No.1 Des.1988. Keluarga Mahasiswa Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM.

9)Rismunandar. 1984. *Air, Fungsi dan Kegunaannya bagi Pertanian.* Penerbit Sinar Baru. Bandung. hal. 48

10)Karama. A.s. dan Irawan. 1995. *loc. cit*

11)Notohadiprawiro.T,S. Widnubroto. dan S. Soekodarmodjo. 1982. *loc. cit*

12) Tanuwibowo, B.S. **Lika-Liku Air**. *Majalah Aku Tahu* No. 55 Sept.-Okt. 1987.Jakarta.hal. 20

13)Darmawijaya,M.I. 1990. *Klasifikasi Tanah. Dasar Teori Bagi Peneliti Tanah dan Pelaksana Pertanian Indonesia.* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hal. 185-186

14)Tanuwibowo, B.S., *loc. cit*

15)Staf Asisten, *Bahan Asistensi Praktikum Dasar-dasar Ilmu Tanah.* Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta. Hal. 29

16) Notohadiprawiro, T. S. Soekodarmodjo. S. Wisnubroto. M. Dradjad. E .Sukana. **Pelaksanaan Irigasi sebagai salah satu Unsur Hidromeliorasi Lahan.** Dalam : *Prosiding Diskusi Panel Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Air Pada Tingkat Usaha Tani.* Fakultas Pertanian UGM, Dirjen PU, dan UGM 16-18 Maret 1983 di Yogyakarta. Hal 12

17)Notohadiprawito, T. S. Soekodarmodjo. dan E. Sukana. 1987. **Pengelolaan Kesuburan Tanah dan Peningkatan Efisiensi Pemupukan,** *Buletin. Fak. Pertanian UGM* 21:1-24

18)Schroeder,D. 1983. **Soil-Facts and Concept. Int. Potash Institute Bern. Switzerland**. Dalam: *Praktikum Kesuburan Tanah.* Jurusan Tanah Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta. Hal 1

19)Foth. H.D. 1984. *Dasar-dasar Ilmu Tanah.* Diterjemahkan Oleh: Purbayanti, E.D., D.R. Lukitawati, Trimulatsih. S.A.B. Hodoyo. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

20)Hakim. 1986, dalam: Kusumarini, E. 1995. Kemungkinan Perubahan Beberapa Sifat Fisik Tanah Akibat Praktek Pengolahan Tanah Pada Lahan Kering Dalam Kaitan Dengan Kualitas Tanah Sebagai Habitat Tanaman. Jur. Ilmu Tanah. Fak. Pertanian UGM. Yogyakarta. Hal 1-20

21) *ibid*

22) *ibid*

23) *ibid*

24)Ismail,I., 1986. **Suatu Kajian Tentang Erosi dan Produktivitas Lahan di Wilayah Perkebunan Tebu PG Bungamayang Lampung Utara**. Dalam: *Prosiding Pertemuan Teknis Tengah Tahunan Tahun 1986 BP3G.* Pasuruan. Hal 299-311

25) Sutanto R, *op cit*, hal 4

26) Utomo. W.H. dikutip oleh Kusumarini, *loc. cit.*

27) Jumin. H.B. 1991. *Dasar-Dasar Agronomi*, Rajawali Press, Jakarta, hal 123

28)Adiningsih,J.S., D .Santosa, M. Soepartini, A. Sofyan, S. Rochayati, D. Setyorini, dan D, Nursyamsi. **Perkembangan dan Prospek Pengelolaan Hara Terpadu di Indonesia**. Dalam *Buku Panduan Kongres Nasional VI HITI* tanggal 12-15 Desember 1995 di Jakarta. Hal. 63

29)Karama. A.A. dan Irawan **Penguasaan Lahan Untuk Penerapan Teknologi dan Peningkatan Pendapat Keluarga Tani**. Dalam *Buku Panduan Kongres Nasional HITI* tanggal 12-15 Desember 1995 di Jakarta. Hal 68

30)Notohadiningrat,T. 1993. **Melembagakan IPTEK dan Sadar Lingkungan Pada Masyarakat Tani untuk Membangun Usahatani Yang Berkelanjutan**. Makalah *diskusi Panel ISMPI wilayah III di UNS Surakarta* tanggal 20 Desember 1993. Hal 1-12•••

Urbanisasi, Suburbanisasi, Dan Kecenderungan Perluasan Kota

ABAD MENDATANG DISEBUT JUGA SEBAGAI FENOMENA PERKOTAAN. SUATU KEADAAN KEADAAN DIMANA KOTA SEBAGAI LALU LINTAS POLITIK, EKONOMI, PENAMPUNGAN PENDUDUK SUDAH MENCAPAI TITIK JENUH. KECENDERUNGAN YANG SAMA TENGAH BERLANGSUNG DI INDONESIA. JUMLAH PENDUDUK PERKOTAAN MENINGKAT PESAT, DISERTAI TINGKAT URBANISASI YANG CEPAT. AKIBATNYA KOTA HARUS MEMIKUL BEBAN BUKAN HANYA KEGIATAN PENDUDUKNYA, TETAPI JUGA KEGIATAN KITA DI SEKELILINGNYA. BAGI PENDUDUK PERKOTAAN, LEDAKAN YANG BESAR AKAN MENIMBULKAN MASALAH DALAM TRANSPORTASI, PELAYANAN FASILITAS KOTA, AIR MINUM, ENRGI, SAMPAH, MAUPUN TERBATASNYA KONTAK SOSIAL. MAKA DI MASA DATANG, SEBAGAIMANA KECENDERUNGAN DI BANYAK NEGARA, INDONESIA AKAN DIWARNAI OLEH KEMUNCULAN KOTA-KOTA MANDIRI (SELF-CONTAINED NEW TOWN).

Kota merupakan akumulasi dari place (tempat), work (kegiatan), dan folk (penduduk). Akumulasi dari ketiaga hal teersebut terjadi dengan intensitas yang tinggi. Dari akumulasi inilah timbulah berbagai bidang ilmu dan teori-teori kota. Pembicaraan mengenai penataan kota pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok peengertian, yaitu : studi kota (urban studi), Perencanaan kota (urban planning) dan perancangan kota (urban design).

Urban studi adalah bagian yang paling luas dan yang paling banyak melibatkan berbagai bidang, seperti sosiologi, sosiatri, ekonomi peerkotaan dan lain-lain. Tujuan urban studi untuk menemukenali fenomena-fenomena yang terjadi dalam segala aktifitas perkotaan yang berkait dengan demografi. Sedang perencanaan kota adalah suatu kegiatan sudah mengarah pada ulasan mengenai penataan ruang yang dekat dengan permasalahan kewilayahan, bermuara pada tata guna lahan dalam kaitannya dengan jenis-jenis kegiatan, pola sirkulasi/trasnportasi, dan yang berkaitan dengan tata ruang yang lain.

Perancangan kota (urban design) lebih berdimensi fisik dan lebih dekat dengan permasalahan arsitektural. Perancangan kota menekankan pada aspek keindahan dan kenyamanan. Pokok-pokok persoalan urban desain menekankan pada penciptaan kualitas ruang sebagai elemen kota untuk meemberikan kenyamanan baik fisik maupun psikis bagi pemakainya. Yang di maksud kenyamanan fisik secara garis besar meliputi kenyamanan thermal dan keamanan. Sedang kenyamanan psikis menyangkut berbagi hal yang lebih sering dibahhas dalam bidang psikologi sosial, seperti r:sa intim, dialogis, privasi dan

Retno Widodo Dwi Purnomo

Mahasiswa Teknik Arsitektur tingkat akhir, angkatan tahun 1990. Pemenang I lomba pembuatan desain Prasasti KTN Se-DIY, Juara harapan I lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 1993 dan sebagai pemenang dalam beberapa lomba karya ilmiah tingkat universitas. Menjadi asisten di berbagai macam studio perencanaan pembangunan daerah.

bagainya.

Kota dan proses perubahan kota

Sebenarnya kata *urban* tidak pernah digunakan dalam bahasa Inggris sebelum abad ke 19. Istilah ini secara singkat dijelaskan dalam Shorter Oxford Dictionery sebagai sebagai suatu yang berhubungan dengan kehidupan kota. Etimologi istilah ini berasal dari kata latin *urbs* yang digunakan oleh orang-orang Romawi untuk menamakan suasana daerah sebagai *kota* khususnya untuk Kota Roma (The City of Rome).[1]

Kriteria tentang *kota* sendiri masih sering menjadi pertanyaan, baik pada definisi sosiologis maupun geografis. Pertanyaan tersebut berkait dengan persoalan 'batas'. Dari jaman pertengahan di Eropa ditemukan kota yang memiliki tembok-tembok sebagai batas antara orang yang tinggal didalamnya dengan orang di luar yang disebutnya sebagai orang desa. Di Jerman, orang-orang yang tinggal di kota pada abad tersebut dengan bangga menyatakan 'Stadt Luft Macht Frei' (udara kota membuat seorang lebih bebas) yang berarti secara sosiologis, orang-orang di kota lebih memiliki kebebasan.[2] Beberapa ahli menyatakan batasan kota dengan jumlah penduduk, misalnya daerah yang didiami lebih dari 20.000 jiwa. Semua batasan ini masih dipertanyakan, namun tulisan ini tidak akan membahas permasalahan tersebut.

Untuk menjelaskan proses perubahan kota, beberapa istilah yang diungkapkan Poplin (Poplin, 1972) adalah segresi, invasi, sentralisasi dan konsentrasi.[3] Istilah segregasi sosial, dipakai Poplin dalam teori ekologi sosial untuk menunjukkan proses terjadinya daerah-daerah yang semakin homogen, yaitu bagian-bagian kota yang didiami kelompok tertentu dengan ciri-ciri ras, ekonomi atau kelas sosial yang relatif sama. Dan pada perkembangan berikutnya, jika ada sebuah kelompok tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang khas seperti tersebut di atas memasuki wilayah tertentu yang telah didiami oleh masyarakat lain, ini disebut invasi. Dua istilah ini adalah dasar terjadinya proses suburbanisasi.

Sentralisasi adalah kecenderungan untuk bertempat dekat dengan pusat pelayanan kota serperti transportasi, komunikasi dan kesempatan kerja. Sedang konsentrasi berhubungan dengan peningkatan kepadatan penduduk, bukan dengan peningkatan sarana prasarana. Berkebalikan dengan segresi dan invasi yang melatari proses suburbanisasi, sentralisasi dan konsentrsi mendasari terjadinya proses urbanisasi.

Pengertian urbanisasi yang sering didengar adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sebuah istilah yang sering menjadi kambing hitam permasalahan ketenagakerjaan, pengganguran, pemukiman kumuh dan masalah-masalah sektor informal lainnya. Sedangkan istilah *suburbanisasi* barangkali merupakan istilah baru bagi kalangan kita, terutama yang tidak berkecimpung dalam profesi maupun pendidikan perencanaan. Secara kasar *suburbanisasi* dapat dijelaskan sebagai proses perluasan lahan perkotaan. Bahasan terhadap data dari BPS mengenai proporsi penduduk kota dan desa tahun 1980 dan 1990 di beberapa daerah tingkat II di bawah ini dapat lebih memberikan penjelasan :(lihat tabel I)

Nama Kota	1980 (%)	1990 (%)
Jakarta Pusat	100	100
Medan	87,90	97,41
Surabaya	86,10	97,47
Banjarmasin	86,69	92,18
Ambon	53,88	74,47
Yoyakarta	99,19	100

Prosentase penduduk yang tinggal di perkotaan/ urban (BPS, 1993)

Kondisi semakin besarnya proporsi penduduk yang tinggal di kota seperti di atas tidak dapat diartikan semata bahwa semakin hari lahan desa semakin kosong. Apresiasi lain yang mungkin dari data tersebut adalah terjadinya proses pergerakan penduduk dari pusat kota ke pinggiran beserta segenap fasilitasnya proses yang terakhir ini yang disebut dengan suburbanisasi.

Pada dasarnya urbanisasi dan suburbanisasi, kedua-duanya merupakan proses perubahan perkotaan yang berkaitan dengan perpindahan penduduk dalam dimensi geografis. Perbedaan yang mendasar dari dua proses tersebut ada pada dua hal pokok, yaitu pola bergerakan dan subjek yang melakukan pergerakan. Suburbanisasi bergerak dari pusat kota (inner city) ke pinggir kota dan dilakukan oleh para pemilik modal dari kelas menengah, sedangkaan urbanisasi cenderung dilakukan oleh kalangan bawah menuju pusat kota.

Kalau kita amati, dua kecenderungan urbanisasi dan suburbanisasi sedang terjadi secara bersamaan, walau dengan tahap awal yang berbeda. Urbanisasi telah berlangsung lebih lama dan akibatnya telah lama terasa. Sedangkan suburbanisasi justru baru terasakan "semangatnya" dengan pembangunan kawasaan-kawasan yang disebut dengan kota mandiri seperti Bumi Serpong Damai dan Lippo City.

Dari kedua proses tersebut saya melihat berlangsungnya liberalisasi yang tak terkontrol. Urbanisasi yang berawal dari impian akan kemudahan hidup di kota untuk mendapatkan pekerjaan dan fasilitas, berakhir dengan kekalahan dalam kompetisi bebas. Sedang suburbanisasi terdorong oleh arogansi kepemilikan modal finansial untuk melakukan invasi. Apabila waktu-waktu lalu dikhawatirkan adanya pemikiran dan praktek perencanaan kota di Indonesia yang justru mendukung proses akumulasi penggunaan sumber daya kota pada hanya sekelompok orang saja, saat ini patut pula

dikhawatirkan eksploitasi dan suksesi kepemilikan sumber daya dari masyarakat setempat sebagai akibat dari suburmanisasi yang tak terkendali.

Suburbanisasi dalam Pertumbuhan Kota

Suburbanisasi seperti telah dijelaskan diatas terkait dengan teori segresi dan invasi. Sebenarnya gerakan dari pusat ke pinggir kota (segresi) yang cenderung
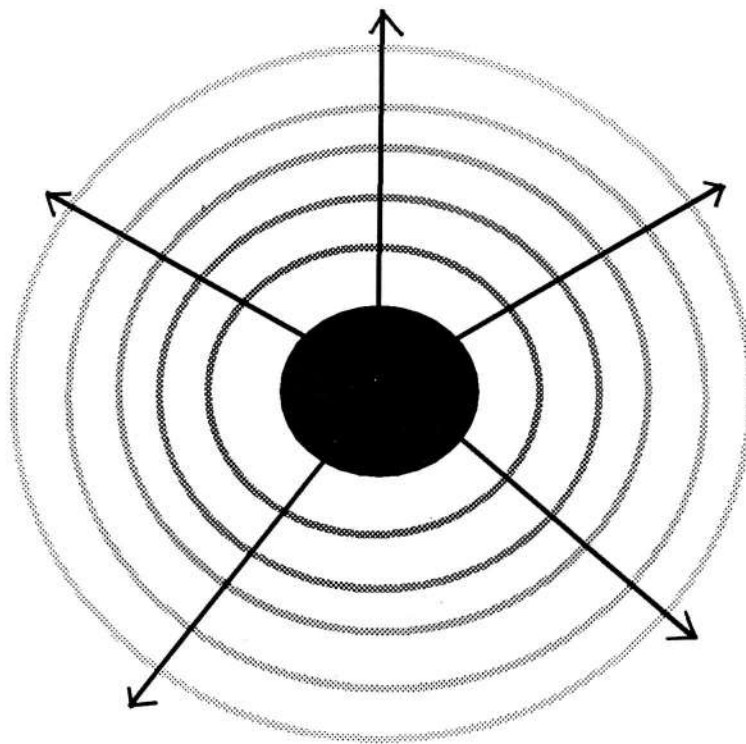
● Pusat kota
⟶ Arah pergerakan pertumbuhan kota

Grafik pertumbuhan kota

dikatagorikan sebagai suburbanisasi terjadi pula secara alami/spontan yang disebabkan menurunnya kemampuan lahan pusat kota mewadai kegiatan penghuninya. Pergerakan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini. (lihat diagram I).

Pergerakan alami yang terjadi spontan dan tetap menjaga heterogenitas kawasan baru di pinggir kota yang terbentuk, tidak membawa resiko besar dalam dimensi sosial, bahkan dapat merupakan katalis perkembangan dan pertumbuhan kota yang memeratakan fasilitas dan aksesibilitas bagi masyarakat pinggiran yang selama ini perlu mengeluarkan sebagian besar pendapatan ekonominya untuk mendapatkannya.

Sedangkan pembentukan *kota mandiri* yang disebut-sebut akhir-akhir ini cenderung homogen dan elitis. Pola fisik kota-kota yang dikatakan sebagai kota mandiri tersebut bahkan cenderung menutup diri, dengan pagar pembatas dan satpam yang cukup *sangar*. Terlepas dari masalah keamanan masyarakat yang menurun akibat meningkatnya ketidakpedulian antar kelompok yang lebih tepat dibahas dalam bidang sosilogi, saya melihat fenomena ini sebagai proses kembalinya definisi kota seperti pada jaman pertengahan di Jerman yang telah diungkapkan di muka. Apakah ini suatu kemunduran ataukah kemajuan, yang pasti pola seperti ini dikhawatirkan memicu berlangsungnya segresi dalam perkembangan kota, yang salah satu resikonya dapat dipahami dari peristiwa kerusuhan Los Angeles pada pertengahan tahun 1992.

Segresi dan kerusuhan Los Angeles

Pada tahun tersebut di Los Angeles terjadi kerusuhan yang terburuk sepanjang sejarah perkotaan di Amerika serikat. Pemicunya adalah pembebasan pelaku penyiksaan terhadap King, seorang warga kota berkulit hitam. Penyiksanya adalah para polisi berkulit putih. Beberapa jam setelah vonis pengadilan tersebar luas, pembakaran, penghancuran, perampokan dan penganiayaan mulai terjadi di perempan Jalan Florence dengan Jalan Normandie di daerah South Central Los Angeles yang merupakan tempat permukiman 261.000 orang kulit hitam dan Hispanic yang miskin.

Selain argumentasi yang mendasarkan terjadinya peristiwa tersebut pada masalah rasial, berkembang pula pembahasan mengenai sejarah terjadinya kota sebagai pendorong. Simi Valley tempat Rodney King diadili adalah suatu daerah suburban Los Angeles yang cukup makmur dengan penduduk sekitar 100.000 jiwa dengan komposisi ras 80% kulit putih, 13 % Hispanic, 5 % Asia dan 2 % kulit hitam dengan harga rata-rata sebuah rumah sekitar 230.000 dollar AS. South Central Los Angeles adalah termasuk Inner city yang berpenduduk 260.000 yang terdiri dari Kulit Hitam dan Hispanic dengan pendapatan 10.000 dollar AS per tahun, berada di bawah kemiskinan dalam standar AS. Dua tetangga yang kontras antara inner city dengan suburban juga terjadi di kota-kota lain di AS seperti New York, Chicago dan Detroit. Dua dunia yang kontras tersebut terjadi akibat berlangsungnya suatu proses yang disebut suburbanisasi dari kota-kota di AS seusai PD II. Para veteran mendapatkan pinjaman yang dijamin pemerintah untuk membeli rumah baru di wilayah pinggiran kota dan pemerintah memberikan pula bantuan finansial untuk membangun jalan-jalan tol yang menghubungkan daerah pusat kota dengan suburban tersebut. Pada tahun 80-an para developer swasta mendirikan daerah-daerah taman industri dan pusat-pusat penelitian dan pengembangan di sepanjang jalan tol yang mengelilingi kota-kota besar. Jejak mereka diikuti perusahan-perusahaan yang hendak menghindari pajak yang begitu besar di wilayah pusat kota. Daerah-daerah suburban ini tumbuh dan berkembang menjadi kota-kota kecil yang mandiri dari daerah pusat kota. Para penduduknya dapat bekerja, sekolah, belanja, berobat, beribadah,dan berekreasi di daerah

suburbannya masing-masing.[4]

Terhadap fenomena ini, Joel Garreau dalam bukunya Edge City : **Life on The New Frontier** berkesimpulan bahwa suburban yang mandiri dan terdiri dari kelas sosial yang relatif homogen (kalangan kulit putih menengah keatas), menyebabkannya terisolasi dari dari keadaan sosial inner city yang miskin dan sarat dengan berbagai permasalahan sosial. Hal ini menimbulkan jarak sosial antar keduanya yang lazim disebut dengan segregasi sosial. Seperti juga pernah diungkapkan oleh Dr Nasikun di Harian Republika beberapa waktu lalu, bahwa ketika terjadi overlaping dua karakter atau lebih dalam kelompok masyarakat, seperti misal apabila masyarakat yang miskin adalah masyarakat yang tinggal di desa, sedang masyarakat kaya pastilah masyarakat yang tinggal di kota, maka potensi konflik kedua kelompok tersebut besar. Segregasi sosial semacam ini memudahkan terjadinya kerusuhan antar warga di kedua kawasan tersebut.

Invasi dan Ancaman terhadap Konservasi

Peristiwa banjir di Jakarta beberapa lalu sempat memicu komentar dari berbagai kalangan, bahkan Presiden (Soeharto-red) mengintruksikan penutupan kawasan BOPUNJUR (Bogor, Puncak, Cianjur) bagi pembangunan baru sebagai reaksi dari peristiwa tersebut. Hal teersebut mengisyaratkan pembenaran pada logika akademik mengenai ancaman terhadap kawasan konservasi oleh invasi kegiatan sebagian kalangan. Kondisi serupa pernah juga terjadi di wilayah bandung, yaitu adanya kegiatan pembangunan dibagian kawasan kota yang telah ditetapkan sebagai kawasan peresapan. Dan fakta alam yang tidak dapat dipungkiri adalah terjadinya banjir pada pertengahan Februari 1996 kemarin. Walaupun tidak dapat dibuktikan secara matematis, fenomena ini perlu manjadi dasar evaluasi.

Suksesi dan Pemiskinan Terstruktur

Trsdisi perencanaan, sebagai upaya dan proses untukmenuju keadaan yang lebih baik dari sekarang bagi semuakalangan tampaknya belum menjadi budaya publik. Padahal, sejarah mencatat bahwa perencanaan kota yang baik dan tepat dapat menjadi katalisator dalam berbegai proses pengentasan kemiskinan.[5]

Sementara proses perubahan kota dewasa ini cenderung menampakkan kegiatan yang mengarah pada liberalisasi tak terkendali, baik dalam pusat-pusat kota, ataupun invasinya ke area pinggiran dan pedesaan. Liberalisaisi (persaingan bebas) ini berkait erat dengan suatu hubungan yang dalam teori disebut dengan segitiga kausal, yaitu : aksesibilitas (kemudahan pencapaian), kepadatan dan bea sewa ruang yang tinggi. Suatu tempat yang mempunyai aksesibilitas tinggi, akan dalam pertumbuhannya cenderung memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, yang berakhir pada beasewa yang senantiasa meningkat.

Liberalisai yang tak terkendali menbiarkan proses kepemilikan lahan yang didasarkan pada kemampuan individual, tanpa negosiator. Ini berakibat pada akumulasi kepemilikan bagi mereka yang memiliki modal, dan keterpinngiran bagi kelompok lain. Kita tidak dapat menyalahkan kedatangan mereka di kota untuk mengakses pada lapangan pekerjaan dan tinggal dekat dengan pekerjaannya. Akibat akhirnya adalah terjadinya fenomena-fenimena pemukiman kumuh di perkotaan. Dalam hubungan sosial ekonomis kondisi ini dapat digambarkan sebagai hubungan tuan tanah - pekerja pada masa feodal. Kekalahan seperti di atas tidak saja terjadi pada para pendatang. Fenomena yang tampak sekali sebagai proses suksesi adalah fenomena kampung-kampung Betawi di Jakarta. Kemilikan lahan mereka semakin terancam, dan mereka semakin tersingkir seiring semakin metropolisnya Jakarta.

Sementara suksesi-sukesi lahan pedesaan terus berlangsung pula. Motivasi untuk mendapatkan lahan dan tenaga kerja yang murah, memacu invasi-invasi para pemilik modal untuk mengambillahan lahan-lahan pertanian yang selama ini menjadi lapangan keerja bagi penduduknya. Pengambilan lahan yang seharusnya dilarang bagi fungsi lain ini seringkali teerjadi karena kolusi. Dan karena tergiur tumpukan rupiah atau mungkin juga karena *tekanan* dilepaskannya lahan yang selama ini mereka jadi majikan di atasnya.

Kota Mandiri dan kemandirian suatu kota

Bagi saya, sebutan *kota mandiri* yang terdengar nyaring akhir-akhir ini lebih sebagai bahasa iklan yang layak diungkapkan para pedagang dan tidak perlu bagi profesi perencana. Apabila *Kota mandiri* yang saya maksudkan disini adalah uraian pengertian yang disosialisasikan para pengembang pada saat-saat ini, pada dasarnya kriteria-kriteria yang menjadi dasar penyebutan kota mandiri seperti adanya fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, kebutuhan rumah tangga dan rekreasi pada skala kawasan tertentu adalah syarat mutlak yang harus dilakukan perencana dalam menata/membangun sebuah kota dan merupakan permasalahan melekat, yang dalam dunia arsitektur disebut sebagai inherent problem. Permasalahan tersebut dapat dianalogikan seperti juga seorang ahli mekanik yang pasti harus menentukan jenis bahan bakar, sistem pembakaran, rem ataupun cara pemasangan onderdil dalam merencanakan sebuah kendaraan. Barangkali protes ini hanya pada dataran istilah saja, namun itu perlu. Sebab meenurut saya sosialisasi intilah ini telah menurunkan makna perencana dan perencanaan.

Perencana, bagaimanapun juga memang bertugas untuk membuat kota yang direncanakannya menuju kemandirian yang sedapat mungkin dinikmati semua kalangan didalamnya. Lebih dari sekedar penyediaan fasilitas, perencanaan harus pula mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan sumber daya untuk tujuan ke depan, seperti konservasi air dan ragam flora - fauna. Namun walau demikian, seperti juga pada proses pembuatan kendaraan yang

menurut hukum Carnot dapat dihitung efisiensinya, pada kenyataanya tidak akan pernah mencapai tingkat efisiensi 100 %. Begitu pula perencanaan kota, sehebat apapun pendekatan yang diterapkan tidak akan pernah mencapai tahap yang paling mandiri, berkenaan dengan daya dukung kualitatif maupun kuaintitatif alam serta kompleknya kegiatan dan kepentingan yang diwadahinya.

Keberhasilan perencanaan pada dasarnya adalah kemampuannya mengakomodasi berbagai konflik dan kepentingan tersebut, bukan untuk memenangkan atau melayani sebagian kelompok yang mampu membayarnya. Membangun sebuah *kota mandiri* pada lahan baru, dengan investasi yang lebih dari cukup, bahkan terkadang telah mendapatkan subsidi infrastruktur, bukanlah pekerjaan yang sulit. Hal semacam ini mengingatkan pola perencanaan tradisional yang berorentasi mewujudkan satu bentuk kota atau urban form tertentu. Salah satu contoh pemikiran serupa yang pernah populer adalah konsepsi garden city-nya Ebenezer Howard. Obsesi Howard adalah menciptakan satu kota yang indah, bersih, nyaman, bebas sepenuhnya dari persoalan fisik.

Dalam pemikiran ini, perencanaan adalah suatu kegiatan teknis estetis belaka untuk memproyeksikan dan memaksakan satu wujud kota tertentu pada masa yang akan datang, dengan kata lain rencana kota adalah *cetak biru* dari kota tersebut di masa datang. Konsekuensi dari konsep ini, menjadikan penataan dan perencanaan kota sebagai kegiatan yang rasionalistik, sentralistik, bahkan eleitis. Perencana adalah meereka yang memiliki ketrampilan teknokratik tertentu dan cenderung bekerja untuk melayani kepentingan satu kelompok tertentu saja. Ini berarti bahwa kegiatan perencanaan sekedar upaya justifikasi teerhadap suattu keputusan poliitik, dan perencana hanya mereka yang mempunyai profsional expertise tertentu untuk memberikan professional judgment teerhadap suatu gagasan.

(Setiawan, B, 1993)

Pemikiran seperti di atas tidak sesuai dengan gerak masyarakat yang dinamis dan penuh kompetisi saat ini. Untuk itu , lebih jauh Forester dalam bukunya Planning in Face of Power mengatakan bahwa sesungguhnya yang harus dilakukan perencana saat ini adalah memfasilitasi suatu proses perubahan yang tidak selalu dapat diantisipasi. Perencanaan bukanlah semata-mata kegiatan yang rasionalistik, teknis dan estetis, akan tetapi merupakan pula proses sosial-politis yang sarat dengan konflik antar kepentingan.

Selama ini memang ada juga pengembang yang menwarkan kota mendiri hingga memikirkan pola hubungan sosia ekonomi antar kelas dengan mendatangkan para tenaga kerja dari masyarakat aslisekitar ke kota baru tersebut. Konsep ini mirip teknopolis yang diterapkan perusahaan komputer di Sun Valley, Amerika Serikat. Sampai seberapa keberhasilan yang dicapai sekarang, belum ada evaluasi akurat yang disosialisakan.

Kota Satelit dan Penggemukan Kota yang Telah Gemuk

Sejauh yang dapat saya pahami, istilah *kota satelit* dalam fenomena perkembangan lebih dapat diterima dari pada istilah *kota mandiri* Pengertian *kota satelit*

1 2 3
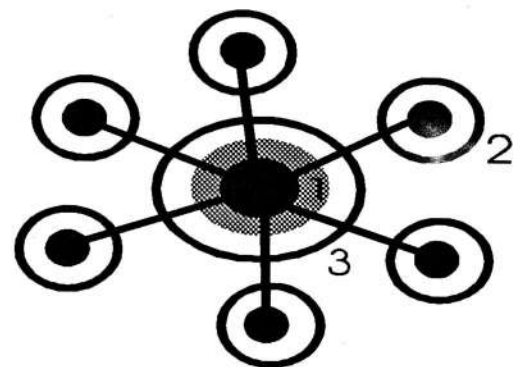
1: Kota industri
2: Kota satelit
3: Koridor

Perkembangan berikutnya
Awal
Kota Industri
Koridor
Kota Satelit
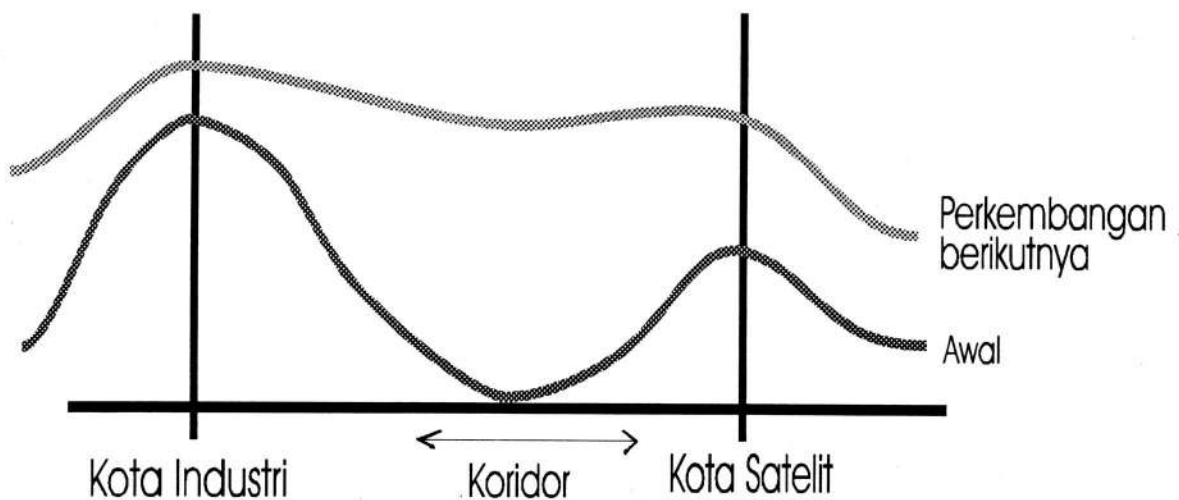
Diagram kota satelit

menunjukkan posisi geografis suburban tersebut terhadap pusatnya (inner city), yaitu lingkup kawasan yang lebih kecil yang dihubungkan oleh koridor sirkulasi dengan kota induknya tersebut.

Kota satelit muncul dilatarbelakanngi pertumbuhan kota induknya. Pertumbuhan kota besar umumnya diiringi pertambahan penduduk yang sangat pesat baik dari kelahirann maupun dari pendatang baru. Permasalahan yang timbul seiring pesatnya pertambahan penduduk itu sudah dapat dibayangkan seperti kesulitan air bersih, polusi udara, mahalnya lahan dan rumah tinggal dan lain-lain. Kota satelit diharapkan mampu menampung luapan dari kota induknya.

Permasalahan yang sering muncul dari fenomena kota satelit adalah terlalu besarnya nilai daya tarik seperti lapangan perkerjaan tanpa diikuti prasarana yang mamadai dan terlalu pendeknya koridor yang menghubungkan dengan kota induknya. Contoh kasus yang tampak adalah Kebayoran dan Jabotabek.

Sewaktu kota Kebayoran terbentuk, diharapkan perhatian tidak selalu tertuju ke Pusat jakarta. Koridor yang menghubungkan antara Kebayoran dengan pusat kota memang relatif jauh untuk ukuran transportasi waktu itu. Namun akibat perkembangan Jakarta yang relatif pesat, akkhirnya koridor yang menghubungkanya semakin hilang, dan menmyatulah kebayoran manggemukkan Jakarta.

Begitupula yang terjadi dengan Jabotabek yang sudah tampak gejala-gejala integrasinya. Hal ini dapat dilihat dari pembukaan-pembukaan lahan-lahan baru untuk pemukiman di sepanjang koridor Tangerang, Bogor dan Bekasi.

Penutup

Semua yang tertulis di atas barulah sebagian kecil dari fenomena-fenomena perluasan kota, dan tinjauan mengenai proses perluasan yang telah diungkapkan tersebut barulah dilihat secara horisontal. Perluasan kota secara vertikal sepeerti kecenderungan super-block, rumah susun dan sebagainya belumlah terbahas dalam tulisan singkat ini. ***

CATATAN AKHIR

1. Otto. M. Hadi, **Perencanaan Sosial dalam Pengembangan Kota , dalam Masyarakat** Jurnal Sosiologi, FISIP UI-Gramedia, Jakarta,1993, hal. 41.
2. Ibid.,
3. P.J.M.Nas, **Kota Dunia Ketiga**, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1984, hal. 24.
4. Saduran Makalah: **Makna Kerusuhan Los Angeles**, Francisia , E. Seda, Makalah Seminar dan Kongres Sosiologi Nasional, Ikatan Sosiologi Indonesia, Desember 1992.
5. Setiawan. B, Beberapa Catatan Peran Perencanaan Kota Dalam Pengentasan Kemiskinan, Makalah Diskusi Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, 1993.

KEPUSTAKAAN

Hall, Peter, 1992, *Urban of Regional Planning*, Routledge, London.

Nas. P.J.M., 1984, *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota*, Bhratara Karya, Jakarta

Otto M. Hadi, 1993, **Perencanaan Sosial Dalam Pengembangan Kota**, Masyarakat Jurnal Sosiologi.***
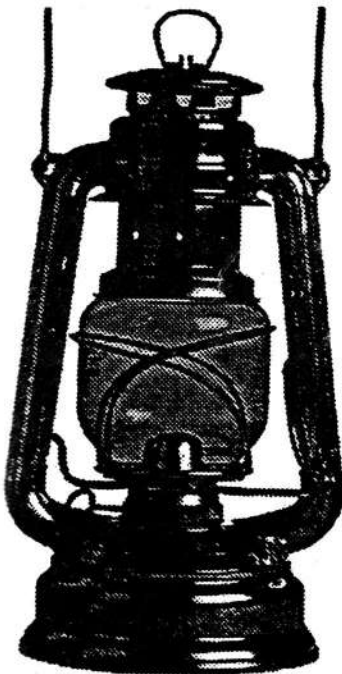
◆◆◆◆◆◆

Industrialisasi Dan Kecenderungan Kejahatan Masa Depan

Kejahatan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik. Akar kejahatan dan perilaku menyimpang dapat dilihat dari masalah struktural dalam konteks sosial ketimpangan kekuasaan, kemakmuran, distribusi kesempatan wilayah ekonomi. Rusaknya tatanan sosial ekonomi menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan. Dalam konteks Indonesia, fenomena industrialisasi dan hancurnya ekonomi pedesaan, bisa jadi menjadi akar persoalan kejahatan di masa datang. Gelombang urbanisasi, sebagai akibat macetnya ekonomi pedesaan, tidak daapt ditampung oleh sektor industri di kota, yang menyebabkan tingkat kompetisi memperebutkan pekerjaan. Situasi ini mengakibatkan rusaknya tatanan sosial, yang mendesak orang untuk memikirkan cara bertahan hidup, dan mendorong semakin banyaknya kejahatan.

Istimewa

Hendrianto,
adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pernah menjabat staf Litbang Majalah Mahasiswa Fakultas Hukum UGM MAHKAMAH.

Ketika kita membicarakan kejahatan, sebenarnya kita sedang membicarakan sebuah masalah yang sangat kompleks dari kehidupan umat manusia. Bagi orang orang primitif, kejahatan hampir hampir hanya berupa tidak melakukan praktek kultus, melanggar ritual tertentu, atau tidak melaksanakan tradisi nenek moyang. Seterusnya dengan timbulnya konsep hak milik, kejahatanpun pada hakekatnya berujud gangguan terhadap kepentingan pribadi tertentu.1) Pada intinya tidak ada metode tertentu untuk menentukan tipe kejahatan secara permanen. Mungkin kita bisa menyebutkan sejumlah kejahatan terkutuk sepanjang sejarah peradaban kita semisal, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain lain. Ukurannya kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu dan intensitas penekananya. Tetapi, bagaimana dengan krisis ekonomi yang disebabkan oleh manajemen negara yang salah urus, ini menyebabkan ribuan penduduk kelaparan dan pengangguran hebat, tidakkah ini kejahatan yang lebih biadab dari pembunuhan. Tidakkah itu sebuah kejahatan jikalau sang majikan mengeksploitir buruh yang ribuan jumlahnya. Memang tidak perlu disangsikan bahwa perkosaan atau pembunuhan adalah kejahatan. Tetapi apalah artinya kurang satu nyawa bagi masyarakat dibanding hancurnya sistem ekonomi domestik akibat APEC. Sementara itupun kejahatan seringkali berfungsi sebagai pembenaran elite penguasa untuk mempertahankan kekuasaan atau *privilese* mereka, sebelum tahun 1965 UU no. 11/PNPS/1963 dibuat untuk menjerat orang orang yang anti Manipol USDEK, tetapi setelah terjadi pergantian rezim, undang undang itu justru pada awalnya dipakai untuk menjerat para simpatisan Manipol USDEK.

Ironis lagi ketika kita mengetahui bahwa sebenarnya hukumlah yang menciptakan penjahat. Artinya hukum mencap sebuah tindakan tertentu sebagai tindak kejahatan dan membuat si pelakunya dikejar dan dijatuhi hukuman. Karena golongan yang

terkuasa atau kelompok kepentingan yang mempunyai kekuatan dapat memanipulasi pembuat dan pelaksana undang undang untuk kepentingan mereka, maka besar kemungkinan tindakan mereka yang merugikan masyarakat tidak dimasukkan ke dalam rumusan kejahatan. Akhirnya orang pun pertanyaan "mengapa suatu tindakan dirumuskan sebagai kejahatan sedangkan tindakan-tindakan yang lain tidak".

William J. Chambliss mengutarakan bahwa kejahatan adalah sebuah gejala hukum, politik, dan ekonomi serta sosial yang harus dipelajari dari banyak segi. Dia mengemukakan bahwa:"semakin banyak kita mempelajari kejahatan semakin banyak kita perlu untuk mengerti sebuah perbuatan dan orang orang yang dianggap sebagai kejahatan oleh perangkat hukum, juga memahami subkultur dan pola hidup orang orang yang terlibat kejahatan.[2]

Bahkan menurut Quinney kejahatan memiliki cakupan yang sangat luas yang bersumber pada dominasi ekonomi dan politik serta perbuatan perbuatan lain yang menimbulkan kerugian sosial.[3]

Dengan latar belakang diatas kita akan mencoba memahami kejahatan sebagai sebuah realitas sosial. Bahwa kita tidak bisa hanya membicarakan kejahatan dari tabel tabel statistik dan dengan pemahaman kejahatan yang ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sebagai sebuah realitas sosial kejahatan mempunyai bangunan analisa sendiri dan tidak segampang seperti rumusan KUHP.

> "PEMILIKAN PRIBADI MENYEBABKAN SEBAGIAN ORANG TIDAK MEMPUNYAI HAK ATAS SUATU BENDA ATAU HARTA, DAN DALAM KONTEKS KAPITALISME YANG EKSPLOITATIF BANYAK ORANG ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI PELUANG UNTUK MENCARI NAFKAH SEHINGGA MEREKA HARUS BERTAHAN HIDUP DENGAN MELAKUKAN PERILAKU PERILAKU MENYIMPANG SEPERTI MERAMPOK, MENCURI ATAU MELAKUKAN KEKERASAN."

ANATOMI KEJAHATAN

Lebih dari seabad yang lalu Karl Marx telah memberikan analisa tentang kejahatan mendahului teori kriminologi modern. Marx menempatkan kejahatan itu dalam konteks konflik yang lebih luas, antar kepentingan sebuah kelas yang dominan serta psikologinya, disatu pihak , dan gaya hidup serta kebutuhan kebutuhan hidup kaum miskin, di pihak lain.

Analisa Marx terhadap perkembangan hukum modern menempatkan ekonomilah sebagai faktor penyebab kejahatan. Gagasan awalnya dilandasi oleh konsep pemilikan pribadi, Marx mengambil contoh pada perdebatan di parlemen provinsi Rhein Jerman mengenai undang undang baru tentang pencurian kayu. Berdasarkan hak milik atas tanah, orang miskin tidak diperbolehkan menikmati tanah tersebut. Hak tradisional untuk memungut kayu bakar dan memetik buah bisa ditafsirkan sebagai kejahatan resmi karena dilakukan tanpa seijin pemilik tanah. Peraturan ini direstui oleh parlemen Rhein. Karena peraturan itu akan menguntungkan kelas mereka sendiri, karena dengan tampilnya kepemilikan atas tanah di tangan mereka, maka akan diperoleh provit yang lumayan jumlahnya. Tetapi sebenarnya kejahatan yang lebih keji adalah merampas hak hak tradisional dan sumber penghasilan dari kaum miskin. Dengan memberlakukan pemilikan pribadi, bukankah mereka sudah meniadakan pihak ketiga dari pemilikan.[4]

Selanjutnya Marx memberikan ilustrasi dengan pemagaran tanah secara paksa pada abad 18. Banyak tuan tanah yang melakukan pemagaran tanah untuk penggembalaan ternak sehingga merampas tanah para petani kecil. Setiap tahunnya kurang dari 50 are tanah yang dibajak untuk penggembalaan ternak. Hal inipun berlanjut pada monopoli atas tempat pertanian dan meningkatnya harga pangan dan menghasilkan depopulasi, pemagaran tanah itu telah menyebabkan banyak orang kehilangan sumber nafkahnya. Seterusnya para petani yang sudah biasa hidup dari hasil tanah sendiri harus memperoleh nafkah dengan jalan bekerja untuk orang lain.[5] Kondisi inilah yang menurut Marx menjadi penyebab naiknya angka kejahatan pencurian dan kekerasan pada masa itu. Sulitnya mencari nafkah membuat para petani miskin melakukan perampasan terhadap harta milik gereja yang kaya pada waktu itu. Selain itu banyak dari mereka yang pergi ke kota untuk mencari kerja dan harus mempertahakan hasil pendapatannya dengan kekerasan.

Pemilikan pribadi menyebabkan sebagian orang tidak mempunyai hak atas suatu benda atau harta, dan dalam konteks kapitalisme yang eksploitatif banyak orang orang yang tidak mempunyai peluang untuk mencari nafkah sehingga mereka harus bertahan hidup dengan melakukan perilaku -perilkau menyimpang seperti merampok, mencuri atau melakukan kekerasan. Memang harus diakui bahwa analisa Marx masih memilki banyak kelemahan, belum tentu semua orang yang tereksploitir akan melakukan kejahatan. Bahkan kondisi tertentu masih membuat sebagian orang tetap survive sehingga tidak melakukan perbuatan kejahatan.

Pendapat Marx diperjelas oleh konsep Richard Quinney tentang realitas sosial kejahatan. Dikatakannya : " Kejahatan adalah manifestasi yang mencolok dari konflik kelas dalam masyarakat. Formulasi hukum pidana, termasuk proses pembuatan di badan legislatif, aturan administratif dan putusan peradilan, memperbolehkan kelas penguasaa untuk melindungi kepentingannya sendiri. Kejahatan tergantung pada perjuangan kelas, sehingga definisi kejahatan yang didominasi kelas penguasa ekonomi bisa mengontrol perilaku orang orang kelas bawah".[6]

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa faktor sosial ekonomi dan politik tertentu boleh jadi mendorong tingginya angka kejahatan. Artinya bukan karena faktor ekonomi saja tingginya angka kejahatan, melainkan ekonomilah sumber kerusakan tatanan sosial politik yang ada sehingga melahirkan angka kejahatan yang tinggi. Sebagai contoh belum lama ini masyarakat Amerika mengutuk pembunuhan dua anak kecil oleh ibu kandungnya. Namun menyusul pemberitaan di media massa mengisahkan betap parahnya latar belakang sosial ekonomi sang ibu. Mungkin ia bersalah, tapi bukan tanpa sebab yang dapat dipilih atau ditolaknya. Ia adalah korban rusaknya tatanan sosial ekonomi di lingkungannya.[7]

> "KEJAHATAN DAN PERILAKU MENYIMPANG DIKAJI DARI MASALAH STRUKTURAL DALAM KONTEKS SOSIAL KETIMPANGAN KEKUASAAN, KEMAKMURAN, DISTRIBUSI KESEMPATAN, WILAYAH EKONOMI, SEHINGGA DENGAN PEMAHAMAN INI AKAN MENGHANTARKAN KITA PADA EKONOMI POLITIK KEJAHATAN (*A POLITICAL ECONOMY OF CRIME*)."

Untuk konteks Indonesia kita bisa melihat tingginya angka kejahatan pada awal tahun 80-an, yang diiringi dengan Operasi Penumpasan Kejahatan (baca "petrus"). Pada waktu itu harga minyak sedang jatuh dan situasi ekonomi sangat memburuk sehingga menyebabkan tatanan sosial yang kacau. Kondisi ini diperparah lagi oleh situasi politik pemilu 1982 yang cukup ramai, dan analisa lebih mendalam untuk para gali yang terbunuh bahwa mereka adalah jagoan jagoan desa yang tidak tertampung akibad rasionalisasi kepolisian pada waktu awal kemerdekaan.[8] Hal ini berarti rusaknya tatanan sosial ekonomi menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, karena sedikitnya pilihan yang tersedia untuk bisa bertahan hidup.

Dari uraian diatas kita bisa memahami akar kejahatan dan perilaku menyimpang dikaji dari masalah struktural dalam konteks sosial ketimpangan kekuasaan, kemakmuran, distribusi kesempatan, wilayah ekonomi. Sehingga dengan pemahaman ini akan menghantarkan kita pada ekonomi politik kejahatan (*a political economy of crime)*

Berikutnya muncul pertanyaan, bagaimanakah klasifikasi kejahatan untuk menganalisa sebuah realitas sosial kejahatan ? Untuk keperluan praktis kita dapat membagi kejahatan ke dalam beberapa jenis yaitu : *uperworld crime*, seperti korupsi, kejahatan korporasi dan white colar crime; kemudian kejahatan terorganisir yang bertujuan memonopoli kegiatan tertentu semisal mafia, sindikat; kemudian kejahatan biasa seperti pembunuhan, perkosaan, perampokan dan judi; kejahatan politik ; dan kejahatan profesional (menggunakan teknologi dan kemampuan teknis profesional)

Selanjutnya untuk tulisan ini akan dibahas masalah kejahatan biasa sebagai sebuah realitas sosial dengan pendekatan ekonomi politik kejahatan, untuk selanjutnya dianalisa pada kasus Indonesia.

KEJAHATAN PADA NEGARA INDUSTRI

Sebelum berbicara lebih banyak tentang realitas sosial kejahatan Indonesia kontemporer mungkin ada baiknya kita melihat pengalaman kejahatan di negara industri lain. Karena dengan belajar dari pengalaman orang lain kita akan lebih mengetahui keunikan sendiri dan bisa menggunakan pisau analisa ekonomi politik kejahatan.

Kalau kita melihat data perbandingan antara Amerika, Jerman, Inggris dan Jepang, terlihat bahwa Jepang memiliki prestasi sukses dalam memerangi kejahatan. Angka pembunuhan per 100.000 penduduk tahun 1992 adalah 1 untuk Jepang dan 9 untuk Amerika. Sedangkan untuk angka perampokan; per 100.000 penduduk, Amerika memiliki angka 260 sedang Jepang hanya 0,5; Inggris memperoleh 90 dan Jerman 80. Selama kurang lebih dua puluh tahun Amerika hanya berhasil memberantas tindak pembunuhan sebesar 75 %; kemudian Inggris 80 %, diatasnya ada Jerman dengan keberhasilan 95 % dan Jepang di peringkat teratas yang berhasil mengurangi angka pembunuhan sebesar 98 %. Angka kejahatan biasa di Jepang pada tahun 1970 sebesar 115 000, tetapi pada tahun 1990 angka itu turun menjadi sekitar 38.000.

Mungkin muncul pertanyaan besar di benak kita, mengapa sebagai sesama negara industri justru Amerika menghadapi kejahatan sebagai sebuah permasalahan besar, sedangkan Jepang justru berhasil

memerangi kejahatan. Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial ekonomi masing masing negara. Jepang, sebagai sebuah negara industri maju hanya memiliki sedikit penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, selain itu jumlah imigran miskin dari negara lain juga sulit ditemukan. Selama empat dekade terakhir ini, kemajuan ekonomi yang luar biasa telah membawa kemakmuran yang tinggi dan pola hidup disiplin diantara orang Jepang. Situasi ini makin terjaga dengan besarnya anggaran untuk Departemen Kepolisian sehingga banyak tenaga polisi yang bisa dikerahkan untuk menjaga keamanan para penduduk. Faktor faktor inilah yang membuat Jepang lebih aman dibanding negara industri lainnya.

Sementara situasi di Amerika sendiri memang lebih buruk. Pada setiap 1000 orang ditemukan pencurian sebanyak 53 kasus. Tentunya hal ini tidak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi Amerika yang buruk, defisit neraca perdagangan selama satu dekade terakhir membuat banyak anggaran sosial yang dipotong. Pada masa pemerintahan Reagan, terjadi pemotongan anggaran secara besar besaran untuk jaminan orang tua dan para pengangguran serta tuna wisma. Akibatnya ribuan gelandangan harus berjuang sendirian untuk hidup dan para pengangguran harus hidup dengan cara yang lebih keras. Hal ini sangat kontras dengan situasi di Jepang, dimana seorang pekerja berumur 50 tahun lulusan SMA dibayar sebesar 85 % dari gaji seorang sarjana lulusan terbaru.[10)]

Untuk konteks Asia Tenggara kita bisa melihat Thailand sebagai sebuah *Newly Industrial Countries* dalam menghadapi kejahatan. Angka pembunuhan pada tahun 1993 menurut catatan statistik sebesar 4.977; turun dari 6.117 pada tahun 1988. Tentunya hal ini belum cukup, karena Thailand sendiri masih menghadapi banyak masalah dengan prostitusi dan pejabat kepolisian yang korup, serta tingginya angka kejahatan biasa lain seperti pencurian dan perjudian. Pelajaran yang dapat diambil bahwa pertumbuhan ekonomi di Thailand telah memberikan banyak perubahan, tetapi aktivitas perdagangan telah menicptakan sengketa informal dalam kehidupan sehari-hari. Industrialisasi telah menyebabkan rusaknya tatanan sosial sehingga menurut Suttichai Yoon, hukum bisa menghadapi para pencopet, tetapi lingkungan para pencopet tidak bisa diatasi oleh hukum.[11)]

"IN UTERO" illustrated by Agung Arif Budiman

Satu hal yang harus disadari disini, bahwa kapitalisme memakan ongkos sosial yang lebih banyak. Bentuk kompensasi yang harus dibayar dari rusaknya tatanan sosial ekonomi akibad kapitalisme adalah kejahatan. Jepang sebagai aktor imperialis-kapitalis memang tidak perlu membayar ongkos sosial kejahatan. Hal itu mungkin karena perlakuan mereka terhadap rakyat berupa *human capitalism*, tetapi hal itu harus dilandasi dengan penghisapan atas negara negara dunia ketiga sehingga mereka bisa mencegah

penyakit sosial kejahatan. Tetapi mereka pun menghadapi penyakit sosial yang tidak kalah parahnya, semisal bunuh diri oleh kaum muda kota, bahaya gas beracun oleh sekte Aung Sin Rikyo. Harus diakui bahwa mereka tidak bisa lari dari hal hal tersebut. Bagaimana dengan Indonesia ?

INDONESIA DENGAN MASALAH KEJAHATANNYA

Satu tahun terakhir ini media nasional tidak sepi memberitakan kasus kasus kejahatan yang banyak mengundang simpati masyarakat. Sebut saja kasus pembantaian keluarga Herbin Hutagalung, pembantaian keluarga Rohadi, perkosaan terhadap keluarga Acan, pembantaian keluarga Sukardjo di Surabaya, dan sebagainya. Ada apa sebenarnya dengan kejahatan di Indonesia ?

Angka kejahatan yang dikeluarkan oleh Mabes Polri pada tahun 1995 memperlihatkan kecenderungan menurun. Semisal untuk daerah Metro Jaya turun dari 26.380 di tahun 1994 menjadi 22.755 di tahun 1995. Kemudian Jatim dari 24.628 turun menjadi 24.034 di tahun 1995. Selanjutnya untuk Jateng turun dari 20.214 menjadi 17.480.[12] . Tetapi statistik resmi ini perlu dipertanyakan lagi karena data resmi ini disusun berdasarkan laporan dari masyarakat dan temuan peristiwa kejahatan yang dihimpun aparat. Tentunya data ini sangat spekulatif, lihat saja survei yang dilakukan oleh Harian *Kompas*, dari 39% responden yang pernah melihat kejahatan hanya 15 % saja yang melapor pada polisi. Kemudian dari 49 % yang pernah menjadi korban, hanya 27% saja yang melapor.[13] Kemudian hasil survei *GATRA* menunjukkan dari 1000 responden hanya 99 yang pernah melapor adanya kejahatan. Dapat dikatakan banyak angka yang hilang, sehingga masih sulit kalau dikatakan Indonesia berhasil memberantas angka kejahatan.

Memang banyak operasi yang digelar petugas keamanan sepanjang tahun 1995. Sebut saja untuk daerah Metro Jaya, tercatat 12 jenis opersi pembersihan pernah digelar mulai dari Operasi Limbah sampai Operasi Lilin. Mungkin mereka bisa berbangga dengan turunnya angka statistik, tetapi apakah ada jaminan para preman yang telah *dikampkonsentrasikan* akan meninggalkan dunianya. Selama *basic human need* mereka belum terpenuhi tentunya mereka harus bertahan dengan modal yang mereka miliki. Kalau dikatakan penumpasan kejahatan berhasil, memang tidaklah sepenuhnya benar, karena masyarakat sudah hidup dibawah bayang bayang rasa takut. Survei *Kompas* sebagai sebuh representasi menunjukkan bahwa satu dari dua orang di Jakarta pernah menjadi korban kejahatan. Ini sudah menunjukkan tingkat keresahan yang tinggi dalam masyarakat.

Saat ini kita sudah memasuki Pelita VI, dan Indonesia dengan bangga bisa menunjukkan tingkat kemakmuran yang tinggi. Tentunya orang bisa mengatakan bahwa seharusnya tingkat kejahatan sudah menurun, tetapi harus dianalisa lagi, benarkah kemakmuran itu sudah dalam artian yang sebenarnya atau hanya ilusi belaka ?

Satu sebab utama yang patut menjadi perhatian kita adalah masalah industrialisasi. Dan hancurnya ekonomi pedesaan. Kita mulai saja dengan masalah industrialisasi; dari sekian banyak agenda permasalahan yang timbul dari industrialisasi nampaknya masalah relokasi dan strategi akumulasi intensif menarik untuk disimak. Perekonomian dunia sudah terbagi dalam dua kelompok besar, yakni negara yang menyediakan tenaga kerja murah dan negara negara yang memiliki struktur industri dengan teknologi canggih dan padat modal. Negara dengan buruh murahlah yang merupakan sasaran relokasi industri teknologi sederhana yang padat karya. Indonesia masuk dalam kategori ini, dan sudah sekian lama kita menikmati keuntungan komparatif seperti ini. Tetapi memasuki dekade 90-an situasi berubah. Kenaikan upah akibat tekanan dalam negri membuat keuntungan merosot, dan para investor pun melirik negara negara lain yang menyediakan tenaga kerja lebih murah semisal Bangladesh dan Vietnam. Selain itu ada persoalan besar lain yaitu perkembangan teknologi sendiri. Di negara negara industri maju saat ini sudah berkembang mesin mesin otomatis yang mampu menandingi tenaga buruh murah dengan produsktivitas yang jauh lebih tinggi dan risiko yang rendah. Akibatnya terjadi penarikan besar besaran terhadap industri perakitan dari negara negara dunia ketiga ke negara negara asalnya.

Tantangan kedua sudah menanti, dalam transisi sebagai negara industri muncul tuntutan untuk meningkatkan daya kompetitif dan meninggalkan keuntungan tenaga kerja murah. Indonesia tentunya sadar betul pengalaman negara negara Amerika Latin yang gagal menjadi *Newly Industrial Countries* padahal mereka memiliki buruh trampil. Karenanya Indonesia tidak bisa mengandalkan tenaga murah melainkan harus mampu menurunkan biaya produksi dengan jalan mengembangkan teknologi produksi, dan konsekuensinya akan terjadi pengurangan jumlah buruh. Tetapi strategi itu menghadapi banyak tantangan seperti patronase bisnis dan rendahnya daya beli masyarakat. Patronase bisnis tidak menimbulkan kemandirian dunia usaha dalam jangka waktu yang panjang sehingga sulit untuk menuju akumulasi intensif.[14] Kita bisa melihat pengalaman kebijakan Industrialisasi Orientasi Ekspor yang lagi lagi hanya mengandalkan tenaga kerja murah, dan tidak ditunjang oleh naiknya pendapatan riil tenaga kerja untuk menunjang ekspansi pasar domestik. Akibatnya ribuan buruh harus bekerja dalam standar fisik yang memprihatinkan dan harga menjadi tidak terkendali.[15]

Sebelum melangkah lebih jauh dalam menganalisa kejahatan, kembali kita melihat dulu analisa ekonomi pedesaan. Revolusi hijau yang dicanangkan sekian tahun yang lalu telah menjadi kuburan bagi para petani. Program itu telah menghasilkan petani petani

orjuis yang memiliki alat produksi dan menghancurkan sistem pertanian komunal yang padat karya. Akibatnya banyak petani penggarap yang kehilangan pekerjaan dan keluarga petani yang tidak memperoleh kesempatan kerja di desa. Keuntungan hanya diperoleh oleh para petani kaya. Seterusnya hal ini tidak ditunjang oleh meningkatnya nilai tukar petani, kenaikan harga dasar gabah dan beras tidaklah terlalu menggembirakan. Hal ini diperparah dengan menciutnya lahan pertanian setiap tahun, sehingga banyak petani yang kehilangan tanah dan harus berpindah ke sektor lain. Di samping itu industri pertanian diluar beras tidak berkembang dengan baik di Indonesia. Misalnya usaha unggas atau produk buah buahan, semua itu masih digarap dengan teknologi yang kuno dan sistem tradisional, sehingga produk kita kalah bersaing dengan produk produk luar negri.[16]

Apa kaitan semua masalah diatas dengan Kejahatan ? Jawabnya tidaklah sederhana. Hancurnya ekonomi pedesaan akan meningkatkan urbanisasi, karena mereka berusaha bertahan hidup dengan bekerja disektor lain. Gelombang urbanisasi dari desa memiliki harapan untuk bekerja di sektor industri perkotaan. Sektor industri sendiri menghadapi kendala besar seperti rendahnya pendapatan riil dan tingginya tingkat kompetisi dalam mencari lapangan kerja. Nuansa industrialisasi yang mencuat adalah trend akumulasi intensif yang kurang membutuhkan tenaga kerja murah, sehingga untuk jangka waktu kedepan kalau akumlasi intensif dijalankan, maka akan banyak tenaga buruh yang lepas dari sektor industri. Mungkin hal ini bisa dijawab dengan pembukaan lapangan kerja baru, tetapi usaha inipun kelihatannya tidak bisa diimbangi dengan naiknya pendapatan riil. Situasi ini akan menyebabkan semakin rusaknya tatanan sosial di Indoneisa, terutama kota kota industri. Rusaknya tatanan sosial ini akan semakin mendesak sekian ribu orang untuk memikirkan cara untuk bertahan hidup, dan dalam kondisi nilai tukar dan pendapatan riil yang rendah inilah akan semakin banyak timbul kejahatan biasa yang berhubungan dengan harta benda.

Tantangan terbesar adalah liberalisasi. Dengan diterimanya APEC dan GATT, maka kita akan semakin masuk dalam situasi ekonomi yang terpuruk. Lihat saja industri pertanian domestik yang harus bersaing dengan produk produk pertanian transnasional, dan perusahaan transnasional itu bisa berekspansi dengan lancar karena dia memiliki lisensi, Nanas Pak Suto dari Gunung Kidul harus bersaing dengan nanas Del Monte, dan untuk pasaran lokal lebih mengutamakan produk produk luar tersebut.[17] Kondisinya tidak akan lebih baik. Dalam artian liberalisasi tidak akan meningkatkan pendapatan riil dan kemampuan daya beli sehingga tetap akan semakin banyak penduduk yang hidup dalam standar minimun. Kembali tatanan sosial kita akan semakin rusak dan hal ini ikut mempersubur kejahatan.***

CATATAN

Paparan diatas diberikan agar kita jangan sampai salah memerangi penjahat dan bukan memerangi kejahatan. Sekian banyak operasi digelar oleh aparat keamana, tapi angka kejahatan terus konstan atau paling hanya turun sedikit. Memang disadari bahwa kejahatan tidak bisa dihapuskan dari muka bumi ini, dia sudah merupakan bagian tak terpisah dari peradaban manusia. Tetapi paling tidak dia masih bisa diatasi. Untuk ini hal yang mendesak bagi Indonesia jikalau ingin memerangi kejahatan adalah membenahi tatanan sosial ekonomi yang sudah rusak sejak sekian tahun yang lalu***

CATATAN AKHIR

1. Emile Durkheim, **"deux Lois de l'evolution penale" in:m l'Annee sociologique 4**, hal 86-87, terjemahan ini dikutip dari AAG Peters dan Koesriani Siswosoebroto, SH; *Buku* ***Teks Sosiologi Hukum I.***

2. William J. Chambliss, **Criminal Law in Action** halaman 2, seperti dikutip oleh Mulyana W. Kusumah dalam **Realitas Sosial Kejahatan,** *Prisma* No. 5/1982.

3. Richard Quinney, *Class, State and Crime* (New York, David Mc Kay)

4. Ringkasan dari tulisan Marx dalam surat kabar *Rheinische Zeitung* (MEW 1: 109-147), terjemahan ini diambil dari buku teks **Sosiologi Hukum I,** AAG Peters dan Koesriani SH, hal 204-205 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa faktor ekonomilah sebab utama tingginya tingkat kejahatan, dengan tidak mengabaikan faktor perilaku dan sosial lainnya; disarikan dari presentasi Prof. Sajtipto pada Seminar Polisi Negara dan Masyarakat di Hotel Sahid, Juli 1994.

5. *ibid* hal 226-228.

6. Richard Quinney, *Criminology: Analysis and Critique of Crime in United States* (Boston: Little Brown & Company, 1974)

7. Lihat Ariel Haryanto, **Acan Tidak Sendirian,** *Tiras* No. 29/Th. 1/17 Agustus 1995.

8. Lihat David Bourchier, **Law, Crime, State and Authority**; Arief Budiman **"State and Civil Society in Indonesia",** *Monash Paper* No. 22 tahun 1988

9. Data ini diambil dari *Majalah The Economist,* April 16th-22nd 1994, **The scret of Japan's safe streets.**

10. Disarikan dari **Fighting Crime in Japan,** *The economist,* 16th 1994.

11. Disarikan dari Thailand: **Playing By the Blues,** *Far Eastern Economic Review,* December, 11 1994.

12. Sumber *Gatra* No. 8 tahun II, 6 Januari 1996.

13. *Kompas* 29 Januari 1996, Diam Bukan Berarti Emas.

14. Lihat Alexander Irwan, *Patronase Bisnis dan Politik,* Yayasan SPES, Jakarta, 1994.

15. Periksa Suryadi A. Radajab, **Relokasi dan Akumulasi,** *Kompas* 23 Mei 1995.

16. Periksa hasil Diskusi Panel Ahli Ekonomi *Kompas,* 22 Desember 1995.

17. disarikan dari diskusi bulanan P3PK, bulan Mei 1994 oleh Loekman Sutrisno.***

◆◆◆◆◆
◆◆◆
◆

Dilema Psikoreligi Manusia Indonesia Modern Materialisme Simbol Dalam Masyarakat Tak Berkelamin

DUNIA SEKARANG TENGAH MENGIDAP PENYAKIT SOSIAL SERIUS YAKNI DEPRESI. MAKIN BANYAK REMAJA BUNUH DIRI, KENAKALAN REMAJA, PEMAKAIAN ALKOHOL, VANDALISME, DAN SEBAGAINYA. PENDEKNYA KEHIDUPAN YANG DISHARMONIS. KECENDERUNGAN INI JUGA TELAH MELANDA INDONESIA DENGAN KEMUNCULAN GENERASI MUDA KEHILANGAN IDENTITAS. JIKA ARAH TRANSFORMASI SOSIAL YANG DIALAMI OLEH MASYARAKAT INDONESIA TIDAK TERANTISIPASI DAN TETAP BERPOLA SEPERTI SEKARANG INI, MAKA WAJAH MASYARAKAT YANG AKAN TERPOTRET ADALAH SEGURAT MUKA TIDAK BERKELAMIN[1]. MASYARAKAT YANG TELAH KEHILANGAN DAYA TARIK, FRUSTASI DALAM KUNGKUNGAN FANTASI YANG TAK TERGAPAI, SERTA KEHILANGAN NAFSU TERHADAP SESAMA MASYARAKAT YANG LAIN DAN HIDUP DALAM KEPUASAN NARSISTIK BELAKA.

Dalam berbagai media massa, hampir setiap hari selalu ada pernyataan dari berbagai pihak mengenai ikhwal globalisasi. Tak ayal lagi, banyak bangsa sekarang ini tampaknya mulai berbenah diri seakan berebut masuk dalam barisan menuju pintu globalisasi tersebut, agar tak menjadi bangsa *underdog*. Sebagaimana dikatakan oleh Giddens (1990), globalisasi dengan basis utamanya teknologi memang selalu menjadi impian. Banyak orang di bumi menanti-nantikan abad 21 sebagai era globalisasi yang sering pula diagungkan sebagai paralelisme dari abad kemenangan teknologi. Bangsa-bangsa pun lantas berlomba-lomba mengokohkan diri dalam bentuk kekuatan gelombang ketiga yang oleh Toffler disebutkan akan menjadi kekuatan yang paling dahsyat, teknologi yang bukan lagi sekedar untuk produksi massal tetapi teknologi super mutakhir.
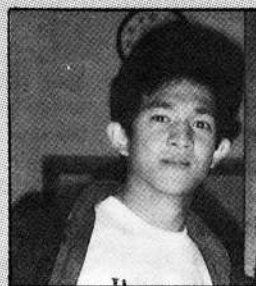
Anthony Dio Martin,
lahir di Pontianak, 21 Mei 1972.
Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada angkatan 1991. Pernah menjadi redaktur bidang humaniora Majalah BALAIRUNG UGM (1991-1992), Kalitbang pada media yang sama (1994-1995).
Tahun 1992-1994 menjabat Ketua Khusus Bidang Pengembangan Wawasan Ilmiah Senat Mahasiswa Psikologi Seluruh Indonesia.
Sejak tahun 1995 menjadi Staf Litbang Forum Kajian Sosial Humaniora (FKSH) Yogyakarta.

Hanya repotnya, tidak semua bangsa yang memiliki harapan tersebut memiliki basis material yang memadai. Bahkan, tidak setiap starata masyarakat siap menerima dengan kritis segala perubahan akibat adopsi teknologi berikut nilai-nilainya tersebut. Teknologisasi masyarakat yang membawa serta perangkat-perangkat nilai seperti kuantifikasi, abstraksi, rasionalitas dalam produksi dan distribusi telah menciptakan bentuk relasi yang sama sekali baru antar sesama manusia dan antara manusia dengan alamnya (Toynbee, 1978). Sebagai alat, teknologi ternyata memiliki tuntutan memassalkan, membuat baku dan yang fatal adalah merintis massifikasi,

dehumanisasi dan depersonalisasi. Teknologi berikut nilai-nilai "modernitas" sebagai variabel yang inheren tersebut akhirnya hanya ditelan mentah-mentah begitu saja.

Akibatnya, berbagai trend perilaku tekno-maladaprif mulai menampakkan diri dalam keseharian. Salah satunya berwujud hubungan antar pribadi yang makin fungsional. Pribadi dinilai berdasarkan sumbangsihnya dan nilai tukarnya (*exchange value*) bagi masyarakat. Komunikasi pun terjadi berdasarkan fungsi-fungsi antar pribadi tersebut. Barometer interaksi manusia yang satu terhadap yang lain didasarkan pada nilai yang berlaku di pasar sosial. Dan pada tingkat yang ekstrim, muncul semangat *homo homini mercator*, dimana manusia menjadi pedagang atas sesamanya.

Logika 'pedagang' ini selanjutnya menjadi amat mempengaruhi pola berpikir dan berperilaku manusia. Manusia merasa hanya berarti jika ia mempunyai nilai tukar bagi masyarakatnya. Nilai tukar tersebut diwujudkan dalam bentuk legitimasi yang sifatnya materialistik, "kamu punya apa dan saya punya apa?". Nilai kemanusiaan perlahan-lahan larut dalam terjemahan sebagai nilai kepemilikan atas materi. Manusia (*sense of self*) merasa berarti jika ia memiliki materi (*sense of having*).

Obsesi kepemilikan ini selanjutnya justru makin menjauhkan antar sesama manusia. Manusia justru makin teralienasi dalam dunia yang hendak digenggamnya.

Kritik Atas Modernisasi dan Nilai Penyertanya

Dalam bahasa sekarang, modernitas dengan kembarannya, teknologi, adalah keharusan. Keharusan itu lantas menjelma menjadi sebuah obsesi bagi manusia-manusia masa kini. Modernisasi telah menjelma menjadi tanda jaman, suatu *zeitgeist*. Modernitas dan dominasi teknologi telah meretas jalan ke arah kemajuan, kemudahan dan kepuasan yang semakin sukar dilukiskan. Namun di sisi lain teknologi ternyata mempunyai logika, kekuatan dan daya sihir sendiri. Dan sebagai konsekuensinya adalah berlututnya manusia di bawah kontrol ciptaannya tersebut.

Tak sulit untuk memahami mengapa teknologi modern dan -terutama nilai penyertanya- banyak dikritik dan dimaki habis-habisan. Sebab, apa yang kita lihat sekarang sebagai modernisasi, tak lain adalah suatu fragmentasi atas eksistensi sejati manusia, yang menggiring manusia dalam keragaman berpikir untuk menemukan kejayaan hidup dalam akumulasi kapital. Tatkala keberadaan manusia secara restriktif konotatif didefinisikan (oleh *Weltanschauung* industri kapitalistik di akhir abad ke-20 ini) sebagai "semata pemilikan ketrampilan teknis praktis" niscaya kategori *to have*, dalam definisi Erich Fromm, menjadi "pemilikan ketrampilan teknis belaka" yang lantas mekar dalam wawasan "Aku adalah (semata) ketrampilan teknis praktis yang aku miliki".

Selanjutnya, untuk mencermati kritik-kritik yang pernah dilontarkan terhadap modernisasi yang terlalu berorintasi kapitalistik, pertama-tama yang akan disajikan disini adalah kajian terhadap kritik "Marx Muda" terhadap industrialisasi berorientasi kapitalistik yang sering mangatasnamakan modernisasi.

"Marx Muda" dalam tulisan-tulisan awalnya menilai bahwa alienasi yang terjadi manusia modern terus berlangsung karena kerja, yang menjadi inti kemanusiaan, telah direduksi menjadi kerja paksa, kerja demi uang.

"...APA YANG KITA LIHAT SEKARANG SEBAGAI MODERNISASI, TAK LAIN ADALAH SUATU FRAGMENTASI ATAS EKSISTENSI SEJATI MANUSIA, YANG MENGGIRING MANUSIA DALAM KERAGAMAN BERPIKIR UNTUK MENEMUKAN KEJAYAAN HIDUP DALAM AKUMULASI KAPITAL."

Dalam beberapa hal pun, orang tidak perlu menjadi Marxis untuk menyetujui apa yang dituduhkan secara tajam dalam *Manifesto Komunis* tentang masyarakat baru. "Yang tertinggal pada hubungan manusia dengan manusia lainnya itu, tak lain adalah hanya kepentingan tanpa malu". Hubungan pribadi, ikatan kekeluargaan, kasih sayang, persahabatan, kerukunan bertetangga, semuanya dinodai atau dikorup oleh kepentingan komersial diri. Bagi Marx, inilah jalinan proses dehumanisasi hubungan antar manusia.

Selanjutnya bagi Marx, keterpisahan antara produksi dan konsumsi yang tajam sangat berpengaruh terhadap asumsi tentang kepribadian manusia. Tingkah laku kini terlihat sebagai serangkaian transaksi belaka. Ketimbang suatu masyarakat yang didasarkan pada perasahabatan, kekeluargaan, kesetiakawanan dan kesetiaan feodal, peradaban sekarang lebih didasarkan pada ikatan kontrak belaka.

Berkaitan dengan pemikiran Marx di atas, banyak yang kemudian mengkritik bahwa ia terlalu menyederhanakan masalah pada faktor ekonomi belaka, terlalu simplisistik dan dan monistik. Dan dalam perkembangan selanjutnya, jika Marx mencaci maki ekonomi kapitalisme sebagai sumber kehancuran umat manusia, maka Horkheimer, Adorno dan kawan-kawannya dari Mahzab Frankfurt mengarahkan kritiknya yang lebih tajam terhadap kebudayaan, khususnya kebudayaan yang teknokratis.

Manurut Teori Kritik Sosial yang mereka kembangkan, manusia sekarang adalah manusia yang

irrasional, yang merasa dirinya berkuasa atas alam, tetapi justru diperbudak oleh benda-benda konsumtif di luar dirinya. Bukan lagi kebutuhan manusia yang menciptakan produksi melainkan kebutuhan itu sendiri diciptakan, supaya produksi bisa laku. Akibatnya, manusia modern tidak lagi bekerja untuk menjamin kebutuhannya yang nyata dan selebihnya mengembangkan diri, melainkan keterpaksaan untuk semakin banyak memiliki benda-benda konsumsi (*konsumzwang*). Dalam hal ini, ego manusia telah sirna. Diganti oleh realitas. Ego manusia sekarang adalah ego yang mengikuti kondisi eksternalnya, yang dibentuk oleh iklan-iklan, oleh pamflet dan propaganda. Ego, yang ketika minder lantas diterjemahkan dengan memakai deodoran atau haus yang diterjemahkan dengan sekaleng Coca Cola.

Lebih jauh lagi, Habermas memakai pendekatan psikoanalisa Freud untuk membedah perilaku manusia modern. Modernitas yang sekarang, menurut Habermas adalah modernitas yang mengembalikan manusia dalam instink *pleasure principle* (instink untuk mencari kesenangan melulu). Manusia dibuai dalam kepuasan yang tak ada habis-habisnya, menghibur diri sepanjang hayat. Iklan-iklan dan materi yang menjanjikan kenikmatan, kepuasan dan kemudahan hidup menjadi sebuah obsesi. Dalam hal inilah, dampak terburuk mulai tampak seperti yang diungkapkan Giddens. Manusia mulai sulit membedakan mana benar dan salah. Isu paling laris dalam pikiran manusia modern hanyalah ia puas atau tidak, adil menurut dirinya atau tidak. Dan memang itulah sumber segala mala petaka umat manusia modern sekarang!

Ongkos Sosial Teknologi Tinggi

Dalam wacana sekitar dampak teknologi, agaknya bangsa Indonesia termasuk yang lalai, tidak kritis serta masa bodoh dengan kritik-kritik yang pernah dilontarkan para pengamat dan ilmuwan. Monster globalisasi yang telah dicurigai sejak dahulu, sekarang ini mulai memberikan ancamannya. Jikalau kalkulasi kemudian tak dihitung dari variabel ekonomi melulu, maka obsesi menjadi bangsa *hi-tech* yang kelewat kita cita-citakan untuk mampu bersaing di era globalisasi -misalnya dengan menyombongkan IPTN yang tak pernah balik modal atau PLTN yang sebenarnya tidak terlalu dikehendaki rakyat karna kita masih memiliki energi alternatif yang lebih aman-agaknya mulai harus dibayar dengan berbagai ongkos sosial yang tinggi.

Ongkos sosial pertama yang jelas harus dibayar adalah problematika difusi kultural serta homogenisasi kultur yang makin kentara. Sejak modernisasi dikembangkan dalam wujud kongkret teknologi maka berbagai nilai yang menyertainya pun diadopsi. Adopsi serta masuknya "ideologi" baru tersebut memang tidak melalui propoganda yang jor-joran atau indoktrinasi yang kaku, tapi justru lewat revolusi damai dalam gemerlap iklan, sihir program-program TV dan tawaran hidup yang "trendy".

Oleh masyarakat yang mengadopsi teknologi modern tersebut, terutama di masyarakat negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, modernitas ditakrifkan bukan berasal dari tatanan masyarakatnya, melainkan hasil cangkokan dari negara yang sudah maju. Ukuran nilai yang kemudian dipakai adalah ukuran nilai yang berlaku di negara-negara maju. Dan sebagai akibat derasnya laju teknologi adalah terjadinya dekonstruksi kebudayaan pada setiap lapisan masyarakat, yang sifatnya bukan *given* tetapi dibangun oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu. Sebagaimana dikatakan oleh Ignatio Ellacuria (1993), secara kritis ia menilai pengatasnamaan modernisasi yang *in concreto* untuk kepentingan penguasa telah turut melestarikan bahaya lain yakni budaya kemiskinan (*civilization of poverty*) pada masyarakat kelas bawah di berbagai negara berkembang, terutama di Amerika Latin.

Kembali pada akibat homogenisasi kultur tersebut, maka lahir pula generasi-generasi yang makin ambivalen. Mereka terobsesi dengan nilai-nilai yang universal sementara nilai-nilai tradisional mulai di-*counter* (atas nama modernisasi) dan dianggap *out of date*. Perbedaan ini telah melahirkan konflik budaya potensial dan gap nilai antar generasi berkepanjangan.

Sementara ini, sekarang ini kita menyaksikan jutaan manusia Indonesia, terutama generasi mudanya yang terdampar dalam keputusasaan, dan kebingungan identitasnya, meraba-raba mencari bayang-bayangnya sendiri, melahap tontonan film luar atau film-film nasional yang "murahan", sandiwara, sinetron soap opera impor kacangan, novel, buku-buku petunjuk murahan dan tak bermutu, mengkonsumsi XTC, dengan harapan dapat menemukan kembali identitas bangsa yang hilang. Korban-korbannya jatuh dalam kelompok-kelompok terapi pengobatan, mistik atau pun dalam penyimpangan-penyimpangan seksual yang angka statistiknya terus melonjak.

Di samping itu, masyarakat Indonesia yang cenderung tidak resignatif -tidak mampu menjaga jarak dengan ekspos teknologi yang bertubi-tubi- saat ini berada pula dalam persimpangan antara menerima kenyataan tentang adanya teknologi yang begitu memudahkan hidup dengan ketidakmampuan untuk mengolahnya. Bangsa Indonesia ibarat bangsa yang mendambakan perubahan tapi sekaligus mulai takut pada perubahan itu. Didorong oleh keinginan dan pikiran delusif menjadi "hebat", kita bahkan rela menjual apa saja untuk membayar mahal ongkos penciptaan image tersebut. Termasuk dengan segala ongkos sosial yang data-data konkretnya dengan mudah dapat kita baca dalam masyarakat kita sehari-hari, yakni data-data indikatif dari simtom-simtom masyarakat yang sakit (*insane community*).

Sakitnya masyarakat akibat modernisasi (dan tentunya juga akibat industrialisasi) bukan lagi suatu kebolehjadian, tetapi juga menjadi pengalaman yang sama di berbagai negara berkembang. Seperti yang

dihasilkan pada *145th Annual Meeting of The American Psychiatric Association* tahun 1992 yang mengangkat tema *Human Values and Biopsychosocial Intergration,* yang mencoba mengkaji proses dehumanisasi akibat industrialisasi. Bangsa kita pun saat ini rupanya terjerat dalam kompleksitas masalah kejiwaan sosial berat dengan ditandai dengan meningkatnya berbagai gejala *the agony of modernization* berupa : (1) buruknya jaminan sosial, (2) pengangguran, (3) meningkatnya kriminalitas secara kuantitatif dan kualitatif, (4) penyalahgunaan zat narkotika, zat additif dan alkohol, (5) kehamilan remaja, (6) prostitusi dan promoskuitas, (7) perjudian, (8) kenakalan remaja, (9) gangguan kejiwaan, (10) perkosaan, (11) bunuh diri, dll.

Rudnak, Time 1993
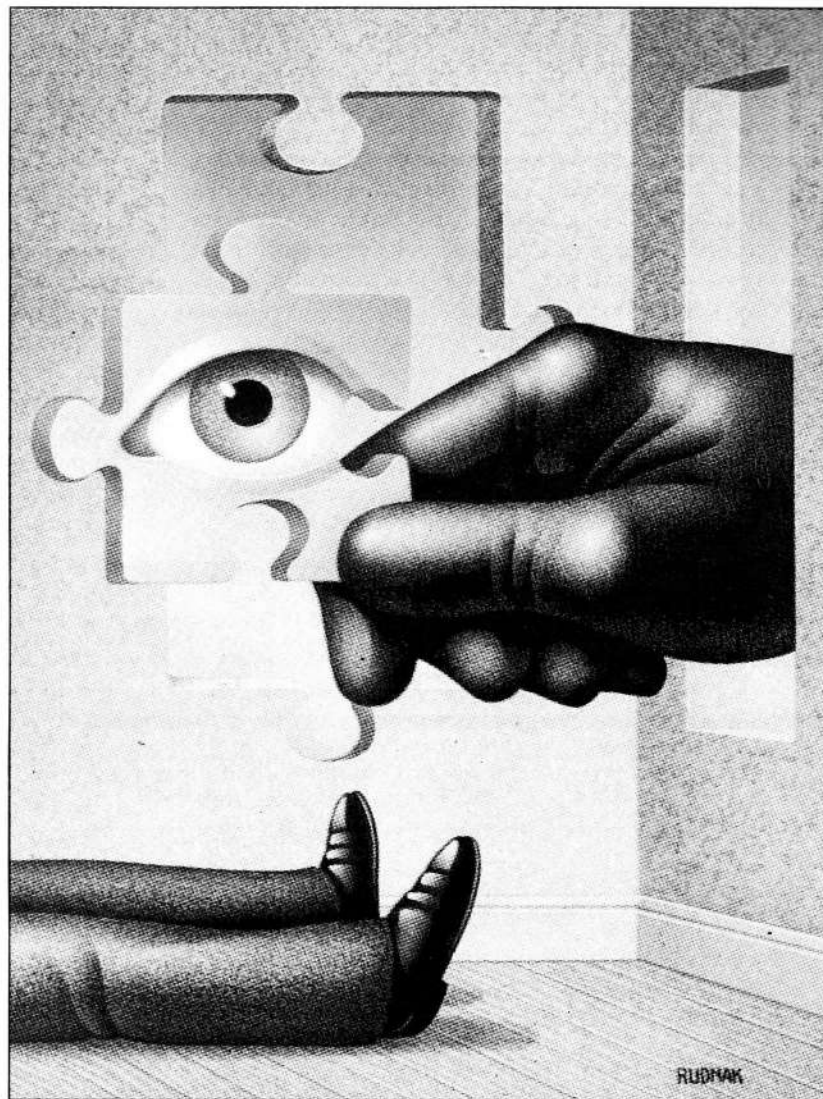
Sekilas Info : Masyarakat Yang Sakit

Mungkin menarik bagi kita untuk meneropong kondisi masyarakat kita yang memprihatinkan saat ini melalui data-data real.

Sebagai pembuka, kita menengok catatan koran Jawa Pos yang selama tiga tahun (1992-1995) mencoba mengidentifikasi 199 kasus bunuh diri yang terjadi di Jatim. Yang menarik dari data tersebut adalah adanya suatu pola pergeseran dari kecenderungan bunuh diri. Dahulu, kebanyakan *record* bunuh diri terjadi pada usia manula karena alasan kesepian dan stres yang tinggi. Namun, justru dari 199 kasus tersebut sebagian besar (51,3%) dilakukan oleh remaja usia 16-23 tahun, bahkan 7,6% dilakukan oleh anak-anak. Menariknya lagi, paling banyak bunuh diri dilakukan dengan alasan tidak mendapat pekerjaan. Alasan terakhir ini sebelumnya tidak akan berarti dalam masyarakat agraris-tradisional, tetapi dalam sistem yang kian kapitalistik di Indonesia seperti sekarang ini, terlihat betapa makin berharganya makna kerja sebagai syarat kebermaknaan hidup.

Selanjutnya, menarik pula menyimak data penelitian epidemiologik 1986 yang pernah dilakukan terhadap para pengunjung puskesmas-puskesmas di Jakarta terutama pada pasien berusia 5-15th. Ternyata sebagian besar mengalami gangguan psikologis atau psikosomatis dengan perincian: retardasi mental ringan 11,4%, retardasi mental sedang 0,9%, retardasi mental berat 0,2%, gangguan kecemasan 8,3%, problema orangtua-anak 6,4%, gangguan depresi 5,8%, gangguan tingkah laku 4,4%, kesulitan belajar 3%, gangguan psikosomatis 2,1%, enuerosis fungsi 41,3%. Pengalaman penyakit mental dalam usia sangat dini tersebut di atas boleh jadi mengindikasikan makin rentannya generasi-generasi muda sekarang terhadap berbagai stresor. Dengan mencermati bahwa sebagian besar problema psikis yang dialami di atas tidak disebabkan oleh disfungsi genetis maka diasumsikan kondisi eksternal 'yang ruwet' sedikit banyak telah memberikan andil terhadap simtom-simtom maladaptif tersebut.

Penelitian-penelitian pada remaja juga menunjukkan data yang tak kalah mencengangkan. Data dari penelitian Pusat Penelitian Kependudukan (1989) menunjukkan bahwa lebih dari 80% remaja mengetahui adanya teman yang berhubungan seksual di luar nikah. Ada juga yang sekitar 15% yang hamil di luar nikah. Sementara, penelitian kontroversial dari Danang Subowo, Yudha Wira Mustika dan Yunita Anggreini (1995) melaporkan 22,5% dari pelajar SLTA di daerah Madiun yang telah berpacaran hingga mencoba bersetubuh. Menariknya catatan penelitian ini adalah karena populasinya pada wilayah Madiun

yang sebenarnya belum termasuk kategori kota besar di Indonesia. Maka, tak mengherankan jika riset ataupun survei kehidupan seksualitas remaja di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Bandung, Yogya dan Surabaya senantiasa menunjukkan yang lebih mengagetkan.

Data lainnya adalah perolehan dana dari dunia prostitusi yang semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir ini rata-rata uang yang didapat dari bisnis seks di seluruh Indonesia bisa mencapai 500 milyar setiap tahun (dana ini hampir mencapai RAPBN 1996/1997 bidang pendidikan khusus untuk pembangunan SD Inpres seIndonesia). Celakanya, besarnya perolehan dana tersebut tidak disertai jaminan kesehatan para pekerja seksual komersil yang memadai. Hasil penelitian untuk thesis doktoral yang dilakukan di daerah lokalisasi Kramat Tunggak (1995) melaporkan sekitar 70% WTS yang praktek di sana jelas-jelas menderita penyakit GO, sebagian laginya menderita penyakit siphilis. Kondisi seperti ini jelas amat kondusif pula untuk menyebarkan virus HIV/AIDS yang amat mematikan itu. Sementara data tentang penderita penyakit HIV/AIDS makin meningkat secara signifikan di Indonesia. Data terakhir dari Depkes tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa kasus HIV/AIDS di Indonesia telah meningkat menjadi 312 kasus, dengan 60% penderitanya ternyata berusia 15-29 tahun.

Data lainnya lagi didapat dari dunia kriminalitas dan kejahatan dengan kekerasan di Indonesia. Hampir semua jenis kejahatan tersebut meningkat dengan signifikan dari tahun ke tahun. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Situasi Kejahatan Dengan Kekerasan

	1991	1992	1993	1994
1. Aniaya Berat	10.130	9.329	9.764	10.637
2. Curas	6.683	7.076	6.657	6.968
3. Perkosaan	1.341	1.356	1.195	1.462
4. Pembunuhan	1.607	1.492	1.438	1.808

Sumber : Direktorat Reserse Polri

Lebih menarik dari paparan data-data kriminalitas tersebut di atas adalah apa yang ada dibalik segala kriminalitas dan kekerasan tersebut. Penelitian kualitatif yang pernah dilakukan di LP Malang dan Pasuruan (1991) sedikit banyak menerangkan apa latar belakang tindak kejahatan yang belakangan ini terjadi. Ternyata, sebagian besar bukan dilatar belakangi oleh sifat kejahatan murni melainkan karena alasan-alasan sosial seperti cemburu atau karena "hanya" tersinggung (50 - 58,3%).

Besarnya tingkat kejahatan juga terungkap dari hasil polling bersampel besar yang dilakukan harian Kompas terhadap 1.002 penduduk berusia 18 tahun ke atas yang tinggal di daerah Jabotabek. Kesimpulannya juga dramatis, satu dari dua orang yang ditanyai pernah menjadi korban kejahatan. Tak mengherankan pula jika Jakarta lantas diberi urutan ke 81 dari 118 kota di seluruh dunia yang disurvei oleh *Corporate Resource Group Swiss* yang mengindikasinya makin tidak amannya Jakarta untuk membuka usaha.

Data lainnya lagi adalah peningkatan pemakaian pil XTC alias ectasy alias Inex di Tanah Air kita. Ectasy yang merupakan nama jalanan dari derivat amfetamin, *N, alphadimetyl-3, 4 -methylenedioxy-phenethylamine* (MDMA) yang membuat pengunanya *fly* dan euphoria, meski bersifat neurotoksit (meracuni syaraf hingga menjadi tidak peka), ternyata juga makin populer di kalangan generasi muda di Indonesia. Diduga, pemakai pil XTC di Indonesia saat ini mencapai 200 ribu orang lebih (melebihi jumlah pemakai di Belanda, negeri asal XTC yang hanya sekitar 25 ribu orang)

Generasi yang menghibur diri sampai mati, mungkin itulah kata-kata yang cocok untuk menjelaskan makna dari pemakaian pil-pil XTC, dan juga drugs lainnya seperti magadon, LSD, kokain dan alkohol yang angkanya terus melonjak dari waktu ke waktu di Tanah Air kita.

Boleh jadi, seiring dengan perkembangan waktu angka-angka tersebut akan terus meningkat, daripada kemungkinan menurun. Apalagi, jika analisa psikologis lebih mendalam terhadap mutu kehidupan ekternal (sosial) di negeri ini justru semakin menyimpulkan banyaknya kondisi sosial yang kian waktu kian membuat stres dan cemas. Manusia-manusia Indonesia kini makin banyak dihadapkan pada stresor sosial yang sulit terelakkan.

Stres Sosial Masyarakat Kita

Masyarakat Indonesia saat ini memang belum sampai pada tingkat hirarki kehidupan modern sebagaimana dialami oleh bangsa-bangsa maju yang berada dalam proses rasionalisasi dan sekularisasi yang semakin kentara. Namun, sejalan dengan

tuntutan dari dalam akibat norma-norma baru yang ditanamkan di mana-mana serta himpitan-himpitan sosial dari luar, resultannya termanifestasi dalam wujud makin tingginya stres yang harus ditanggung generasi Indonesia saat ini. Hidup menjadi makin berat, dan naga-naganya adalah mekarnya perilaku psiko-maladaptif yang pada dasarnya adalah usaha pelarian diri (*escapist behavior*) atau upaya melepaskan diri situasi lingkuangan yang membuat stres tersebut.

Dalam gambaran umum, berbagai situasi sosial yang sangat potensial memberikan sumbangan terhadap stres manusia Indonesia saat ini dapat dilihat dalam tabel.

Secara khusus, kondisi aparat penegak hukum yang lemah, akan dibahas dalam bagian tersendiri. Dalam bagian ini, beberapa stresor sosial yang akan dibahas disini adalah soal inflasi yang tinggi, kesenjangan upah, kesempatan kerja yang sedikit, retaknya hubungan kekerabatan serta ekspos iklan di media massa yang makin gencar, kreatif dan inovatif dari waktu ke waktu.

Tingginya tingkat inflasi di Indonesia dari waktu ke waktu, pada dasarnya merupakan cermin abnormalitas sosial sekaligus menjadi bagian rantai siklus penyebab stres sosial yang penting. Inflasi di Indonesia, pada tataran riilnya memang ditunjang oleh perilaku konsumtif yang sangat irrasional. Semenjak materi menjadi tolok ukur nilai keberhasilan seseorang, yang muncul adalah perilaku berlomba-lomba mengumpulkan materi. Pada level konsumsi ini, orang bahkan lantas berani membayar berapa saja bukan untuk mendapatkan barang, tapi lebih-lebih untuk memperoleh gengsi dan citra diri. Akibatnya, yang kita lihat adalah pola gaya hidup yang kelewat mewah pada diri para pejabat, para eksekutif atau para pengusaha.

Sementara di sisi yang lain, harus diakui sebagian rakyat justru banyak yang sengsara karena harga barang-barang yang semakin mahal. Di samping itu, masyarakat kelas bawah juga makin sulit untuk mengkonsumsi atau memperoleh barang-barang dengan "harga rakyat". Menjamurnya mal, dept store atau supermarket, secara signifikan memang menaikkan gengsi hidup namun mereka pun dengan kejam telah merebut barang-barang konsumsi rakyat serta mematikan pasaran-pasaran tradisional. Barang-barang konsumsi, pada akhirnya makin banyak yang lari ke mal dan supermarket daripada dijual di pasar-pasar biasa. Dengan kondisi, ini akhirnya masyarakat pun dipaksa dan digiring untuk menerima kehadiran mal-mal dan pasar modern tersebut.

Keadaan tersebut tidak akan muncul sebagai problematika sosial andaikan disertai daya beli masyarakat luas yang tinggi. Namun, kenyataan yang ada justru masyarakat kita sebagian besar berada dalam garis kemiskinan yang mengenaskan. Rata-rata menerima upah yang rendah, tapi dipaksa untuk membeli barang-barang yang harganya kian melambung. Akhirnya, masyarakat pun kebanyakan bersikap *hopeless* dengan situasi semacam ini.

Buntut-buntutnya adalah munculnya kecemburuan sosial yang tinggi. Atau banyak dari masyarakat kelas bawah yang lantas menempuh jalan pintas, mengambil risiko dalam perbuatan-perbuatan kriminalitas, dengan menjual dirinya di lokalisasi-lokalisasi, demi beberapa lembar rupiah atau bahkan lari dalam pemakaian alkohol atu perjudian dengan harapan agar lepas dari segala tuntutan hidup yang tinggi.

Situasi Kejahatan Dengan Kekerasan yang Bersifat Kejam dan Brutal

	1991	1992	1993
1. Aniaya Berat	1.308	1.200	1.428
2. Curas	20	38	48
3. Perkosaan	104	108	120
4. Pembunuhan	660	680	938

Sumber : Direktorat Reserse Polri

Situasi Sosial Yang sangat Potensial Memberikan Sumbangan Terhadap Stres Manusia Indonesia

1. Inflasi yang tinggi.
2. Upah yang rendah dan kesenjangan upah yang besar.
3. Kepastian hukum yang rendah.
4. Inkonsistensi sikap-tindakan para tokoh masyarakat dan pemimpin.
5. Aparat penegak hukum yang tak dapat diandalkan.
6. Kesempatan kerja yang sedikit.
7. Birokrasi yang panjang dan bertele-tele.
8. Pungli dimana-mana.
9. Pudarnya kepedulian antar tetangga, kerabat dan saudara.
10. Ekspose iklan yang bertubi-tubi.
11. Kriminalitas yang mengancam setiap saat.
12. Transportasi yang buruk dan jalanan yang macet.
13. Mahalnya ongkos pendidikan.
14. Tingginya biaya kesehatan.
15. Kesulitan mendapatkan tempat tinggal.
16. Kepadatan yang tinggi.

Tingginya stres sosial ditunjang pula dengan sulitnya memperoleh pekerjaan saat ini. Data resmi Depnaker memperkirakan hingga tahun 2010 jumlah pencari kerja berjumlah 125,71 juta orang sementara lapangan kerja yang tersedia hanya 117,14 juta. Besarnya jumlah angkatan kerja dibanding lapangan kerja yang tersedia, ditambah tuntutan kualitas pekerja yang semakin tinggi, membuat banyak pekerja usia produktif yang akan tersisih dan tak mendapatkan tempat kerja. Bagi penduduk produktif tersebut yang setiap harinya senantiasa ditanamkan norma-norma kapitalistik untuk "bermakna melalui kerja yang digeluti", kondisi menganggur menjadi stresor yang besar. Tak mengherankan jika banyak yang bahkan berani bunuh diri karena tak mendapat kerja, ataupun bahkan berani mencoba bekerja apa saja termasuk dalam kerja-kerja kotor.

Distribusi Belanja Iklan Tahun 1995 dan Perkiraan Tahun 1996 (dalam miliar rupiah)

Media	1995	1996
Televisi	1.638	2.351
Surat kabar	1.075	1.538
Majalah	211	291
Radio	170	190
Luar Ruang	230	300
Bioskop	11	12

Melejitnya norma-norma kapitalistik, seperti dicurigai Marx pada akhirnya juga membuat manusia kita sekarang makin merasa kekurangan waktu untuk orang lain, juga berakibat pada retaknya hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan bahkan persaudaraan pun berubah wujud menjadi hubungan yang sifatnya makin fungsional belaka. Interaksi terjadi hanya karena adanya proses saling membutuhkan. Selain itu, orang-orang tidak punya waktu untuk saling mengenal, saling menyapa, apalagi saling berbagi rasa.

Problematika pun muncul ketika orang-orang tersebut mulai kehilangan rasa percaya dan kehilangan teman atau saudara yang dapat menjadi tempat berbagi rasa serta dililit rasa sepi. Akhirnya, kita pun mencatat melonjaknya jumlah klien atau pasien yang berobat (konsultasi) ke psikologi, psikiater atau dokter dengan membawa beban-beban diri, dengan harapan hanya supaya ada telinga empati yang mau mendengarkan.

Kesulitan lain dan tuntutan kebutuhan yang besar juga dipacu dengan makin menjamurnya berbagai iklan saat ini. Iklan-iklan saat ini telah mampu menyihir dan secara hebat dapat memproduksi kebutuhan-kebutuhan manusia. Akibatnya, manusia sekarang makin sulit untuk membedakan apa yang sekedar ia butuhkan dengan apa yang sungguh-sungguh ia perlukan. Besarnya dana belanja iklan dapar dilihat pada tabel.

Jika ditotal, besarnya dana belanja iklan tersebut bahkan telah melewati anggaran dana RAPBN 1995/1996 untuk bidang pendidikan. Besarnya dana iklan tersebut, jelas eqivalen dengan makin seringnya masyarakat kita akan dibujuk dengan berbagai produk-produk komersil. Iklan-iklan tersebut akan senantiasa menciptakan kebutuhan baru, menawari gaya hidup serta kebutuhan konsumsi yang baru. Banyaknya pilihan dan kebutuhan yang ditawarkan, dengan sendirinya akan menjadi salah satu stresor penting dalam kehidupan masyarakat kita di masa-masa mendatang.

Hukum Lemah, Polisi Bobrok dan Masyarakat Brutal

Ada sebuah lelucon, "Apa yang pasti di Indonesia adalah ketidakpastian". Lelucon ini pada prinsipnya ingin mengejek segala ketidakpastian yang ada di segala sektor kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari ketidakpastian harga, ketidakpastian aturan, ketidakpastian logika hingga yang paling fatal adalah ketidakpastian hukum.

Hukum yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk aturan sebagai aturan, pada hakekatnya diperlukan untuk menata kehidupan masyarakat agar lebih tertib, aman dan terjaga. Namun, sejalan dengan makin menguatnya kekuasaan di seluruh wilayah republik ini, maka hukum pun seringkali dilangkahi. Akibatnya, yang lebih banyak tampak di negara kita adalah penginjak-injakan hukum oleh pemegang kuasa.

Masyarakat sadar, apa yang dianggap benar bahkan apa yang sudah diputuskan sekalipun oleh kekuasaan kehakiman tertinggi, dapat dianulir begitu saja dengan telepon dari seorang pejabat. Mereka sadar, bila seorang telah berhasil menjadi pejabat, maka hukum-hukum justru akan membentuk barisan pelindung, hingga menjadi sulit disentuh. Dan kalau pun hukuman diberikan, vonisnya tidak setimpal dengan apa yang dilakukan. Masyarakat Indonesia, jelas paham betul akan "hukum rimba" yang tengah berlangsung di setiap sisi kehidupan saat ini.

Dalam kondisi demikian, apa yang dapat masyarakat rasakan adalah ketidakpercayaan, *hopeless* dan tidak aman terhadap hukum. Ketidakpastian pada akhirnya menciptakan dampak psikologis berupa perasaan *insecure*, khawatir dan cemas jika harus berhadapan dengan masalah hukum. Mirip teori Hoffner, buntut-buntutnya masyarakat mengembangkan logika hukumnya sendiri. Lihatlah

apa yang dilakukan oleh masyarakat kita jika ada pencuri yang tertangkap basah, atau perilaku brutal masyarakat yang dapat menghancurkan seisi rumah seorang pemerkosa yang tertangkap atau yang lebih suka mencari cara"damai" jika harus berurusan dengan aparat hukum. Segala tindakan tersebut secara nyata terkatalis oleh rasa frustrasi, depresif dan ketidakyakinan bahwa hukum akan berjalan dengan cara yang fair. Kebrutalan atau agresi semacam itu yang kian berkembang saat ini, jelas-jelas dipandu oleh rasa frustrasi sosial yang besar, sebuah bentuk *frustration agression* (Gerungan, 1987).

Persoalan ketidakamanan hidup justru diperparah pula oleh para aparat kepolisian yang lebih banyak memberikan masalah ketimbang memecahkan masalah. Masyarakat Indonesia, bukannya tidak muak dengan perilaku sebagian besar polisi jalan raya yang sengaja mencari-cari kesalahan untuk menilang dan menarik uang damai. Kepolisian, yang seharusnya dapat diandalkan untuk menciptakan rasa aman, ternyata terkadang menjadi sumber stres sosial yang lebih besar. Seringnya penangkapan tanpa surat, atau pun pemukulan dan siksaan untuk membuat tersangka mengaku, menjadi masyarakat kita justru khawatir, takut, cemas sekaligus prihatin melihat kerja aparat kepolisian. Catatan-catatan pertikaian hukum yang dilansir majalah Forum Keadilan misalnya, senantiasa mengangkat tema polisi yang justru berseteru dengan rakyat. Buntut-buntutnya adalah rakyat yang dikalahkan haknya. Hal ini jelas memberikan dampak psikologis yang besar bagi rasa aman masyarakat kita.

Berbicara tentang aparat kepolisisan ini pula, adalah menarik untuk melihat data hasil penelitian tahun 1995 yang menungkapkan bahwa 41,2% polantas di Jakarta diperkirakan mengalami simtom-simtom kelainan psikologis.

Dengan segala kondisi di atas, hukum hanyalah sekadar alat pajangan, sebuah hasil perekayasaan sosial dan aturan-aturan hanyalah janji-janji surga, sementara aparat hukum tak dapat diandalkan. Akibatnya, masyarakat berusaha sebisa mungkin menghindari hukum. Lebih suka menyelesaikan sendiri persoalan mereka dengan cara-cara yang mereka sukai. Masyarakat sekarang akan lebih suka main suap, melanggar aturan jika memungkinkan atau berkelit dari hukum jika bisa. Dan yang paling gawat adalah makin maraknya perilaku brutal, ganas dan main hakim sendiri karena masyarakat tak lagi mengandalkan hukum.

Agama Modern dan Pelarian Masalah

Situasi perubahan sosial masyarakat Indonesia saat ini agaknya secara substansial telah mengurangi pula fungsi agama sebagai faktor pengendali dalam diri pemeluknya, kendatipun pada sebagian lain muncul gejala kehidupan beragama yamg semakin semarak. Agama pada masa postmo ini pun berubah fungsi sebagai sekadar alat legitimasi formal, sarana rekreasi rohani dan sarana mohon berkat agar lebih berhasil lagi mengejar prestasi dan kedudukan tinggi dalam mobilitas dan hirarki sosial di lingkungannya.

Dalam hal ini, agama dengan nilai-nilainya yang diharapkan dapat menjadi sarana *subculture* penanaman nilai dan pemekaran hati nurani kemanusiaan sejati manusia modern, turut diubah pula menjadi sebuah 'lembaga agama'. Agama pun lantas tidak lagi memberikan spiritualitas konkret untuk mengambil sikap, bertindak dan membuat keputusan menghadapi segala tawaran-tawaran pilihan yang disajikan kehidupan modern dengan perangkat nilainya. Dalam berbagai hal, agama menjadi pelarian positif, candu yang sehat, tempat rekreasi rohani, dimana orang mencari ketenangan supaya dapat lebih giat bekerja dan berproduksi lagi untuk mengumpulkan materi lebih banyak.

Dalam kondisi yang demikian, seperti dikhawatirkan oleh Griffin (1995) adalah berkembangnya materialisme ateistik. Dalam hal ini, manusia tidak berhenti menjadi religius tetapi menggantikan satu tujuan dasar religius dengan tujuan lain. Ini menjadi bahaya besar bagi agama-agama di masa mendatang. Kelihatan makin semarak, tapi sebenarnya keropos. Dan parahnya, agama juga tidak mampu menyembuhkan luka-luka sosial yang dihadapi manusia modern saat ini.

Trend Perilaku Akibat Stres Sosial

Semenjak agama, tidak lagi memberikan jawaban atas krisis diri manusia, maka pencarian dapat mengarah pada "Ilah-ilah" yang lain. Bagaimanapun, struktur psikis manusia mengharapkan adanya katarsis atas depresi dan stres sosial yang bertubi-tubi saat ini. Maka, yang kita temukan sebagai strategi *coping behavior* (perilaku untuk menganggulangi masalah) akibat frustrasi sosial yang dilakukan generasi kita sekarang, khususnya di Indonesia adalah dalam bentuk perilaku melawan (*fight*) dan pelarian (*withdrawl*), seperti yang diungkapkan Selye (1936).

Perilaku melawan muncul dalam bentuk agresi fisik dan verbal, tawuran, kerusuhan sosial dan etnis(*riot*), demonstrasi, coretan-coretan tembok, selebaran gelap, ketidakpatuhan sengaja pada peraturan (*civil disobedience*) serta perilaku main hakim sendiri.

Perilaku pelarian muncul dalam pemakaian obat-obat bius, ganja, kokain, XTC, hiburan-hiburan yang tidak sehat, video games, perjudian, sex dan prostitusi, pertahyulan, maraknya sekte-sekte keagamaan dan bahkan termasuk pula kelompok-kelompok doa yang menutup mata terhadap situasi sosial.

Kesimpulan

Keseluruhan tulisan ini akhirnya mungkin bernada minor dan pesimis. Dan memang begitulah fokus pilahan pandangan yang sengaja diambil dalam tulisan ini. Sengaja kritik-kritik atas budaya yang makin teknokratis dengan data-data pendukungnya disajikan disini untuk membuat kita makin waspada dan tidak lengah karena ketakjuban memandang gemerlap cahaya modernitas, yang disuapkan dari

waktu ke waktu. Penulis sama sekali tidak menolak kenyataan bahwa teknologi telah memajukan peradaban manusia dalam sebuah loncatan waktu yang maha dasyat.

Kita mengakui bahwa kita memang negara berkembang yang butuh berlari lebih kencang, tetapi logikanya tidak berarti untuk mengejar ketertinggalan tersebut adalah dengan rakus membeli segala teknologi berbau "modern" lantas dibayar dengan ongkos-ongkos sosial yang kelak harus ditanggung oleh generasi anak-cucu kita kelak. Sebagai catatan akhir, ada baiknya merenungkan kembali kata-kata dari Mahatma Gandhi tentang *Man and Machine* (1869-1948), "Alat-alat mesin jangan sampai meperlemah otot manusia, otot bangsa. ...Dan, keberatan saya yang pokok terhadap mesin ialah karena dengan mesin itulah, memungkinkan manusia satu menindas manusia yang lain". (***)

Catatan Akhir

1.Istilah **Masyarakat Tak Berkelamin** populer dipakai dalam berbagai kajian budaya sejak diskusi *Kompas*, 27 September 1995 bertema **Agenda Persoalan Budaya Pasca-50 Tahun Indonesia Merdeka** .

2.Anthony Giddens, *The Coneqduences of Modernity*, Stamford, California, Stanford University Press, 1990.

3. Alvin Toffler, *Gelombang Ketiga*, Jakarta, PT Pantja Simpati, 1988.

4.Mahasarjana sejarah, Arnold Toynbee (1978) dalam pidatonya di muka BBC telah mengingatkan bahwa teknologi tak pernah netral.

5. Paul Tillich, **The Person in A Technical The Revolt Against Depersonalization in the Modern Era** dalam H.M. Ruitenbeek, *Varietis of Modern Society Theory* (New York, S.P. Dutton & Co. Inc., 1963).

6. Djatmiko, **Modernisasi dan Konsekuensi Psikologi**, Makalah 17 Maret 1988.

7. Limas Sutanto, dalam *Kompas*, 29 Juni 1995.

8. Alvin Toffler, *Gelombang Ketiga*, Jakarta, PT Pantja Simpati, 1988.

9. Alvin Toffler, op cit.

10. Bakaruddin R Ahmad, Jahja Muhaimin dan Mochtar Mas'oed, *Marx's Thingking of Alienation: History, Method and Concept*, UGM, Yogyakarta, 1992.

11. Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, **Jakarta**, Gramedia 1983.

12. Sindhunata, op cit.

13. **Jay Martin** , *Habermas and Modernity*, Cambridge, Polity Press,1985.

14. Lihat **Ongkos Sosial biaya hidup modern** , *Kompas*, 6 Desember 1995.

15. Jack Solomon, *The Sign of Time*, Los Angeles, Jeremy P, Tarcher, inc.,1988.

16. Ignatio Ellacuria, **Utopia and Prophecy in Latin Amerika** dalam *Mysterium Liberiotionis : Fundamental Concepts of Liberation Theology*, New York, Orbis Books, 1993.

17. *Jawa Pos*, 9Januari 1996.

18. Inu Wicaksqana, dalam *Kedaulatan Rakyat*, 10 Oktober 1994.

19. Faturochman, dalam *Kedaulatan Rakyat*, 18 Desember 1989.

20. Ketiganya adalah pelajar SMAN I Madiun yang menjadikan obyek tersebut sebagai bahan penelitian dalam rangka lomba karya tulis ailmiah tingkat SLTA se-Jatim. Tantanga terutama datang dari kalangan pejabat Madiun.

21. Penulis mengadakan penelitian seksualitas pada mahasiswa Jawa dan Bali (1992) yang hasilnya dimuat dalam majalah *Balairung* bertema '**Seks Mahasiswa: Wanita juga Hot**'. Data-data dari jawaban responden menunjukkan bahwa mahasiswa Bali berkecenderungan lebih permisf dan toleran pada gaya kehidupan seks bebas Peneliti melihat faktor pariwisata dan turisme sebagai faktor penting pendorong permisivitas tersebut.

22. Data dari sebuah LSM perempuan, *Kompas*, 23 Juli 1995.

23.Tabloid Masa Depan, *Media Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi berkala 1995/96 no.9 tahun XII.

24. *Kompas*, 23 Juli 1995.

25. *Kompas*, 23 Juli 1995.

26. Data direktorat Reserse Polri, *Kompas*, 26 Oktober 1995.

27. Penelitian skripsi dari Rubin Masruchin 1992, di LP Malang dan Pasuruan.

28. *Kompas*, 29 Januari 1996.

29. *Majalah Forum Keadilan*, no.1 Tahun V, 22 April 1996.

30. Martin E.P. Seligman dalam bukunya, **Learned Optimism**, New York, Alfred A. Knopf. Inc, 1991, mengatakan proses depresi terhadap kondisi eksternal yang terus-menerus , sementara seseorang tidak mampu berbuat apa-apa akan mengakibatkan suatu keadaan dimana orang jadi marah , jengkel tapi tak berdaya, hoplessness.

31. *Kompas*, 29 Agustus 1995.

32. Data diambil dari *Cakram*, Majalah perilklanan, kehumasan dan komunikasi bisnis, edisi Maret 1996.

33. Peter Berger dan Richard John Neu haus, **Memberi wewenang Kepada Rakyat** dalam *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 1988.

34.Eric Hoffnery, *The True Bilievery*, New York, Harper & Row Publishers, Inc., 1951.

35.**Gerungan** , *Psikologi Sosial*, Bandung, PT. Eresco, 1991.

36. *Kompas* 23 Januari 1996.

37. Haeder Nashir, **Fenomena Manusia Modern di Jawa Tengah, Kegagalan Makna Hidup** dalam *Kedaulatan Rakyat*, 5 Januari 1996.

38. Dafid Ray Griffin, **Tuhan dan Agama dalam dunia Dunia Post Modern** , esei dalam *Teologi Postmodern* ",Terjemahan , State University of New York Press, 1993.

39. Leo Laba Lajar, OFM, **Sekularisasi da Sekularisme : Autonomi Terhadap Allah?** dalam *Iman dan Ilmu : Refleksi Iman atas Masalah-Masalah Aktual*, Yogyakarta, Kanisius, 1992.

40. Menurut Dafid Ray Griffin, 1995, tentang *Teologi Postmodern*, dalam materialisma ateistik maka materialah yang dianggap menjadi kenyataan dasar alam semesta. Dalam kenyataan ini, Darwinisme Sosial "*Survival of the fittest*" diterima sebagai satu-satunya etika.

41. Bahwa praktek keagamaan lantas hanya merupakan candu bagi masyarakat, seperti diungkapkan Marx , memang keliru dalam pandangan distingsi. ***

Masa Depan Keanekaragaman Hayati Indonesia: Goliath Lawan Daud

MASA DEPAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA LAKSANA GOLIATH LAWAN DAUD. INDONESIA YANG BERMODAL BIODIVERSITAS LAKSANA TUBUH GOLIATH, SEOLAH SEDANG MENGHADAPI NEGARA MAJU DENGAN KERAGAMAN HAYATI SEKECIL DAUD. GOLIATH YANG LAMBAN BELUM BERSIAP UNTUK MENGHADAPI DAUD YANG GESIT, BERTAMENGKAN HAK PATEN DAN BERSENJATAKAN KETAPEL TEKNOLOGI TINGGI. KURANGNYA TEKNOLOGI UNTUK MEMANFAATKAN KERAGAMAN HAYATI INDONESIA, DITAMBAH LEMAHNYA PERANGKAT HUKUM PENUNJANG MENYEBABKAN POTENSI BESAR DI 'KEBUN SENDIRI' DISAMBAR NEGARA LAIN YANG LEBIH AGRESIF.

Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah istilah yang didefinisikan sebagai segala bentuk kehidupan di muka bumi beserta pola-pola hubungan yang dibentuknya. Definisi yang sangat luas ini dapat dibagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil yaitu keragaman ekosistem, keragaman jenis (spesies), dan keragaman intra spesies (genetik, varietas). Dengan demikian lingkup pembicaraan biodiversitas mencakup segala bentuk kehidupan, mulai dari unsur genetik dalam inti sel makhluk hidup sampai ekosistem yang menampung ribuan spesies flora dan fauna, termasuk ratusan ribu interaksi antar spesies yang terjadi di dalamnya.

Rama Ardana,
Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan 1991. Pernah menjabat Pemimpin Redaksi Majalah Mahasiswa Kehutanan Sylva Indonesia.

Berapa banyakkah bentuk kehidupan yang terkandung dalam kata 'biodiversitas' itu? Tidak ada yang tahu persis[1]. Tetapi justru ketidaktahuan inilah yang menjadi alasan utama perlindungan biodiversitas.

Ketergantungan manusia akan sumber daya alam hayati alamiah maupun buatan[2] banyak bergantung oleh jenis-jenis liar yang baru dikenali dan dipelajari sifat-sifat serta manfaatnya. Perbaikan kualitas dan kuantitas panen, pencarian bibit unggul yang tahan hama, sedikit memerlukan air dan pupuk memerlukan persilangan dengan jenis-jenis yang belum didomestikasi. Belum lagi pencarian sumber pangan baru yang selama ini 90% sumbernya dipenuhi hanya oleh 30 spesies. Para ilmuwan percaya bahwa sekitar 80.000 jenis tumbuhan dunia dapat dimakan.

Sementara itu, jauh di tengah rimba raya tropika Indonesia menanti ratusan ribu spesies yang belum pernah dikenali sebelumnya, apalagi dipelajari sifat-sifat fisiologis, maupun genetiknya untuk kemudian dipetik manfaatnya.

NILAI KEKAYAAN BIODIVERSITAS INDONESIA

Indonesia termasuk negara yang beruntung dalam hal biodiversitas, karena sekitar seperenam dari seluruh spesies dunia (rincian lihat tabel I) terdapat di negara kita-yang luasnya hanya 1,3% bumi. Bentangan wilayah yang meliputi wilayah Asia dan Australia, keluasan laut dan hutan tropika, variasi geografik dan iklimnya memberikan rumah yang subur bagi berbagai jenis tumbuhan maupun hewan. Yang menjadi masalah adalah seberapa besar potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan bijaksana dan lestari untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Potensi yang luar biasa ini masih menghadapi terlalu banyak hambatan. Sekalipun biodiversitas telah dikenali, dipelajari serta dimanfaatkan selama ribuan tahun oleh penduduk pribumi Indonesia, kesadaran

Tabel 1.
Perkiraan jumlah spesies dalam kelas di dunia Indonesia

Kelas	Dunia	Indonesia	%
Mamalia	40.000	3.000	7,5
Unggas	8.900	1.500	16,9
Rreptilia	8.000	2.000	25
Amfibia	6.000	1.000	16,7
Ikan	38.000	8.500	22,4
Mollusca	150.000	20.000	13,3
Serangga	125.000	250.000	20
Tumb berbunga	30.000	25.000	8,33
Tumb paku	13.000	1.250	9,62
Lichen(lumut kerak)	16.000	1.500	9,38
Alga	21.000	1.800	8,57
Jamur(fungi)	100.000	12.000	12
Bakteri(cyanophyta)	2.700	300	11,1
Total	**1.953.600**	**327.850**	**16,8**

Sumber: Sastrapradjda dalam Soerjani (1994)

akan pentingnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara luas baru dimuali empat tahun yang lalu. Itupun masih kalah perhatian dengan usaha memenuhi pasok kayu dan mempertahankan swasembada pangan, yang dimuali justru dengan membuka satu juta hektar hutan tropika kita- habitat sebagian besar biodiversitas Indonesia.

Karena luasnya lingkup pembicaraan biodiversitas, tulisan ini membatasi lingkupnya pada beberapa bidang yang menonjol, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan, dan hukum. Pada kesemua bidang itu sumber daya manusia-dan bukannya kekayaan biodiversitas-adalah kuncinya.

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Upaya pemanfaatan (*use*) keanekaragaman hayati dimulai dengan usaha perlindungan (*save*) dan penelitian (*study*) menurut Strategi Global Biodiversitas yang dicanagkan KTT Bumi di Rio de Jeneiro. Ilmu pengetahuan dan teknologi baik yang modern maupun tradisional adalah tulang punggungnya.

Di kedua jenis iptek ini, Indonesia kedodoran. Ilmu pengetahuan modern dan teknologi kita masih kalah jauh dari negara maju yang telah memanfaatkan biodiversitas dari segala penjuru bumi tanpa harus memiliki dan merawatnya sendiri.

Fasilitas iptek yang kita miliki masih sangat terbatas, dan belum terjalin dalam satu jaringan kerja (*network*) yang padu. sampai sekarang di Indonesia belum tersedia pusat data, dan pusat penelitian biodiversitas untuk merangkum serpih-serpih data yang tersebar di banyak lembaga.

Ketidakpaduan badan-badan tersebut masih ditambah dengan keterbatasan dana penelitian karena pemodal di Indonesia tidak terlalu tertarik membiayai penelitian, dan eksplorasi yang tidak dapat memberikan keuntungan ekonomik dalam jangka waktu pendek.

Terlepas dari ketiadaan pusat data dan dana, Indonesia sangat kekurangan tenaga peneliti. Padahal sekitar 4200 ahli taksonomi diperlukan [3] untuk menginventarisasi seluruh spesies saja, belum penelitian lanjutan sampai pada tahap pemanfaatan yang lestari.

Keterbatasan tenaga peneliti di Indonesia disebabkan beberapa faktor. Rendahnya kesempatan pendidikan tinggi, dan tidak tersedianya imbalan yang menarik mengakibatkan rendahnya minat menjadi peneliti ekosistem serta keragaman hayatinya, dan kurangnya apresiasi terhadap pelestarian biosfer. Bila dirunut, semua faktor tersebut merujuk pada minimnya psersentasi anggaran pendidikan dan riset pada Anggaran Pendapatan belanja Negara kita.

Hal lain yang mengancam kelestarian sumber iptek keragaman hayati ialah hilangnya 'taman bermain' bagi para peneliti tadi. Penebangan hutan yang meninggalkan kerusakan adalah salah satu sebabnya. Menurut WWF(*World Wide Fund for Nature*) Indonesia telah kehilangan hampir separuh habitat hidupanliarnya[4].

Nasib yang sama dialami penduduk asli (*indigenous people*). Pemilik pengetahuan tradisional dan kearifan tersebut juga kehilangan 'gelanggangnya'. Karena bergantung hanya pada satu-satunya ekosistem yang mereka akrabi, penduduk asli sangat mengenal spesies-spesies yang berguna untuk konsumsi pangan, obat, dan perilakunya dalam ekosistem. Kearifan mereka dalam menghormati alam, mengolah lahan, dan menjaga keseimbangan ekosistem merupakan aset yang berharga dalam upaya pelestarian. Sistem bercocok tanam yang mereka kembangkan betul-betul yang paling cocok setelah pengalaman mengajarkan kepada mereka selama ribuan tahun melalui petuah turun-temurun.

Pengetahuan ini belum giat digali, dan dipelajari secara ilmiah, bahkan menginventarisasinyapun

Tabel 2

Fungsi dan potensi ekosistem hutan dengan keragaman biotiknya

Ekologi	Pemanfaatan Langsung	Industri	Pangan	Lain-lain estetika
Keseimbagan suhu, iklim biota. Pelestarian flora dan fauna alamiah. Perlndungan daerah tangkapan air. Pengaontrol erosi. Sumber cadangan air. Penyerap CO_2 dan gas rumah kasa. Penghasil O_2 dan membersihkan udara.	Makanan yang langsung dikonsumsi(perburuan dan pemanfaatan subsistem lainya) Bahan baku obat-obatan. Bahan baku arang. Konstruksi kayu. Bahan baku untuk tenun dan kain(serat dan ulat sutra) Pemeliharaan lebah madu.	Kayu Farmasi Kertas penghasil getah (karet, nyatoh, jelutung, dll) Penghasil residu (methol, terpentin, dll) Minyak nabati(cengkeh adas, kayu putih, dll) Sumber plasma nutfah bagi industri bioteknologi.	Sumber bahan baku pokok pangan. Sumber protein nabati/ hewani(darat dan laut) Pangan alternatif. Bank plasma nutfah, cadangan untuk persilangan bibit unggul.	Rekreasi Spiritual Kepecinta alaman Sejarah Sosial budaya Ketahanan nasional

Sumber: **Myers dalam Satari ,1994.**

belum. Padahal jumlah suku pedalaman hutan ini, sejalan dengan pesatnya pembangunan di pedalaman hutan, kian menurun. Kepunahan mereka membawa serta ilmu pengetahuan yang berharga bagi umat manusia.

Lambatnya proses transfer iptek dari negara maju ke negara berkembang ditambah dengan kepolosan dalam dunia perdagangan telah membenamkan penduduk asli ke dalam kemiskinan sementara negara maju berpesta pora dalam bisnis biodiversitas.

Sebagai contoh sukushuar di Equador dan Peru yang telah memanfaatkan kemanjuran kina dan kirare selama ratusan tahun tidak menerima satu sen pun, setelah kemudian negara maju mengenali khasiatnya dan menghasilkan keuntungan, 43 juta dollar AS dihasilkan tiap tahun.

Kecurian plasma nutfah, baik untuk obat-obatan maupun perbaikan tanaman pertanian, sudah banyak dialami negeri kita. Yang paling mudah diingat adalah segala jenis buah dan bunga 'bertitel' Bangkok yang kualitasnya unggul, dan lebih disukai konsumen. Sebagian besar plasma nutfah untuk persilangannya berasal dari negeri kita. Sekarang giliran perusahaan-perusahaan Jepang mulai mengumpulkan jamu-jamuan dari seluruh Asia, suatu pertanda yang perlu diwaspadai, mengingat kurang maraknya penelitian untuk mengungkap ekstrak kimiawi dalam obat-obatan tradisonal.

Indonesia belum menggiatkan penelitian bidang kimia, farmakologi, toksikologi, dan ilmu terkait lainnya untuk mengembangkan fitofarmaka, dari pengetahuan turun-temurun. Padahal fitofarmaka adalah salah satu upaya pengintegrasian obat tradisional dan obat modern. Beralihnya masyarakat maju kembali ke alam (*back to nature*) adalah peluang yang bisa dimanfaatkan. Apalagi dengan kelebihan fitofarmaka sebagai obat alternatif dari penggunaan bahan kimia yang memiliki efek samping tinggi.

PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Sampai sekarang pemanfatan biodiversitas terbatas pada spesies yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, dan lebih terfokus pada tumbuh-tumbuhan, belum pada hewan, fungi, mikrorganisme dan jasad renik lainnya.

Peran hewan, mikroorganisme, dan fungi tidak sedikit, terutama di bidang peternakan, perikanan, dan pertanian. Jamur mikoriza belum dimanfaatkan dan dibudidayakan untuk membantu tanaman menyerap mineral dan unsur hara dari tanah. Mikroba, yang berperana sangat penting dalam dunia rekayasa genetika karena kemampuannya memotong, menyambung, dan menukangi gen (DNA: Deoxiribo Nucleic Acid), belum juga dimanfaatkan dalam skala besar, lagi-lagi karena tidak siapnya infrastruktur penelitian.

Pemanfatan yang terfokus pada tumbuh-tumbuhan dapat dilihat pada bidang pertanian untuk mempertahankan kebanggaan swasembada pangan, dan kehutanan untuk mengejar devisa dari ekspor non migas. Sektor kehutanan menguasai 64,4 juta hektar 5) lahan (luas ini adalah sepertiga luas daratan Indonesia) dengan kontribusi kepada pemerintah pusat sebesar 3,3 milyar dollar AS 6) dengan pokok produksi playwood, kayu gergajian dan rotan. Seolah-olah hanya itulah yang bisa diandalkan dari

kehutanan. Tak terlalu salah untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang justru merugikan karena hutan memiliki banyak fungsi lain yang bisa mendukung bioindustri, selain fungsi ekologik sekaligus dengan intangible benefitnya (lihat tabel 3).

Kelangkaan bahan kayu akhir-akhir ini, yang bahkan memaksa beberapa industri plywood gulung tikar, selayaknya dijadikan pertanda bahwa pengelolaan hutan yang diterapkan di lapangan selama ini tidaklah lestari (*sustainable*). Patokan kelestarian klasik untuk menunjuknya adalah bila hutan mampu memberikan volume kayu yang sama tiap tahunnya. Konsep terbaru lebih luas tuntutannya daripada sekadar volume kayu yang dihasilkan, hutan baru bisa dikatakan lestari apabila potensi hutan, dan fungsinya pada lingkungan, dan sosial budaya tetap langgeng. Setelah 20 tahun pembangunan kehutanan dilaksanakan, dalam upayanya memenuhi konsep kelestariannya-yang klasik sekalipun-hutan kita sudah 'bertekuk lutut'.

Sebetulnya potensi hutan diluar kayu dan rotan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi, selama prasarana iptek dan industrinya telah matang. Amerika Serikat, misalnya merencanakan untuk menjual produk medis senilai 147 milyar dollar AS hanya dari tiga jenis tanaman obat (salah satunya berpotensi menyembuhkan HIV), walaupun untuk itu diperlukan riset sampai 25 tahun ke depan, dan biaya percobaan jutaan dollar AS. Industri medis Indonesia sampai saat ini masih berupa assembler saja, sehingga praktis bahan baku aktif masih diimpor.

Pada pokoknya, Indonesia masih punya banyak potensi dalam upaya memanfaatkan biodiversitas secara lestari dan bijaksana melalui bioindustri yang mengandalkan riset dan teknologi tinggi. Kontribusi bioindustri pada GDP Indonesia menurut perkiraan [7] Setiawan adalah 71,84 milyar dollar AS, hampir separuh total GDP (lihat tabel 2). Produk kehutanan berupa kayu hanyalah sebagian kecilnya saja, padahal hutan sebagai gudang plasma nutfah dan ekstrak alami dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas panen bahan baku bioindustri yang lain.

Kecermatan dan kehati-hatian mutlak diperlukan dalam penerapan teknologi rekayasa genetika untuk perbaikan panen pertanian, peternakan, dan perikanan. Kehati-hatian ini sangat diperlukan untuk mencegah penggunan bibit unggul dalam skala besar menjadi penyeragaman genetik dan berlanjut kepada proses perapuhan populasi, suatu hal yang pernah terjadi pada varietas padi IR-8 di Indonesia.

Pada tahun 1970-1971 varietas ini diserang virus tungro (hama wereng). Pada tahun 1975, setengah juta acre verietas baru musnah oleh hama. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkanlah IR-36 yang seharusnya resisten terhadap bakteri tanaman dan virus tungro. Namun padai tersebut kemudian malah diserang oleh dua virus baru.

HUKUM DI SEPUTAR BIODIVERSITAS

Setidaknya ada dua masalahhukum terlibat dalam lingkup biodiversitas, masalah tata batas dan pengakuan hak cipta intelektual. Masalah hukum yang mendasar dalam upaya perlindungan biodiversitas adalah perihal tata batas. Pekerjaan menata batas di kawasan perlindungan maupun di hutan produksi belum selesai, bahkan di kawasan yang dikelola dengan sistem HPH (Hak Pengusahaan Hutan) tata batas baru dikerjakan 10 persennya saja.

Di banyak kawasan perlindungan, yang tata batasnya belum sempurna, penggerogotan dan pebibrikan lahan oleh penduduk setempat adalah hal yang jamak ditemui, apalagi di daerah berpenduduk padat. Penebangan hutan oleh HPH diluar kawasan yang telah dikukuhkan, bahkan masuk ke dalam areal taman nasional (areal konservasi in-situ biodiversitas) beberapa kali terjadi.

Ganjalan di bidang hukum yang paling menonjol pada kebanyakan negara berkembang ialah tidak adanya pengakuan hak cipta atas kepemilikan sumber daya alam hayati dan pemanfaatan tradisionalnya.

Tabel 3
Perkiraan Kontribusi Bioindustri pada GDP Indonesia tahun 1994.(dalam milyar dollar)

Bidang Industri	Kontribusi	Rincian	Kontribusi	%GDP
Pangan	46,8	Pertanian	39	30
		Perikanan		
		Peternakan		
		Processing	7,8	
Sandang	7,8	Tekstil		5
		Bahan baku serat		
		Bahan baku pewarna		
Papan	11	Kau/playwood	3,1	7
		Rotan	0,2	
		Processing		
Kesehatan	4,68	Obat-obatan	1	3
Energi	1,56	Bahan bakar dari sumber daya hayati (etanol, dll)		1
Total	**71,84**			**46**

Sumber: **Setiawan dalam Satari, 1994.**
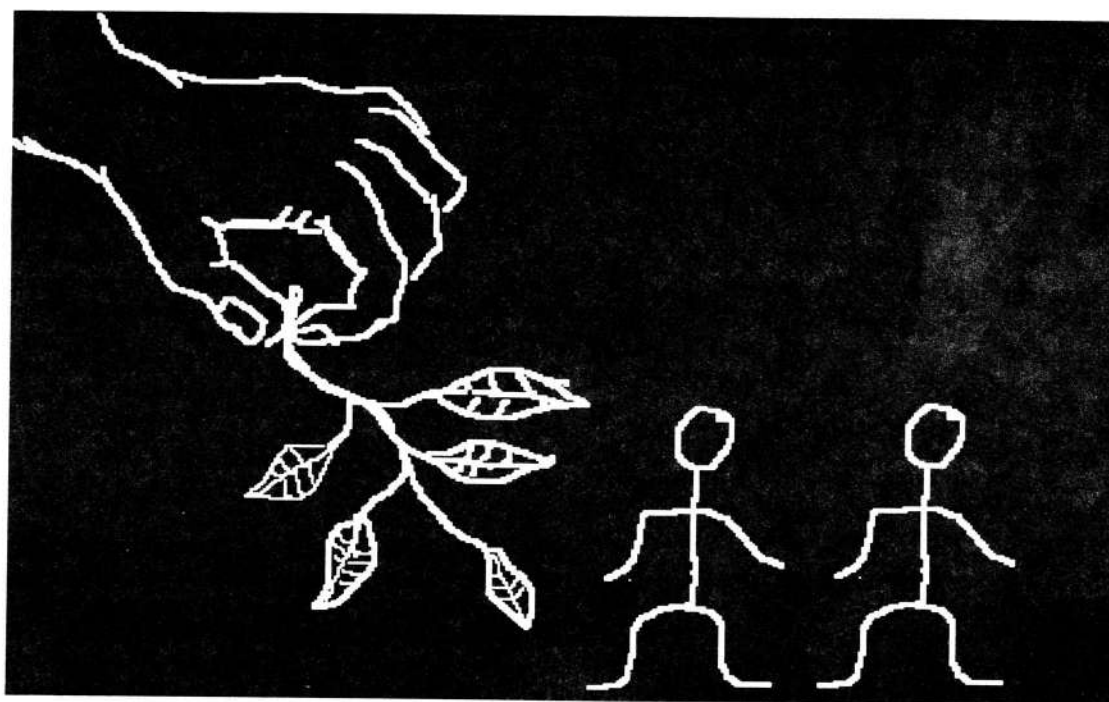
Hak paten mati-matian diperjuangkan negara-negara maju untuk melindungi hasil rekayasa genetiknya dengan alasan bahwa mereka telah mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk ekspedisi, eksplorasi, dan riset.

Negara-negara seperti Amerika Serikat memaksakan hukum hak paten mereka dan hak kepemilikan intelektual pada negara-negara berkembang dan menuduh bahwa negara-negara Dunia Ketiga melakukan 'praktik perdagangan yang tidak jujur' jika mereka tidak mau mengadopsi hukum Amerika Serikat yang membolehkan monopoli hak atas bentuk-bentuk kehidupan hasil rekayasa.

Di satu pihak sumber daya alam dianggap sebagai milik bersama, atau warisan dunia yang bebas dan tidak dimasukka ke dalam sistem hak paten. Dalam hal ini Vandana Shiva menyatakan:'Persoalan proteksi hak paten untuk bentuk-bentuk kehidupan yang telah dimodifikasi menimbulkan sejumlah pertanyaan politis tentang kepemilikan dan kendali atas sumber genetika yang belum terpecahkan. Masalahanya adalah dalam memanipulasi bentuk-bentuk kehidupan, tidak seorangpun mulai dari hal yang sama sekali tidak ada, tetapi dari bentuk kehidupan yang dimiliki oleh orang lain, mungkin melalui hukum adat.'

Persoalan lain menghadang, kerena perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal sumber daya dan lingkungan pemukiman secara kolektif. Pemberian hak ulayat hanya pada tingkat pemenfaatan dan bukannya pengelolaan, apalagi hak milik yang dijamin kepestian hukumnya.

Ketidakjelasan penafsiran pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 menyebabkan banyaknya pertikaian antara pengusaha pemilik lahan dengan penduduk yang seringkali melibatkan aparat pemerintah yang lebih membela kepentingan pemilik modal demi 'mengamankan pembangunan'. Karenanya penyempurnaan perundang-undangan agar menampung kepentingan masyarakat komunal sudah mendesak.

PENUTUP

Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (BIOCOP II) di Jakarta belum membantu negara-negara berkembang pemilik kekayaan biodiversitas seperti Indonesia. Masalah-masalah mendasar seperti pembagian keuntungan, alih teknologi, protokol keamanan (*biosafety*), dan akses terhadap sumber keragaman hayati mulai dibicarakan, walaupun demikian penerapannya masih perlu waktu panjang. Beberapa topik bahkan 'mati angin' dan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Pembicaraan mengenai mekanisme transfer teknologi menemui jalan buntu karena mendapat ganjalan dari negara-negara maju yang mengkhawatirkan hilangnya sebagian keuntungan mereka dari hak cipta intelektual (*intelectual property right*). Negara maju pun enggan meratifikasi Konvensi Keanekaragaman hayati karena konvensi tersebut menharuskan pembagian royalti dengan negara pemilik sumber genetik.

Protokol keamanan hayati-yang membahas upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati terhadap dampak berbagai organisme yang direkayasa secara genetik siap disebarluaskan ke seluruh dunia-masih diambang diantara dua kebutuhan, melestarikan

diambang diantara dua kebutuhan, melestarikan keragaman hayati, atau mencukupi pangan dunia.

Alih iptek dari pengetahuan tradisional ke universitas, pusat penelitian, dan perusahaan komersial di negara maju belum diakui, sehingga klaim atas hak paten dengan tak semena-mena melupakan jasa penemu dan peramu aslinya yang sekaligus memelihara dan melestarikan sumber genetiknya.

Walhasil, selain alternatif mengisolasi akses negara lain ke sumber genetik di seluruh penjuru negeri (yang mustahil dikerjakan), pilihan Indonesia hanya dua. Yang pertama adalah menggairahkan eksplorasi dan penelitian hayati di Indonesia, selain untuk mengubah pemanfaatan sumber daya hayati dari ekstraktif tanpa teknologi tinggi ke pengembangan bioindustri ditunjang dengan penelitian hayati yang serius, hal ini juga dapat mengurangi kerusakan pada habitat alami sumber daya hayati. Pilihan pertama ini akan memberikan keuntungan jangka panjang, tetapi membawa konsekuensi penanaman modal yang besar, tidak terkecuali peningkatan APBN di bidang pendidikan.

Pilihan kedua adalah memaksa negara-negara maju, yang selama ini telah meraup milyaran dollar AS dari sumber genetik kita, untuk meratifikasi Konvensi Keragaman Hayati, tanpa melupakan usaha perbaikan aturan-aturan internasional yang mengikat, termasuk pengakuan hak cipta intelektual atas pengetahuan tradisional dan kearifan alam, tidak hanya di dalam tubuh Konvensi Keragaman Hayati, tetapi juga dalam aturan-aturan GATT/WTO. Indonesia memerlukan pelobi-pelobi jagoan di tingkat internasional untuk mendapatkan bagian keuntungan yang berimbang (*equitable profit sharing*) seperti yang diinginkan.

Kesulitannya adalah bagaimana cara Indonesia menekan negara maju, justru pada saat negeri ini bergantung pada bantuan pembanguna mereka, sebab pada akhirnya permasalahan biodiversitas Indonesia bermuara pada politik dan ekonomi internasional.

Ada setitik 'kabar baik' bagi negara berkembang yang mungkin menjadi embrio penghargaan atas hak paten negara pemilik biodiversitas. Pabrik farmasi Merck, yang pada tahun 1992 menandatangani perjanjian dengan pemerintah Costa Rica, 'menyumbang' sejumlah uang kepada pemerintah Costa Rica, di luar janji untuk berbagi keuntungan. Perjanjian, yang berakhir tahun 1996 itu, memberikan kemungkinan untuk tidak membagi keuntungan bila Merck dapat menemukan tanaman obat yang sama di negara-negara lain.

Untuk mendapatkan tanaman obat, yang kemungkinan menghasilkan produk medis bernilai sekitar 147 milyar dollar AS itu, negara maju seperti Amerika Serikat cukup 'menyumbang' kepada pemerintah Costa Rica 1 juta dollar saja. Tidak sampai 0,001 persennya.***

CATATAN AKHIR

1) Berbicara mengenai spesies saja, para ahli memperkirakan jumlah spesias dibumi dengan rentang yang sangat lebar mulai 2 juta sampai 100 juta spesies, dengan perkiraan terbaik sekitar 10 juta spesies dan yang baru 1,4 juta spesies telah terelakan.

2) 100% pangan dan 40% obat-obatan berasal dari sumber daya alam hayati, belum lagi sejumlah bahan bangunan (kayu) dan produk-produk industri lain (kertas, rotan, lak, getah-getah, minyak atsiri, dll)

3) Wilson dalam Jhamthani memperkirakan kebutuhan 25.000 thaksonom untuk menginvestarisasi seluruh spesies dunia angka 4200 adalah asumsi bahwa Indonesia memerlukan seperenamnya.

4) Indonesia meyisakan 746.860 km2 dari 1.446.530 km2 habitat alaminya, persisnya kehilangan 49%.

5) Terdiri atas 30,5 juta hektar hutan produksi terbatas dan 33,9 juta hektar hutan produksi tetap menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan.

6) Data tahun 1990 (Walhl: 1993)

7) Perkiraan dibuat Benjamin Setiawan berdasarkan perkiraan penghasilan per kepala pada 1994 adalah 800 dollar AS dengan jumlah penduduk 195 juta, maka GDP Indonesaia adalah 156 milyar. Perkiraan dan perician dibuat berdasarkan The World in 1994, 25. St.Jame's Street, London,SWla 1HG.****

DAFTAR PUSTAKA

AnonymuS,1986, **Hutan Tropis Hasilkan Obat Milyaran Dollar,** *Kompas.*,12 Maret 1996.

Jhamtani, Hira (eds),1993, *Perspektif Sosial dan Ekologi Keragaman Hayati,* KONPHALINDO, Jakarta.

Kartawinata, Kuswata dan Anthony J. Whitten (eds), 1991, *Krisis Biologi: Hilangnya Keanekragaman Biologi,* Edisi I. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Satari, Ahmad M. dkk (eds)1994, *Prosiding Lokakarya Nasional Keanekaragaman Hayati Tropik Indonesia,* Lembaga Pengembangan insani dan Biosfer Indonesia. Jakarta.

Tim Redaksi Ekoinfo, 1995, **Seputar COP II: Konvensi Keanekaragaman Hayati Menghasilkan Sejumlah Keputusan dan Mandat**. Majalah *Ekoinfo*. edisi 01 (Desember). Jakarta.

WRI, IUCN, dan UNEP, 1992, *Global Biodiversity Strategy : Guidelines for Action to Save, Study, and Use Earth's Biotic Wealth Sustainably and Equitably.*
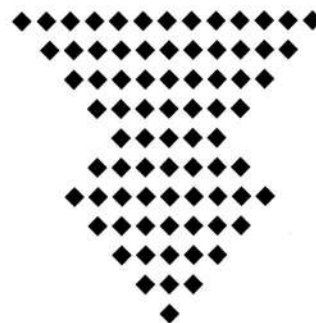
Sektor Informal, Alternatif Peluang Kerja Di Perkotaan

DI BIDANG KETENAGAKERJAAN, MASA DATANG AKAN DIWARNAI OLEH BANYAK SEKTOR INFORMAL. SEKTOR EKONOMI MODERN GAGAL MENYERAP LUAPAN TENAGA KERJA. HAL INI KARENA DALAM SEKTOR MODERN, SELALU ADA UKURAN-UKURAN RASIONALITAS YANG MENYARING SETIAP TENAGA KERJA YANG HENDAK MASUK DI DALAMNYA(*MARGINAL PRODUCTION OF LABOUR*). ARTINYA ADA STANDAR PRODUKTIVITAS MINIMAL BAGI TENAGA KERJA AGAR BISA MEMASUKI SEKTOR MODERN TERSEBUT. KUALITAS PENDIDIKAN ANGKATAN KERJA INDONESIA SANGAT MEMPRIHATINKAN. RENDAHNYA TINGKAT PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN MEMPENGARUHI TINGKAT PENAWARAN ANGKATAN KERJA DI SEKTOR INDUSTRI. SEKTOR MODERN MASIH RELATIF KECIL DAN KEMAMPUANNYA MEMBERIKAN KESEMPATAN KERJA RELATIF SEDIKIT PERTUMBUHANNYA DIBANDING SEKTOR INFORMAL. SEKTOR INFORMAL SELAMA INI IDENTIK DENGAN KEMISKINAN DAN SERBA KETIDAKPASTIAN.

Joko Pitoyo
Mahasiswa Fakultas Geografi UGM Jurusan Geografi Manusia. Pernah aktif di Badan Penerbit Pers Mahasiswa Fak Geografi UGM dan pemimpin umum majalah mahasiswa Media Geografi, Fakultas Geografi

I. Beberapa Pengertian Dasar Tentang Sektor Informal

Istilah sektor informal pertama kali disampaikan oleh Keith Hart, seorang antropolog Inggris berdasarkan penelitiannya tentang kesempatan kerja bagi kelompok miskin perkotaan di Ghana, Accra dan Nima pada tahun 1970-an. Sejak itulah sektor informal merupakan konsep ekonomi dalam menjelaskan aktivitas penduduk miskin di perkotaan. Berdasarkan penelitian tersebut, Hart membagi kesempatan memperoleh penghasilan di kota menjadi tiga kelompok yaitu sektor formal, informal sah dan informal tidak sah. Pembedaan masing-masing kelompok tersebut didasarkan pada kegiatan yang dilakukan individu, jumlah pendapatan dan pengeluaran yang mengalir dalam perekonomian kota. Selain hal tersebut, pembedaan antara formal dan informal dilihat melalui keteraturan kerja, hubungan dengan perusahaan, curahan waktu, serta status hukum kegiatan yang dilakukan (Manning dan Effendi, 1985: 75). Secara lebih rinci, Hart membagi sektor informal sah dan tidak sah sebagai berikut :

A. Kesempatan memperoleh penghasilan yang informal: sah

1. Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder seperti pertanian, perkebunan yang berorientasi pasar, kontraktor bangunan dan kegiatan yang berhubungan dengannya, pengrajin usaha sendiri, pembuat sepatu, penjahit, pengusaha bir dan alkohol.

2. Usaha tertier dengan modal yang relatif besar seperti perumahan, trasportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum, spekulasi batrang-barang dagangan dan kegiatan sewa menyewa.
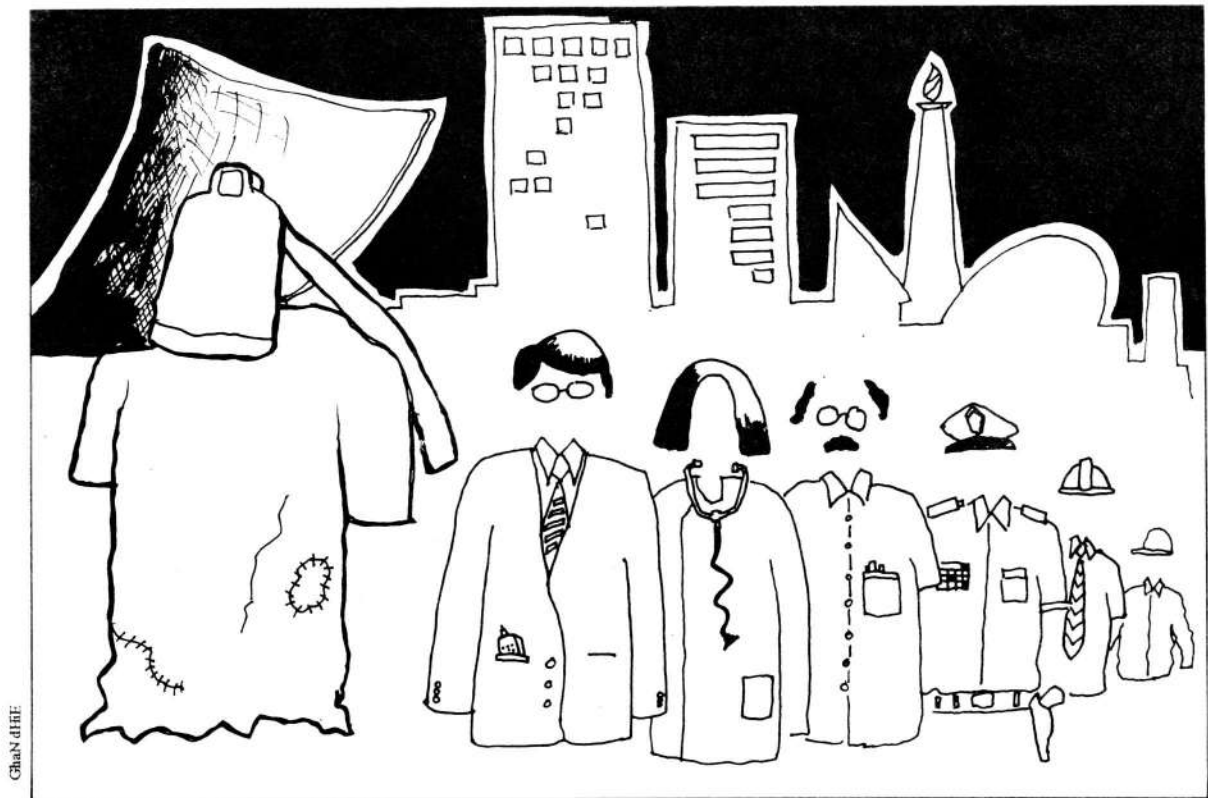
3. Distribusi kecil-kecilan seperti pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, pengusaha makanan jadi, pelayan bar, pengangkut barang, agen atas komisi dan penyalur.

4. Jasa lainnya seperti pemusik (ngamen), pengusaha binatu, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah, juru potret, pekerja reparasi kendaraan maupun reparasi lainnya, makelar dan perantara di pasar, pengadilan dan sebagainya.

5. Transaksi pribadi seperti arus uang dan barang pemberian maupun semacamnya, pinjam-meminjam dan pengemis.

B. Kesempatan memperoleh penghasilan yang informal: tidak sah

1. Berbagai kegiatan jasa dan perdagangan gelap pada umumnya seperti penadah barang-barang curian, lintah darat (tukang kredit) dan pegadaian (dengan tingkat bunga yang tidak sah), perdagangan obat bius, mucikari, pelacuran, penyelundupan, suap-menyuap, pelbagai macam korupsi politik, perlindungan kejahatan dan sebagainya.

2. Berbagai kejahatan dalam transaksi seperti pencurian, pencopetan, perampokan, pemalsuan uang dan penipuan serta perjudian.

Berdasarkan dua batasan tersebut ternyata bila dikaji lebih jauh dan dikaitkan dengan berbagai kesempatan memperoleh penghasilan di Indonesia sekarang, ada beberapa hal yang tidak relevan misalnya dalam hal prostitusi, suap-menyuap, korupsi politik, lintah darat, serta perjudian yang menjadi legal atau dilegalkan. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya agak sulit menentukan garis pemisah antara sektor informal yang sah dan tidak sah. Disamping itu, pemisahan antara sektor informal sah dan tidak sah tersebut hanya didasarkan pada hasil penelitian di lapangan dengan kasus di Ghana sehingga hasilnya belum tentu relevan bila di terapkan di daerah lain. Hal ini dikuatkan oleh Hugo berdasarkan penelitiannya pada tahun 1973 di 14 desa di Jawa Barat bahwa pembedaan antara kegiatan sah atau tidak sah lebih membingungkan daripada menjelaskan.

Pada perkembangan selanjutnya, banyak kritik dan sanggahan tentang konsep sektor informal dan formal. Hal ini dikarenakan konsep sektor informal lebih didasarkan pada penemuan-penemuan empiris di lapangan. Artinya penelitian dari daerah yang berbeda akan memberikan batasan yang berbeda tentang konsep sektor informal. Misalnya saja Hidayat (1978) yang memberikan batasan sektor informal berdasarkan kriteria modal yang diperoleh sulit, teknologi padat karya, organisasi bersifat keluarga, sumber kredit tidak resmi, tidak ada serikat buruh dan bantuan pemerintah, berdiri sendiri/tidak tergantung kepada pemerintah, barang berskala kecil, dan tidak ada hubungan kerja dengan majikan. Berdasarkan kriteria ini, jelas banyak hal yang tidak relevan bila digunakan untuk menjelaskan sektor informal di jaman sekarang sehingga justru pencirian tersebut terkesan membingungkan daripada menjelaskan karena terlalu bertumpu kepada konsep empiris (Breman, 1980). Breman juga menegaskan bahwa pembagian informal dan formal itu tidak sesuai dengan realita sosial masyarakat miskin karena tidak

menunjukkan status sosial. Berdasarkan studinya di India bahwa yang menentukan status sosial adalah kasta dan bukan formal dan informal. Selanjutnya Breman menguatkan pendapat Mazumdar (1976) bahwa pembagian pasar tenaga kerja yang bersifat dualistis tidaklah sesuai dengan realita sosial karena secara empiris tidak jarang pekerja di sektor tersier dan pekerja usaha sendiri memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari pekerja di sektor formal. Atas pendapat Mazumdar tersebut Breman mengungkapkan gagasan baru, bahwa pasar tenaga kerja yang terkotak-kotak (*fragmented*) dianggap lebih tepat dalam menggambarkan pasar tenaga kerja di dunia ketiga.

Berdasarkan berbagai konsep tentang sektor informal dapatlah ditarik benang merah bahwa sesungguhnya konsep sektor informal lebih ditentukan oleh batasan operasional dalam penelitian. Hal ini berarti bahwa penelitian dan pembahasan tentang sektor informal lebih ditentukan oleh batasan operasional yang digunakan sehingga pembahasan dan penelitian tersebut akan tetap relevan dan reperesentatif.

II. Latar Belakang Historis Sektor Informal

Pengkajian tentang sektor informal haruslah dikaitkan dengan sejarah terjadinya sektor informal tersebut. Hal ini akan memperjelas akar permasalahan dari keberadaan sektor informal sehingga dalam aspek kebijakan lebih diuntungkan. Disamping itu, pengetahuan tentang latar belakang sektor informal tidak saja menyangkut pola dan proses dari sektor informal tetapi lebih terhadap trend atau kecenderungan di masa datang. Dalam hal ini jelas pihak perencana akan lebih diuntungkan.

Konsep sektor informal muncul pada tahun 1970-an oleh Keith Hart sebagai akibat perdebatan dalam menjelaskan kemiskinan di kota di negara dunia ketiga. Sebelum adanya konsep ini, kemiskinan di kota dijelaskan dengan teori kebudayaan kemiskinan (*culture of poverty*) dari Oscar Lewis (1968). Berangkat dari ketidakmampuan teori Lewis dalam memberikan kebijakan yang tepat terhadap penduduk miskin perkotaan, maka Hart mengungkapkan teorinya tentang sektor informal.

Dalam pembahasan selanjutnya, perlu diungkap beberapa teori yang menjelaskan sektor informal secara mondial. Hal ini berkaitan dengan kebijakan secara makro dalam era globalisasi, diharapkan dapat digunakan untuk melihat keberadaan sektor informal di Indonesia dalam percaturan Internasional. Secara umum ada tiga teori yang menjelaskan keberadaan sektor informal, yaitu :

1. Dependency Theory (Teori Ketergantungan)

Dependency Theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa sektor informal itu merupakan bagian dari akumulasi modal negara-negara maju. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan ekonomi dunia sehingga terpecah dalam negara maju dan negara berkembang. Dijelaskan bahwa ekonomi negara berkembang tidak dapat berkembang akibat tekanan dari negara maju sehingga pada akhirnya sektor informal akan tetap ada dan negara miskin tidak akan menjadi sektor formal. Lebih tragis lagi bahwa dalam kancah liberalisasi dan globalisasi, pasar dalam negeri di negara-negara dunia ketiga akan diintegrasi oleh pasar luar negeri dan dibanjiri produk dari negara-negara maju. Berkenaan dengan hal tersebut maka Indonesia sebagai salah satu negara berkembang hendaknya mempersiapkan sumber daya manusianya sekaligus sumber daya sosial lainnya sebelum memasuki pasar bebas. Dalam hal ini keahlian (***skills***) dan ketrampilan manusia merupakan determinan pokok yang mutlak harus ada bila Indonesia tidak ingin dijadikan subordinat oleh bangsa lain.

2. Dualisme Theory/The Benigh Relationship Approach

Dualisme theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa sektor informal ada karena pengaruh kapitalisme. Artinya dengan pembangunan yang bersifat kapitalis maka banyak angkatan kerja yang tidak dapat tercakup dalam sektor formal. Maka dalam tahap selanjutnya mereka akan bekerja sendiri dalam rangka mempertahankan hidup (*struggle to live*) dan mencari kehidupan yang lebih baik. Menurut teori ini, setidaknya ada tiga pemikiran tentang keberadaan sektor informal, yaitu :

1. *Duality Approaach*

Pendekatan ini memandang sektor informal berdiri sendiri yang diciptakan oleh penduduk miskin perkotaan sehingga tidak ada kaitannya dengan sektor lainnya.

2. *Complementary Approach*

Pendekatan ini memandang sektor informal merupakan bagian dari sektor formal. Artinya sektor informal akan menunjang keberadaan sektor formal.

3. *Antisipated Trends Approach*

Pendekatan ini memandang sektor informal akan menjadi sektor formal sejalan dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Hal ini berarti dengan semakin majunya negara berarti sektor informal semakin kecil (Mazumdar, 1974).

Berdasarkan beberapa pendekatan tersebut, hendaknya Indonesia dapat memperhitungkan bagaimana sesungguhnya akar masalah sektor infomal yang ada, apakah senada dengan pendekatan pertama, kedua atau yang ketiga, atau mungkin malah merupakan komposit dari ketiganya. Hal inilah yang penting untuk diantisipasi, seiring dengan era globalisasi agar kebijakan yang tepat dapat dicanangkan.

3. Cultural Theory (Teori Kebudayaan)

Cultural theory merupakan pendekatan ketiga tentang terjadinya sektor informal yang intinya bahwa sektor informal timbul sebagai akibat mekanisme Ekonomi Bazar (*Bazaar Economy*). Dalam mekanisme ekonomi ini pelaku- pelaku ekonomi

didasari oleh ikatan-ikatan sosial yang intinya non-profit. Berdasarkan teori ini maka sektor informal di negara sedang berkembang tidak akan pernah hilang, karena telah merupakan way of live. Hal inilah yang menggejala di Indonesia dengan mekanisme boro (pengembara) dari satu tempat ke tempat lain melalui migrasi sirkuler (Geertz, 1977).

Berdasarkan fenomena tersebut maka Indonesia sebelum memasuki pasar bebas haruslah memperbaiki sumber daya moral (*moral resources*) yang bertumpu pada akar berpikir rasional dan logis melalui mekanisme pendidikan yang terarah. Dengan demikian Indonesia dapat mengikir budaya-budaya primordial dalam masyarakat tradisional yang akan menghambat lajunya pembangunan.

III. Kebijakan Terhadap Sektor Informal

Setelah membahas beberapa latar belakang historis, teori dan beberapa pendekatan terhadap sektor informal, hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah bagaimana menurunkannya dalam dataran implementasi melalui kebijakan yang tepat dan relevan. Namun demikian, mengingat kompleksnya permasalahan sektor informal di Indonesia dewasa ini, maka kebijakan yang diajukan bersifat alternatif. Untuk lebih jelasnya di sini akan diungkap terlebih dahulu beberapa kesulitan dalam penyusunan kebijakan terhadap sektor informal, yaitu :

1. Sifatnya *heterogen*, artinya sektor informal yang ada di Indonesia tidaklah sama baik jenis pekerjaan maupun karakteristiknya sehingga timbul masalah dalam memberikan antisipasi dan penangananannya. Masalahnya adalah mana seharusnya yang lebih didahulukan, berakar dari kompleksnya masalah.

2. Tingginya Migrasi *Sirkuler* di Indonesia Hal ini merupakan fenomena yang telah biasa di Indonesia, artinya mereka masuk ke sektor informal hanya bersifat sementara, misalnya ketika di daerah asal sedang berada pada waktu senggang, tidak ada pekerjaan di sawah. Maka di kota mereka berperang sebagai pengembara/penduduk yang mengambang (*floating poppulation*). Hal inilah yang dalam tahap berikutnya sangat mengganggu dalam penentuan kebijakan.

3. Hubungan Dengan Sektor Formal

Keberadaan sektor informal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sektor formal, karena seperti apa yang telah diungkap di awal tulisan ini, bahwa pemisahan antara sektor formal dengan informal secara tegas adalah tidak mudah. Apalagi dalam era modern ini, banyak sekali sektor informal yang telah menggunakan teknologi modern dan manajemen yang rapi, ini jelas lebih menyulitkan terhadap pembedaan dengan sektor formal. Adalah hal yang logis bila penentuan kebijakan yang tepat menjadi terhambat.

Menelaah dari beberapa hambatan tersebut, maka ada beberapa hal yang dianggap dapat digunakan sebagai kebijakan dalam kaitannya dengan keberadaan sektor informal di Indonesia.

1. Kebijakan Tidak Langsung (Kebijakan Bersifat Makro)

- Kebijakan yang pertama berkaitan dengan supplay tenaga kerja. Maka hal yang harus dilakukan adalah mengontrol pertumbuhan angkatan kerja melalui kontrol terhadap pertumbuhan penduduk dan migrasi desa-kota supaya angkatan kerja tidak terkonsentrasi di perkotaan.
- Berkaitan dengan supplay tenaga kerja, maka hal yang harus dilakukan adalah penciptaan kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah asal dan kota-kota kecil misalnya melalui pembangunan yang pesat dalam bidang manufaktur dan industri sedang.

2. Kebijakan Langsung (Kebijakan Mikro)

- Sistem bapak angkat dalam hal kerajinan dan industri rumah tangga.
- Adanya penataan ruang dalam hal lokasi aktivitas pedagang kaki lima sesuai dengan tata ruang kota. Hal ini berarti tidak membenarkan adanya penggusuran lokasi pedagang kaki lima agar supaya tidak muncul lagi di tempat lain.
- Adanya berbagai aktivitas penyuluhan, pembinaan dalam hal peningkatan ketrampilan yang didukung oleh bantuan kredit dan teknologi.
- Pengembangan terhadap suatu jenis sektor informal haruslah disesuaikan dengan kaarakteristik masing- masing sektor tersebut.

Demikianlah beberapa kebijakan dalam kaitannya dengan sektor informal. Diharapkan Indonesia dapat memperbaiki diri, membaca pengalaman dan berlandaskan teori yang pernah ada sehingga kebijakan dalam kaitannya dengan sektor informal tersebut dapat diterapkan. Dengan demikian dari segi ketenagakerjaan Indonesia telah siap untuk berkompetisi dan terjun dalam pasar bebas dunia. Akhirnya dapat diungkapkan bahwa dengan pengembangan, penataan dan managemen yang tepat terhadap sektor informal Indonesia akan mampu eksis dalam percaturan aktivitas ekonomi dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Breman, Jan., 1980, **The Informal Sector in Research, Theory and Practice**, *Comparative Asian Studies Program Publication No III*, Erasmus University, Rotterdam

Geertz, Clifford, 1977, *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi di Dua Kota di Indonesia,* PT. Gramedia, Jakarta

Hart, Keith. 1973, **Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana** dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Efendi, 1988, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota,* PT. Gramedia, Jakarta

Hidayat, 1978, *Pengemabangan Sektor Informal Dalam Pembangunan Nasional: Masalah dan Prospek,* PPSDM, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran, Bandung

Hugo, Graeme J., 1978, *Poppulation Mobility in West Java,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta ***

◆◆◆◆◆◆